



BUNGA RAMPAI

SEJARAH SUMATERA BARAT

Sumatera Barat Dari Zaman Jepang
Hingga Era Reformasi

Karya: M. Sa



Ajisman

Zusneli Zubir

Jumhari

Efrianto, A

BPSNT Padang
Press



BUNGA RAMPAI

SEJARAH SUMATERA BARAT

**"SUMATERA BARAT DARI ZAMAN JEPANG
HINGGA ERA REFORMASI"**

BUNGA RAMPAI

SEJARAH SUMATERA BARAT

**“SUMATERA BARAT DARI ZAMAN JEPANG
HINGGA ERA REFORMASI”**

AJISMAN
ZUSNELI ZUBIR
JUMHARI
EFRIANTO A.

BPSNT PADANG PRESS

AJISMAN, ZUSNELI ZUBIR, JUMHARI, EFRIANTO A.

**“SUMATERA BARAT DARI ZAMAN JEPANG HINGGA
ERA REFORMASI”**

©2012 BPNST Padang Press

Cetakan Pertama: Oktober 2012

Hak Penerbitan pada BPSNT PadangPress

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbayak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit (UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)

Editor

DR. MHD. NUR, MS

Desain cover

ZUSNELI ZUBIR

Lay-out

CV. FAURA ABADI

Percetakan

CV. FAURA ABADI

ISBN 978-602-8742-54-2

Penerbit:

BPSNT Padang Press

Jl. Raya Belimbing No. 16 A Kuranji Padang

Sumatra Barat

Telp/ faks: 0751-496181 www.bpsnt-padang.info

SAMBUTAN
SETDITJEN NILAI BUDAYA SENI DAN FILM
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Diiringi puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyambut gembira atas terbitnya hasil kajian yang dilakukan oleh para peneliti Kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang. Karya ini sebagai bentuk tanggungjawab ilmiah mereka dapat mempublikasikan hasil kajiannya kepada masyarakat.

Karya yang berupa Bunga Rampai hasil penelitian para peneliti Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang ini berupaya menjelaskan tentang berbagai hal tentang sejarah masyarakat yang ada di daerah Sumatera Barat. Dalam perspektif sejarah daerah Sumatra Barat memiliki sejarah yang panjang, dan ini telah menghiiasi perjalanan panjang dari kehidupan masyarakat yang hidup di bumi Andalas ini. Kemudian dalam perspektif budaya, hampir sama dengan daerah lainnya di Indonesia, masyarakatnya juga bersifat heterogen dan memiliki kompleksitas budaya yang unik dan menarik untuk dikaji dan dipublikasikan kepada masyarakat luas.

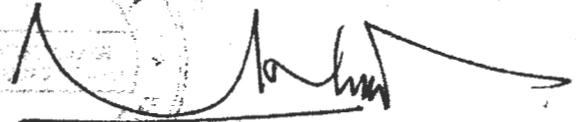
Dalam rangka itulah, para peneliti dari Kantor Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang mempublikasikan beberapa buah hasil kajian dalam bentuk Bunga Rampai. Bunga Rampai tersebut dalam bingkai : *Sumatera Barat dari Zaman Jepang Hingga Era Reformasi*. Bingkai tersebut dengan beberapa hasil kajian yakni : (1) Dinamika Perkembangan INS Kayutanam 1926-1998 oleh Ajisman, (2) Sejarah Romusha di Nagari di Nagari Durian Gadang Kabupaten Sijunjung pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945 oleh Zusneli Zubir, (3) Sejarah Konflik Tanah Ulayat di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat 1981-2005 oleh Jumhari, dan (4) Dinamika Orang Jawa di Sitiung 1974-2009 oleh Efrianto.

Karya tersebut meretas kearah pengetahuan tentang berbagai persoalan, mulai dari persoalan sejarah dinamika perkembangan INS Kayu Tanam, Sejarah Romusha di Nagari Durian Gadang Kabupaten Sijunjung, konflik tanah ulayat di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman, dan sampai kepada persoalan hubungan ranah dan rantau dengan melihat studi kasus Kongres Kebudayaan Minangkabau (KKM) yang dilaksanakan pada tahun 2010 di Padang, Sumatera Barat.

Akhirnya, mudah-mudahan hasil kajian dalam bentuk Bunga Rampai ini dapat menambah khasanah pengetahuan kita terhadap sejarah masyarakat yang ada di Sumatera Barat.

Jakarta, Juli 2012

Setdirjen, NBSF
Kemenbudpar



Drs. Mumus Muslim, MM.

NIP. 19630502 198403 1 001

PENGANTAR REDAKSI

Bunga rampai dengan tema *Sumatera Barat dari Zaman Jepang hingga Era Reformasi* memuat karya, pertama karya Ajisman dengan judul *Dinamika Perkembangan INS Kayutanam 1926-1998*. Ajisman menjelaskan bahwa ruang Pendidik INS Kayutanam didirikan oleh Muhammad Syafei pada tanggal 31 Oktober 1926, dan pada awal berdirinya mendapat dukungan dari organisasi Pegawai Kereta Api. Prinsip Ruang Pendidik INS adalah berdiri sendiri tanpa mau menerima bantuan yang mengikat dan semua alat-alat serta ruang sekolah dibuat sendiri oleh murid-murid "cari sendiri dan kerja sendiri.

Proses belajar mengajar yang diterapkan di Ruang Pendidik INS adalah merupakan gabungan antara teori dan praktek secara seimbang. Sistem pendidikan yang dikembangkan bertujuan: 1) mendidik rakyat kepada kemerdekaan (dalam makna luas), baik berfikir, berbuat, berkeaktifitas dan terutama kemerdekaan dari penjajah Belanda. 2) memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3) menanamkan kepercayaan pada diri sendiri dan berani bertanggungjawab. 4) mandiri dan tidak mau menerima bantuan yang mengikat. Ruang Pendidik INS Kayutanam mulai dibuka pertama kali dengan murid 75 orang, dan murid tersebut adalah anak-anak dari pegawai buruh kereta api. Ketika dibuka murid yang 75 orang dibagi atas 2 kelas: 1A dan 1B, dengan sistem belajar berganti hari. Kalau 1A masuk hari Senin, hari Selasa ia tinggal di rumah, di hari itu 1B yang belajar, gurunya hanya Muhammad Syafei seorang. Murid-murid datang dari berbagai tempat, seperti Padang, Pariaman, Padang Panjang dan Bukittinggi dengan naik kereta api ke INS. Pada awal pembukaan murid-murid hanya duduk di tikar, tidak ada bangku atau meja belajar. Pada awal berdirinya untuk tempat belajar Muhammad Syafei menyewa sebuah rumah penduduk. Setahun kemudian di dalam kebun kopi didirikan Los dari bambu beratap rumbia, bangkunya dari papan berkaki bambu yang ditanamkan ke tanah, tetapi sudah ada meja dan bangku sehingga kaki murid tidak perlu bersila, hanya berjantai ke tanah. Tiap-tiap satu mata pelajaran murid-murid disuruh bersenam, melepaskan lelah.

Kedua, karya Zusneli Zubir dengan judul : *Sejarah Romusha di Nagari Durian Gadang Kabupaten Sijunjung Pada Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942 - 1945*. Karya tersebut menjelaskan bahwa pendudukan Jepang di Indonesia selama 3,5 tahun, dikenal sebagai periode penjajahan yang luar biasa kejam, apabila dibandingkan dengan penjajahan Belanda yang berlangsung lebih lama.

Membandingkan dua penjajahan ini memang tidak ada salahnya, karena sampai saat sekarang kita masih mendengar cerita dari orang tua yang hidup pada zaman itu. Mereka selalu bercerita tentang kekejaman Jepang terhadap rakyat. Kekejaman yang dilakukan Jepang itu sehubungan dengan kepentingannya untuk memenuhi kebutuhannya terhadap sumberdaya alam dan manusia, dalam rangka mendukung kepentingan perang Asia-Pasifik antara Jepang dengan sekutu. Salah satu bentuknya melalui kerjapaksa (rodi) atau lebih dikenal dengan “romusha”. Sampai saat ini kalau ditanya pada orang-orang tua yang hidup di zaman Jepang, pengalaman apa yang paling mengerikan selama pendudukan Jepang, selalu dijawab hidup sebagai “romusha”.

Ketiga, karya Jumhari dengan judul : *Sejarah Konflik Tanah Ulayat di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat 1981–2005*. Jumhari menjelaskan bahwa dalam konteks persoalan konflik tanah di Sumatera Barat, sengketa tanah ulayat menjadi salah satu persoalan utama konflik agraria yang sering terjadi di daerah ini. Bahkan beberapa kasus menyangkut perselisihan kepemilikan dan penggunaan tanah, berjalan parallel dengan rezim yang berkuasa. Sebagai contoh pada masa kolonial. Kebijakan pemerintah mengeluarkan UU Agraria, yakni *Domain Declaration* Sumatera pada tahun 1874, merupakan bentuk strategi penguasa untuk melakukan klaim kepemilikan tanah ulayat milik anggota masyarakat nagari sebagai *property right* yang syah dari komunitas adat mereka. Penyebutan istilah ‘lahan tidur’ yang terdapat dari salah satu pasal dari *Domain Declaration*, yakni bahwa semua tanah yang terbukti tidak diolah dengan hak milik (*eigendom*) dianggap milik Negara. Perspektif dari dasar persepsi hukum kolonial ini, sering menimbulkan perselisihan sebab hal ini bertolak belakang dengan kenyataan sosial, bahwa prinsip kepemilikan tanah ulayat dalam terminologi hukum adat di Minagkabau adalah milik nagari. (Renske Biezeveld), op.cit : 142)

Keempat, karya Efrianto dengan judul : *Dinamika Orang Jawa di Nagari Sitiung 1974 – 2009*. Efrianto menjelaskan bahwa sebelum tahun 1977 Nagari Sitiung merupakan sebuah nagari yang dihuni oleh masyarakat asli. luas lahan dan jumlah penduduk yang tidak sebanding menyebabkan banyaknya lahan yang belum tergarap. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung menjadikan daerah ini sebagai kawasan penempatan para transmigran. Di sisi lain pemerintah orde baru telah menetapkan program transmigrasi sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, Bali dan Lombok. Kebijakan ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) kebijakan ini dilakukan untuk menyukseskan program swasebada beras pada Repelita ke 4. Untuk

mensukseskan swasembada beras, pemerintah berusaha untuk membuka areal-areal persawahan baru dan memperbanyak saluran irigasi untuk mendukung rencana tersebut. Pada saat bersama masyarakat di Wonogiri sering menderita akibat banjir banding, kondisi ini selalu dihadapi oleh masyarakat ketika air Sungai Begawan Solo meluap.

Karya tersebut meretas kearah pengetahuan kita terhadap berbagai persoalan, mulai dari persoalan sejarah dinamika perkembangan INS Kayu Tanam, sejarah Romusha di Nagari Durian Gadang Kabupaten Sijunjung, konflik tanah ulayat di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman, dan sampai kepada persoalan dinamika Orang Jawa di Nagari Sitiung

Akhirnya, mudah-mudahan hasil kajian dalam bentuk bunga rampai ini dapat menambah khasanah pengetahuan kita terhadap sejarah masyarakat yang ada di Sumatera Barat.

Redaksi

DAFTAR ISI

SAMBUTAN SETDITJEN NILAI BUDAYA SENI DAN FILM KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.....	i
PENGANTAR REDAKSI.....	iii
DAFTAR ISI	vii
1. Dinamika Perkembangan INS Kayutanam 1926-1998 Oleh : Ajisman.....	1
2. Tenaga Romusha di Nagari Durian Gadang Kabupaten Sijunjung pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945 Oleh : Zusneli Zubir.....	67
3. Sejarah Konflik Tanah Ulayat di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat 1981-2005 Oleh : Jumhari.....	138
4. Dinamika Orang Jawa di Nagari Sitiung 1974 – 2009 Oleh : Efrianto	198

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap orang yang memiliki kepedulian terhadap nasib bangsa pada masa penjajahan, mau tidak mau akan terlibat dalam gerakan politik, baik dalam pemikiran ideologis, maupun dalam gerakan atau aksi. Salah seorang tokoh Sumatera Barat yang memiliki kepedulian terhadap nasib bangsa pada masa penjajahan adalah Muhammad Syafei. Minatnya kepada politik bermula dari membaca tulisan-tulisan tokoh terkenal antara lain Tjipto Mangunkusumo, Soewardi Surjaningrat yang dimuat dalam majalah *Hindia Putra*, yang dikirim secara rutin oleh bapak angkatnya yang bernama Marah Sutan waktu Muhammad Syafei masih di belajar di Sekolah Raja tahun 1905 di Bukittinggi.³

Setelah Muhammad Syafei tamat sekolah Raja di Bukittinggi ia menetap di Jakarta, kemudian aktif diberbagai organisasi, antara lain menjadi anggota aktif Partai Insulinde.⁴ Bersama Marah Sutan, ia menjadi pengurus partai cabang Insulinde Jakarta dengan fungsi sebagai kordinator seluruh cabang di luar pulau Jawa.⁵ Pada Kongres Partai Insulinde tahun 1917 di Semarang Muhammad Syafei mengajukan usul kepada anggota Kongres agar membuat resolusi untuk menghapus sistem kontrak terhadap kuli perkebunan Belanda, yang tidak berbeda dari bentuk perbudakan gaya baru yang mengadung semacam hukum bagi yang melakukan mogok atau lari dari pekerjaan.

Muhammad Syafei juga aktif dan menjadi anggota Budi Utomo memegang jabatan pengurus Cabang Jakarta. Pada saat itu, tulisanya banyak dimuat dalam majalah organisasi, salah satu ia menulis dalam bahasa Belanda. Tulisan itu ditujukan kepada pemuda Indonesia yang

¹ Artikel ini merupakan gagasan ulang dari Laporan Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2010.

² Peneliti Madya Pada BPNB Padang

³ A.A. Navis, *Filsafat dan Strategi Pendidikan M.Syafei Ruang Pendidikan INS Kayutanam*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1996. hlm. 25

⁴ Partai Insulinde adalah jelmaan dari Indische Partij yang didirikan oleh tiga orang tokoh Tjipto Mangunkusumo, Sewardi Surjaningrat, dan Douwes Dekker. Pada awal berdirinya Indische Partij sangat populer karena semboyan perjuangannya secara terang-terangan untuk mencapai kemerdekaan bangsa bebas dari penjajahan Belanda. Anggotanya terdiri dari berbagai keturunan bangsa, seperti Indo Belanda, Peranakan Cina, dan pribumi sendiri. Setelah ketiga tokoh pendirinya dibuang oleh pemerintah, partai itu menjelma dengan nama baru Partai Insulinde (*Ibid*, hlm 139)

⁵ M.Syafei, *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta: CSIS1982. hlm. 139

mempunyai sifat kebelandaan untuk memberi peringatan agar jangan percaya bahwa Belanda mencintai bangsa Indonesia lebih dari mencintai bangsanya sendiri.⁶

Kecintaan Muhammad Syafei terhadap ilmu pengetahuan, maka kedua orang tuanya memutuskan untuk mengirimnya ke negeri Belanda dalam proses melanjutkan sekolah. Ketika Muhammad Syafei belajar di Belanda ia ditunjuk sebagai anggota pengurus Perhimpunan Indonesia, pada saat itu ia banyak mendapat kesempatan berdiskusi dengan tokoh terkenal seperti Hatta, Monutu, Sukiman, dan Subardjo, yang menjadi politisi terkemuka sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Menurut pandangan Muhammad Syafei, arti dan fungsi pendidikan bagi bangsa yang ingin merdeka tidak kalah pentingnya dari gerakan politik. Dalam suatu diskusi dengan beberapa temannya di Belanda, Muhammad Syafei mengajukan resolusi yang rumusnya ialah "Untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya bagi pergerakan nasional menghadapi penjajahan Belanda, pendidikan nasional harus diperluas dan diperdalam".⁷

Setelah Muhammad Syafei kembali dari Belanda tahun 1925 ia mengambil keputusan bahwa tidak lagi akan berjuang melawan penjajahan Belanda dengan melalui organisasi politik, ia akan bergerak di bidang pendidikan terutama bercita-cita untuk mendirikan lembaga pendidikan. Menurut Muhammad Syafei kegiatan dalam gerakan politik semula bertujuan untuk mencapai kemerdekaan telah beralih kepada perebutan kepemimpinan dalam partai, sehingga telah terjadi banyak sangketa yang menimbulkan perpecahan antara sesama pemimpin politik serta pengikutnya, disamping itu pemerintah pada saat itu anti terhadap setiap gerakan politik.

Pada tanggal 30 Oktober 1926 Muhammad Syafei mendirikan lembaga pendidikan. Ketika pertama kali didirikan sekolah ini bernama *Indonesische Nederlandsche School*, dengan kependekan INS. Selama perjalanan sejarahnya, kependekan INS tetap dipergunakan. Pada masa Jepang kependekan itu berarti *Indonesia Nippon Sekolah*, pada periode perang kemerdekaan *Indonesia Nationale School* dan dewasa ini menjadi *Institut Nasional Syafei* (INS) di Kayu Tanam, Sumatra Barat.

INS Kayu Tanam didirikan dengan tujuan mendidik rakyat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mendidik pemuda-pemuda supaya berguna bagi masyarakat, memiliki percaya diri, berani dan bertanggungjawab. Sedangkan prinsip pendidikan di INS adalah belajar,

⁶ *Ibid*, hlm. 141

⁷ H. Nazar Sidin. "Apa Siapa". Padang: Pustaka Artaz, Edisi Sumatera Barat Bahagian I, 2004. hlm. 154.

berkerja dan berbuat. INS juga tidak mau menerima bantuan yang mengikat, termasuk subsidi yang ditawarkan pemerintah Hindia Belanda. Semboyan INS adalah “cari sendiri dan kerjakan sendiri”.⁸

Sesuai dengan cita-cita pendirian INS yaitu untuk mewujudkan Indonesia merdeka dan melepaskan diri dari belenggu penjajah. Oleh karena itu sistem pendidikan yang ada di INS menganut sistem aktif kreatif. Maksudnya adalah lembaga pendidikan ini mempunyai sistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk dan menciptakan sistem siswa aktif terutama dalam belajar mengajar. Kreatif yaitu bahwa para siswa tidak hanya terpaku pada pelajaran yang diberikan oleh gurunya saja tetapi para siswa juga dituntut untuk dapat menganalisis sendiri pelajaran-pelajaran yang belum diterangkan oleh guru, kalau guru tidak hadir maka siswa-siswi mampu menganalisa sendiri pelajaran-pelajaran yang belum diterangkan tersebut, sehingga mereka tidak hanya membuang waktu tanpa ada manfaatnya.

Selain dari hal di atas untuk membentuk siswa aktif dan kreatif maka di INS juga diberikan pelajaran keterampilan, seperti keterampilan pertukangan kayu, pertukangan besi, ilmu bercocok tanam, bertenun dan olah raga. Dari beberapa hal yang tercakup dalam lembaga pendidikan INS merupakan sekolah umum yang digabung dengan sekolah kejuruan. Tujuan dari sistem ini adalah agar para alumni INS tidak hanya mengharapkan bekerja pada kantor pemerintah sebagai kaki tangan penjajah, tetapi alumni INS diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri.⁹ Proses belajarnya sebagaimana yang dikemukakan diatas merupakan gabungan antara teori dan praktek secara seimbang. Sistem pendidikan yang dikembangkan bertujuan antara lain:

1) Mendidik rakyat ke arah kemerdekaan (dalam makna luas), baik kemerdekaan dalam berfikir, berbuat, beraktivitas, dan terutama kemerdekaan dari penjajahan Belanda. 2) Memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3) Menanamkan kepercayaan pada diri sendiri dan berani bertanggungjawab. 4) Mandiri dan tidak dengan bantuan yang mengikat.¹⁰

2) Selain pendidikan yang disebutkan di atas di INS ada juga pendidikan kesenian yang mempelajari teater, drama, tari, menyanyi dan lain-lain. Pelajaran kesenian ini sangat membantu perjuangan RI dalam

⁸ Gusti Asnan. *Kamus Sejarah Minangkabau*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), 2003. hlm. 100

⁹ Abdul Hamid, *Menyelesai Bengkalai Cita-cita Alm. Engku M. Syafei*. Padang: Badan Wakap Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam, hlm. 7

¹⁰ Mas'oeed Abidin, dkk. *Ensiklopedi Minangkabau*. Padang: Pusat Kajian Islam dan Minangkabau Sumatera Barat. 2005. hlm. 197

mencapai de jure kemerdekaan Indonesia di hadapan bangsa asing. Pada awal kemerdekaan murid-murid INS sering mengadakan pertunjukan kesenian antara lain yang pernah dipergelarkan di ruang kebudayaan Padang Panjang yang dikunjungi oleh utusan-utusan dari luar negeri seperti Amerika, Inggris, Perancis, Belgia dan lain-lain. Mereka dijamu di ruang pendidikan Kebudayaan Padang Panjang, disini ditampilkan berbagai macam pertunjukan kebudayaan Indonesia yang ditampilkan oleh siswa-siswi INS Kayutanam digabung dengan siswa-siswi Sekolah Normal Putra dan Putri Padang Panjang.

Ruang Pendidik INS Kayutanam adalah satu model pendidikan yang mencoba membuat perpaduan yang seimbang dan harmonis antara pengajaran teori dan praktek keterampilan. Konsep Ruang Pendidik INS ini merupakan model sekolah kerja. Bentuk dan corak berbeda dengan model sekolah kerja yang terdapat di Negara barat. Pendidiknnya orisinil dari ciptaan Muhammad Syafei. Dasar pendidikannya bersumber dan berlandaskan kepada alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, khususnya pada nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam alam Indonesia.

Konsep pendidikan INS Kayutanam perah terwujud secara utuh pada masa sebelum kemerdekaan, walaupun setelah melalui proses yang panjang dan menghadapi kesulitan dan tantangan yang berat. Dalam masa setelah kemerdekaan kerana situasi dan kondisi kehidupan pemerintah yang kurang menguntungkan Ruang Pendidik INS tidak dapat dilanjutkan. Baru pada awal pemerintahan Orde Baru terbuka kesempatan membangun kembali Ruang Pendidik INS Kayutanam.

Pembangunan kembali Ruang Pendidik INS Kayutanam ternyata tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Hampir mmasuki tahun kedua puluh, usaha membangun kembali Ruang Pendidik INS tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Bahkan perkembangan yang ada memperlihatkan semakin jauh penyelenggaraan Ruang Pendidik INS Kayutanam dengan cita-cita pendidikan yang dirumuskan oleh Muhammad Syafei. Dalam penyelenggaraan pendidikan ditemui berbagai hambatan dan kesulitan pokok yang menghalangi kelanjutan Ruang Pendidik INS Kayutanam.

Dalam perjalanan sejarahnya Ruang Pendidik INS Kayutanam mengalami pasang surut, hal ini disebabkan oleh situasi dan kondisi yang membuat perjalanannya tersendat-sendat, baik sebelum kemerdekaan, maupun sesudah kemerdekaan Indonesia bahkan zaman Orde Baru. Oleh karena itu peneltian ini akan mengungkapkan lebih jauh tentang Dinamika Perkembangan Ruang Pendidik INS Kayutanam dimualai awal berdirinya tahun 1926 sampai tahun 1998.

2. Pembatasan Masalah dan Ruang Lingkup

Penelitian ini difokuskan pada pasang surutnya perkembangan lembaga Pendidikan INS Kayutanam. Kajian ini dibatasi pada skop spasial dan temporal. Skop spasialnya adalah Sumatra Barat pada umumnya dan Kayu Tanam khususnya. Sedangkan skop temporal adalah selama 1926-1998. Alasan pemilihan tahun 1926 adalah berdirinya INS dan tahun 1998 merupakan tonggak penting dalam Sejarah Indonesia, yakni runtuhnya Rezim Orde Baru dan masuknya Orde Reformasi.

Secara rinci pokok permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Apakah yang mendorong Muhammad Syafei untuk mendirikan lembaga Pendidikan INS Kayutanam sebagai bentuk perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia?
- b. Bagaimanakah sistem pendidikan di INS Kayutanam ?
- c. Bagaimana dinamika perkembangan lembaga Pendidikan INS Kayutanam ?

3. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini mencakup ruang lingkup temporal dan ruang lingkup spasial. Ruang lingkup temporal menyangkut periodisasi atau *sense of time* (pengertian waktu), yaitu adanya kesadaran waktu dalam melihat gejala apa pun objeknya.¹¹ Dalam hal ini penelitian berada dalam kurun waktu 1926-1998. Tahun 1926 dijadikan batas temporal dengan alasan bahwa tahun 1926 merupakan tahun berdirinya Ruang pendidikan INS Kayutanam. Sedangkan tahun 1998 dijadikan batas akhir karena tahun 1998 adalah tahun bergulirnya reformasi di Indonesia. Sementara itu, ruang lingkup operasional terfokus di Ruang Pendidikan INS Kayutanam yang terletak di Jorong Palabihan Kenagarian Kayutanam, Kecamatan 2 x 11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat.

Sedangkan manfaat dari hasil penelitian ini, diharapkan generasi penerus memahami apa yang telah diperjuangkan oleh pendiri Pendidikan INS Kayutanam dalam rangka membangun bangsa dan

¹¹ Dalam ilmu sejarah, setiap gejala dilihat dan berlansung dalam *time setting* tertentu. Kerangka waktu merupakan "jantung" kajian sejarah. Tidak ada yang terlepas dalam unsur waktu. Menghilangkan *sense of time* berarti hilang esensial kajian sejarah (Mestika Zed, Tentang Sumber Sejarah: Pengertian dan Jenis-Jenis Sumber Sejarah". 1997, handost IS. 1998, hlm. 2).

Negara. Selanjutnya generasi yang sekarang maupun yang akan datang diharapkan dapat meneladani semangat kerja keras para pendahulunya.

4. Tinjauan Pustaka

Sampai sejauh ini penelitian tentang dinamika perkembangan Ruang Pendidikan INS Kayutanam belum ada dilakukan. Namun ada beberapa karya yang pernah mengkaji tentang persoalan Ruang Pendidikan INS secara umum. Diantaranya karya A.A Navis, "*Filsafat dan Trategi Pendidikan M. Syafei*", diterbitkan oleh PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, tahun 1996. Dalam buku itu diuraikan tentang sosok Muhammad Syafei yang mencakup tempat lahir, pendidikan dan kifrahnya di dunia politik. Kemudian juga diuraikan sejarah berdirinya INS Kayutanam dan sisitem pendidikanya. Bagian akhir dari isi buku itu juga memuat cuplikan pidato-pidato Muhammad Syafei dalam berbagai forum selama memimpin INS Kayutanam.

Karya Gusti Asnan, "*Kamus Sejarah Minangkabau*"(2003), Diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), karya tersebut memuat sedikit sejarah singkat INS Kayutanam antara lain perkembangan INS pada zaman Belanda, Jepang dan pada masa kemerdekaan RI.

Karya selanjutnya H. Nazar Sidin, "*Apa Siapa*" Edisi Sumatera Barat Bahagian I, diterbitkan oleh Pustaka Artaz, (2004). Dalam buku itu diuraikan tentang biografi singkat beberapa orang tokoh Minangkabau yang terkemuka, baik di Minangkabau maupun yang diperantauan. Dalam buku itu ditulis serba sedikit tentang Muhammad Syafei, yang mencakup tempat lahir, pendidikan dan motifasi yang mendorong ia mendirikan lembaga pendidikan INS Kayutanam. Kemudian Karya Pusat Pengkajian Islam Minangkabau (PPIM), Edisi Awal, Cetakan Pertama (2005). Dalam buku itu juga diuraikan serba sedikit mengenai perkembangan lembaga pendidikan INS Kayutanam, mulai dari berdirinya sampai awal kemerdekaan RI.

Berbeda dengan karya diatas, penelitian ini sesungguhnya ingin menjelaskan tentang dinamika perkembangan Lembaga Pendidikan INS Kayutanam. Hal ini sangat menarik, sebab bila dilihat Ruang Pendidikan INS Kayutanam tumbuh dan berkembang sejak zaman penjajahan Belanda dan telah banyak andilnya untuk bangsa dan negara, tetapi hal ini belum dipahami oleh banyak orang. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia melawan penjajah secara fisik berupa persenjataan. Namun perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda seperti itu tidak lah mungkin untuk mencapai kemerdekaan. Cara lain yang ditempuh adalah melalui lembaga pendidikan, yakni murid-murid dan guru serta

pengurus bersama pejuang lainnya, berperan aktif dalam melawan penjajahan Belanda.

5. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Meneliti dinamika perkembangan Lembaga Pendidikan INS Kayutanam merupakan salah satu bentuk karya sejarah. Peristiwa sejarah diteliti dengan menggunakan metode dasar (*basic method*) sejarah yang biasa disebut penelitian bahan dokumen¹² atau metode sejarah, yaitu berupa prosedur kerja yang terdiri dari empat tahap. Pertama, *heuristic* (mencari dan menemukan data). Kedua, *kritik* sumber, menilai otentik atau tidaknya sesuatu sumber dan seberapa jauh kredibilitas sumber itu. Ketiga, *sintesis* dari fakta yang diperoleh melalui keritik sumber atau disebut juga kredibilitas sumber itu dan keempat, penyajian hasilnya dalam bentuk tulisan.¹³

Pertama adalah tahap *heuristic*, yaitu tahap mencari dan mengumpulkan data. Data yang diperoleh akan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang hubungannya dengan informasi dari pelaku atau orang yang sezaman dengan peristiwa yang terjadi dan dokumen yang dijadikan bahan penulisan. Dalam hal ini bisa berupa hasil karya dari M. Syafei yang berhubungan dengan Ruang pendidikan INS Kayutanam. Sedangkan data sekunder adalah informasi dari orang yang dianggap tahu tentang lembaga INS Kayutanam seperti mantan murid, guru dan mantan pengurus yayasan INS Kayutanam.

Pengumpulan data dilakukan melalau *pertama*, studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu buku-buku, dokumen, arsip, laporan penelitian, artikel atau berita dalam Koran, majalah dan lain-lain yang berhubungan dengan Ruang pendidikan INS Kayutanam. *Kedua*, Wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan antara lain mantan murid, guru, mantan pengurus Yayasan dan orang yang dianggap tahu mengenai Ruang pendidikan INS Kayutanam.

Tahap *kedua*, kritik, yaitu tahap penyeleksian sumber-sumber sejarah. Meliputi kritik eksteren dan intern. Kritik ekstern dilakukan untuk menguji tingkat keabsahan sumber (otentisitas sumber). Sedangkan kritik intern dilakukan untuk menguji kredibilitas sumber

¹² Mestika Zed, *Apakah Berpikir Sejarah?*. 1998. *Handout IS*, hlm. 4.

¹³ Louis Gottschlk, *Mengerti Sejarah. Terjemahan Nograho Notosusanto*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995. hlm. 32. Lihat juga Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Yayasan Bintang Budaya, 1999. hlm. 89.

apakah sumber itu bisa dipercaya atau tidak. Tahap *ketiga* adalah tahap analisis dari fakta yang diperoleh melalui kritik sumber atau disebut juga kredibilitas sumber itu. Dalam hal ini juga adanya interpretasi dalam arti merangkai fakta-fakta lain menjadi satu kesatuan pengertian. Tahap ini, melakukan analisa berdasarkan fakta sejarah.

Tahap *keempat*, historiografi, yaitu tahap penulisan sejarah. Pada tahap terakhir ini akan dilakukan koreksi baik secara bertahap maupun secara total. Metode koreksi bertahap dan koreksi total diterapkan guna menghindari kesalahan-kesalahan yang sifatnya substansial dan akurat sehingga menghasilkan penulisan sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

B. INS KAYUTANAM DAN TOKOH PENDIRI

1. Sejarah Berdiri

Lembaga pendidikan INS Kayutanam merupakan nama sebuah pendidikan yang cukup andil dalam mencerdaskan anak bangsa. Sekolah ini didirikan oleh Muhammad Syafei pada saat bangsa Indonesia berada dibawah kekuasaan Belanda, dan bersamaan dengan adanya pembaharuan yang dipengaruhi oleh bangsa asing seperti Perancis, Mesir, Cina, Jepang, dan sebagainya.

Pada zaman penjajahan Belanda, orang Minangkabau termasuk suku bangsa yang haus akan pendidikan, sehingga sehabis Perang Dunia I bermunculanlah gerakan yang luar biasa untuk membuka sekolah bagi anak-anak muda. Pada mulanya animo pendidikan hanya karena pengaruh faktor ekonomi yang berhubungan dengan perintah yang menyatakan menerima banyak pegawai yang bergaji tetap dan lebih baik dari pada hanya menjadi petani.

Setelah pemerintah jajahan mendirikan sekolah Belanda maka muncul suatu istilah yang menyatakan bahwa orang yang bersekolah dinamakan orang pintar. Tamatan sekolah menengah dinamakan orang intelek, menyekolahkan anak ke sekolah berbahasa Belanda berarti mengantarkan anak kepada suatu kemajuan, sedangkan yang tidak bersekolah dipandang sebagai “Orang Kolot”.¹⁴

Pengaruh dari paham dan pandangan tersebut adalah bermunculannya sekolah-sekolah yang memakai label *School* di belakang nama sekolah tersebut. Di antaranya “Diniyah School” dan “Adabiah School”. Pada saat itu sekolah-sekolah yang berlatar belakang agama tidak terlalu diperhitungkan dikalangan pemerintah. Namun

¹⁴ A.A. Navis, *Filsafat dan Strategis Pendidikan M.Syafei Roeng Pendidikan INS Kayutanam*. Jakarta: Grasindo, 1996, hlm. 51.

orang Minangkabau tetap mengikuti pelajaran yang berbasiskan agama Islam.

Pencantuman nama *School* pada sekolah-sekolah agama merupakan suatu pernyataan bahwa mereka adalah dari kelompok kaum muda bangsa Indonesia yang mengobarkan api pembaharuan bagi kalangan muda bangsa Indonesia disebabkan oleh adanya beberapa prinsip pendidikan pemerintahan Kolonial Belanda yang sangat merugikan bangsa Indonesia, diantara prinsip-prinsip yang dilancarkan oleh Pemerintah Kolonial antara lain:

1. Dualisme dalam pendidikan yaitu dengan adanya pemisahan sekolah antara anak Belanda dan anak pribumi serta adanya pemisahan antara anak orang miskin dengan orang kaya.
2. Gradualisme yang ekstrim yaitu dengan mengusahakan pendidikan yang sederhana mungkin bagi anak Indonesia dan memperlambat munculnya sekolah yang setaraf E.L.S.
3. Prinsip konkordasi yang memaksa semua sekolah berorientasi barat dengan mengikuti model sekolah di Netherland dan menghalangi penyesuaiannya dengan keadaannya di Indonesia.
4. Kontrol sentral yang ketat dengan menciptakan biokrasi yang ketat yang hanya memungkinkan perubahan kurikulum dengan persetujuan dengan para pembesar di Indonesia maupun di negeri Belanda. Hal ini menyebabkan lambannya perubahan pendidikan di bawah pemerintahan Belanda.
5. Tidak adanya perencanaan pendidikan sistematis yang menyebabkan pemerintah mengadakan percobaan dengan berbagai macam sekolah menurut keadaan zaman.
6. Pendidikan pegawai sebagai tujuan utama sekolah. Penerimaan murid sekolah berbahasa Belanda dan sekolah menengah ditentukan menurut kemampuan pemerintah sebagai majikan utamam menyerap lulusannya.¹⁵

Prinsip yang diterapkan oleh pemerintah kolonial tersebut sangat jelas merugikan bagi pendidikan pribumi. Sistem pendidikan yang dilancarkan oleh Belanda bertujuan agar anak-anak Indonesia selalu berada dalam kebodohan yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan, yang pada prinsipnya memang itu yang diinginkan oleh penjajah.

Bersamaan dengan munculnya sekolah-sekolah Islam di Minangkabau, misalnya berdirinya Sumatera Thawalib, maka di Jawa

¹⁵ S. Naution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Bandung: Jemmars, 1983, hlm. 145-146.

juga lahir paham pembaharuan yang ditunggangi oleh paham komunis yang akhimya merebak ke Sumatera dan mulai merasuki alam pikiran masyarakat Minangkabau dan juga merembes sampai ke Sumatera Thawalib sehingga mempengaruhi para pelajarnya dan guru-guru di Sumatera Thawalib. Setelah dipengaruhi paham komunis maka secara perlahan-lahan Sumatera Thawalib mulai memperlihatkan kemundurannya dan pengurus Sumatera Thawalib mulai mengundurkan diri satu persatu sehingga Sumatera Thawalib benar-benar di ambang kehancuran, dan setelah Padang Panjang dilanda gempa pada tahun 1926 aktifitas di gedung Sumatera Thawalib terhenti.

Sebelum kehancuran Sumatera Thawalib karena pengaruh system pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintahan colonial maka muncul keinginan dari masyarakat Minangkabau untuk menuntut ilmu ke negeri luar, seperti ke Eropa dan Mesir. Terbukti pada masa pemerintahan kolonial pendidikan Islam di Hindia Belanda cukup mengalami kemajuan, yang disebabkan oleh banyaknya buku-buku pelajaran yang di kirim dari daerah Arab dan juga banyak dari kaum muda Minangkabau yang pergi menuntut ilmu ke tanah Arab.¹⁶

Walaupun sistem belajar mengajar di Sumatera Barat sudah mengalami kemajuan, namun belum ada kesepakatan antara satu madrasah dengan madrasah lain tentang kurikulum pelajaran, system belajar dan pelajaran yang akan diberikan kepada siswa tergantung kepada guru yang akan mengajar mata pelajaran itu. Di tengah situasi dan kondisi pendidikan yang sedang kacau seperti itulah lembaga pendidikan Indonesische Nederlands School (INS) muncul pertama kali di Sumatera Barat atas prakarsa Muhammad Syafei sepulangnya beliau dari negeri Belanda. INS diresmikan berdirinya pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, sekarang masuk wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Pendukung awal pendirian INS adalah anggota organisai buruh kerea api yang bernama VBPS yang berpusat di Padang. Organisasi ini diketuai oleh Abdul Rachman, seorang pegawai pada perusahaan kereta api, dia juga keponakan dari Marah Sultan (bapak angkat Muhammad Syafei). Berkemungkinan telah terjadi kontak yang lama antara mamak dengan keponakan untuk mendirikan sekolah yang dicita-citakan.

Abdul Rachman berkampaye melalui majalah *Boemi Poetra* SS, baik dengan tema pentingnya sekolah itu bagi masa depan anak-anak VBPS, maupun tentang siapa tokoh Muhammad Syafei sebagai seorang yang telah mareup ilmu pendidikan di Belanda. Setelah

¹⁶ A. Mustafa, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, hlm. 68.

Muhammad Syafei kembali dari Belanda tahun 1925, Rachman mulai berkampanye untuk mendirikan sekolah itu dikalangan pengurus dan anggota organisasinya sejak awal tahun 1926. Dukungan terhadap keberadaan sekolah yang akan didirikan itu juga diberikan oleh organisasi perantau Minangkabau "Medan Perdamaian" di Jakarta, di mana Marah Sultan salah satu penasehat dan Muhammad Syafei anggota kehormatan dalam organisasi tersebut.¹⁷

Pada tanggal 7 April 1926 Muhammad Syafei telah sampai di Padang. Dalam pertemuan dengan Abdul Rachman dirumuskan gambaran dari sekolah yang akan didirikan itu. Lokasi sekolah disepakati di Kayutanam karena letaknya mudah didatangi oleh anak-anak dari Padang, Pariaman, Padang Panjang dan Bukittinggi, yang dapat ditempuh sekitar satu atau dua jam dengan menggunakan kereta api. Keduanya sepakat bahwa sekolah yang mereka cita-citakan itu akan mendidik murid agar berwatak mandiri, mau bekerja keras. Sekolah ini bersifat nondiploma karena fungsi diploma pada umumnya bukan untuk menerangkan nilai pendidikan murid, melainkan untuk mendorong mereka mencari kerja dari kantor ke kantor, seperti halnya dengan sekolah lain.

Ketika kesepakatan telah mantap, Abdul Rachman membawa Muhammad Syafei melakukan kampanye kepada persatuan anggota organisasi buruh kereta api VBPS dari Padang, Padang Panjang dan Solok. Kampanye diadakan pada pertemuan yang juga dihadiri wakil-wakil pemerintah, seperti Demang atau Asisten Demang, kepala polisi, jaksa atau ajung jaksa, dan kepala nagari. Dalam kampanyenya, Abdul Rachman dengan bijak membangkitkan emosi hadirin tentang pentingnya sekolah bagi anak-anak buruh agar bemasib lebih baik dari orang tuanya yang terbenam pada jurang sistem kapitalisme. Antara lain isi kampanye Abdul Rachman adalah:

"Bangsa kita telah tersesat oleh anggapan bahwa diploma (Ijazah) dipandang sebagai mukjizat tanda kemajuan, sedangkan kemajuan itu sendiri diartikan mengubah cara hidup agar seperti orang barat. Diploma memang dapat jadi jaminan untuk mendapatkan tempat yang pantas dalam lapangan kerja di pemerintahan. Akan tetapi itu tidak berarti bahwa diploma menjamin seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kelirulah apabila tujuan orang akan mendapatkan pekerjaan yang baik karena mempunyai diploma. Pekerjaan yang baik didapat dengan kecerdasan dan bekerja keras. Sekolah di Hindia tidak mengajar bumiputra agar menjadi bangsa yang mampu bekerja keras."¹⁸

¹⁷ A.A. Navis. *Op. Cit.* hlm. 54.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 56

Abdul Rachman memperkenalkan Muhammad Syafei sebagai seorang pendidik yang telah belajar di Eropa. Berikut ucapan Abdul Rachman:

“Kalau M. Syafei mau bekerja dikantor atau menjadi guru di sekolah yang ada, sebagai seorang yang pernah belajar di Eropa, pastilah ia akan mendapat gaji besar, seperti yang telah ditawarkan kepadanya, yaitu antara 350 gulden sampai 700 gulden. M.Syafei lebih suka mengajar di sekolah yang bertempat di desa kecil dari pada bekerja di kota dengan gaji besar. Selanjutnya, dikatakan Abdul Rachman bahwa sekolah yang mereka cita-citakan akan dimulai pada tanggal 1 Agustus. Untuk memulai sekolah itu, tidak perlu dibangun gedung lebih dulu. Malah tidak perlu ada meja dan bangku. Ia mencontohkan Al Azhar di Kairo, mahasiswa dan guru atau dosen di sana tidak duduk di bangku, melainkan di lantai. Namun, universitas itu banyak dikunjungi dan mahasiswanya terpakai dimana-mana.”¹⁹



Gambar 1
Pekarangan INS pada awal berdirinya
(Dokumentasi Galeri INS)

Akhirnya sekolah yang dicita-citakan itu dapat terwujud dan diresmikan pada hari Minggu 31 Oktober 1926.²⁰ Ruang Pendidik INS kyutanam mulai dibuka dengan 75 orang dibagi atas 2 kelas: 1A dan 1B, dengan sistem belajar berganti hari. Kalau 1A masuk hari senin, hari

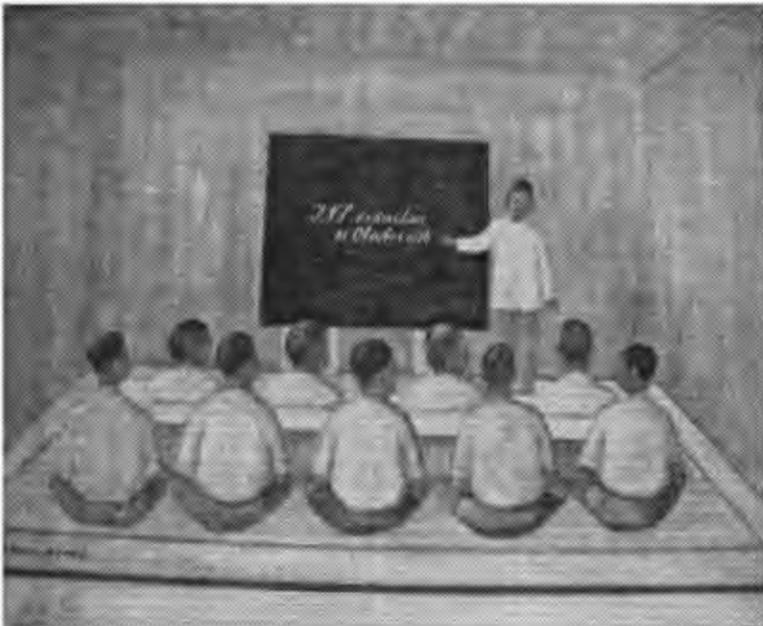
¹⁹ Majalah *Suara Bemi Poetra SS*, 7 April 1926.

²⁰ Dalam acara peresmian itu dihadiri oleh pengurus VBPSS dari berbagai kota. Hadir juga pejabat pemerintah seperti polisi, Demang, bahkan Kontrolir Jan Derx dari Pariaman. Dalam pidatonya, Jan Van Derx mengatakan bahwa model sekolah seperti INS inilah yang menjadi awal pertumbuhan dunia industri di Belanda. Bukan dari sekolah yang didirikan oleh pemerintah negeri ini. Lihat Majalah *Soera Boemi Poetra SS*, 12 November 1926.

selasa ia tinggal di rumah, di hari itu 1B yang belajar, gurunya hanya Muhammad Syafei seorang. Murid-murid datang dari berbagai tempat, seperti Padang, Pariaman, Pandang Panjang dan Bukittinggi dengan naik kereta api. Pada awal pembukaan murid-murid hanya duduk di atas tikar, tidak ada bangku atau meja belajar.

Pada awal berdirinya untuk tempat belajar Muhammad Syafei menyewa sebuah rumah penduduk. Setahun kemudian di dalam kebun kopi didirikan los dari bambu beratap rumbia, bangkunya dari papan berkaki bambu yang ditanamkan ke tanah, tetapi ada meja dan bangku sehingga kaki murid tidak perlu bersela, hanya berjunta ke tanah. Tiap-tiap satu mata pelajaran murid-murid disuruh bersenam, melepas lelah.²¹

Dalam keadaan yang serba kekurangan itu INS terus berkembang dan beroperasi sebagai lembaga pendidikan. Dalam periode awal dana untuk pengembangan INS di dapatkan dari acara-acara pementasan yang dilaksanakan oleh para siswa dengan bermoldakan keahlian mereka melaksanakan berbagai macam pertunjukan dan berbagai keahlian mereka dalam membuat pekerjaan tangan seperti benda-benda keramik, dan kerajinan jenis perkakas yang terbuat dari besi dan lain-lain.



Gambar 2
Lukisan yang menggambarkan kondisi murid belajar di INS tempo dulu (*Dokumentasi Galeri INS*)

²¹ Majalah *Sendi*, No. 8 Tahun 1926. hlm. 5-6.

2. Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan INS bertolak dari pemikiran “Alam Berkembang Menjadi Guru”. Sistem ini ternyata tidak berubah mulai dari awal berdirinya sampai saat ini. Dalam buku *Dasar-Dasar Pendidikan* yang dikarang oleh Muhammad Syafei menjelaskan bahwa dengan mengakui adanya Tuhan, sudah jelas kita mengakui akan ciptaan Tuhan. Ciptaan-ciptaan itu diselidiki dan diperhatikan, hasil-hasil penyelidikan dan perhatian itulah bagian terbesar yang menjadi dasar atau filosofi pendidikan INS Kayutanam.²²

Dalam melihat dan memperhatikan alam ini Muhammad Syafei mengambil contoh kepada alam Indonesia (Alam Berkembang Menjadi Guru). Ia mencontohkan kepada kejadian-kejadian di alam ini seperti awan tebal yang mengandung uap yang kemudian menyebabkan terjadinya hujan. Selain dari awan yang mengandung hujan bergerak di udara, beratus macam unggas setiap hari bertebangan diseluruh lapisan alam Indonesia, dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Pagi-pagi mereka sudah mulai beterbangan untuk bekerja mencari makan.

Bermacam-macam tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas bumi Indonesia, mulai dari lumut yang sehalus-halusnya sampai kepada pohon raksasa yang berjuta-juta banyaknya di seluruh Indonesia. Matahari sepanjang tahun dengan memancarkan panas yang tidak henti-hentinya, disamping hujan turun cukup banyak sehingga tumbuh-tumbuhan hidup terus sepanjang masa. Air dari tempat tinggi menuju ke tempat yang rendah akhirnya tiba di lautan lepas. Air yang bermuka sangat luas itu dipanasi oleh matahari yang selalu ada di atas bumi Indonesia. Air menjadi uap dan naik kelangit menjadi awan yang mengandung hujan. Ketika cukup dingin di langit tinggi, maka uap itu jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Hujan yang jatuh ke bumi membasahi tumbuh-tumbuhan. Air yang mulanya hanya mengalir pada tempat terbatas, akhirnya mendatangkan nikmat bagi beribu-ribu tumbuhan, manusia dan hewan. Bagaimanapun juga mesti di akui bahwa air bekerja.

Begitu juga dengan angin atau udara yang berpindah-pindah, seandainya tidak ada udara yang berpindah-pindah atau tetap pada satu tempat, maka dapat dipastikan bahwa udara tetap pada tempatnya. Dengan demikian hujanpun tidaklah dapat bertukar tempat dan pembagian air untuk tumbuh-tumbuhan serta makhluk tidak merata.

²² Muhammad Syafei. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Sumatera Barat: INS Kayutanam, 1968. hlm. 3.

Dengan demikian ternyata udara bekerja untuk membahagiakan kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan dan seterusnya.

Hal-hal yang demikian itulah yang menjadi dasar pikir atau filosofi pendidikan Perguruan INS Kayutanam. "Alam Berkembang Menjadi Guru". Navis mengungkapkan sistem pendidikan INS berangkat dari pemikiran filsafah alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Alam bergerak dalam sistem yang tetap secara dinamis yang dialektik seimbang. Manusia sebagai substansial alam, dengan tenaga pikiran dan perasaannya tidak boleh tidak harus mengikuti sistem alam itu. Keluar dari sistem berarti lepas dari keseimbangan.²³

Sistem pendidikan yang dirancang oleh Muhammad Syafei bukan saja beliau bercita-cita untuk dapat diterapkan di INS, tetapi juga berharap dapat diterapkan secara nasional. Paling tidak ada empat kerangka dasar pemikiran Muhammad Syafei waktu mendirikan INS Kayutanam pada tahun 1926, seperti yang dituangkan dalam buku Dasar-dasar Pendidikan. Keempat dasar pemikiran itu adalah:

Pertama. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup di alam tropis khatulistiwa dengan buminya yang subur, pada umumnya tidak memiliki tradisi etos kerja dan hidup dalam budaya santai. Sebaliknya, bangsa-bangsa yang hidup di belahan bumi bagian utara memiliki musim salju dan musim panas memaksa mereka bekerja selama enam bulan untuk bertahan hidup setahun. Oleh paksaan alam itu mereka memiliki etos kerja dan kemampuan menggunakan otak mencari ilmu dan teknologi untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan yang lebih baik.

Kedua. Sebaiknya bangsa yang beragama seharusnya mengakui alam sebagai *Sunnatullah* yang wajib pula dipedomani sebagaimana mempedomanai kitab Suci Al-Quran. Kehidupan alam dan makhluk di dalamnya merupakan gerak yang dinamis yang harmonis sesuai dengan kodratnya masing-masing. Setiap substansi yang tidak bergerak menurut sistem dinamakan alam. Demikian pula halnya dengan manusia yang diciptakan Allah dengan derajat yang sama.

Ketiga. Sistem dan tujuan pendidikan, masa penjajah, diseluruh jenjang tingkat pendidikan, berfungsi untuk membentuk manusia priyai yang elitis. Bukan mendidik manusia yang memiliki etos kerja, aktif, kreatif, dan mandiri yang dibutuhkan oleh suatu bangsa yang merdeka.

Keempat. Strategi dan sistem pendidikan yang sesuai bagi bangsa Indonesia yang merdeka ialah menanamkan etos kerja mealui pengembangan komponen vital manusia sperti otak, jiwa, dan tangannya

²³ A.A. Navis, *Filsafat dan Strategi Pendidikan M. Syafei Ruang Pendidikan INS Kayutanam*. Jakarta: Grasindo, 1996, hlm. 102.

agar seimbang menurut kodrat masing-masing sehingga mampu berpacu dengan bangsa yang maju, baik dalam bidang ilmu dan kecerdasan serta mampu dalam keterampilan dan etos kerja.

Dalam kerangka itulah Muhammad Syafei menyusun konsep pendidikan, baik sistem, metoda ataupun kurikulum pada Ruang INS Kayutanam. Dengan demikian maka tujuan utama pendidikan ialah untuk mengembangkan komponen vital peserta didik seperti “otak”, “rohani” dan “tangan” agar seimbang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pendidikan “otak” melalui kurikulum akademik bertujuan agar peserta didik menjadi cerdas dan berilmu. Pendidikan “jiwa/rohani” melalui kurikulum agama, seni dan olahraga, bertujuan agar peserta didik memiliki mental yang tangguh. Pendidikan “tangan” melalui kurikulum kerajinan tangan atau keterampilan bertujuan agar peserta didik memiliki etos kerja. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendidikan Otak

Pendidikan otak melalui kurikulum akademik seperti ilmu matematik, fisika, kimia atau alam. Pendidikan tersebut bukan bertujuan agar peserta didik menjasi ahli dibidang tersebut. Hampir seluruh profesi yang digelui orang sedikit sekali yang ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh di sekolah. Kurikulum ilmu pasti dan ilmu alam berfungsi unuk melatih dan mengembangkan nalar siswa agar mampu berpikir eksak, logis dan sistematis. Sedangkan ilmu sosial atau humaniora bukan bertujuan menjadi ahli dari ilmu tersebut, melaikan fungsi utamanya untuk melatih dan mengembangkan daya ingat dan penalaran siswa. Untuk mengembangkan nalar siswa, maka sitiap murid diberikan tugas-tugas tertentu yang diberikan secara berkala. Setiap murid wajib mengikuti pelajaran atau kurikulum pendidikan ilmu pasti.



Gambar 3

Masjid “M. Natsir” yang terletak di dalam kompleks INS tempat pendidikan agama bagi siswa (*Dokumentasi tim 2010*)

b. Pendidikan Kerohanian

Pendidikan rohani terdiri dari tiga komponen kurikulum yang saling berkaitan yakni: agama, kesenian, dan olahraga. Ketiga materi kurikulumnya lebih berfungsi untuk membentuk sikap mental murid dari pada keahlian seperti yang diajarkan pada sekolah kejuruan. Materi kurikulumnya berfungsi untuk mendidik siswa agar memiliki sikap mental yang sesuai dengan tuntunan hidup. Tiga komponen tersebut adalah:

a. Pendidikan Agama

Dalam konsep agama, pendidikan agama bertujuan agar peserta didik mampu menunaikan kewajibannya sebagai khalifah Allah di muka bumi dalam masyarakat. Seperti menjadi imam, menjadi khatib, mengurus jenazah dan lain sebagainya

b. Pendidikan Seni

Pendidikan seni seperti seni rupa, seni musik, sastra dan drama. Pendidikan seni tersebut berfungsi sebagai alat bantu untuk membentuk sikap mental yang etis dan estetis, kritis dan peka, aktif dan kreatif serta solidaritas dan toleran. Latihan-latihan yang dilakukan secara tidak langsung mempengaruhi otak kecil yang menjasi motor penggerak pemikiran dan sikap dalam kehidupan. Pada umumnya orang yang tidak pernah bersentuhan dengan seni dan olahraga, cenderung bersifat egoistis merasa benar sendiri. Oleh karena itu pendidikan seni pada sekolah bukan berfungsi untuk mendidik siswa agar menjadi ahli pada masing-masing komponen kurikulum tersebut, namun dapat membantu bagi pengembangan bakat dan untuk jadi pilihan hidup dikemudian hari.

Seni Rupa.

Kurikulum seni rupa berupa seni lukis dan keramik. fungsi seni rupa ini untuk melatih dan mengembangkan pandangan indra mata agar dapat menilai dan membedakan secara garis lurus, tebal atau tipis warna yang satu dengan yang lain.

Dalam seni rupa ini setiap murid diajarkan pekerjaan meniru bentuk dan meniru senilai, menciptakan sesuatu atas dorongan perasaan dan pikiran. Yang dimaksud dengan meniru bentuk, kalau murid melukis atau membuat sesuatu yang persis sama dengan contoh dihadapannya, seperti alam, benda atau papan tulis. Alat yang digunakan dapat apa saja, seperti pensil, pena atau arang kayu.

Jika murid membuat sesuatu benda yang tidak serupa dengan contohnya, baik dalam bentuk maupun warna. Ini terjadi karena sudah diramu lebih dahulu oleh pikiran murid. Misalnya dalam kerajinan keramik, murid meniru selembar daun, tetapi yang dihasilkannya asbak seperti daun. Begitu juga dalam melukis misalnya murid meniru sesuatu benda lukisan, tetapi dengan sengaja mengubah bentuknya, baik dalam garis atau warna yang sesuai dengan apa yang dipikirkannya.²⁴

Seni Musik

Seni musik untuk melatih indera telinga agar mampu mendengar dengan teliti, atau membedakan suara sembarang serta warna suara yang berbeda. Untuk memberi latihan disiplin dalam mengikuti nada irama dan ketukan. Menggerakkan musik atau bernyanyi bersama untuk memberi latihan kebersamaan meski dalam nada yang berbeda serta meredam ego yang ingin menonjol sendiri.



Gambar 4

Kerajinan tangan murid INS yang dipajang di Galeri
(*Dokumentasi Galeri INS*)

Seni Sastra

Seni sastra gunanya untuk melatih menggunakan bahasa lisan atau tulisan sebagai alat komunikasi yang lebih baik. Siswa belajar menafsirkan dan mengembangkan nalar dengan tepat apa yang dibaca atau yang didengar, serta belajar mengembangkan imajinasi kedalam tulisan atau lisan. Membaca puisi merupakan latihan teknis pengelolaan vokal dan pernapasan serta keberanian

²⁴ *Ibid*, 124

tampil di muka umum. Dengan demikian siswa tidak canggung lagi terjun ke tengah-tengah masyarakat.

Seni Drama

Seni drama berfungsi untuk memahami naskah cerita, sehingga dapat memahami secara langsung di dalam cerita tersebut. Hal yang paling penting dalam seni drama ini adalah pemahaman kerja sama antar sesama unsur pendukung tanpa memandang perbedaan peran dan posisi sesamanya.



Gambar 5
Ruang kreatifitas siswa di Gedung Galeri INS
(Dokumentasi tim 2010)

c. Pendidikan Olahraga

Pendidikan olahraga berfungsi untuk menumbuhkan kekuatan fisik atau kepentingan pertandingan sebagai tontonan. Hal yang paling penting olahraga adalah untuk membentuk sikap mental yang kuat dan ulet, kompetitif, tabah dalam menghadapi kekalahan dan tidak sombong bila menang. Sikap mental yang demikian bukan saja ditanamkan kepada pemain, tetapi juga kepada peserta didik yang menjadi penonton. Pendidikan juga membentuk sikap mental yang sama yang saling menghargai antar pemain meskipun saling berbeda prestasinya. Pendidikan olahraga ini memberikan kesadaran bagi siswa didik yang betapapun unggulnya, tidak akan berarti apa-apa bila tidak didukung oleh yang lain. Kesadaran itu menumbuhkan rasa kesetiakawanan yang kuat sebagai dasar kepedulian sosial di tengah-tengah masyarakat.

d. Pendidikan Kerajinan Tangan/Keterampilan

Tujuan pendidikan kerajinan tangan pada INS Kayutanam adalah untuk mendidik agar siswa memiliki tradisi kemauan dan kerajinan

bekerja guna meningkatkan etos kerja. Orang yang memiliki etos kerja selalu mempunyai gagasan utama memulai dan menyelesaikan tugas dan kewajiban tanpa menunggu perintah dalam istilah lain menumbuhkan sikap “tidak senang diam” selalu saja ingin berbuat atau memikirkan sesuatu yang berbeda.

Materi kurikulum keterampilan tidak menuntut alat atau bahan tertentu seperti sekolah kejuruan. Peralatan dan bahan dapat dapat diambil dari apasaja, seperti tanah liat, karton, plastic, sabut kelapa atau bahan lain yang baru atau bekas. Karena tujuan pendidikan di bidang keterampilan ialah membangun kemauan dan kerajinan bekerja, serta kemampuan untuk membuat atau menciptakan sesuatu. Kemampuan menciptakan hanya dapat dilakukan oleh anak yang berbakat, sedangkan kemampuan reproduktif dapat dilakukan oleh semua murid. Hasil reproduksi siwa tidak sama tergantung kepada bakat dan kemauannya. Guru tidak dituntut untuk mengarahkan siswa kepada satu jenis keterampilan.

Dalam hal keterampilan murid tidak memiliki takut yang sama, sehingga minat dan hasilnya juga tidak akan sama. Untuk yang berbakat akan menghasilkan yang lebih bagus, yang tidak akan menghasilkan benda yang kurang pula. Pada tahap awal pendidikan di bengkel atau di lapangan, penelitian tidak pada hasil atau bentuk dari apa yang dikerjakan murid, melainkan penelitian pada proses mengerjakannya. Ada murid yang bekerjacepat atau lambat, tetapi ada juga yang asal-asalan. Keterampilan murid dikembangkan membuat sesuatu yang berbeda dari temannya. Sasarannya antara lain ialah (a) menghilangkan sikap mental ikut-ikutan atau kebiasaan ikut arus, (b) memantapkan pendirian dan sikap mandiri, (c) menumbuhkan semangat kompetitif yang sehat.²⁵



Gambar 6
Tempat pembakaran keramik untuk kerajinan tangan
(Dokumentasi tim 2010)

²⁵ *Ibid*, 120

Pendidikan keterampilan yang perlu diperhatikan ialah bagaimana murid memulai dan bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan. Artinya, murid harus membiasakan dirinya bila suatu pekerjaan dimulai, pekerjaan itu harus samapi selesai dikerjakan. Jika murid mengerjakan sesuatu, pertama terlebih dahulu murid harus mampu merawat dan memanfaatkan alat serta mengenal sifat bahan yang akan digunakan agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Selesai bekerja murid diharuskan membersihkan bengkel kerja setiap hari selesai bekerja. Kemampuan merawat bengkel kerja ada hubungannya dengan sikap mental dan dengan pekerjaan itu sendiri.

Pendidikan keterampilan dapat dilakukan di dalam kelas, berupa pelajaran kerajinan tangan dengan bahan seperti, kertas, bamboo, akar atau sisa guntingan kayu dan sebagainya. Pada bengkel kerja dapat dilakukan dengan menggunakan bahan dan peralatan yang lebih besar seperti teknik maubelar, teknik bangunan, mesin, las, dan tempat dan juga keterampilan pertanian. Untuk keterampilan pertanian ini INS mempunyai lahan persawahan yang cukup memadai untuk praktek bagi siswa.



Gambar 7

Hasil kerajinan tangan siswa INS yang dipajangkan di Galeri
(Dokumentasi tim 2010)

3. Tokoh Pendiri

Muhammad Syafei, dilahirkan sekitar tahun 1893, dan berpulang ke rahmatullah di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1969. Jenazahnya di bawa ke Kayutanam dan dimakamkan di komplek perguruan INS Kayutanam. Beliau dimakamkan disamping makam ibu angkatnya yang oleh murid-murid INS di panggil dengan sebutan Andung Chalidjah.

Ayahnya adalah Marah Sutan yang lahir di Padang tahun 1870.²⁶ Marah Sutan adalah lima orang bersaudara anak dari Penghulu Dagang di Bukittinggi yang bergelar Bagindo Nagari dan istrinya adalah gadis desa kelahiran Kayutanam. Namun istrinya dipanggil Upit, konon orang tua Upit berasal dari Jawa Timur yang bekerja di rumah sakit militer Belanda di Kayutanam. Tahun 1884 Marah Sutan sekolah di *Kweekschool* di Bukittinggi, yang pada saat itu oleh rakyat dinamakan Sekolah Raja sekolah yang didirikan pada tahun 1873.

Pada tahun 1890 Marah Sutan tamat di Sekolah Raja, kemudian ia langsung diangkat menjadi guru pada sekolah rendah di Padang. Pada tahun itu juga ia menikah dengan gadis asal Bengkulu kelahiran Padang namanya Chalidjah. Lima tahun lamanya di Padang sebagai guru Marah Sutan berpindah-pindah tempat. Antara lain pernah dipindahkan ke Sukadana Lampung, tujuh tahun kemudian ia dipindahkan lagi ke Pidie di Aceh. Pada tahun 1902 tiga tahun di Aceh pindah ke Pontianak.²⁷



Gambar 8
Marah Sutan (duduk di tengah)
bersama murid INS Kayutanam

²⁶ Menurut A.A. Navis. Keterangan tahun kelahiran Marah Sutan membingungkan Keponakan Marah Sutan, Baharuddin MS dalam majalah Budaya Jaya NO. 132/1979 menetapkan tahun 1872, tapi dalam surat pada A.A. Navis, ialah tahun 1860. Namun A.A. Navis lebih cenderung memilih tahun 1870 dengan alasan masa-masa sekolah zaman dahulu adalah pada usia 8 tahun. Lihat A.A. Navis, *Filsafah dan Strategi Pendidikan M. Syafei Ruang pendidikan INS Kayutanam*. Jakarta: Grasindo, 1996, hlm. 22.

²⁷ H. Nazar Sidin. *Apa Siapa*. Edisi Sumatera Barat Bahagian I. Padang: Pustaka Artaz, 2004. hml. 154

Tiga tahun berikutnya Marah Sutan pindah lagi ke Simabur Batusangkar. Lebih kurang empat tahun di Simabur Marah Sutan minta pindah lagi ke Sambas Kalimantan Barat. Di Sambas Kalimantan Barat Marah Sutan banyak menimba ilmu bertenen karena di daerah itu terkenal dengan tenun Sambasnya yang cukup terkenal di seluruh nusantara. Marah Sutan hanya dua tahun berada di Sambas setelah itu ia minta pensiun dan menetap di Jakarta mengajar di Taman Siswa. Setelah sekian tahun mengajar di Taman Siswa. Marah Sutan meninggal tanggal 31 Agustus 1945, dan dikebumikan di pemakaman Tanah Abang Jakarta.

Dalam kehidupannya yang sering berpindah-pindah, tugas suami istri ini tidak mempunyai anak.²⁸ Lalu di setiap tempat menetap ia mengambil anak angkat. Marah Sutan mengambil anak angkat seorang anak Sunda yang ditinggal mati oleh ayahnya di Sukadana namanya Sukardi. Sukardi disekolahkan di Sekolah Raja di Bukittinggi. Mereka juga mengangkat anak Mandahiling di Aceh yang bernama Ismail. Begitu juga ketika Ismail sekolah di Sekolah Raja di Bukittinggi mereka mengangkat Muhammad Syafei sebagai anak angkatnya. Muhammad Syafei diangkatnya menjadi anak ketika ia bertugas di Pontianak.



Gambar 9
Muhammad Syafei, salah satu karya lukisan
murid INS Kayutanam
(Dokumentasi Galeri INS)

²⁸ H. Nazar Sidin. *Apa Siapa*. Edisi Sumatera Barat Bahagian I. Padang: Pustaka Artaz, 2004. hml. 154

Awal pertama kali Muhammad Syafei diambil oleh Marah Sutan sebagai anak angkat adalah ketika Marah Sutan sedang mengajar di sekolah, hampir setiap hari kepala Syafei nongol di jendela kelas tempat Marah Sutan mengajar. Syafei memang di tugaskan oleh ibunya untuk berjualan kue di sekolah tersebut. Setiap Marah Sutan mengajar di kelas, Syafei selalu memperhatikan dan menyimak apa yang diajarkan oleh Marah Sutan, ketika murid sedang belajar menyanyi di dalam kelas Muhammad Syafei juga ikut menyanyi, sehingga Marah Sutan tertarik hatinya. Suatu ketika Muhammad Syafei ditanya oleh Marah Sutan tentang ayahnya. Mendengar jawaban Muhammad Syafei, Marah Sutan paham bahwa Muhammad Syafei tidak mengenal ayahnya, karena ayahnya meninggal saat Muhammad Syafei masih bayi. Ibunya bernama Sjafiah, yang pekerjaannya membuat kue untuk dijual oleh Syafei di sekolah sekitar rumahnya.

Sjafiah tidak dapat menentukan hari dan tanggal lahir Muhammad Syafei. Berdasarkan perhitungan dari berbagai keterangan Sjafiah dan sanak keluarganya, Marah Sutan memperkirakan tahun kelahiran Muhammad Syafei tahun 1893. Setelah tamat sekolah di kampungnya. Muhammad Syafei dikirim oleh Marah Sutan ke Bukittinggi untuk belajar di Sekolah Raja atau *Kweekschool*. Sekolah Raja adalah semacam sekolah guru dan kalau tamat biasanya diperkerjakan sebagai guru di HIS (*Holansche Inland School*).

Pada tahun 1914 Muhammad Syafei berhasil menyelesaikan sekolahnya di *Kweekschool* dan pada saat itu ia akan diangkat oleh pemerintah untuk menjadi guru di HIS, namun Muhammad Syafei menolak, yang lebih suka mengajar di sekolah swasta. Atas saran Marah Sutan, setelah tamat dari sekolah Raja di Bukittinggi ia pindah ke Jakarta mengikuti ayahnya dan mengajar di *Kartini School*. Di Jakarta Muhammad Syafei ikut menjadi aktifis pergerakan Budi Utomo bersama Marah Sutan dan tokoh lainnya.²⁹

Marah Sutan beserta keluarganya tinggal di Jl. Batu Tulis Gang Abu No. 35 di Jakarta. Marah Sutan setiap hari kerjanya menulis untuk berbagai media massa atau buku-buku pelajaran untuk sekolah rendah di Jakarta. Sementara anak angkatnya Syafei dan Sukardi menjadi guru di Sekolah Kartini, yaitu sekolah untuk anak perempuan yang didirikan oleh Yayasan orang Belanda yang bersimpati kepada cita-cita R.A. Kartini.

Selama Marah Sutan tinggal di Jakarta rumah mereka sering kedatangan tamu untuk berdiskusi, dan itu sudah menjadi tempat

²⁹ H. Nazar Sidin, *Op Cit.* hlm.154

berkumpul orang-orang pergerakan. Berikut pernyataan Baharuddin MS:

“Kegiatan yang berlangsung di rumah Marah Sutan di Gang Abu diliputi suasana pergerakan nasional. Banyak orang pergerakan yang datang kesana antara lain Ki Hajar Dewantara, Haji Agus Salim, Samuan dan lain-lain. Tamu-tamu itu berdiskusi berjam-jam lamanya dan pembicaraan soal Indonesia yang merdeka. Di masa itu pula Marah Sutan menjadi ketua *Afdeeling* Batavia (Daerah Betawi) untuk partai Insulinde yang dipimpin oleh Douwes Dekker. Marah Sutan juga dikenal menjadi Redaktur *Tjahaj Hindia*. Kemudian Pamitran dan surat kabar yang terakhir yang dipimpinnya adalah *Majapahit*. Sebagai penulis yang aktif beliau mengarang berbagai buku. Rumah Marah Sutan benar-benar merupakan prototipe kegiatan pelajaran dan pendidikan yang nantinya akan diwujudkan di Kayutanam”.³⁰

Banyaknya tokoh-tokoh pergerakan yang sering datang ke rumah Marah Sutan, maka berkesempatan bagi Syafei untuk bertukar-tukar pikiran dan berdiskusi tentang pendidikan anak bangsa. Syafei kian yakin bahwa hanya dengan melalui pendidikan dapat ditingkatkan harkat dan martabat bangsa.

Sementara itu Marah Sutan dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan dalam partai Insulinde merasakan bahwa hanya dengan pendidikan nasionallah bangsa Indonesia akan berhasil mencapai cita-citanya sebagai bangsa yang merdeka dan menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Oleh karena itu Marah Sutan berhasrat benar mengirim anak angkatnya bersekolah di Belanda. Selain untuk memperoleh ilmu pengetahuan lainnya yang berguna bagi sekolah yang akan didirikannya di Kayutanam, juga untuk mempelajari dinamika bangsa yang mampu menjajah bangsa Indonesia sampai berabad lamanya.

Sebetulnya yang hendak dikirim sekolah ke Belanda oleh Marah Sutan adalah Sukardi, kaena membutuhkan biaya yang sangat banyak di zaman sehabis perang dunia, disamping itu Sukardi juga sudah beristri tidaklah mudah untuk dilaksanakan oleh Marah Sutan. Marah Sutan juga tidak mau mencari sponsor untuk mensekolahkan anak angkatnya ke Belanda. Situasi yang sulit itu tidak mengendorkan semangat Marah Sutan, melahan kian keras berusaha agar Syafei dapat dikirim ke Belanda. Di samping lebih banyak menulis, Marah Sutan membuka kursus bahasa Indonesia untuk orang-orang Belanda di Gunung Shari. Namun tiu tidak banyak membantu mengatasi

³⁰ Majalah *Budaya Jaya*, No. 132 Tahun 1979. Dalam A.A. Navis, *Filsafat dan Strategi pendidikan M. Syafei Ruang Pendidikan INS Kayutanam*. Jakarta: Grasindo, 1996, 11

kesulitannya. Tidak jarang suami istri makan nasi dengan garam saja. Pendidikan cuma-cuma kepada penduduk sekitarnya tetap berjalan.³¹

Pengiriman Muhammad Syafei untuk melanjutkan sekolah ke Belanda baru terlaksana setelah Perang Dunia Pertama. Tanggal 31 Mei 1922 Muhammad Syafei berangkat ke Belanda. Sebelum berangkat ke Belanda Syafei sempat ditawari beberapa pekerjaan antara lain ditawari pekerjaan menjadi redaktur dari *Volkslecuur* (Yang kemudian bernama Balai Pustaka), namun ia menolak. Selanjutnya, ditawari lagi menjadi dosen bahasa Indonesia di Universitas Leiden dengan gaji 4.000 gulden setahun dan biaya transport ke Belanda pulang pergi.³² Demi cita-citanya untuk mendirikan sekolah semua tawaran tersebut ditolaknya.



Gambar 10
Motto Ruang Pendidik INS “Sedikit Bicara Banyak Kerja”
(Dokumentasi Galeri INS)

Muhammad Syafei banyak menimba ilmu pengetahuan di negeri Belanda, terutama yang menyangkut masalah pembangunan pendidikan, ia menilai strategi pendidikan yang tepat untuk bangsa adalah seperti yang berlaku di negara-negara yang merdeka, bukan seperti yang berlaku di negara jajahan. Strategi pendidikan yang berlaku di Belanda pasti berbeda jauh dengan yang diterapkan di tanah jajahannya. Pendidikan di Belanda telah menghasilkan bangsa yang jumlahnya sedikit tapi mampu menjajah bangsa Indonesia yang jumlahnya banyak dan terletak jauh dis seberang lautan. Pendidikan di tanah jajahannya

³¹ *Ibid.* hlm. 12

³² Majalah *Boedi Tjaniago*, Bukittinggi, No 4/1992

hanya menumbuhkan minat untuk sekedar “dapat makan” dari upah kerjanya, atau hanya “untuk menjadi budak nasi”.³³

Tujuan Muhammad Syafei untuk belajar ke Belanda ialah untuk mengetahui dinamika apa yang menyebabkan bangsa itu maju dan kuat, serta industri kerajinan apa yang menunjang kemajuan mereka. Muhammad Syafei juga meninjau sekolah yang didirikan Dr. Georg Kerchebsteiner di Munchen, Jerman, karena disekolah tersebut juga diajarkan pelajaran kerajinan tangan serta sistem sosial berdasarkan kecintaan terhadap sesama.

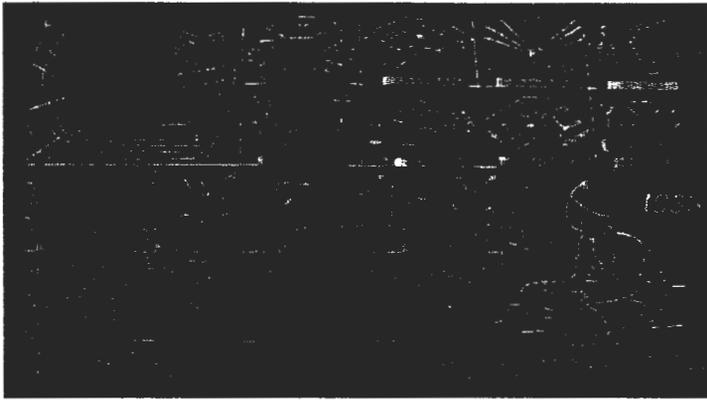
Menurut Muhammad Syafei, pelajaran kerajinan tangan dan pendidikan kerajinan tangan ada bedanya. Pelajaran kerajinan tangan dapat diberikan melalui kursus atau pelatihan, yang fungsinya untuk keterampilan tenaga kerja. Akan tetapi, pendidikan kerajinan tangan berfungsi untuk membangkitkan minat kerajinan dan kemauan bekerja. Untuk mencari sistem dan metode pendidikan yang demikian itulah ia datang ke Belanda untuk mempelajarinya dan dapat diterapkan kelak di Kayutanam.

Selama di Belanda, dia mengunjungi hampir seluruh sentral industri dan sekolah kerajinan untuk keperluan studinya. Untuk praktek pendidikan Muhammad Syafei mendapat izin mengajar pada sekolah rendah di *Mookoek, Rotterdam*. Pada waktu senggang, Muhammad Syafei dipergunakan untuk banyak menulis buku antara lain buku pelajaran membaca Arab dan Latin untuk sekolah rendah, semua buku itu kemudian diterbitkan oleh J.B. Wolters, Jakarta.³⁴

Pergaulannya dengan mahasiswa Indonesia yang ada di negeri Belanda seperti Muhammad Hatta, Sukiman, Subarjo, Monutu dan lain-lain, membuat ia semakin yakin bahwa Indonesia bisa lepas dari tangan penjajah. Setelah sering berdiskusi dengan Hatta dan tokoh lainnya, maka semuanya menemukan pandangan yang sama bahwa bangsa yang merdeka ialah bangsa yang terdidik sebagai bangsa yang merdeka, bukan hanya oleh semangatnya saja, tetapi juga oleh kadar intelektual dan kemampuan menjadi bangsa yang mandiri di bidang ekonomi. Ekonomi bangsa dapat ditegakkan apabila memiliki industri, dan industri hanya dapat dikelola oleh bangsa yang memiliki mental yang rajin, ulet, dan disiplin. Oleh karena itu setelah Hatta kembali dari Belanda ia membentuk partai Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Merdeka). Muhammad Syafei sendiri mendirikan Ruang Pendidik “*Indonessch Nederlandsche School*” (INS) di Kayutanam.

³³ Majalah *Budaya Jaya*. Op. Cit, hlm. 10

³⁴ Majalah *Sendi* No. 9 Tahun 1953



Gambar 11

Gambaran semangat bekerja yang ditanamkan pada murid INS
“Sehari selembar benang, lama-lama menjadi sehelai kain,
seperti jaring laba-laba” (*Dokumentasi Galeri INS*)

Dalam mendirikan INS Kayutanam, Muhammad Syafei berkeinginan untuk melahirkan anak-anak didik yang akhirnya mempunyai intelektualitas yang inovatif, kreatif, dinamis sepanjang hidupnya, mandiri, cerdas dan beretos kerja. Muhammad Syafei membina murid-murid untuk senantiasa kreatif di dalam mengembangkan bakat dan keilmuannya. Harapan Muhammad Syafei untuk murid-muridnya adalah agar mereka di tengah-tengah masyarakat dapat senantiasa memiliki gagasan dengan tidak pernah mengeluh serta dapat mencari solusi pada setiap kondisi yang ada. Dapat bekerja keras dengan kemudian berpikir yang logis, analisis, sistematis dan beretika serta senantiasa dapat bersyukur, sabar, jujur, dan ikhlas bermanfaat bagi sesama manusia.

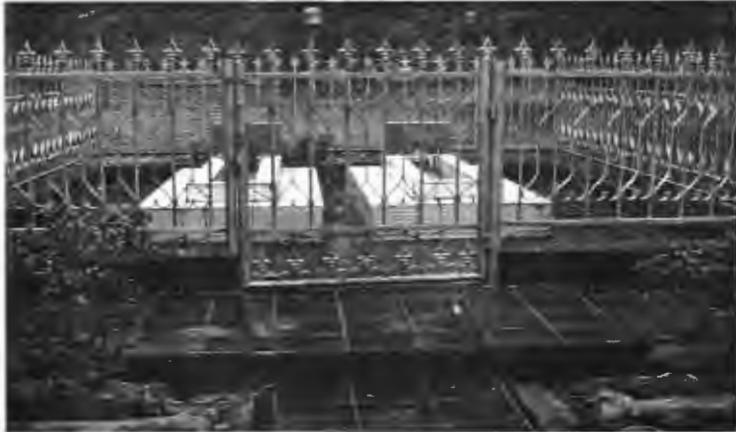
Dalam berbagai pertemuan dengan murid-muridnya Muhammad Syafei sering berucap antara lain “jadilah engkau jadi engkau”. Sekolah berfungsi mengasah kecerdasan akal budi murid, bukan membentuk manusia lain dari dirinya sendiri, ”jangan meminta buah mangga kepada pohon rambutan, tetapi jadikanlah setiap pohon menghasilkan buah yang manis”. Kebebasan berpikir, kemandirian untuk mencapai cita-cita oleh keinginan masing-masing murid sesuai dengan bakat dan kemauannya.

Gambaran cita-cita, semangat, ketangguhan mental, dan disiplin untuk terus mengabdikan pada keyakinannya terlukis pada suatu lukisan sederhana berupa bentuk “Jaringan laba-laba”. Laba-laba merentang jaring, selebar demi selebar sampai jaringan menjadi kokoh. Seperti kata pribahasa, *sehari selembar benang, lama-lama menjadi sehelai kain*. Ornamen laba-laba merentang jaring memperlihatkan kemerdekaan dan

kebebasan berfikir untuk mencapai cita-cita, keinginan untuk mengembangkan bakat dari kemampuan dan pribadi murid, yang kesemuanya itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa.



Gambar 12
Ruang Kreatifitas siswa di Gedung Bustanil Arifin INS
(Dokumentasi tim INS)



Gambar 13
Makam Muhammad Syafei
Berdampingan dengan makam Andung Chalidjah di kompleks INS
(Dokumentasi tim 2010)

Pengabdian dan perjuangan Muhammmad Syafei bukan hanya di bidang pendidikan saja, tetapi juga pernah menduduki jabatan penting di negeri ini antara lain: tahun 1946 ia diangkat menjadi P dan K dalam kabinet Syahril yang ke dua. Kemudian ia menjadi anggota Dewan

Pertimbangan Agung, dan pada tahun 1950 ia menjadi DPR sementara RI. Pada tahun 1968 ia memperoleh gelar Honoris Causa dari IKIP Padang karena jasanya dalam bidang pendidikan.

Muhammad Syafei meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1969 dalam usia 76 tahun. Meninggalkan istri, Johanna Sicrie, yang dinikahinya pada tanggal 31 Oktober 1954 serta tiga orang anak yang masih kecil. Jenazahnya di bawa ke Palabihan Kayutanam dan dimakamkan di tengah kampus INS dengan suatu upacara resmi. Makam beliau berdampingan dengan makam Andung Chalidjah.

C. DINAMIKA PERKEMBANGAN

1. Masa Pra Kemerdekaan

Sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu, bahwa Lembaga Pendidikan INS Kayutanam berdiri pada tanggal 31 Oktober 1926. Pada awal berdirinya bentuk pendidikannya sangat sederhana dengan perlengkapan belajar mengajar seadanya. Muhammad Syafei mendirikan Lembaga Pendidik INS hanya bermodalkan kerja keras dan tekad yang kuat. Respon masyarakat pada saat itu sangat meragukan dan mencemoohkan bahwa pendidikan itu tidak akan berlangsung lama.

Pada mulanya Lembaga Pendidik INS diselenggarakan di dalam sebuah kamar rumah sewaan tempat Muhammad Syafei beserta orang tuanya tinggal. Rumah tersebut terletak lebih kurang 500 meter dari stasiun Kereta Api Kayutanam. Tidak ada perlengkapan sama sekali, yang ada hanyalah sebuah buku, dan gurunya hanya Muhammad Syafei sendiri. Pada awal dibuka jumlah murid 75 orang, terbagi atas kelas : 1A dan 1B, dan belajarnya berganti hari. Kalau kelas 1A masuk hari Senin, hari Selasa mereka tinggal di rumah, pada hari itu kelas 1B yang belajar. Pada awalnya murid mengikuti pelajaran seperti orang mengaji di surau, duduk bersila di lantai, tiap-tiap satu pelajaran selesai, murid disuruh bersenam sebentar untuk melepaskan lelah.³⁵ Setahun kemudian dibuatlah sebuah bangunan di perkarangan rumah sewaan tersebut yang terbuat dari bambu dengan atap rumbia. Untuk proses belajar dibuat pula bangku dan meja dari lembaran papan ber kaki bambu yang ditanamkan ke tanah, namun tidak berapa lama setelah itu meja dan bangku sudah dibuat dari kayu lazimnya di pakai di sekolah, tetapi tenaga pengajarnya masih Muhammad Syafei sendirian.

Setelah belajar selama lebih kurang tiga tahun sekolah mengalami kemajuan, murid semakin bertambah, ruang belajar pun juga bertambah, namun masih tetap menggunakan bambu. Tidak berapa lama

³⁵ Majalah *Sendi*, No. 8. Tahun 1926

kemudian dapat menyewa sebidang tanah yang letaknya tidak berapa jauhnya dari tempat sekolah yang semula. Pembangunan sekolah yang baru ini semuanya dikerjakan oleh murid-murid bersama guru, karena murid sudah diajarkan bertukang, ada yang mengangkut batu dan pasir dari batang air, dan ada juga yang mengetam kayu.



Gambar 14
Guru bersama murid saat goro bersama
(Dokumentasi Galeri INS)

Berkat kesungguhan guru bersama murid-murid dan dibantu juga oleh masyarakat sekitar, maka dapatlah didirikan dua buah gedung dengan delapan ruang kelas, tapi masih beratap rumbia dan dinding papan juga berlantaikan tanah. Setelah dapat membangun delapan ruang kelas, maka murid-murid sudah dapat belajar dalam kelas yang memadai dengan menulis di atas meja yang terbuat dari kayu. Hari demi hari kegiatan belajar mengajar semakin lancar dan pekerjaan tangan murid-murid semakin membuahkan hasil. Begitu juga dengan murid semakin bertambah dan guru yang mengajarpun semakin bertambah jumlahnya.

Usaha perluasan pembangunan gedung terus dilakukan, hal itu dilakukan tetap dengan cara berdikari, dan tidak menerima bantuan dari pihak lain, apalagi dari pihak Belanda. Biaya pembangunan dicari dengan cara mengadakan berbagai pertunjukan sandiwara, pertandingan sepak bola, mengadakan pasar malam dan perlelangan barang-barang kerajinan tangan murid-murid sendiri.

Dalam membangun ruang pendidik INS tidak dilakukan dengan cara mencari-cari atau meminta-minta. Hal itu sudah menjadi dasar dari pendidikan INS, tidak meminta-minta hanya mesti mencari dengan

usaha dan tangan sendiri. Jika Muhammad Syafei mau menerima bantuan dari Belanda ketika itu mungkin akan bisa mendirikan gedung yang megah-megah, tapi hal itu tidak dilakukan oleh Muhammad Syafei. Pernah suatu ketika Belanda mau memberikan bantuan, tetapi Andang, Inyik Marah Sutan dan Muhammad Syafei berpendirian tidak menerima bantuan tersebut. Beliau berucap “Datangnya dari musuh yang dilahirkan berbentuk kawan”. Jadi kalau soal bantuan untuk pembangunan INS pada saat itu memang tidak pernah Muhammad Syafei meminta.-minta ke pemerintah, apalagi ke pemerintah Belanda.³⁶

Bagaimanapun kesulitan yang dialami oleh Muhammad Syafei dalam pengelolaan penyelenggaraan Ruang Pendidik INS, ia tetap dengan cara berdikari dalam hal pembiayaan pendidikan.³⁷ Pendapatan dari iuran uang sekolahpun tidak mencukupi saat itu. Muhammad Syafei banyak mendapat bantuan untuk segala pembiayaan dan pengembangan dari Marah Sutan dan Andung Chalidjah dengan emas simpanannya. Sehingga sepuluh tahun kemudian, di tahun 1933 INS sudah mempunyai bangunan seluas 2.525 meter. Sehingga semua tanah sewaan di Kayutanam telah habis dibangun.

Walaupun perkembangan pembangunan INS di tahun 1935 itu sudah cukup pesat, namun usaha untuk mencari tanah yang lebih luas dan memadai terus dilakukan. Akhirnya pada tahun 1935 dengan pertolongan Dokter Sofyan Rasat ketika bertugas di Kayutanam dapatlah dibeli sebidang tanah untuk kampus INS yang sekarang. Tanah tersebut seluas 16 Ha dan ditambah 2 Ha dari hibah masyarakat setempat. Tanah ini berada ditepi jalan raya Padang-Bukittinggi

Tahap demi tahap dimulailah pembangunan gedung sekolah di tanah milik sendiri di Pelabian Kayutanam, karena di tanah sewaan sudah terasa sempit, disamping itu jumlah murid semakin bertambah juga. Kegiatan pemindahan sekolah ini berlangsung selama lebih kurang tiga tahun. Pada tahu ke dua pemindahan sekolah telah berdiri beberapa sarana dan prasarana antara lain: tiga buah rumah guru, karena guru yang mengajar di INS Kayutanam harus di asramakan, satu buah asrama, satu buah ruang makan, satu buah ruang senam, satu buah

³⁶ Wawancara dengan Jamil Adam, tanggal 27 Maret 2010 di Kayutanam

³⁷ Pernah pada suatu ketika Syafei dipanggil oleh pembesar Belanda. Ketika Syafei bertemu dengan petinggi Belanda tersebut ia berkata kepada Syafei “Kami tahu engkau tidak mau menerima bantuan dari pihak bangsa Eropa. Kalau kas dari nagari-nagari untuk membangun sekolah engkau, bagaimana? Uang itu adalah uang bangsa engkau sendiri juga”. Muhammad Syafei menjawab “Saya mengucapkan terima kasih atas tawaran tuan, tapi karena datangnya tiba-tiba saya belu bisa mengambil keputusan”. Tuan Belanda itu tertawa, ia paham jawaban tersebut adalah suatu penolakan secara halus. Lihat Majalah *Sendi*, No. 8. Tahun 1926, hlm. 8.

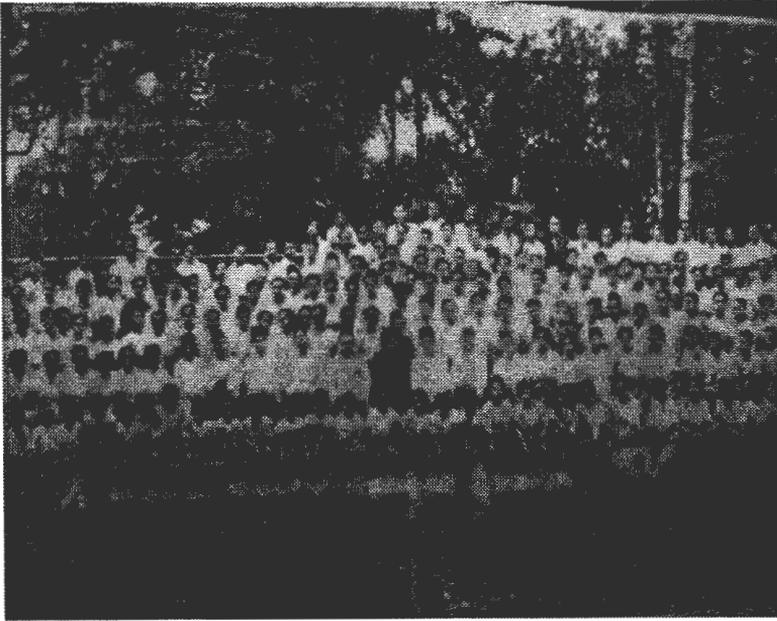
kolam renang, perpustakaan, kantor administrasi, kamar ganti pakaian di lapangan bola kaki. Pada tahun kedua kepindahan sekolah untuk keperluan pelajaran pekerjaan tangan, telah dibangun pula beberapa gedung antara lain, ruang untuk kegiatan kesenian, menggambar, ruang bertenun, poliklinik, ruang pertukangan kayu, ruang pekerjaan anyaman, ruang pekerjaan tanah liat, ruang pertukangan besi, tungku pembakaran bata dan keramik.³⁸



Gambar 15
Salah satu Grup Kesenian Murid INS
(Dokumentasi Galeri INS)

Pemindahan sekolah dan pembangunan gedung baru dilakukan dengan cara bergotong royong, baik murid maupun guru bekerja bersama-sama, ditambah lagi dengan masyarakat setempat yang juga ikut membantu. Pemindahan sekolah ini dipimpin langsung oleh Muhammad Syafei. Tahun 1939 seluruh kegiatan pemindahan dan pembagunan sekolah telah selesai dilaksanakan.

Pada masa itu sekolah INS terdiri dari dua tingkatan: bagian bawah sekolah rakyat dan lama pendidikannya 7 tahun yang disebut juga dengan Ruang Rendah. Bagian atas disebut juga dengan Ruang Dewasa lamanya 4 tahun atau 5 tahun. Mulai dari kelas 6 ruang rendah sampai dengan ruang dewasa belajarnya 2 kali sehari, pagi dan petang. Murid-murid ruang dewasa yang masuk dari tahun 1926, ketika pindah ke Pelabian mereka sudah besar-besar, merekalah yang menebas rumput membuat lapangan bola kaki di Pelabian.



Gambar 16
Marah Sutan dan Muhammad Syafei
di tengah-tengah murid-murid INS
(Dokumentasi Galeri INS)

Pada ulang tahunnya INS yang ke 10 di Pelabian, diadakanlah pertandingan sepak bola. Kesebelasan INS dimasa itu adalah kesebelasan yang terkuat di daerah Sumatera Barat dan belum pernah kalah berhadapan dengan kesebelasan yang datang dari luar Sumatera Barat seperti Aceh dan Jawa.³⁹ Pada tahun 1930 sekolah INS secara fisik mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik sarana dan prasarannya. Ruang Pendidik INS secara fisik telah siap dan secara konsep berkembang sebagai “sekolah kerja” yang bermutu dan menjadi salah satu sekolah swasta pribumi yang memiliki sarana dan prasarana yang paling lengkap diseluruh Sumatera Barat pada waktu itu. Dengan kondisi yang demikian, maka Muhammad Syafei sebagai pemilik sepakat dengan kedua orang tuanya Marah Sutan dan Andung Chalidjah untuk menafkahkan INS secara keseluruhan termasuk rumah yang mereka tempati kepada nusa dan bangsa Indonesia.⁴⁰

³⁹ Wawancara dengan Muslim Saleh, tanggal 29 Maret 2010 di Pariaman.

⁴⁰ Wawancara dengan Muslim Saleh, tanggal 29 Maret 2010 di Pariaman.



Gambar 17
Sebagian trofi masih tersimpan di Galeri INS
(*Dokumentasi Galeri INS*)

Akta Notaris Wakaf INS dibuat dimuka Notaris Raden Kardiman di Padang, dibuatkanlah penetapan wakaf tersebut dengan surat, selama Muhammad Syafei masih ada, beliaulah yang memimpin wakaf itu. Kemudian sepeninggalan Muhammad Syafei, panitia wakaf INS lah yang akan mengurus pekerjaan ini dan meneruskannya. Panitia wakaf terdiri dari: Ketua Mr. Abubakar Daar, Wakil Ketua dokter Rasidin Raden Kardiman, Abd Muluk, dokter Akam dan dokter Hakim.⁴¹



Gambar 18
Asrama putri tampak dari kejauhan saat ini
(*Dokumentasi tim 2010*)

⁴¹ Majalah *Sendi*, *Cp. Cit*, hlm. 18

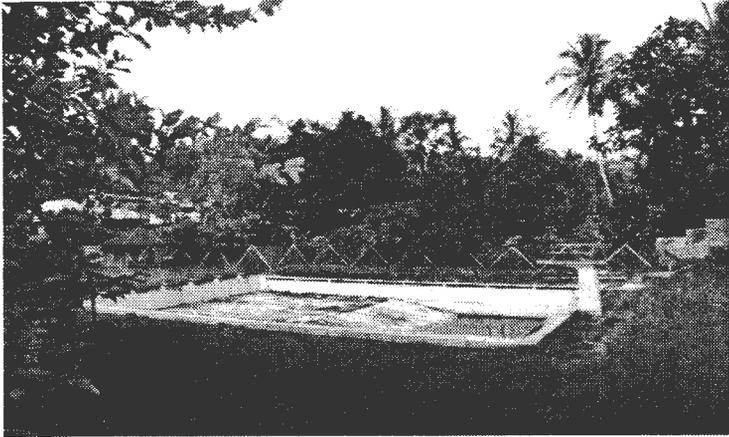
Pada saat diwakafkan INS telah memiliki sarana dan prasarana belajar yang paling lengkap, baik untuk keperluan pendidikan akademis, pendidikan keterampilan maupun sarana pendukung lainnya. Pada saat itu kampus INS telah memiliki 11 ruang kelas, 3 buah rumah guru, satu rumah peranganin, satu asrama berdaya tampung 300 orang, satu ruang makan dan restoran, satu ruang perpustakaan, satu kantor administrasi, poliklinik, satu lapangan tennis, satu kolam renang, satu ruang senam, dan kamar ganti pakaian di stadion lapangan bola kaki. Selain untuk keperluan pelajaran pekerjaan tangan telah memiliki pula ruang menggambar, atau melukis ruang bertenun, bertukang kayu, pertukangan besi, ruang pekerjaan tanah liat dan tungku pembakaran keramik.



Gambar 19
Studio Lukis (ruang tempat melukis)
bagi siswa INS (*Dokumentasi tim 2010*)

Semua kemajuan yang telah dicapai dilakukan secara gotong royong bersama-sama murid-murid, guru dan masyarakat sekitar. Tidak satupun kegiatan pembangunan menerima bantuan dari luar, apalagi dari pemerintah Belanda. Hampir seluruh biaya pembangunan berasal dari uang pribadi Engku Muhammad Syafei dan harta simpanan kedua orang tuanya. Pernah beberapa kali pihak pemerintah Belanda menawarkan bantuan dana, semuanya ditolak oleh Engku Muhammad Syafei secara halus, tanpa merusak hubungan baik. Penolakan ini sesuai dengan prinsip dasar yang dianut Ruang Pendidik INS untuk tidak mau menerima sokongan yang dapat mengurangi kebebasan untuk mencapai cita-cita, karena untuk mencapai hal tersebut harus dilakukan dengan usaha sendiri dan tenaga sendiri.⁴²

⁴² Wawancara dengan Jamil Adam, tanggal 30 Maret 2010 di Kayutanam



Gambar 20
Kolam renang INS saat ini
(Dokumentasi tim 2010)

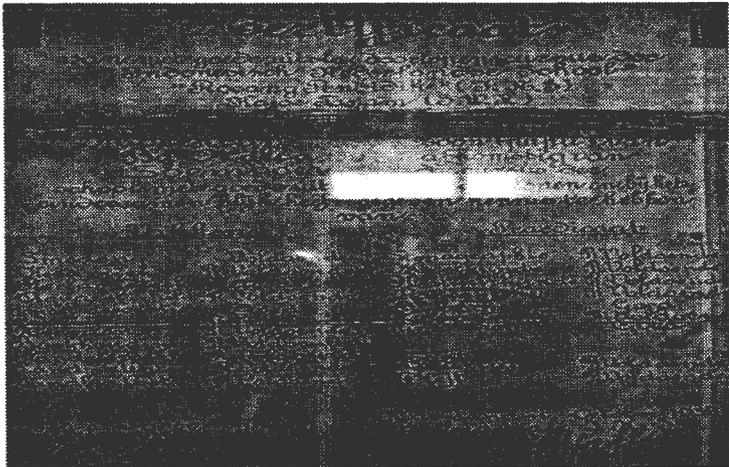
Dalam bidang penyelenggaraan Ruang pendidik, INS Kayutanam mencapai tingkat kemajuan yang sangat pesat. Saat itu jumlah murid INS telah mencapai 600 orang yang berasal dari seluruh Indonesia.⁴³ Proses belajar mengajar berlangsung sepanjang hari dari pagi sampai petang. Pelajaran teori diberikan pada pagi hari, sedangkan pekerjaan tangan pada siang hari. Kedua pelajaran ini dilengkapi pula dengan pendidikan kesenian dan olahraga pada sore dan malam hari. Begitu juga dengan pengadaan buku pelajaran dan bahan pengajaran keterampilan kerajinan tangan. Buku pelajaran disusun sendiri oleh Muhammad Syafei, sedangkan bahan pekerjaan keterampilan sebahagian besar diambil dari barang-barang yang sudah tersedia di dalam kampus. Jika bahan itu tidak ada di dalam kampus barulah dicari keluar oleh Muhammad Syafei.

Disamping kesenian dan olahraga ruang pendidik INS juga telah memperlihatkan prestasi yang cemerlang. Sejak tahun 1938 INS telah mampu menyelenggarakan Olympic Games pelajar-pelajar Sekolah Menengah se Sumatera Barat sebanyak tiga kali yang mempertandingkan berbagai cabang olahraga seperti : bola kaki, basket, atletik, dan lain-lain. Penyelenggaraan Olympic Games I pada tahun

⁴³ Kemasyhuran INS pada saat itu sudah terkenal ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan murid-muridnya ada yang dari Jawa, Aceh, Medan. Bahkan dari Nanga Pinuh Kalimantan Barat, yang memasukkan anaknya ke INS melalui perantara Marah Sutan. Marah Sutan pernah bertugas sebagai guru di Kabupaten Sambas yang terkenal dengan kerajinan Anyaman Tedung Saji, sebelum ia pindah ke Kayutanam. Lihat Majalah *Suara Bumi Putra*, terbit, 21 April 1939

1938 dibarengi pula dengan penyelenggaraan Jambore Pandu Muhammadiyah se Sumatera Barat, yang diikuti lebih kurang 5000 orang pemuda pelajar.

Di saat itu, ruang pendidik INS juga telah memiliki grup-grup kesenian, sandiwara dan grup tari. Grup-grup kesenian ini melakukan pertunjukan kesenian ke berbagai daerah di Sumatera Barat. Pertunjukan kesenian bertujuan untuk menghimpun dana bagi penyelenggaraan Ruang Pendidik INS, disamping bagian dari penyelenggaraan pendidik INS. Begitu juga dengan kegiatan pasar malam, murid-murid INS memamerkan lukisan dan kerajinan tangan yang hasilnya cukup memuaskan untuk penyelenggaraan ruang pendidik INS. Pada pasar malam tersebut dimanfaatkan untuk menjual kerajinan tangan murid-murid INS Kayutanam kepada para pengunjung.



Gambar 21
Bentuk Sertifikat yang diberikan
Pada murid setelah tamat dari INS di tahun 1938
(*Dokumentasi Galeri INS*)

2. Pendudukan Jepang

Semenjak kepindahan INS ke Palabian di Kayutanam tahun 1939 sampai masuknya tentara pendudukan Jepang tahun 1942, INS mengalami kemajuan baik dibidang fisik maupun di bidang pendidikan. Akan tetapi setelah Jepang menduduki negeri ini INS mengalami kemunduran yang sangat tajam di bidang pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, Ruang Pendidik INS Kayutanam tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Karena pada waktu kedatangan Jepang, INS dijadikan Belanda sebagai basis menghadapi Jepang, akibatnya banyak gedung INS yang rusak, kondisi itu yang

menyebabkan kegiatan pembelajaran terhenti.⁴⁴ Akibatnya sebagian dari murid INS yang berasal dari luar daerah Sumatera Barat kebanyakan dari mereka kembali kepada orangtua mereka, karena aktifitas belajar terhenti, namun hal itu tidak berlangsung lama karena kampus INS digunakan sebagai tempat pemuda berlatih seni militer atau *Senendan*.⁴⁵ Sebelum diadakan latihan militer di INS Kayutanam, saat Jepang baru masuk segala-galanya dikuasai Jepang, walaupun INS dibolehkan jalan terus, namun sudah mengalami kemunduran karena untuk mendapatkan alat-alat sudah sangat susah sekali dan sekolah juga terlalu banyak digunakan untuk gotong royong sehingga waktu belajar tinggal sedikit.

Walaupun kegiatan belajar mengajar terhenti di INS, namun INS lebih banyak bergerak ke arah perjuangan politik. Pada saat itu segala sesuatunya diatur oleh Jepang, maka Muhammad Syafei mengikuti permainan politik Jepang. Pada suatu ketika Bung Karno pernah berkunjung ke INS dan sebelum meninggalkan INS ia berbisik kepada Muhammad Syafei “Kita mesti bermain komedi sebanyak-banyaknya terhadap Jepang. Keadaan kita sangat sukar, kita akan di Jepangkan”.⁴⁶

Bung Karno mengajukan permohonan kepada pembesar-pembesar Jepang agar dibolehkan melatih pemuda-pemuda perjuangan atau melaksanakan latihan militer. Maksud dari permintaan itu adalah agar semua pemuda-pemuda di Sumatera Barat diperbolehkan menjadi lasykar dengan mendapat latihan ketentaraan. Permintaan tersebut dikabulkan Jepang dan pemuda-pemuda untuk menjadi pemimpin dilatih di Kayutanam dan mereka di asramakan di Ruang Pendidik INS tidak kurang dari 600 orang.⁴⁷



Gambar 22

Ketika Muhammad Hatta berkunjung ke INS di tahun 1950 an
(Dokumentasi Galeri INS)

⁴⁴ H. Mas'oe'd Abidin dkk. 2005. *Ensiklopedi Minangkabau*. Edisi Awal. Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM) Sumbar: Padang, hlm. 197.

⁴⁵ A.A. Navis, *Filsafat dan Strategi Pendidikan M. Syafei Ruang Pendidik INS Kayutanam*, Jakarta: PT Grasindo, 1996, hlm 63

⁴⁶ Majalah *Sendi*, *Op. Cit.* hlm.20

⁴⁷ *Ibid*

Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di INS Kayutanam pada masa pendudukan Jepang tak lain tujuannya adalah untuk membentuk layskar-layskar rakyat dan tentara pejuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia khususnya di Sumatera Barat. Oleh karena itu Muhammad Syafei selaku pimpinan INS Kayutanam meminta izin pada pembesar-pembesar Jepang untuk melatih para pemuda tersebut, karena pada saat Jepang sangat keras dan segala sesuatu yang berhubungan dengan gerakan politik tidak dibenarkan berdiri dan dibubarkan oleh Jepang.

Sebagai pengganti gerakan rakyat tersebut Jepang menciptakan tiga A : Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Namun gerakan yang diciptakan oleh Jepang tersebut tidak dapat sambutan dari rakyat, maka tak lama kemudian Jepang membubarkan gerakan itu dan menggantinya dengan "PUTERA" Pusat Tenaga Kerja, yang pimpinannya diambil dari orang yang dipercayai dan disegani oleh rakyat yaitu: Ir. Soekarno, Muhammad Hatta, Kh. Hajar Dewantara dan K.H.M. Mansur.

Setelah Jepang merasa kesulitan dan makin terjepit dalam perang Asia Timur Raya, maka pendekatan kepada rakyat semakin dipererat, rakyat diperbolehkan dan diberi kesempatan untuk duduk di pemerintahan. Oleh karena itu Jepang membentuk sebuah lembaga perwakilan dengan nama *Chuo Sangi Kai* sebagai ketuanya diangkat Muhammad Syafei, dan untuk perwakilan daerah juga dibentuk dengan nama *Chuo Sangi In*, yang untuk wilayah Sumatera di pimpin oleh Muhammad Syafei, sedangkan untuk wilayah Jawa dipimpin oleh Ir. Soekarno. Sebagai ketua *Cuo Sangi In*, Muhammad Syafei diberangkatkan ke Tokyo

Sementara itu kegiatan belajar di INS terhenti sama sekali, Ruang Pendidik INS Kayutanam terpaksa bergeser orientasi, disamping tempat melatih para pemuda, INS juga menjadi pusat gerakan politik nasional yang dilakukan secara terselubung dibawah kekuasaan militer Jepang. Disamping tempat penyelenggaraan pendidikan sebisanya Ruang Pendidik INS bertambah peran sebagai tempat pertemuan politik, baik pertemuan antar pejabat-pejabat tinggi militer Jepang dengan pemimpin pergerakan untuk membicarakan berbagai masalah tentang Sumatera, maupun pertemuan-pertemuan antar pemimpin pergerakan kebangsaan untuk membahas dan membicarakan segala upaya persiapan kearah kemerdekaan bangsa dan tanah air.

Pergeseran orientasi pendidikan di masa pendudukan Jepang ini, dipandang dari sisi kepentingan INS sangatlah merugikan, karena Ruang Pendidik INS tidak dapat berjalan dan berkembang sebagai mana mestinya. Penyelenggaraan dan pembangunan Ruang Pendidik INS tidak dilakukan secara baik. Akan tetapi dari kepentingan nasional

membawa keuntungan yang sangat besar, sebab keterlibatan INS di lapangan politik secara aktif telah membawa andil bagi perjuangan dan pencapaian kemerdekaan Indonesia.

Setelah rakyat mendengar tentang kekalahan Jepang pada perang Asia Timur Raya, maka keadaan seluruh Indonesia berubah dengan cepat. Pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, berita tentang kemerdekaan sangat susah untuk ditangkap akhirnya dapat juga diketahui oleh masyarakat Sumatera Barat melalui beberapa pemuda yang bekerja pada kantor Pos Telepon dan Telegram (PTT) ketika menerima monitoring berita "Domei" di Bukittinggi. Salinan teks proklamasi itu diserahkan kepada Adi Negoro dan Adi Negoro menyerahkannya kepada Muhammad Syafei yang ketika itu menjabat sebagai ketua *Chuo Sangi In Sumatera*.⁴⁸

Setelah menerima salinan teks proklamasi itu maka Muhammad Syafei mengadakan rapat kilat di rumah Dr. Rasyidin di Padang Panjang pada tanggal 19 Agustus 1945 yang dihadiri oleh Muhammad Syafei sendiri, Chatib Sulaiman, Mr. Nasrun, Suska, Yahya Jalil dan Dr. Rasyidin. Pada rapat tersebut diambil keputusan bahwa yang harus dilakukan pertama kali adalah menyebarluaskan teks proklamasi ke seluruh pulau Sumatera dan yang kedua segera melaksanakan pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang.⁴⁹

Pada tanggal 29 Agustus 1945 dilaksanakan pembacaan ulang teks Proklamasi di Sumatera Barat oleh Muhammad Syafei. Pada tanggal 31 Agustus 1945 dibentuklah Komite Nasional Indonesia untuk wilayah Sumatera Barat yang anggotanya terdiri dari mantan anggota *Cuo Sangi In*. jumlah anggotanya lebih kurang 41 orng dengan ketuanya Muhammad Syafei. Sesuai dengan hasil keputusan rapat maka selebaran-selebaran tentang pengesahan bangsa Indonesia di pulau Sumatera disebarkan ke seluruh wilayah dan ditanda tangani oleh Muhammad Syafei atas Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno Hatta. Para pemuda mendesak Muhammad Syafei melakukan pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang, maka Muhammad Syafei membicarakan permintaan pemuda tersebut kepada Jepang dan hal itu ditolak oleh Jepang. Akhirnya pemimpin Sumatera Barat mengambil jalan sendiri dengan tidak menghiraukan Jepang. Maka pada tanggal 1 Oktober 1945 Muhammad Syafei dilantik secara resmi menjadi Residen Sumatera Barat.⁵⁰

⁴⁸ A.A. Navis, *Op.Cit*, hlm. 37

⁴⁹ Muslim Ilyas, *Riwayat dan Perjuangan Aziz Chan*, Jakarta: PT Telaga Gunung, 1984, hlm. 29

⁵⁰ *Ibid*

Setelah Muhammad Syafei diangkat menjadi Residen maka rakyat Sumatera Barat menerimanya sebagai pemimpin. Namun saat itu Muhammad Syafei lebih banyak berada di Kayutanam dari pada di Padang, maka INS Kayutanam secara tidak langsung berubah menjadi sentral pemerintahan karena pejuang lebih sering datang ke Kayutanam untuk membicarakan masalah yang berhubungan dengan perjuangan.⁵¹ Muhammad Syafei merupakan orang yang lebih cenderung kepada pendidikan, maka beliau kurang mempunyai pengalaman dalam pemerintahan. Oleh karena itu Muhammad Syafei mengundurkan diri sebagai Residen Sumatera Barat pada tanggal 10 Desember 1945 dan digantikan oleh Roesat Dt. Parpatih Nan Baringek.⁵² Walaupun Muhammad Syafei telah mengundurkan diri dari Residen Sumatera, namun ia tetap membantu perjuangan dari lembaga pendidikannya. Suatu ketika Menteri Amir Syarifudin datang ke Sumatera Barat untuk mengurus Garis Demokrasi dan ia juga datang menemui Muhammad Syafei agar melakukan usaha untuk mempercepat *de jure* atau penakuan secara keseluruhan terhadap kedaulatan Indonesia melalui lembaga pendidikan INS Kayutanam.⁵³

3. Masa Revolusi Kemerdekaan

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Ruang Pendidik INS tidak serta merta dibuka kembali. Karena situasi dan kondisi saat itu tidak memungkinkan penyelenggaraan pendidikan, seluruh perhatian tercurah untuk menghadapi membela kemerdekaan yang baru saja diproklamlirkan.

Kendatipun kegiatan belajar dan mengajar tidak dapat dijalankan, namun INS menjadi pusat tempat berkumpulnya para pejuang. Segala daya dan upaya dikerahkan untuk menghadapi tentara Belanda yang membonceng di dalam tentara NICA dan sekutu, dapat dikatakan pada masa itu INS berubah menjadi pusat pergerakan kemerdekaan di Sumatera Barat. INS dijadikan pusat untuk membicarakan segala sesuatu untuk membela kemerdekaan.

Begitu juga Muhammad Syafei, walaupun aktifitas mengajar tidak mungkin dilakukan di INS, beliau aktif memimpin usaha pergerakan mempertahankan kemerdekaan. Suatu ketika menteri Pertahanan Amir Syarifudin datang mengunjungi Padang dan beliau

⁵¹ Abrar Yusra, *Otobiografi A.A. Navis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 24

⁵² Marah Joenoes, *Mr. H. St. Moh Rasjid, Perintis Kemerdekaan, Pejuang Tangguh, Berani dan Jujur*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001, hlm. 41

⁵³ *Sendi. Op. Cit.* hlm. 23.

mampir ke INS, Muhammad Syafei bertanya pada Amir Syarifudin "Apa yang harus dilakukan?". Amir Syarifudin menjawab "Lakukan segala upaya yang menaikkan nama Indonesia di luar negeri. Ini adalah jalan untuk mempercepat *de jure* kita atau pengakuan kemerdekaan di luar negeri."⁵⁴



Gambar 23
Salah satu grup kesenian murid-murid INS Kayutanam
(Dokumentasi Galeri INS)

Salah satu usaha yang dilakukan oleh Muhammad Syafei adalah dengan mendirikan Ruang Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan di Padang Panjang.⁵⁵ Untuk mendirikan gedung itu Muhammad Syafei mendapat surat hutang seharga dua juta rupiah. Pada saat itu barang-barang yang dibutuhkan sangat sulit didapatkan maka INS Kayutanam meminjamkan sebagian dari barang-barang milik INS kepada Ruang Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tersebut. Seperti: alat-alat sandiwara, kursi, meja, alat-alat tenun, alat-alat pembuat benang termasuk buku-buku diperpustakaan dan lain-lain.

Selain mengusahakan berdirinya Ruang Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Muhammad Syafei dan siswa INS Kayutanam juga mengusahakan untuk membuat senjata. Semua peralatan pertukangan besi di INS dibawa ke nagari Gunung di Padang Panjang, tidak kurang 50 orang murid yang dibawa kesana. Di nagari Gunung dibuka bengkel

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Gedung Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan di Padang Panjang yang didirikan Muhammad Syafei sebelumnya adalah Kantor Penyelidikan Jepang yang banyak menyimpan arsip dan tidak kurang dari 18 ribu buah buku dalam berbagai bahasa. Dengan seizin Gubernur Sumatera Kantor ini dialih fungsikan menjadi Gedung Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Padang Panjang.

untuk membuat senjata, senjata yang sudah siap dibuat dibagikan kepada penduduk kampung guna keperluan perjuangan. Bahan yang dijadikan pembuatan senjata itu adalah besi-besi rel kereta api.⁵⁶

Tidak beberapa lama Gedung Pendidikan Pengajaran dan kebudayaan sudah siap untuk dioperasikan, yang sebahagian besar peralatan diambil dari INS Kayutanam. Di Gedung Kebudayaan ini diselenggarakan berbagai aktifitas pendidikan dan budaya seperti perpustakaan, museum barang kesenian, sandratari, sandiwara rakyat dan berbagai bentuk kesenian lain.

Semenjak itu kalau ada rombongan yang datang dari Jawa atau luar negeri, selain dibawa ke INS Kayutanam, juga dibawa berkunjung ke Ruang Kebudayaan Padang Panjang. Ketika ibu Kota Sumatera telah pindah ke Bukittinggi banyak rombongan yang datang terutama pembesar-pembesar luar negeri untuk berkunjung dan bertemu Wakil Presiden. Hampir seluruh Negara, seperti: Amerika, Inggris, Perancis, Belgia, Australia, Tiongkok, India, Mesir dan lain-lain.⁵⁷ Setiap tamu yang datang dari Jawa atau luar negeri selalu dibawa ke Gedung Kebudayaan ini dan mereka disajikan berbagai-bagai pertunjukan kesenian ditampilkan oleh murid-murid INS dan murid-murid sekolah Normal Putera dan Putri Padang Panjang. Semua utusan merasa kagum dan heran, mereka sama sekali tidak menduga bahwa Indonesia kaya dengan budaya. Suatu kenyataan yang memberi bukti sudah sepantasnyalah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya.

Dalam waktu yang relativ singkat Gedung Kebudayaan ini telah menampakkan wujudnya. Kegiatan-kegiatan budaya yang diselenggarakan setahap demi setahap telah menaikkan citra Indonesia di mata dunia. Setiap tamu yang datang dari luar negeri selalu dibawa ke gedung kebudayaan ini, untuk diperlihatkan bahwa bangsa Indonesia memang bangsa yang berbudaya. Beberapa tamu dari luar negeri yang pernah berkunjung ke gedung Kebudayaan Padang Panjang ada yang mengirimkan surat ke gedung Kebudayaan Padang Panjang. Antara lain Wakil dari Amerika mengatakan dalam suratnya "Suatu waktu Ruang Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Padang Panjang akan memberi sumbangan yang berharga dalam kebudayaan kepada seluruh dunia".⁵⁸

Tidak beberapa lama kemudian bulan Juli 1947 Agresi Belanda I pecah, saat Belanda melakukan perjalanan dari Padang ke Bukittinggi untuk sementara dapat ditahan di Lubuk Alung. Sementara itu pasukan Republik yang pada penyerangan pertama menduduki Pasar Usang

⁵⁶ *Sendi, Ibid.* hlm. 26

⁵⁷ *Sendi, Ibid.* hlm. 28

⁵⁸ *Sendi, Ibid.* hlm. 29

ditarik mundur ke Kayutanam dan sebagian mereka ditempatkan di INS Kayutanam. Sehingga pada Agresi Belanda I INS Kayutanam menjadi tempat mengungsi dan markas tentara Republik Indonesia.

Walaupun keadaan Sumatera Barat kacau dan kayutanam sedang dalam masa kritis, namun pendidikan di INS masih tetap berjalan apa adanya. Karena kondisi yang tidak memungkinkan akhirnya Andung Chalidjah dan Muhammad Syafei mengungsi ke Padang Panjang. Sekali dalam satu bulan Muhammad Syafei turun ke Kayutanam untuk melihat-lihat keadaan sekolah yang masih berjalan seadanya.

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda memulai Agresinya yang ke II diawali dengan penyerangan di Front Utara. Pada saat itu tentara Republik telah bersiap siaga di perbatasan hingga akhirnya Belanda hanya dapat maju sampai di Sicincin. Tertahannya tentara Belanda di Sicincin karena kegigihan pemuda pejuang "Siaga Pasar Usang" yang sengaja memperlambat kemajuan tentara Belanda. Para pejuang Pasar Usang memotong jalan-jalan yang akan dilewati tentara Belanda dan menghalanginya dengan pohon-pohon besar, jembatan-jembatan dirusak, dan ranjau-ranjau darat dipasang disekitar jalan lintas Padang dan Bukittinggi.⁵⁹

Sebelum tentara sampai di Kayutanam, tentara Republik Indonesia bertanya kepada Muhammad Syafei tentang soal bumi hangus. Muhammad Syafei menjawab "Kalau memang perlu INS dibumi hanguskan, supaya jangan jatuh ke tangan Belanda saya merelakan".⁶⁰ Dengan seizin Muhammad Syafei, gedung INS dibumi hanguskan oleh tentara Republik Indonesia. Akhirnya kegiatan belajar mengajar terhenti sama sekali, karena sebagian besar gedung INS habis dibakar. Gedung INS dibumi dihanguskan sesuai dengan surat keterangan bumi hangus No 27/gog/12/SR-IV-B/52 dari kepala Staf Resimen IV Benteng dan Sub Teer IV Sumatera Barat dan Riau/I.I.S.U.dto Mayor Sjoeib. Tujuan pembumi hanguskan ini adalah untuk menghindari agar INS Kayutanam tidak dimanfaatkan oleh Belanda.⁶¹

⁵⁹ M.D. Mansoer, dkk, *Sejarah Minangkabau*. Jakarta; Bhatara, 1970, hlm. 254

⁶⁰ Konon menurut ceritanya, sebelumnya Andung Chalidjah telah meminta kepada Muhammad Syafei biarlah beliau ditinggalkan di INS. Nanti kalau Belanda masuk beliau juga akan ikut bersama Belanda membakar INS dan beliau bersedia hangus bersama INS. Demikian sedihnya Andung Chalidjah saat mendengar gedung INS akan dibumi hanguskan. Akhirnya Andung Chalidjah dipaksa oleh para pemuda untuk mengungsi ke gunung Padang Panjang. Di Gunung Padang Andung Chhalidjah mendapat kabar bahwa INS telah dibumi hanguskan.

⁶¹ Abdoel Hamid, *Menyelesaikan Bengkalai Cita-Cita Almarhum Engku Syafei*, Badan Wakaf Ruang Pendidikan INS Kayutanam, hlm. 13

Bentuk pengorbanan yang diberikan oleh Muhammad Syafei dalam menghadapi Agresi Belanda pada tahun 1948, adalah dalam bentuk persetujuan pembumi hanguskan Ruang Pendidikan INS Kayutanam. Jika kita lihat dari sudut strategis perjuangan jangka panjang pembumi hanguskan ini menimbulkan kerugian yang besar, karena meruntuhkan sebuah pilar pembangun bangsa. Tetapi dari strategi dan taktik berperang memberi kemenangan, karena kedudukan strategis INS tidak dapat dikuasai dan dimanfaatkan Belanda sebagai markas tentaranya.

Muhammad Syafei dan Andung Chalidjah mengikhlasan INS untuk dibumi hanguskan, tanpa mengharapkan sesuatu. Persetujuan diberikannya semata-mata untuk kepentingan bangsa. Walaupun sudah disadari sebelumnya bahwa suatu ketika INS akan hilang sama sekali, hal itu tidak mengoyahkan sikap teguh Andung Chalidjah dan Muhammad Syafei. Bagi mereka kepentingan nasional harus lebih diutamakan dari pada kepentingan sekelompok atau individu.

Masa revolusi kemerdekaan ini adalah merupakan masa yang sangat pahit bagi INS. Karena pada masa ini bukan hanya pendidikan yang dikorbankan, akan tetapi fisik dan Gedung INS yang dikorbankan dengan dibumi hanguskan, demi untuk membela kemerdekaan. Zaman revolusi ini menjadi zaman perjalanan penting dalam sejarah Ruang Pendidikan INS. Sekaligus zaman ini sebagai babak akhir dari masa gemilang dan awal masa keruntuhan Ruang Pendidikan INS Kayutanam.

4. Zaman Orde Lama

Masa setelah pemulihan kedaulatan Republik Indonesia, Ruang Pendidikan INS Kayutanam belum bisa berjalan sebagaimana mestinya, kondisi masih serba sulit, perekonomian belum berjalan lancar. Begitu juga dengan suhu politik pemerintah yang belum stabil, perhatian pemerintah lebih fokus pada usaha-usaha konsolidasi pemerintah. Pada saat itu berbagai pemberontakan terjadi, terutama di berbagai daerah. Pemerintah lebih memperhatikan gejolak di daerah dan berusaha untuk memadamkan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi.

Untuk membangun kembali Ruang Pendidik INS yang telah porakporanda oleh pembumi hangusan pada zaman revolusi fisik, memang belum bisa dilakukan. Hambatannya bukan hanya saja sulit untuk mencari dana, akan tetapi untuk terlaksananya aktifitas belajar mengajar yang belum memungkinkan saat itu. Kondisi yang serba sulit itulah yang menyebabkan INS belum bisa berjalan sebagaimana

mestinya. Akibatnya lama kelamaan perkarangan dan lingkungan sekolahpun sudah dipenuhi rumput-rumput hilalang.

Berdasarkan kondisi tersebut, untuk pembangun kembali Ruang Pendidik INS secara utuh belum dapat dilakukan. Untuk menghadapi kondisi dan situasi yang demikian, Muhammad Syafei merubah strategi pendidikannya. Strategi pendidikan yang diterapkan Muhammad Syafei disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu. Bentuk pendidikan yang diterapkan Muhammad Syafei adalah dalam bentuk kursus-kursus yang waktunya lebih singkat. Kursus yang dilaksanakan di Ruang Pendidik INS saat itu adalah: Kursus Guru Revolusioner, kursus Aplikasi Mata Pelajaran Ekspresi dan kursus SGB Istimewah.

Setelah kemerdekaan diakui oleh dunia, tanggal 28 Desember 1249 Bendera Merah Putih berkibar di seluruh pelosok tanah air. Pada saat itu Muhammad Syafei dan Andung Chalidjah yang sebelumnya berdarurat turun dari pengungsian dari Gunung Singgalang. Setelah turun dari pengungsian ia langsung menuju INS di Pelabian. Di INS, Muhammad Syafei dan Andung Chalidjah sudah ditunggu oleh ratusan mantan muridnya. Bersama mantan muridnya Andung Chalidjah dan Muhammad Syafei kembali membersihkan dengan secara bergotong royong yang dibantu oleh masyarakat sekitar, karena pada saat itu perkarangan INS sudah kembali rimbah seperti pertama kali dibangun dulu.

Tidak berapa lama kemudian tepatnya bulan Mei 1950 dibuka kursus Guru Revolusioner Indonesia (GRI) dengan murid 46 orang, 30 orang putera dan 16 orang puteri, mereka belajar di sisa-sisa bangunan yang ada, gurunya sebagian diambil dari mantan guru INS. Kursus ini adalah kursus lanjutan yang pernah dilakukan pada awal kemerdekaan, namun pelaksanaannya terhenti karena datang Agresi Belanda.

Bulan Oktober 1952 dibuka SGB Istimewa.⁶² di Ruang Pendidik INS Kayutanam. Gagasan untuk mendirikan SGB Istimewa sebetulnya adalah dari Menteri PDK Dr. Bahder Johan yang terkesan melihat kursus Guru Revolusioner yang dipimpin langsung oleh Muhammad Syafei. Untuk pelaksanaan gagasan tersebut Menteri Bahder Johan memberi bantuan dana sebesar 150 juta yang dapat membangun beberapa ruang sekolah. Seluruh fasilitas dan penyelenggaraan SGB Istimewa dibiayai

⁶² Keistimewaan Sekolah Guru B Istimewah ini, yaitu murid-muridnya berasal dari murid-murid pilihan dari seluruh Indonesia. Pelajaran yang diberikan pada mereka adalah pelajaran musik, menggambar, kerajinan tangan dan Bahasa Indonesia. Bobotnya lebih banyak diberikan dari pada guru biasa. Diharapkan kepada mereka supaya dapat menularkan ilmu yang ia dapat kepada teman-temannya sesama di daerah masing-masing.

oleh pemerintah. Kepala sekolah berstatus pegawai negeri, sebagian guru diambilkan dari alumni INS.

Sejalan dengan penyelenggaraan SGB Istimewa, di INS dilaksanakan pula aplikasi kursus dalam mata pelajaran ekspresi. Kursus bagi guru-guru dan kepala Sekolah dasar yang didatangkan secara berkala dari seluruh Indonesia. Kursusnya berlangsung selama tiga bulan per angkatan. Tujuan dari kursus aplikasi ekspresi ini adalah untuk mencetak guru-guru pelajaran ekspresi di tingkat Sekolah Dasar. Sebetulnya kedua jenis kursus ini adalah bentuk lin dari pelaksanaan Ruang Pendidik INS oleh Muhammad Syafei, yang sesungguhnya sebetulnya sama dengan tujuan Ruang Pendidik INS yaitu: kreatifitas, pengembangan ilmu atau bakat, potensi diri, kemandirian dan etos kerja.⁶³ Murid-murid sama-sama diajar berdikari dan tidak tergantung kepada orang lain.

Ketika pecah peristiwa PRRI yang disusul penangkapan rehadap tokoh-tokoh pemimpinnya, Ruang Pendidik INS kembali menjadi sasaran, aktifitas di Ruang Pendidik INS kembali terhenti. Muhammad Syafei pada masa PRRI berusaha bersikap netral, tetapi situasi dan kondisi suhu politik di Sumatra Barat tidak memungkinkan untuk bersifat netral. Muhammad Syafei yang pada saat itu ketua Badan Aksi Keutuhan Republik Indonesia (BAKRI) telah berusaha menetralsisir pertentangan daerah dengan pusat tersebut, tetapi pemerintah pusat bersikeras, maka kemudian meletuslah PRRI di Sumatera Barat khususnya.

Ketika teman-temannya bergabung dengan PRRI untuk menentang kekuasaan pemerintah pusat. Muhammad Syafei tidak punya pilihan lain, dan ikut bergabung dengan PRRI dan diangkat dalam jabatan Menteri PPK pada Kabinet PRRI.⁶⁴ Karena Muhammad Syafei yakin dengan kebenaran perjuangan PRRI dan sejalan dengan prinsipnya yang anti komunitas. Namun ada faktor lain yang mendorong ikut bergabung dengan PRRI, yaitu pandangan politik yang menentang sentralisme kekuasaan yang kian menguat berkat dukungan komunitas diparlemen. Hal lain yang mendorong ia bergabung dengan PRRI ialah jaminan dari pimpinan militer bahwa aksi-aksi mereka bukan untuk berperang melawan Presiden Soekarno, tetapi hanya sebagai bentuk protes kepada pemerintah pusat. Sementara itu kampus dijarah dan

⁶³ Wawancara dengan Bajuri tanggal 3 April 2010 di Palabian Kayutanam. Bajuri adalah mantan murid SGB Istimewa tahun 1957. Ia adalah utusan dari Provinsi Jambi. Setelah tamat dari SGB Istimewa Bajuri tidak lagi pulang ke Jambi ia menikah dengan gadis Palabian Kayutanam.

⁶⁴ A. A. Navis, *Op. Cit.* hlm. 47

seluruh gedung dihancurkan oleh tangan-tangan oknum PKI, sehingga seluruh aktifitas belajar lumpuh tidak berjalan.

Situasi ini semakin parah ketika Presiden Soekarno menjalankan Demokrasi Terpimpin dan politik Nasakomnya, yang akhirnya berujung kepada pemberontakan G30 SPKI. Akibat pengaruh situasi politik yang demikian Ruang Pendidik INS menjadi lumpuh selama lebih kurang 10 tahun lamanya. Pergolakan demi pergolakan tidak hanya membawa Ruang Pendidik INS kepada kehancuran, akan tetapi telah berdampak pada psikologis dan politis yang sangat berat bagi kelanjutan Ruang Pendidik INS Kayutanam.

5. Zaman Orde Baru

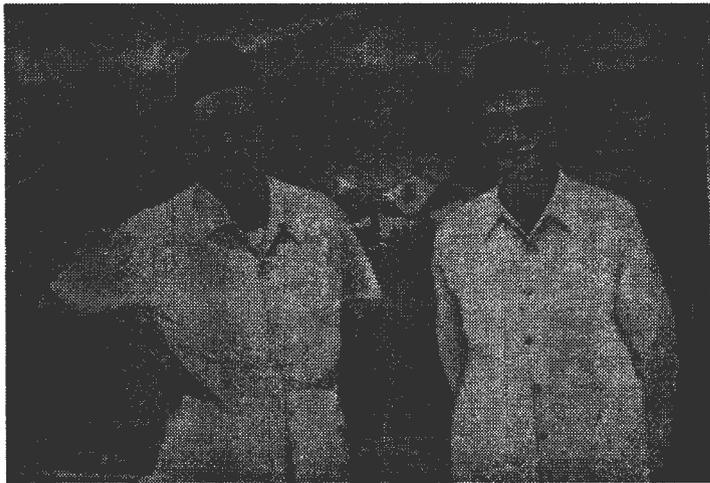
Setelah pergantian pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru, tahun 1967 Muhammad Syafei memulai kembali membangun INS. Pergantian Orde Lama ke Orde Baru telah membawa perubahan situasi dan kondisi terhadap kehidupan bernegara. Krisis-krisis politik yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan inkonstitusional yang mencapai puncaknya pada saat meletusnya G 30 S/PKI pada tahun 1965. Gerakan ini ditumpas oleh ABRI bersama rakyat dan lahirlah Orde Baru. Kabinet Ampera dibentuk dan pimpinan oleh Jenderal Soeharto.⁶⁵ Pemerintah Orde Baru mulai menciptakan kondisi politik yang bisa memungkinkan untuk melaksanakan pembangunan. Iklim segar yang diciptakan oleh Orde Baru ini telah menimbulkan gairah baru bagi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan.

Kondisi yang diciptakan oleh Orde Baru ini, memberi kesempatan untuk kembali membangun Ruang Pendidik INS. Atas permintaan masyarakat dan dorongan dari Menteri P dan K, Dr. Sarino Mangoenpranoto, maka pada tahun 1967 Ruang Pendidik INS dihidupkan kembali. Pembangunan dilaksanakan secara bersama-sama, turun membersihkan perkarangan Ruang Pendidik INS yang telah menjadi rimba kembali. Hampir seluruh penduduk Kayutanam datang bergotong royong bergantian setiap hari. Akhirnya dua ruang belajar berdinding papan beratap seng dan berlantai semen telah siap untuk dimanfaatkan, mulailah murid-murid belajar. Pada umumnya murid berasal dari sekitar Kayutanam sendiri. Tenaga pengajar bekas murid INS yang berasal dari nagari sekitar. Pada awal pendirian kembali Ruang Pendidik INS pada awal zaman Orde Baru, gurunya diambil dari bekas murid disekitar Kayutanam ini, mereka hampir tidak mendapatkan

⁶⁵ Suardi Hp, dkk, *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Sejarah dan nilai Tradisional. Jakarta: 1986, hlm. 153.

gaji, yang penting bagi mereka adalah INS dapat hidup kembali. Berikut penuturan Jamil Adam “Saya masih ingat pada saat itu seluruh masyarakat di Kayutanam ini ikut bergotong-royong, karena perkarangan INS pada saat itu sudah rimba dan sudah banyak ditumbuhi pohon-pohon kecil. Besar kecil semua orang bekerja, ada yang mengangkat batu dari sugai, ada yang mengetam papan, ada yang membuat bangku dan meja karena bekas murid-murid INS punya keterampilan semua, jadi untuk mendirikan gedung sekolah itu tidak masalah, tinggal kita mencari bahan bakunya seperti semen, seng dan paku.⁶⁶ Demikian Jamil Adam mengungkapkan.

Pada awal Orde Baru itu INS banyak dikunjungi oleh pejabat-pejabat baik dari pusat maupun pejabat dari daerah Sumatera Barat. Tepat pada tanggal 31 Oktober 1968, INS merayakan hari jadinya yang ke 42 tahun. Hampir seluruh pejabat pemerintah sipil dan militer datang meriahkan seperti Gubernur Harun Zain, Rektor Unand Busra Zahir, Rektor IKIP (sekarang menjadi UNP) Isjrin Nurdin, ketua DPRD Letkol Imam Suparto.⁶⁷ Kunjungan pejabat itu mendapat sambutan hangat dari masyarakat sekitar yang beramai-ramai hadir dan secara tidak langsung memberi dorongan dan kepercayaan pada masyarakat untuk memasukan anaknya ke perguruan tersebut.



Gambar 24
Muhammad Syafei dan A. Hamid
(*Dokumentasi tim, 2010*)

Secara bertahap pembangunan Ruang Pendidik INS dibangun kembali. Untuk meminta bantuan kepada Departemen P dan K memang

⁶⁶ Wawancara dengan Jamil Adam, tanggal 4 April 2010, di Kayutanam

⁶⁷ Wawancara dengan Jamil Adam, tanggal 4 April 2010 di Kayutanam

agak sulit bagi Muhammad Syafei, karena kondisi anti PRRI masih belum bisa dihilangkan begitu saja saat itu. Namun hubungan pribadinya dengan beberapa orang Belanda memungkinkan untuk memperoleh bantuan dana dari NOVIB. Dalam suasana yang demikian Muhammad Syafei berpulang kerahmatullah, pada tanggal 5 Maret 1969 di Jakarta. Sebelum ia meninggal ia sempat menanda tangani surat perjanjian bantuan rehabilitasi Ruang Pendidik INS Kayutanam dengan pihak NOVIB dan Belanda. Muhammad Syafei memberikan amanah kepada A. Hamid untuk memimpin Badan Wakaf INS Kayutanam.

Sampai pada akhir tahun 1970 an, dana pembangunan Ruang Pendidik INS sebagian besar bersifat swadaya, maka pergerakan pembangunan pada tahun-tahun pertama lancar. Namun hasil yang didapat belum memadai, sehingga penyelenggaraan pendidikan yang diharapkan belum berjalan sebagaimana mestinya. Tahun 1973, bantuan NOVIB yang dirintis Muhammad Syafei diterima sejumlah Rp. 300 juta rupiah. Bantuan diberikan dalam bentuk kerjasama dengan sistem *cofinancing* untuk pembangunan fasilitas sekolah, dimana pihak INS harus menyediakan nilai fisik yang sama.⁶⁸ Dari dana bantuan NOVIB ini dibangunlah beberapa ruang INS antara lain: empat rumah permanen untuk ruang bengkel kerja keterampilan, satu ruang untuk pertukangan kayu dan satu ruang untuk pertukangan besi, satu ruang untuk keterampilan tanah liat dan keramik, satu buah Mushallah dan satu rumah tempat tinggal.

Di akhir tahun 1974, bantuan NOVIB Belanda terhenti, maka kegiatan rehabilitasi Ruang Pendidik INS tidak dapat dilanjutkan. Terhentinya bantuan NOVIB karena ada masalah dalam pelaksanaan kerjasama perjanjian dengan INS. Pihak NOVIB Belanda mengirimkan komisi pencari fakta ke Indonesia. Setelah komisi pencari fakta NOVIB tersebut datang melihat dan meneliti sendiri keadaannya di lapangan, maka terbukti timbulnya masalah disebabkan semata-mata akibat kesalah pahaman dalam pendaya gunaan dana bantuan NOVIB. Timbulnya masalah kesalah pahaman penggunaan dana tersebut, akibatnya adanya laporan-laporan yang tidak benar dari pihak-pihak atau orang-orang yang tidak menyukai INS, atau bisa jadi orang-orang yang tidak menyukai kepemimpinan Ruang Pendidik INS itu sendiri.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 68

⁶⁹ Wawancara dengan Bajuri, tanggal 4 april 2010 di Kayutanam



Salah Satu Ruang Praktek Kerajinan
(*Dokumentasi, tim 2010*)

Karena tidak ditemukannya penyimpangan dalam dana bantuan NOVIB, maka tahun 1978 pihak Belanda kembali melanjutkan perjanjian kerjasama INS dan NOVIB. Dalam melanjutkan kerjasama ini pihak NOVIB memberikan bantuan untuk rehabilitasi Ruang Pendidik INS dalam kurs rupa lama sebesar Rp. 350 juta rupiah.⁷⁰ Seluruh dana tersebut telah digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana Ruang Pendidik INS antara lain: 6 buah rumah guru, 2 ruang workshop, 3 unit asrama, 1 rumah tamu, 1 ruang makan dan dapur, pembelian peralatan teknik mesin dan kayu, pembuatan instansi air dan listrik, pembuatan jalan dan gang, dan pembelian perabot rumah guru dan kantor.

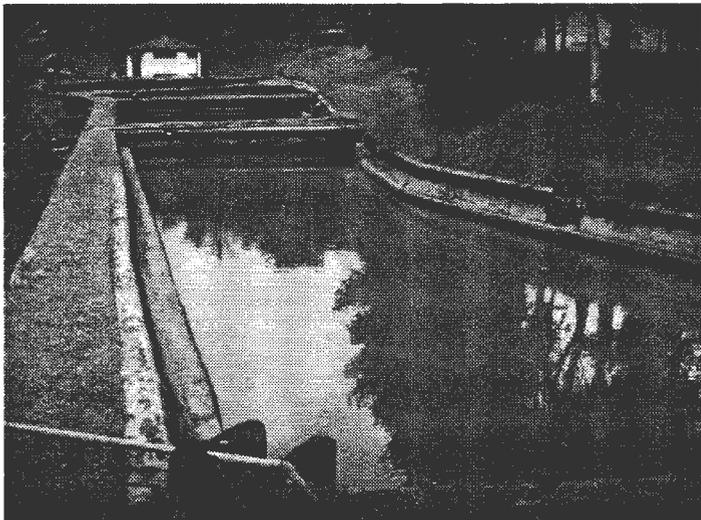


Gambar 26
Kantor Utama INS (*Dokumentasi tim 2010*)

⁷⁰ Wawancara dengan Jamil Adam, tanggal 29 Maret 2010 di Kayutanam

Dalam dekade lebih kurang 10 tahun dari tahun 1973 sampai tahun 1985 bantuan demi bantuan berdatangan untuk rehabilitasi pembangunan Ruang Pendidik INS. Pada tahun 1978 selain bantuan dari NOVIB Belanda datang lagi bantuan Presiden Republik Indonesia sebesar Rp. 25.000.000, bantuan ini dipergunakan untuk rehabilitasi ruang-ruang yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidik INS, kemudian ditambah lagi untuk pembangunan seperti pembuatan pagar, sarana pendidikan perikanan, pertanian, dan peternakan.

Selain mendapat bantuan tetap dari Pemda Sumatera Barat, Ruang Pendidik INS juga mendapat bantuan rutin bulanan sebesar Rp. 750.000 dari Badan Logistik Republik Indonesia. Bantuan rutin bulanan ini lebih banyak dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin pendidikan seperti pembelian alat-alat kantor, atau untuk membayar gaji guru-guru honorer.



Gambar 27
Kolam Sarana Pendidikan Perikanan
(Dokumentasi tim 2010)

Pada periode kepemimpinan A. Hamid, secara fisik INS berkembang dengan pesat. Seluruh sumbangan yang didapat, baik sumbangan dari dana masyarakat, bantuan Presiden, bantuan Bulog dan bantuan dari NOVIB. Secara fisik Ruang Pendidik INS telah menampakkan wujudnya kembali seperti sebelum perang kemerdekaan. Prasarana dan sarana fisik, berupa ruang pendidikan akademis dan pendidikan keterampilan sudah hampir lengkap dimiliki. Artinya secara fisik seharusnya INS telah dapat mengangkat eksistensinya sebagai suatu model sekolah kerja, yang mampu menghasilkan tenaga-tenaga

skil terampil tingkat menengah di tanah air. Akan tetapi dalam perjalanannya tidak seperti yang diharapkan.

Sejak dibuka kembali pada pertengahan 1967 sampai dengan terbentuknya lembaga pembangunan INS pada bulan April 1985, penyelenggara kegiatan pendidikan INS tidak berjalan dan berkembang sepesat pembangunan fisik yang telah dilakukan. Pembangunan fisik ternyata lebih mudah dilaksanakan, walaupun disana sini ditemui juga beberapa hambatan yang berarti. Akan tetapi pembangunan kegiatan pendidikan ternyata lebih sulit untuk terwujud. Tersendatnya penyelenggara pendidikan lebih terasa setelah ditinggal Muhammad Syafei.

Diantaranya masalah pokok yang ditemui, selain masalah pembiayaan pendidikan, adalah masih kabur dan tidak ditemukan pengelola Ruang Pendidik INS yang mampu memahami dan menjabarkan gagasan pendidikan yang dicita-citakan Muhammad Syafei kedalam bentuk-bentuk penyelenggaraan atau operasional dilapangan. Sebagaimana salah seorang mantan murid INS menyatakan “Tidak berkembang Ruang Pendidik INS Kayutanam, karena konsep pendidikan yang diterapkan tidak lagi sesuai dengan konsep pendidikan yang dicita-citakan oleh Engku Muhammad Syafei. Semanjak beliau meninggal susah untuk mencari orang yang paham dengan cita-cita Ruang pendidik INS, pada masa kemundurannya itu banyak murid yang *drop out*.⁷¹

Selain persoalan tersebut, Muhammad Syafei juga tidak meninggalkan gagasan pendidikannya dalam bentuk operasional konsep yang tertulis lengkap, tetapi lebih banyak menunjukkan melalui praktek pendidikan yang dilakukan, baik yang dilakukan pada zaman Belanda, maupun dalam tahun-tahun pertama pembangunan kembali Ruang Pendidik INS di awal zaman Orde Baru. Pada akhirnya mengakibatkan usaha pembangunan kembali Ruang pendidik INS tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian dapat dikatakan penyelenggaraan pendidikan INS setelah ditinggal almarhum Muhammad Syafei berjalan tanpa konsep operasional yang jelas. Sehingga kegiatan penyelenggaraan pendidikan INS lebih banyak dipengaruhi perkembangan situasi dan pendidikan yang terjadi di luar INS.

Situasi ini diperparah ketika bantuan NOVIB tidak lagi mengalir ke INS dan tidak pastinya pemasukan dana dari sumber-sumber lain, mulai mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Dana tetap yang berasal dari Pemerintah Daerah tidak mencukupi untuk operasional penyelenggaraan pendidikan seperti: pembayaran honor

⁷¹ Wawancara dengan Abuzar Burhan, tanggal 5 April 2010 di Kayutanam

guru, pembelian bahan-bahan pengajaran keterampilan dan biaya pemeliharaan lain.

Operasional pendidikan INS di tengah-tengah krisis keuangan mengalami beberapa esulitan. Pada tahun 1977 Pengurus Badan Wakaf Ruang Pendidik INS mengambil kebijaksanaan baru yang kemudian menimbulkan kontroversial dikalangan pengurus. Kebijaksanaan yang diambil oleh pengurus Badan Wakaf adalah dengan mendaftarkan Ruang Pendidik INS Kayutanam ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Bila Ruang pendidik INS telah terdaftar di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan sendirinya akan mendapat bantuan layaknya seperti sekolah-sekolah lainnya di Sumatera Barat.

Kebijakan ini sebetulnya sangat pahit bagi pengurus Badan Wakaf Ruang Pendidik INS, karena semasa dipimpin Muhammad Syafei langkah ini tidak pernah terpikirkan walaupun memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukannya. Hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip pokok INS untuk bersikap mandiri dan tidak menggantungkan diri kepada pihak-pihak lain yang akan mempengaruhi kebebasan INS untuk mencapai cita-citanya.

Mulai tahun ajaran 1977/1978 Ruang Pendidik INS secara resmi memakai kurikulum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Namun perubahan strategis pendidikan ini akhirnya tidak menjawab dan menyelesaikan persoalan. Bahkan perkembangan yang ada memperlihatkan kegiatan pendidikan semakin merosot, walaupun bantuan untuk operasional pendidikan mengalir dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Jumlah murid yang masuk dari tahun ke tahun semakin merosot, begitu juga dengan jumlah murid yang *drop out* semakin tinggi. Pada tahun ajaran 1984/ 1985 jumlah murid yang masuk untuk tingkat SMP hanya sebanyak 7 orang dan untuk tingkat SMA 12 orang. Jumlah murid untuk tingkat SMP dan SMA semuanya hanya berjumlah 73 orang.⁷² Semenjak diperkenalkannya kurikulum Depdikbud untuk bidang pengajaran akademik pada tahun 1977, perkembangan pendidikan INS dari tahun ketahun semakin menurun. Animo masyarakat untuk memasukan anaknya ke INS semakin berkurang. Mereka menilai bahwa pendidikan INS tidak banyak bedanya dengan Sekolah Menengah Umum Negeri, yang sudah hampir ada di setiap kecamatan pada saat itu.

Untuk menjawab persoalan kemerosotan pendidikan INS, para pengelola Ruang Pendidik INS telah melakukan beberapa usaha dan

⁷² Data diolah dari Buku Induk Siswa INS tahun ajaran 1984/1985.

kebijaksanaan pendidikan. Antara lain Badan Wakaf membentuk panitia khusus yang tugasnya membuat konsep yang ideal, sistem dan metode Ruang Pendidik INS Kayutanam. Panitia khusus ini terbentuk dalam musyawarah alumni pada tahun 1979 di Padang. Dalam musyawarah tersebut, terpilih tiga orang panitia khusus yaitu: Syamsul Bahar, Rosma Kundur dan Jermias. Sutan Bagindo. Ketiga orang ini ditugaskan untuk merumuskan konsep ideal dan metode Ruang Pendidik INS untuk kedepannya yang akan dijadikan pegangan bagi pengurus dalam mengelola Ruang Pendidik INS Kayutanam.⁷³

Setelah ketiga orang ini berkerja merumuskan konsep ideal dan metode Ruang Pendidik INS maka hasil rumusan konsep tersebut diseminarkan dalam beberapa kali dengan pengurus Badan Wakaf INS. Namun hasil yang dicapai panitia khusus ini ternyata lebih bersifat rumusan langkah-langkah kebijaksanaan operasional penyelenggaraan pendidikan INS dan panitia juga mengabaikan konsep dan sistem pendidikan Syafei. Pada hal yang dibutuhkan adalah suatu konsep ilmiah tentang sistem dan metode pendidikan Ruang Pendidik INS. Ketika hasil kerja panitia ini diterapkan di Ruang Pendidik INS ternyata tidak banyak memberi jawaban dan penyelesaian yang berarti dalam mengatasi masalah yang dihadapi INS.

Krisis kepemimpinan di Ruang Pendidik INS, sebetulnya sudah dirasakan semenjak A. Hamid meninggal dunia. INS kehilangan kepemimpinan Yayasan dan pimpinan sekolah, karena baik zaman Muhammad Syafei maupun A. Hamid, pimpinan Yayasan dan pimpinan sekolah dipegang oleh satu orang. Sehingga setelah A. Hamid meninggal dunia tidak satupun diantara alumni yang menawarkan diri atau yang dianggap mampu menjabat kedua jabatan sekaligus.

Salah satu jalan yang ditempuh oleh Badan Wakaf untuk masalah tersebut adalah pengurus Badan Wakaf meminta Rektor IKIP Padang mencarikan salah seorang untuk memimpin INS. Pengurus menemukan Prof. Dr. Dachnel Kamars. Konsep Dachel Kamars dibicarakan pada suatu rapat yang dihadiri oleh antara lain: Dr. M. Ansjar (Rektor IKIP Padang), Prof. Fachri Ahmad (Rektor Universitas Andalas), Prof. Dr. Sjofoyan Asnawi (Rektor Universitas Bung Hatta), Dr. Jazir Burhan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat) dan Drs. Miswar (Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat), serta beberapa orang alumni INS. Dalam rapat tersebut tidak satupun peserta rapat yang setuju andaikan INS akan kehilangan cirinya. Peserta rapat sependapat bahwa ciri pendidikan INS justru menjadi asset nasional di Sumatera Barat yang harus

⁷³ Wawancara dengan Jamil Adam, tanggal 27Maret 2010 di Kayutanam

dipertahankan. Kalau INS akan diarahkan kepada sekolah unggul semacam Taruna Nusantara, lebih baik dipilih salah satu sekolah negeri di satu kota di Sumatera Barat yang pantas sebagai pelaksana program alternatif pendidikan.⁷⁴ Prof. Dr. Dachnel Kamars memprogramkan INS seperti SMA Taruna Nusantara, agar murid INS mampu melanjutkan studi ke perguruan tinggi paling terkemuka dan mengabaikan konsep dan sistem pendidikan Muhammad Syafei.

Menurut Navis ada beberapa faktor yang menyebabkan Ruang Pendidik INS tidak berjalan sebagai mana mestinya, setelah ditinggal Muhammad Syafei dan A. Hamid. Antara lain penyebabnya adalah:

- a. Dalam Anggaran Dasar badan Wakaf yang dikukuhkan dalam akta Notaris sejak tahun 1939, Pemimpin Umum badan Wakaf berada dalam satu tangan dengan kepemimpinan sekolah, yaitu pada Muhammad Syafei. Yang berlanjut pada masa pimpinan A. Hamid. Setelah A. Hamid meninggal tidak satupun pengurus yang mau atau mampu untuk menjabat kedua jabatan itu. Sebetulnya sistem yang ideal bagi suatu perguruan swasta ialah dengan memisahkan posisi antara pemimpin yayasan dengan pemimpin sekolah.
- b. Situasi dan kondisi yang telah berubah. Pada umumnya masyarakat menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri, terutama karena sekolah negeri dipandang lebih bergengsi, dan uang sekolahnya sangat murah.
- c. Lokasi Ruang Pendidik INS jauh dari kota yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial berpusat, mengurangi minat para orang tua murid untuk memasukkan anaknya ke INS. Dalam kondisi itu, lokasi INS yang berlokasi di desa lebih sulit dibandingkan dengan sekolah swasta di kota. Murid yang masuk ke INS adalah anak keluarga miskin di sekitar nagari Kayutanam atau murid yang dikeluarkan dari sekolah dari kota lain. Hanya sedikit murid yang dimasukkan ke INS oleh orang tuanya karena alasan idealisme INS sendiri. INS tidak dapat memungut uang sekolah yang cukup untuk membiayai keperluan rutin dan operasional lainnya secara memadai. Padahal penerimaan uang sekolah sangat menentukan sekali untuk mencapai kondisi yang ideal. Apalagi bagi INS yang menganut sistem aktif dan kreatif, dalam arti murid juga wajib belajar pada bengkel-bengkel kerja yang membutuhkan alat dan bahan yang mahal bagi ukuran yang sekarang.

⁷⁴ A. Navis. *Op. Cit*, hlm. 73

- d. Disamping itu, kebijakan pemerintah sejak awal kemerdekaan, dimana diploma atau ijazah sekolah swasta tidak diakui, baik untuk diterima sebagai pegawai negeri maupun ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Akibatnya sekolah swasta hanya dapat menjangkau murid yang ditolak oleh sekolah negeri, baik karena dari keluarga miskin atau murid itu bodoh atau nakal.⁷⁵



Gambar 28
Aula Bustanul Arifin INS
(Dokumentasi tim 2010)



Gambar 29
Bundaran Seni INS
(Dokumentasi tim 2010)

⁷⁵ *Ibid.* hlm. 65



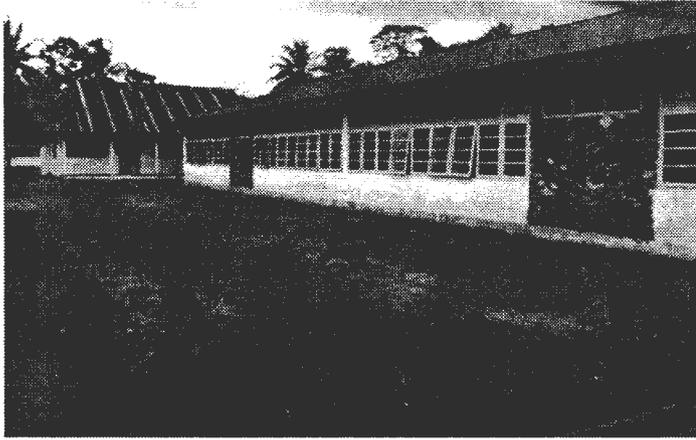
Gambar 30
Bengkel Praktek
(Dokumentasi tim 2010)



Gambar 31
Rumah Kepala Sekolah INS
(Dokumentasi tim 2010)



Gambar 32
Perpustakaan
(Dokumentasi tim 2010)



Gambar 33
Salah satu lokal belajar
(Dokumentasi tim 2010)

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Lembaga Pendidikan INS Kayutanam didirikan oleh Muhammad Syafei pada tanggal 31 Oktober 1926, dan pada awal berdirinya mendapat dukungan dari organisasi Pegawai Kereta Api. Prinsip Lembaga Pendidikan INS adalah berdiri sendiri tanpa mau menerima bantuan yang mengikat dan semua alat-alat serta ruang sekolah dibuat sendiri oleh murid-murid “cari sendiri dan kerja sendiri”.

Proses belajar mengajar yang diterapkan di Lembaga Pendidikan INS adalah merupakan gabungan antara teori dan praktek secara seimbang. Sistem pendidikan yang dikembangkan bertujuan: 1) mendidik rakyat kepada kemerdekaan (dalam makna luas), baik berfikir, berbuat, berkreatifitas dan terutama kemerdekaan dari penjajah Belanda. 2) memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3) menanamkan kepercayaan pada diri sendiri dan berani bertanggungjawab. 4) mandiri dan tidak mau menerima bantuan yang mengikat.

Lembaga Pendidikan INS Kayutanam mulai dibuka pertama kali dengan murid 75 orang, dan murid tersebut adalah anak-anak dari pegawai buruh kereta api. Ketika dibuka murid yang 75 orang dibagi atas 2 kelas: 1A dan 1B, dengan sistem belajar berganti hari. Kalau 1A masuk hari Senin, hari Selasa ia tinggal di rumah, di hari itu 1B yang belajar, gurunya hanya Muhammad Syafei seorang. Murid-murid datang dari berbagai tempat, seperti Padang, Pariaman, Padang Panjang dan

Bukittinggi dengan naik kereta api ke INS. Pada awal pembukaan murid-murid hanya duduk di tikar, tidak ada bangku atau meja belajar.

Pada awal berdirinya untuk tempat belajar Muhammad Syafei menyewa sebuah rumah penduduk. Setahun kemudian di dalam kebun kopi didirikan Los dari bambu beratap rumbia, bangkunya dari papan berkaki bambu yang ditanamkan ke tanah, tetapi sudah ada meja dan bangku sehingga kaki murid tidak perlu bersila, hanya berantai ke tanah. Tiap-tiap satu mata pelajaran murid-murid disuruh bersenam, melepaskan lelah.

Pada tahun 1935, Muhammad Syafei membeli sebidang tanah di Pelabian lebih kurang 3 km dari Pasar Kayutanam dan memindahkan INS ke lokasi tersebut. Pada tahun 1937, INS telah memiliki 3 buah rumah guru, sebuah asrama dengan kapasitas 300 orang. Pada tahun itu juga INS telah memiliki sarana prasarana antara lain: sebuah ruang makan, lapangan olahraga, danau buatan tempat rekreasi dan praktek, taman bacaan dan gedung olahraga. Dana pembangunan diperoleh melalui pertunjukan sandiwara, pameran dan penjualan hasil kerajinan tangan yang dihasilkan oleh murid, serta swadaya masyarakat. Pada tahun 1937, dihadapan Notaris INS diwakafkan kepada masyarakat.

Semenjak kepindahan INS ke Palabian di Kayutanam tahun 1939 sampai masuknya tentara pendudukan Jepang tahun 1942, INS mengalami kemajuan baik di bidang fisik maupun di bidang pendidikan. Akan tetapi setelah Jepang menduduki negeri ini INS mengalami kemunduran yang sangat tajam di bidang pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang Ruang Pendidik INS Kayutanam tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Pada waktu kedatangan Jepang, INS dijadikan Belanda sebagai basis menghadapi Jepang, akibatnya banyak gedung INS yang rusak. Kondisi itu yang menyebabkan kegiatan pembelajaran terhenti, sebagian dari murid INS yang berasal dari luar daerah Sumatera kembali kepada orangtua mereka, karena aktifitas belajar terhenti. Namun itu tidak berlangsung lama karena kampus INS digunakan sebagai tempat berlatih seni militer atau *Senendan*. Setelah Jepang menduduki Indonesia pada awal tahun 1942. Ruang Pendidik INS kembali dibuka dan namanya diubah dari *Indonesische Nationale School* menjadi *Indonesia Nipon Sekolah*. Sedangkan pada masa kemerdekaan Ruang Pendidik INS merupakan singkatan dari *Indonesia Nationale School*.

Sesudah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Ruang Pendidik INS mulai dibuka dan secara bertahap memperbaiki gedung yang rusak akibat perang. Kondisi ekonomi yang tidak mendukung, proses pembangunan memakan waktu yang lama. Untuk itu Muhammad Syafei mengalihkan kegiatan pendidikan INS ke Padang Panjang

dengan mendirikan Ruang Pendidikan Pengajaran Keterampilan (KPPK) dan seluruh peralatan diambil dari peralatan INS Kayutanam.

Pada waktu Agresi Belanda ke II (1948), gedung INS kembali dijadikan basis tentara Belanda. Pada tahun 1950, reruntuhan INS secara berangsur-angsur kembali dibangun dengan jumlah murid 30 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Akibat kondisi gedung yang semakin parah dan kondisi perekonomian yang belum stabil, akhirnya Muhammad Syafei bersedia menerima bantuan dari pemerintah daerah dan pusat.

Ketika pergolakan daerah (PRRI) Ruang Pendidik INS tidak bisa melaksanakan aktifitas kegiatan belajar mengajar. Pada tahun 1967, Muhammad Syafei kembali ke Kayutanam dan mulai membenahi kembali Lembaga Pendidikan INS, dan setelah Muhammad Syafei meninggal, kepemimpinan INS diserahkan pada A. Hamid. Pada periode kepemimpinan A. Hamid, secara fisik INS berkembang dengan pesat. Seluruh sumbangan yang didapat, baik sumbangan dari dana masyarakat, bantuan Presiden, bantuan Bulog, dan bantuan dari NOVIB. Secara fisik Ruang Pendidik INS telah menampakkan wujudnya kembali seperti sebelum perang kemerdekaan. Prasarana dan sarana fisik, berupa ruang pendidikan akademis dan pendidikan keterampilan sudah hampir lengkap dimiliki. Artinya secara fisik seharusnya INS telah dapat mengangkat eksistensinya sebagai suatu model sekolah kerja, namun dalam perjalanannya tidak seperti yang diharapkan.

Diantaranya masalah pokok yang ditemui, selain masalah pembiayaan pendidikan, adalah masih kabur dan kurang pemahaman pengelola tentang menjabarkan gagasan pendidikan yang dicita-citakan Muhammad Syafei kedalam bentuk-bentuk penyelenggaraan atau operasional di lapangan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian besar informan mengatkan "Tidak berkembangnya Ruang Pendidik INS Kayutanam, karena konsep pendidikan yang diterapkan tidak lagi sesuai dengan konsep pendidikan yang dicita-citakan oleh Engku Muhammad Syafei. Semenjak beliau meninggal susah untuk mencari orang yang paham dengan cita-cita Ruang pendidik INS, pada masa kemundurannya itu banyak murid-murid yang *drop out*'.

Selain persoalan tersebut, Muhammad Syafei juga tidak meninggalkan gagasan pendidikannya dalam bentuk operasional konsep yang tertulis lengkap, tetapi banyak menunjukkan melalui praktek pendidikan yang dilakukan, baik yang dilakukan pada zaman Belanda, maupun dalam tahun-tahun pertama pembangunan kembali Ruang Pendidik INS di awal zaman Orde Baru. Pada akhirnya mengakibatkan usaha pembangunan kembali Ruang Pendidik INS tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian dapat dikatakan

penyelenggaraan pendidikan INS setelah ditinggal almarhum Muhammad Syafei berjalan tanpa konsep operasional yang jelas. Sehingga kegiatan penyelenggaraan pendidikan INS lebih banyak dipengaruhi perkembangan situasi dan pendidikan yang terjadi luar INS.

Manurut Navis ada beberapa faktor yang menyebabkan Lembaga Pendidikan INS berjalan sebagaimana mestinya, setelah ditinggal Muhammad Syafei dan A. Hamid. Antara lain:

- a. Dalam Anggaran Dasar Badan Wakaf yang dikukuhkan dalam akta Notaris sejak tahun 1939. Pemimpin sekolah, yaitu pada Muhammad Syafei, berlanjut pada masa pimpinan A. Hamid. Setelah A. Hamid meninggal tidak satupun pengurus yang mau atau yang mampu untuk menjabat kedua jabatan itu. Sebetulnya sistem yang ideal bagi suatu perguruan swasta ialah dengan memisahkan posisi antara pimpinan yayasan dan pimpinan sekolah.
- b. Situasi dan kondisi yang telah berubah. Pada umumnya masyarakat menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri, terutama karena sekolah negeri dipandang lebih bergengsi, dan uang sekolahnya sangat murah.
- c. Lokasi Ruang Pendidik INS jauh dari kota yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial berpusat, mengurangi minat para orang tua murid untuk memasukkan anaknya ke INS. Dalam kondisi itu, lokasi INS yang berlokasi di desa lebih sulit dibandingkan dengan sekolah swasta di kota. Murid yang masuk ke INS adalah anak keluarga miskin di sekitar nagari Kayutanam atau murid yang dikeluarkan dari sekolah dari kota lain. Hanya sedikit murid yang dimasukkan ke INS oleh orang tuanya karena alasan idealisme INS sendiri. Oleh karenanya, INS tidak dapat memungut uang sekolah yang cukup untuk membiayai keperluan rutin dan operasional lainnya secara memadai. Padahal penerimaan uang sekolah sangat menentukan sekali untuk mencapai kondisi yang ideal. Apalagi bagi INS yang menganut sistem aktif dan kreatif, dalam arti murid juga wajib belajar pada bengkel-bengkel kerja yang membutuhkan alat dan bahan yang mahal bagi ukuran yang sekarang.
- d. Disamping itu, kebijakan pemerintah sejak awal kemerdekaan, dimana diploma atau ijazah sekolah swasta tidak diakui, baik untuk diterima sebagai pegawai negeri maupun ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Akibatnya

sekolah swasta hanya dapat menjaring murid yang ditolak oleh sekolah negeri, baik karena dari keluarga miskin atau murid itu bodoh atau nakal.

Selain dari Navis beberapa mantan murid INS Kayutanam yang kami jadikan informan juga mengatakan bahwa semenjak ditinggal Muhammad Syafei dan A. Hamid seolah-olah INS kehilangan kepemimpinan. Apa lagi semenjak A. Hamid meninggal tidak ada orang yang berani untuk menjabat sebagai pimpinan Yayasan dan sekaligus pimpinan sekolah. Karena zaman Muhammad Syafei dan A. Hamid kedua jabatan itu dipimpin oleh satu orang. Beberapa kali Yayasan Badan Wakaf mencari orang yang cocok dan pas untuk menjabat pengelola sekolah, namun hasilnya tidak memuaskan. Sehingga INS tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan.

2. Saran

1. Pendirian Ruang Pendidik INS tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai dan manfaat yang diharapkan, yaitu untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang, terutama bagi INS sendiri, khususnya bagi murid-murid dan para guru. Selain itu juga bagi Pemerintah Daerah setempat, yaitu Pemda Padang Pariaman yang menaungi keberadaan sekolah-sekolah di daerah tersebut.
2. Kehadiran Ruang Pendidik INS Kayutanam mempunyai andil yang besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga Pemerintah Daerah dapat memberi perhatian yang serius. Misalnya dalam bentuk bantuan fisik, bantuan tenaga guru, dan bantuan-bantuan lainnya yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup sekolah tersebut.
3. Selanjutnya perlu juga melihat kembali latar belakang, yaitu tentang sikap Muhammad Syafei, A. Hamid dan mantan murid-muridnya di masa lalu yang pantang menyerah, tanpa pamrih, ikhlas dan berkemauan yang keras memajukan sekolah, sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah dan para lulusannya.
4. Terakhir ditunjukkan kepada Pemda setempat dan secara umumnya kepada Pemerintah Pusat untuk memperhatikan keberadaan Ruang Pendidik INS, terutama penghargaan kepada tokoh pendirinya, yaitu Muhammad Syafei. Penghargaan tidak hanya simbol saja yang tertuang dalam selembar kertas, tetapi diharapkan dapat bermakna dengan melakukan tindakan yang konkrit.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asnan, Gusti. 2003. *Kamus Sejarah Minangkabau*. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM).
-2006. *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*.
Yogyakarta; Citra Pustaka.
- Abidin, Mas'ued, dkk. 2005 *Ensiklopedi Minangkabau*. Padang: Pusat Kajian Islam dan Minangkabau Sumatera Barat.
- A. Mustafa, dkk. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Hamid, Abdul, (tanpa tahun) *Menyelesai Bengkalai Cita-cita Alm. Engku M. Syafei*. Padang: Badan Wakap Ruang Pendidikan INS Kayu Tanam.
- Ilyas, Muslim. 1984. *Riwayat dan perjuangan Aziz Chan*. Jakarta: PT Telaga Gunung.
- Ibrahim Thalib. 1978. *Pendidikan Muhammad Syafei INS Kayutanam*. Jakarta: Mahabudi.
- Joenoed, Marah. 2001. *Mr. H. St. Moh. Rasyid Perintis Kemerdekaan Pejuang Tangguh dan Jujur*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Kuntowijoyo. 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Yayasan Bintang Budaya.
- Kahin Audrey. 1979. *Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat Dlam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950*. Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Sumatera barat, bekerjasama dengan Ex Tentara Pelajar Sumatera Tengah (CTP) pelajar Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.
- Louis Gottschlk. 1995. *Mengerti Sejarah. Terjemahan Nogroho Notosusanto*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mansoer, M.D. dkk. 1970. *Sejarah Minangkabau*. Jakarta: Bhatara.
- Nasutiom. 1983. *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Bandung: Jemars
- Navis, A.A . 1996. *Filsafat dan Strategi Pendidikan . M.Syafei Ruang Pendidikan INS Kayutanam*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syafei, Muhammad. 1986. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Sumatera Barat: INS Kayutanam.

- Sidin, Nazar. 2004. *Apa Siapa*. Padang: Pustaka Artaz, Edisi Sumatera Barat Bahagian I.
- Suardi Hp.dkk. 1986. *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Sejarah dan nilai Tradisional Jakarta.
- Tim Penulis INS Kayutanam, *Sendi (Majalah)*, Tidak diterbitkan.
- Yusra, Abrar. 1994. *Otobiografi A.A. Navis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Zed, Mestika. 1998. *Apakah Berpikir Sejarah?. Handout IS*.
- Zed, Mestika. 1997 *Tentang Sumber Sejarah: Pengertian dan Jenis-Jenis Sumber Sejarah, Handost IS*. 1998.

MAJALAH

- Majalah, *Sendi* No. 8 Tahun 1926
 No. 9 Tahun 1953
 Majalah *Budaya Jaya* N. 132 Tahun 1979
 Majalah *Boedi Tjaniago* Bukittinggi No. 4 Tahun 1992
 Majalah *Saura Bumi Putera*, Terbit 21 April 1939

WAWANCARA

- Wawancara dengan Jamil Adam, Kayutanam, 27 Maret 2010
 Wawancara dengan Muslim Saleh, Pariaman, 29 Maret 2010
 Wawancara dengan Bajuri, Kayutanam, 3 April 2010
 Wawancara dengan Abu Bakar Burhan, Kayutanam, 5 April 2010
 Wawancara dengan H. Yasrizal, Kayutanam, 28 Maret 2010
 Wawancara dengan Masril, Kayutanam, 28 Maret 2010
 Wawancara dengan Mukhtar Taat, Kayutanam, 29 Maret 2010
 Wawancara dengan Datuk Buur, Padang, 3 April 2010.

TENAGA ROMUSHA DI NAGARI DURIAN GADANG KABUPATEN SIJUNJUNG PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG 1942 –1945¹

Zusneli Zubir²

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pendudukan Jepang di Indonesia selama 3,5 tahun, dikenal sebagai periode penjajahan yang luar biasa kejam, apabila dibandingkan dengan penjajahan Belanda yang berlangsung lebih lama. Membandingkan dua penjajahan ini memang tidak ada salahnya, karena sampai saat sekarang kita masih mendengar cerita dari orang tua yang hidup pada zaman itu. Mereka selalu bercerita tentang kekejaman Jepang terhadap rakyat.

Kekejaman yang dilakukan Jepang itu sehubungan dengan kepentingannya untuk memenuhi kebutuhannya terhadap sumberdaya alam dan manusia, dalam rangka mendukung kepentingan perang Asia-Pasifik antara Jepang dengan sekutu. Salah satu bentuknya melalui kerjapaksa (rodi) atau lebih dikenal dengan “romusha”.³ Sampai saat ini kalau ditanya pada orang-orang tua yang hidup di zaman Jepang, pengalaman apa yang paling mengerikan selama pendudukan Jepang, selalu dijawab hidup sebagai “romusha”.⁴

Kondisi seperti itu sudah diperkirakan oleh Hatta, dalam sebuah pernyataannya yang disampaikan pada bulan Januari 1942, yaitu:

Jika Jepang dengan kawan-kawanya menang, dunia akan diperbudaknya. Jika Indonesia tidak diperbagikan antara Jerman dengan Jepang, ia jatuh ke bawah perintah Jepang, dan cita-cita Indonesia akan sia-sia. Fasisme menghendaki cuma satu tunduk kepada kekerasannya.⁵

¹ Artikel ini merupakan gagasan ulang dari Laporan Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2010.

² Peneliti Madya Pada BPSNT Padang

³ Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2001), hlm. 134. dan R. P. Suyono, *Seks dan Kekerasan Pada Zaman Kolonial : Penelusuran Kepustakaan Sejarah*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2005), hlm. 290.

⁴ Romusha dalam bahasa Jepang berarti seorang pekerja yang melakukan pekerjaan sebagai buruh kasar. Akan tetapi, dalam konteks sejarah Indonesia istilah ini mempunyai pengertian khusus yang mengingatkan rakyat akan pengalaman yang sangat pahit di bawah pemerintahan militer yang kejam. Lihat Buku Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol ; Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942 – 1945*. (Jakarta : Gsrindo. 1993), hlm. 123.

⁵ *Koran Dagblad Radio*, Sabtu 10 Januari 1942 no 8 th ke 21

Hal yang sama juga dikatakan oleh Soekarno tahun 1938, pada saat ia bertemu dengan seorang pembesar Belanda dr. LGM. Jaquet di Bengkulu bahwa, “penduduk pribumi apabila mengalami masa pendudukan Jepang akan menderita tekanan sosial ekonomi yang lebih berat dari pada keadaan semasa pemerintahan Belanda”.⁶

Memang apa yang dikatakan oleh Soekarno maupun Hatta itu, pada bulan pertama masuknya Jepang ke Indonesia maupun di Sumatra Barat belum dirasakan, bahkan yang terjadi sebaliknya dari yang diperkirakan oleh Soekarno dan Hatta tersebut. Jepang pada saat itu memperlihatkan simpati dan rasa persaudaraan terhadap rakyat.⁷ Oleh sebab itu, kedatangan serdadu Jepang disambut dengan senyuman. Begitu pula dengan tokoh-tokoh politik yang ditahan Belanda dibebaskan dan diberi kebebasan bergerak.⁸

Namun kondisi seperti itu tidak bertahan lama, karena tidak lama kemudian situasi itu segera berubah, kekerasan dan ketegangan mulai dirasakan oleh masyarakat. Para tentara yang disambut dengan senyuman dan dipuja itu mulai menangkapi dan merampas harta benda masyarakat yang mereka temukan, jam tangan pun menjadi incarannya. Siapa saja yang coba mencegah pasti menerima tendangan atau pukulan.⁹ Semuanya itu merupakan awal bagi para serdadu Jepang dalam memperlihatkan kekuasaannya yang sewenang-wenang.¹⁰ Semenjak itu, kekerasan mulai terjadi dimana-mana tanpa dibatasi ruang dan waktu, dan terus meningkat pada saat Jepang banyak membutuhkan sumberdaya baik alam maupun manusianya, guna menghadapi perang yang sedang berlangsung.

Tenaga manusia banyak digunakan sebagai tentara sukarela (heiho), dan tenaga kerja paksa (romusha) untuk membangun berbagai sarana pertahanan, seperti benteng-benteng dan sarana transportasi. Diantaranya adalah membangun jalan kereta api dari Sijunjung menuju Logas Riau. Usman salah seorang bekas romusha yang berasal dari Jawa Tengah mengatakan bahwa pada saat membangun jalan kereta api mereka tidak dilengkapi dengan prasarana yang memadai begitu pula dengan kesehatan, bahkan mereka banyak yang disiksa karena hanya

⁶ L. D. Jong (editor), *Pendudukan Jepang di Indonesia*, (Jakarta : Kesaint Blanc. 1987), hlm. 28.

⁷ Akira Nagazumi, *Pemberontakan Indonesia di Masa Pendudukan Jepang*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 1988), hlm. x.

⁸ Mardjani Martamin, et al., *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatra Barat*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978), hlm. 178.

⁹ Ahmad Husen, et al., *Sejarah Perjuangan RI di Minangkabau / Riau 1945 - 1950*, edisi kedua, (Jakarta : BPSIM. 1991), jilid 1, hlm. 43.

¹⁰ Mardjani Martamin, *op. cit.*, hlm. 178.

melakukan kesalahan-kesalahan kecil.¹¹ Hal itu ditegaskan pula oleh A. Wahid mantan Wali Nagari Silokek – Silukah, bahwa pekerja paksa yang meninggal karena kondisinya yang sudah memprihatinkan karena penyakit dan kelaparan, ada yang dibuang saja ke Sungai Batang Kuantan tanpa dikubur.¹²

Banyak lagi pengalaman yang memprihatin dialami oleh para Romusha di Sijunjung, ini menjadi suatu hal yang menarik untuk diungkapkan, karena peristiwa yang dialami itu merupakan pengalaman yang penting sebagai pelajaran agar dapat dimanfaatkan sebagai koreksi pada masa sekarang.

Pertimbangan lain adalah, persoalan romusha dalam penulisan sejarah di Sumatra barat belum mendapat perhatian secara khusus. Kalaupun ada penulisan sejarah tentang romusha, hanya menjadi bagian terintegral dari tulisan lainnya. Tulisan tentang sejarah kerja paksa yang ditinjau dari sudut sejarah sosial, baru dilihat secara selintas lalu dalam penulisan sejarah perjuangan Kabupaten Sijunjung yang diterbitkan oleh Kabupaten Sijunjung, terutama yang berhubungan dengan periode atau masa pendudukan Jepang. Oleh sebab itu penelitian ini perlu segera dilakukan, mumpung para pelaku atau saksi sejarah periode ini relatif masih banyak yang hidup, maka sangatlah tepat untuk memulai penelitian ini. Penelitian masa ini perlu dilakukan, agar pengalaman pahit yang pernah dialami oleh pelaku, menjadi pelajaran bagi masyarakat dan anak cucu pada masa yang akan datang.

2. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Sejarah romusha yang akan diangkat kepermukaan, merupakan salah satu bagian dari perjalanan sejarah bangsa yang telah menimbulkan penderitaan yang sulit dilupakan oleh bangsa ini. Perjalanan hidup romusha ini khususnya di Durian Gadang, Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu sisi negatif penjajahan Jepang, maka untuk merumuskannya ada beberapa pertanyaan yang hendak dijawab, yaitu Bagaimana proses kedatangan para romusha ke Sijunjung? Dari mana sajakah asal tenaga romusha tersebut? Apa sajakah yang mereka lakukan dalam pekerjaan sebagai romusha? Selama mereka bekerja dimanakah mereka bertempat tinggal? Bagaimana pola kerjanya termasuk pengaturan jam kerjanya, jam istirahat, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari? Kemudian

¹¹ Wawancara dengan Usman, umur 85 tahun, di Selokek – Silukah Muaro Sijunjung pada bulan 24 Juni 2008, dan 4 Juli 2009.

¹² Wawancara dengan A. Wahid di Selokek-Silukah Muaro Sijunjung pada tanggal 3 Juni 2008.

setelah Jepang meninggalkan Indonesia, bagaimana nasib mereka? Apakah mereka di organisasikan untuk kembali ke kampung masing-masing atau mereka dibiarkan begitu saja ?

Hal inilah yang hendak diungkapkan dalam penelitian ini, agar pengalaman yang dialami oleh para romusha ini menjadi pengalaman sejarah yang dapat kita ambil hikmahnya sebagai pengalaman buruk dalam perjalanan sejarah bangsa.

Adapun batasan spasial dan temporal dari penelitian ini akan mengungkapkan perjalanan hidup para romusha yang terdampar di Durian Gadang mulai dari kedatangan hingga akhir hayatnya. Akan tetapi penelitian ini juga akan mengungkapkan hal-hal lain, sepanjang yang berhubungan dengan persoalan romusha, seperti nagari-nagari lain yang terkait, akan tetap disinggung secara sepintas. Khususnya Kabupaten Sijunjung tetap akan dilihat sebagai suatu kesatuan untuk memahami dinamika masyarakatnya selama terjadinya perjalanan sejarah romusha yang dapat memberi nilai pedagogik dan patriotik, namun di sisi lain terdapat pula ekses-ekses sebagai akibat suasana tersebut, pada kehidupan rakyat di daerah itu.

3. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan asal para Romusha yang terdampar di Nagari Durian Gadang, Sijunjung; menjelaskan berbagai peristiwa yang dialami oleh para Romusha dan respon masyarakat Kabupaten Sijunjung umumnya dan Durian Gadang khususnya terhadap peristiwa Pembuatan jalan Api-Logas 1942-1945, serta melukiskan respon masyarakat Durian Gadang terhadap peristiwa yang terjadi pada masa pendudukan Jepang, khususnya dalam pembuatan jalan kereta api dari Sijunjung ke Logas- Riau.

Adapun manfaat dari penelitian adalah terdapatnya pengalaman pelaku-pelaku sejarah, atau yang pernah menyaksikan peristiwa yang terjadi pada masa pendudukan Jepang di Kabupaten Sijunjung khususnya di Nagari Durian Gadang.

Diharapkan pengalaman para romusha tersebut dapat memperbesar rasa cinta pada bangsa ini dan menghargai akan hak-hak bagi setiap warga di negara ini dan dapat menambah referensi sejarah tingkat lokal (khususnya nagari) Durian Gadang sekitarnya dalam Wilayah kabupaten Sijunjung. Sekaligus menjadi bukti penghargaan kepada korban selama proses perjalanan sejarah bangsa, sehingga pengalaman yang dialami oleh setiap anak bangsa ini tidak hanya tinggal dalam bentuk cerita lisan, tetapi ditulis dalam bentuk tulisan yang kegunaannya jauh kedepan.

Selain menambah khasanah historiografi lokal yang berkaitan dengan perjalanan romusha dan masyarakat sekitarnya di Durian Gadang juga menjadi langkah awal dari studi yang mendalam untuk masa yang akan mendatang. Diharapkan pula munculnya ide dan gagasan yang menyangkut tema penelitian seperti diatas dalam bentuk seminar dan diskusi, sehingga akan melahirkan kebijakan pemerintah Kabupaten Sijunjung terhadap korban Romusha beserta keluarga. Serta melestarikan sisa-sisa peninggalan sejarah yang berhubungan dengan romusha seperti pereketa apian di Sijunjung.

4. Tinjauan Pustaka.

Sehubungan dengan masalah tersebut, penulis akan melakukan penelitian tentang perjalanan Hidup *Romusha* pada masa pendudukan Jepang. Kajian ini cukup menarik untuk diteliti, karena sampai saat ini belum banyak sejarawan yang melakukan penelitian sehubungan dengan masalah tersebut. Hal ini disebabkan, karena selama ini ada kecendrungan penulisan sejarah hanya mengungkapkan sejarah politik atau perjuangan, sejarah ekonomi, sejarah social yang berkaitan dengan tokoh atau pahlawan. Sedangkan yang berhubungan dengan berbagai pengalaman yang pernah dialami oleh rakyat kecil pada masa penjajahan, baik masa Kolonial Belanda maupun Jepang, belum mendapat perhatian maksimal.

Kalaupun ada beberapa peneliti yang telah melakukan penulisan tentang berbagai pengalaman yang pernah dialami rakyat tersebut, tetapi semuanya baru disinggung secara selintas, karena kebetulan terkait dengan tema pokok yang menjadi fokus tulisannya, apalagi yang berhubungan dengan pengalaman yang pernah dialami oleh para romusha.

Ada beberapa tulisan yang sudah mencoba mengungkapkan tentang romusha, seperti tulisan Armiyn An, et., al dalam bukunya "*Sejarah Perjuangan Rakyat Kabupaten Sawahlunto Sijunjung 1833 - 1950*", M.D. Mansoer, et., al dalam bukunya "*Sejarah Minangkabau*", Buku tersebut menjelaskan tentang romusha hanya bagian integral dari tema pokok yang menjadi fokus tulisannya. Begitu pula dengan bukunya Mestika Zed "*Giyugun ; Cikal Bakal Tentara Nasional di Sumatera*", juga menyinggung masalah romusha secara selintas, yaitu terkait dengan pembangunan jalan kereta api "trans-Sumatera" yang dibangun sejak tahun 1943.¹³

¹³ Mestika Zed, *Giyugun ; Cikal Bakal Tentara Nasional di Sumatera*, (Jakarta : LP3ES), hlm. 102.

Namun ada tulisan yang menarik yang ditulis oleh P.J. Suwarno yang berjudul "*Romusha Daerah Istimewa Yogyakarta*" yang secara khusus menderitakan tentang pengalaman para romusha selama dipekerjakan di Yogyakarta. Walaupun demikian tulisan P.J. Suwarno ini tetap menarik untuk dijadikan sebagai sumber referensi, karena bagaimanapun dalam bukunya tersebut juga menyinggung bahwa para romusha yang berasal dari Yogyakarta juga banyak yang dikirimkan ke Sumatera.

Selain buku-buku yang ditulis oleh para penulis di atas, banyak juga penulis yang membahas masalah romusha seputar zaman Jepang, tetapi tidak secara khusus membahas masalah yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Apalagi yang berhubungan dengan pengalaman para romusha yang mengerjakan jalan kereta api trans-Sumatera seperti Logas antara Sijunjung-Riau ini.

Selain itu buku-buku yang menulis seputar masalah Jepang, sangat sedikit yang menyinggung secara langsung masalah pengalaman dan nasib para romusha pada zaman Jepang, biarpun demikian informasinya dapat digunakan untuk memahami dinamika sosial pada konteks ruang dan waktu yang sama.

5. Kerangka Konseptual dan Pendekatan

Dalam membantu mengarahkan penelitian ini, beberapa konsep yang digunakan perlu mendapat kejelasan. Berhubung dengan tema penelitian ini fokus pada masalah romusha yang tidak bisa lepas dari masalah mobilisasi dan kekerasan, maka untuk itu perlu ada penjelasan tentang romusha, mobilisasi dan konsep kekerasan.

Menurut Aikokurasawa, yang dimaksud dengan romusha tersebut dalam bahasa Jepang berarti seorang pekerja yang melakukan pekerjaan sebagai buruh kasar dan dimobilisasi oleh militer. Akan tetapi, dalam konteks sejarah Indonesia istilah ini mempunyai pengertian khusus yang mengingatkan rakyat akan pengalaman yang sangat pahit di bawah pemerintahan militer yang kejam.

Sedangkan kekerasan yang terjadi selama proses kerja paksa tersebut, menimbulkan berbagai macam bentuk konflik sebagai efek yang timbul dari arogansi kekuasaan militer Jepang, maka untuk itu penulis mencoba mengadopsi teori konflik dalam melihat persoalan tersebut. Menurut Ibnu Khaldun, konflik dapat dilihat dari watak psikologis dan merupakan dasar sentimen serta ide yang membangun hubungan sosial diantara berbagai kelompok manusia,¹⁴ berhubungan dengan rasa cinta terhadap identitas kelompok dan agresif. Agresif

¹⁴ Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar konflik Sepanjang Zaman: Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004), hlm. 80.

manusia akan memicu timbulnya berbagai konflik dan kekerasan yang begitu lekat dengan sejarah manusia.¹⁵

Ada pun konsep kekerasan sebagai ukuran apa yang dimaksud dalam tulisan ini nantinya, penulis pertama-tama mengacu pada pengertian kekerasan menurut Kamus Bahasa Indonesia. *Kekerasan* diartikan dengan perihail yang bersifat keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan.¹⁶

Adapun menurut Kiefer dalam bukunya *The Tausung: Violence and Law in a Philippine Moslem Society* menjelaskan bahwa konsep kekerasan berdasarkan pada dua hal, pertama, merupakan suatu tindakan untuk menyakiti orang lain, sehingga menyebabkan luka-luka atau mengalami kesakitan; kedua, merujuk pada penggunaan kekuatan fisik yang tidak lazim dalam suatu kebudayaan.¹⁷ Hal ini juga meliputi pengertian yang sangat luas mulai dari tindakan penghancuran harta benda, pemaksaan, pemukulan, perusakan, penyiksaan sampai pembunuhan.¹⁸

Defenisi ini berkaitan juga dengan kategori kekerasan tanpa memperhitungkan berapa jumlah korbannya, siapa orangnya dan siapa yang bertanggung jawab, apakah individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan, institusi, atau negara.

Selanjutnya, karena konsep kekerasan merupakan ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang menjadi korban, namun sangat tergantung pada lingkungan sosial budaya masyarakat setempat, maka penulis juga melakukan pendekatan antropologis, yang lebih dikonsentrasikan pada cara-cara melakukan kekerasan yang didalamnya berperan nilai-nilai serta kendala sosial yang ada.

Michel Foucaul mengatakan, bahwa kekuasaan dapat juga dilihat sebagai unsur multidimensional dari semua hubungan-hubungan kemanusiaan. Tidak saja karena di sana terdapat *kekuasaan atas*, tetapi juga *kekuasaan untuk* mengembangkan bakat, kekuasaan untuk membangun suatu masyarakat yang lebih manusiawi, lebih berkesamaan.¹⁹

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 81-84.

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. III, (Jakarta : Balai Pustaka. 2001), hlm. 425.

¹⁷ T.M. Kiefer, *The Tausung: Violence and Law in a Philippine Moslem Society*, (New York: Holt, Rinehart and Wisnton, 1972, hlm. 52.

¹⁸ A. J. Abbink, *Cultures of Violence: A Comparative studi of Cultural Form of Violent Behavior. A Reseach Proposal*, (Nijmegen: Intitute for Cultural and Social Anthropology, University of Nijmegen. 1994), hlm. 3.

¹⁹ Lihat Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, (Jakarta : Garba Budaya dan Kalyanamitra. 1999), hlm. 46.

Artinya suatu peristiwa sejarah tidak akan lepas dari satu faktor dengan faktor lainnya, sehingga dalam penelitian sejarahpun tidak terlepas dari hal itu. Sehubungan dengan itu, timbul pertanyaan, dengan apa persoalan kekerasan terhadap para romusha pada masa Jepang ini di kaitkan. Menurut tim, pembicaraan romusha pada zaman Jepang, akan menjadi menarik jika terkait dengan aspek sosial budaya tempat para romusha itu hidup.

Oleh karena itu, pendekatan yang di gunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah dengan tinjauan masalah sosial dan budaya. Sedangkan batasan ruang dari persoalan romusha yang hendak di teliti adalah, para romusha multietnis, khususnya Jawa yang berada di sijunjung, Sumatra Barat dengan batasan waktu pada zaman pendudukan Jepang.

6. Metode dan Sumber Penulisan

Metode yang digunakan dalam penelitian mengenai Romusha (Kerja paksa) pada *Masa Pendudukan Jepang*, penulis akan menggunakan metode sejarah antara lain menurut Gilbert J. Garraghan dalam bukunya *A Guide to Historical Method* menjelaskan bahwa metode sejarah adalah seperangkat azas atau kaidah-kaidah yang sistematis yang digubah untuk membantu mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis hasil yang dicapai, pada umumnya dalam bentuk tertulis.²⁰ Louis Gottschalk, Dalam *Mengerti Sejarah* menjelaskan bahwa *metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau*²¹, dimulai dari pengumpulan data hingga penulisan.

Mengingat konteks waktu penelitian ini sifatnya kontemporer, maka pendekatan sejarah lisan (*oral history*) menjadi pilihan yang tidak dapat dielakkan. Apalagi metode sejarah lisan mempunyai sifat retrospektif, sehingga memungkinkan penggalian dan pengumpulan bukti-bukti dari masa lalu yang tidak tersedia dalam sumber tertulis.

Melalui kerja sejarah lisan ini, wawancara yang dilakukan mampu mendokumentasikan aspek-aspek tertentu dari pengalaman sejarah yang cenderung hilang dalam sumber lainnya. Para penutur tidak hanya menceritakan kembali masa lalu, tetapi juga membuat penilaian atau

²⁰ Gilbert J. Graghan, *A. Guide to Historical Method*, (New York: Fordham University Press. 1984), hlm. 54-57. Lihat juga Ibrahim Alfian, *Tentang Metodologi Sejarah* Dalam Buku T. Ibrahim Alfian, et al., ed., *Dari babad Dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis: Kumpulan Karangan dipersembahkan kepada Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1992), hlm. 409-419.

²¹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*. Penterjemah Nugroho Notosusanto, (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1985), hlm. 32.

interpretasi sendiri terhadap masa lalu.²² Ini jelas memberikan wama pada persepsi peneliti tentang masa lampau.

Dengan pendekatan sejarah lisan, dapat membantu dalam menjelaskan kontinuitas kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat Minangkabau, yang meliputi empat tahap yaitu; pertama melakukan pendataan dan survey para informan (pengkisah); ke dua membuat daftar pertanyaan (pedoman wawancara); Ketiga menghubungi informan; dan ke empat melakukan wawancara dengan informan, dalam hal ini dapat disebut sebagai informan kunci.

Guna memperoleh data lisan, keterangan dari pelaku sejarah dan saksi mata yang masih hidup baik yang berdomisili di wilayah Sumatra Barat maupun di luar Sumatra Barat sangat diperlukan, mulai dari mantan Heiho, Gyugun, Seinendan, Keibodan, Bagodan, Fujinkai, Hakokai dan mantan anggota organisasi masyarakat masa pendudukan Jepang yang tergabung dalam veteran/pejuang bersenjata, pelaku, pemuka masyarakat atau ninik mamak", dan kaum ulama, sampai pada pemuda menjadi sasaran wawancara. Informasi tersebut diseleksi dengan cara membandingkan dengan beberapa informan yang terlibat atau mengetahui tentang topik yang sama. Berbagai informasi yang diperoleh diseleksi dan dikritik kerelevansinya dengan pokok persolan penelitian, dengan membandingkan dengan beberapa informan dan sumber lain yang menjelaskan topik yang sama, dengan maksud untuk melakukan cross check apakah informasi yang diperoleh cukup valid ataupun tidak, termasuk pengujian akurasi sumber itu sendiri dengan menghubungkan dan membandingkan antara beberapa sumber dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta sejarah.

Kemudian data lisan yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut dikombinasikan pula dengan sumber primer tertulis yang ada yaitu arsip atau dokumen tertulis lainnya yang dapat diperoleh melalui catatan harian, Koran se-zaman, foto dan memoir para pelaku sejarah. Hanya, disaat menjelang kekalahan Jepang, semua foto dan dokumen yang ada di kantor pusat militer Sumatra di Bukittinggi dibakar, sehingga satupun tidak ada yang tertinggal.²³ Bagi penulis

²² Bambang Purwanto, Sejarah Lisan dan Upaya Mencari Format Baru Historiografi Indonesiasentris dalam buku, *Dari Samudra Pasai ke Yogyakarta* Persembahan kepada Teuku Ibrahim Alfian, (Jakarta: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia. 2002), hlm. 152.

²³ Masmimar, et al., *Pemuda dan Proklamasi: Gerakan Pemuda Merealisasikan Proklamasi Dan Mewujudkan Pemerintah RI di Bukittinggi-Sumatra*, (Jakarta: Panitia Penulisan Sejarah Pemuda dan Proklamasi 1945 Bukittinggi-Sumatra, 1990), hlm, 31.

peristiwa itu sangat disayangkan, karena kehilangan beberapa sumber yang sangat dibutuhkan.

Untuk melengkapi sumber primer tersebut dilakukan wawancara mendalam untuk menggali pengalaman sejarah yang pernah dialami oleh sebagian masyarakat. sehingga merupakan beban psikologis.

Oleh sebab itu, guna melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara, digunakan sumber sekunder (bahan "tangan kedua") yang diperoleh melalui instansi resmi, yaitu; Perpustakaan Nasional Jakarta, Arsip Nasional, Perpustakaan Dewan Harian Angkatan 45 Sumatra Barat, Perpustakaan Daerah Sumatra Barat di Padang, Kantor LBH Yogyakarta, Perpustakaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang .

Fakta sejarah yang telah diperoleh baik dari lisan maupun tertulis diberi arti dan makna, kemudian dirangkaikan satu sama lainnya, sehingga menjadi suatu jalinan cerita yang sistematis. Salah satu contoh adalah apa yang dilakukan A. Wahid salah seorang korban romusha yang masih hidup yang berdomisili di durian gadang sijunjung, Sumatra Barat, menceritakan tentang pengalamannya seputar kerja paksa dimasa pendudukan Jepang. Data yang diperoleh melalui A. Wahid ini akan dianalisis secara kritis, sehingga diperoleh data yang dijadikan bahan penulisan penelitian ini sesuai dengan metodologi ilmu sejarah.

B. PEMERINTAHAN JEPANG DAN PERANG PASIFIK

1. Situasi Sosial Politik Pemerintahan Jepang

Ikutnya Jepang dalam pecaturan politik dunia dengan melibatkan diri di berbagai konflik antar blok Timur dan Barat, tidak terlepas dari perubahan situasi sosial politik dalam negerinya sendiri. Perubahan yang sangat mendasar terjadi pada saat kebijakan Restorasi Meiji dijalankan oleh Kaisar Jepang (Tenno Matsuhito). Semula kebijakan menutup (isolasi) diri yang dijalankan oleh Pemerintahan Jepang di bawah rezim Tokugawa semenjak tahun 1603, membuat Jepang menjadi negara tradisional yang memperlihatkan ciri-ciri feodalistik. Kebijakan itu di jalankan oleh rezim Tokugawa atas pertimbangan perlindungan (proteksi) terhadap kebudayaan Jepang dari pengaruh kebudayaan Barat. Mereka takut apabila Jepang membuka diri terhadap Barat, maka nilai-nilai social budaya yang mereka miliki akan terpengaruh. Akibatnya tentu saja Jepang menjadi bangsa yang tertinggal dari negara-negara lain yang sudah menuju pada negara modern dengan kemajuan berbagai teknologi.

Setelah Jepang menjalankan Kebijakan Restorasi Meiji, semua cirri-ciri feodalistik yang memberikan hak-hak istimewa pada kaum

ningrat dihapuskan.²⁴ Orientasi baru Jepang adalah mencoba mengejar ketertinggalannya, dengan mengirim berbagai putra terbaiknya untuk pergi belajar ke berbagai Negara Barat. Semenjak itu berbagai kemajuan mulai dicapai oleh Jepang, terutama modernisasi di bidang pendidikan, industry, militer, social-ekonomi dan politik yang selama ini tertinggal dari Negara Barat. Kebijakan restorasi Meiji ini di jalankan oleh Jepang berlangsung dari tahun 1868 – 1912,²⁵ waktu yang relative pendek, namun menghasilkan berbagai kemjuan yang luar biasa bagi kemajuan Jepang. Kemajuan yang dialami Jepang tersebut merupakan transformasi yang paling luar biasa yang pernah dialami suatu bangsa dalam kurun waktu yang sesingkat itu.

Revolusi di bidang pendidikan membuat Jepang muncul menjadi Negara maju di Asia, berbagai kemajuan dicapainya, terutama dibidang teknologi. Kemajuan dibidang teknologi membawa keuntungan yang sangat besar terhadap perubahan dibidang industry, sehingga kemajuan yang dicapai oleh Jepang di bidang Industri menyamai kemajuan yang telah dicapai oleh Negara-negara Barat.²⁶

Begitu pula dengan kondisi politik Jepang, semenjak mereka banyak megrim putra-putra terbaiknya untuk belajar ke Barat, perkembangan di bidang politik mengalami perubahan yang cukup besar. Perubahan yang sangat mendasar di mulai dari tahun 1868, dengan diadopsinya sistim politik yang dikenal dengan trias political. Guna melaksanakan system politik tersebut Jepang mengeluarkan undang-undang yang isinya memuat tentang pembentukan Dewan Negara (Dajokan) sebagai dasar kebijakan politik dalam Negara.²⁷ Dewan Negara tersebut terbagi dalam tiga kelompok utama yaitu, legislative, eksekutif dan yudikatif.

Perubahan besar yang terjadi pada masyarakat Jepang tersebut, membuat ia mampu mensejajarkan dirinya dengan Negara-negara Barat yang selama ini selalu menganggap Negara itu hanya dari golongan ras kelas tiga.²⁸ Luar biasanya Jepang tidak meninggalkan nilai-nilai social budayanya sendiri, walaupun mereka sudah menyerap berbagai kemajuan ilmu dari Barat.

Semenjak kemajuan yang dialami oleh Jepang diberbagai bidang, terutama teknologi industri, mereka mulai melirik daerah-daerah yang dapat memberikan bahan baku dan pasar. Disamping dorongan

²⁴ Kenneth B. Pyle. *Generasi Baru Zaman Meiji ; Pergolakan Mencari Identitas Nasional (1885 – 1895)*. (Jakarta : Gramedia. 1988). hal 2.

²⁵ *Ibid.* hal. 3.

²⁶ Meta Sekar Puji Astuti. *Apakah Mereka Mata-mata ? ; Orang-orang Jepang Di Indonesia (1868-1942)*. (Yogyakarta : Ombak. 2008). hal. 24.

²⁷ *Ibid.* hal. 24

²⁸ *Op.,cit.* Kenneth B. Pyle. hal. 234.

jiwa ekspansionisme bangsa Jepang sendiri untuk membuktikan ke mata dunia bahwa mereka bukan bangsa kelas bawah.²⁹

Ekspansi Jepang pertama ditujukan ke Cina, dengan pernyataan perangnya pada tanggal 1 Agustus 1894, Jepang resmi melakukan serangan ekspansinya ke Cina. Perang antara Jepang dan Cina ini kemudian dikenal dengan perang *Sino - Jepang*, dalam perang ini Jepang dapat menguasai Cina. Setelah Cina dapat di kalahkan, kemudian Jepang mengarahkan ekspansinya ke Rusia. Perang Jepang dengan Rusia akhirnya hanya menghasilkan Taiwan bagi Jepang, ditambah separuh dari Sakhalin dan Korea.³⁰ Kondisi ini membawa keyakinan bagi Jepang bahwa mereka mampu sejajar dengan negara-negara Barat, keberhasilan Jepang mengalahkan Rusia juga menjadi salah satu pendorong dari bangkitnya semangat nasionalisme dan rasa kebangsaan di kawasan Asia.

Kebijakan Jepang untuk menjadikan kawasan selatan dan utara sebagai daerah perluasan kekuasaan dan perpindahan penduduk Jepang, merupakan sebuah kebijakan yang telah dipersiapkan oleh bangsa Jepang jauh-jauh hari. Dalam kehidupan masyarakat Jepang dikenal dengan istilah *Nanshin-ron*, apabila diartikan dalam bahasa Indonesia, adalah jika penduduk Jepang, ingin lebih berutang dalam kehidupannya maka diharuskan pindah kebagian selatan Jepang yaitu kawasan Asia Tenggara. Kebijakan ini telah diperkenalkan semenjak tahun 1887 oleh *Shiga Shigetaka* dalam karyanya yang berjudul *Nanyo-Jiji*³¹.

Faktor-faktor inilah yang mendorong bangsa Jepang banyak pindah ke kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Semenjak Jepang terbuka dengan dunia luar banyak penduduknya yang juga berusaha untuk mencari kehidupan baru di kawasan selatan Jepang. Umumnya orang-orang Jepang yang bekerja pada sektor perdagangan kecil dan pelacur, mereka inilah yang sering mengirimkan uang ke Jepang, sehingga menghasilkan devisa yang cukup besar guna mempercepat proses kemajuan bagi ekonomi Jepang.

Pada awal abad ke-20, Jepang mengalami "Demokrasi Taisho" yang dibayang-bayangi bangkitnya ekspansionisme dan militerisme Jepang. Semasa Perang Dunia I, Jepang berada di pihak Sekutu yang menang, sehingga Jepang dapat memperluas pengaruh dan wilayah kekuasaan. Jepang terus menerus menjalankan politik ekspansionis dengan menduduki Manchuria pada tahun 1931. Dua tahun kemudian, Jepang keluar dari Liga Bangsa-Bangsa setelah mendapat kecaman

²⁹ *Ibid.*, hal 240.

³⁰ *Perang Dunia Ke Dua dan Pendudukan Jepang* diambil dari www.swaramuslim.com diambil pada tanggal 22 Juli 2009

³¹ Lot.cit hal 7

internasional atas pendudukan Manchuria. Pada tahun 1936, Jepang menandatangani Pakta Anti-Komintern dengan Jerman Nazi, dan bergabung bergabung bersama Jerman dan Italia membentuk blok poros pada tahun 1941.

Bulan Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe sebagai Perdana Menteri Jepang. Sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Jepang tidak menghendaki melawan beberapa negara sekaligus, namun sejak pertengahan tahun 1941 mereka melihat dan merasa Amerika Serikat, Inggris dan Belanda harus dihadapi sekaligus, apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara.

Kondisi ini juga dipicu oleh sikap Amerika yang melancarkan embargo minyak bumi kepada Jepang, padahal minyak bumi merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan Jepang baik untuk mendukung perindustrian di Jepang, maupun untuk keperluan pasukan perang. Admiral Isoroku Yamamoto, Panglima Angkatan Laut Jepang, mengembangkan strategi perang yang sangat berani, dengan mengerahkan seluruh kekuatan armadanya untuk melakukan dua operasi besar.

Bangsa Jepang mengumumkan kepada seluruh penduduknya yang berada diluar Jepang untuk segera kembali ke Jepang, untuk itu pemerintah Jepang mengirimkan beberapa buah kapal yang bertugas untuk membawa penduduk kembali ke Jepang. Sehingga sebelum penyerang banyak pedagang-pedagang Jepang yang ada di Indonesia meninggalkan harta mereka, bagi yang tidak sempat meninggalkan Indonesia oleh Belanda mereka di buang ke Australia.

Perpindahan orang Jepang dari kawasan selatan, dilanjutkan dengan serangan angkatan laut Jepang ke seluruh kawasan di Asia Pasifik. Serangan itu dilakukan dengan menggunakan 6 kapal induk (pengangkut pesawat tempur), 10 kapal perang, 18 kapal penjelajah berat, 20 kapal penjelajah ringan, 4 kapal pengangkut perlengkapan, 112 kapal perusak, 65 kapal selam serta 2.274 pesawat tempur. Kekuatan pertama, yaitu 6 kapal induk, 2 kapal perang, 11 kapal perusak serta lebih dari 1.400 pesawat tempur, tanggal 7 Desember 1941, akan menyerang secara mendadak basis Amerika Serikat di Pearl Harbor kepulauan Hawaii.

2. Jepang Menghadapi Perang Pasifik

Serangan Jepang ke Pearl Harbor tersebut menimbulkan reaksi yang cukup keras terhadap para sekutu Amerika, begitu pula dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborgh Stachouwer menyatakan perang terhadap Jepang, lima jam setelah serangan itu dilakukan. Selain serangan ke Pearl Harbao, Angkatan Laut Jepang bertugas untuk mendukung Angkatan Darat dalam Operasi Selatan,

yaitu penyerangan atas Filipina dan Malaya serta Singapura, yang akan dilanjutkan ke Jawa. Adapun pasukan yang dikerahkan ke Asia Tenggara adalah 11 Divisi Infantri yang didukung oleh 7 resimen tank serta 795 pesawat tempur. Seluruh operasi direncanakan selesai dalam 150 hari³².

Dalam serangannya ke selatan, bala tentara Jepang telah memasuki wilayah Hindia Belanda pada awal tahun 1942. Dengan kekuatan yang tak sebanding, yaitu empat divisi militer Hindia Belanda atau sekitar 40.000 personil dibawah pimpinan Jenderal H. Ter Poorten, melawan enam sampai delapan divisi tentara Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Hitoshi Imamura sehingga perang antara Jepang dan Belanda yang tidak berlangsung lama. Pada Januari-Februari secara bertahap Jepang berhasil menduduki Tarakan, Kalimantan Timur kemudian melaju ke Balikpapan, Pontianak, Samarinda dan akhirnya Banjarmasin.

Pertempuran di Jawa berakhir ketika pada 1 Maret 1942 Tentara Keenambelas Jepang berhasil mendarat di tiga tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, Eretan Wetan, Jawa Barat dan Kragan, Jawa Tengah. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 7 Maret 1942 Jenderal H. Ter Poorten telah menyerah tanpa syarat di Kalijati, Lembang³³. Mulailah babak baru dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, awalnya kedatangan Jepang dipandang sebagai pihak yang akan membantu Indonesia dalam mewujudkan cita-cita memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, namun kebijakan Jepang ternyata jauh lebih kejam dibandingkan dengan cara Belanda memperlakukan bangsa Indonesia, sehingga rasa simpatik berubah menjadi benci..

Perang Pasifik ini berpengaruh besar terhadap gerakan kemerdekaan di negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia-Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, batu bara guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Sumber daya alam di Jawa dan Sumatera dirancang oleh Jepang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara. Diawal kedatangannya Jepang meneriakkan Slogan 3 A, (Nipon Cahaya Asia, Nipon Pemimpin Asia, Nipon Pelindung Asia) Slogan ini menarik minat dan respon dari para pemimpin bangsa, namun dalam kenyataannya Jepang tetap bekerja demi kejayaan dan kebesaran bangsa dan negaranya.

³² *DJB pada masa pendudukan Jepang* unit Khusus Museum Perbankan di Indonesia : Sejarah Pra Bank Indonesia diambil dari Laporan Sejarah Bank Indonesia www.bankIndonesia.com Pada tanggal 22 Juli 2009

³³ Sejarah Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) diambil dari www.wikipedia.com diambil pada tanggal 22 Juli 2009

Jepang dalam menjalankan politik dan penjajahnya di Asia, melakukan berbagai kesalahan yang menimbulkan rasa tidak simpati dari negara-negara yang ada di Asia, seperti yang dirasakan oleh rakyat Indonesia, tiga kesalahan besar meliter Jepang terhadap bangsa Indonesia.

1. Kerja paksa: banyak laki-laki Indonesia diambil dari tengah keluarga mereka dan dikirim hingga ke Burma untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan banyak pekerjaan berat lainnya dalam kondisi-kondisi yang sangat buruk. Ribuan orang mati atau hilang.
2. Pengambilan paksa: tentara-tentara Jepang dengan paksa mengambil makanan, pakaian dan berbagai pasokan lainnya dari keluarga-keluarga Indonesia, tanpa memberikan ganti rugi. Hal ini menyebabkan kelaparan dan penderitaan semasa perang.
3. Perbudakan paksa terhadap perempuan: banyak perempuan Indonesia yang dijadikan "wanita penghibur" bagi tentara-tentara Jepang. Selain itu, Jepang menahan banyak warga sipil Belanda di kamp-kamp tahanan dalam kondisi-kondisi yang sangat buruk, dan memperlakukan tahanan perang militer di Indonesia dalam keadaan yang buruk pula.

Prilaku ini ternyata juga dirasakan oleh hampir seluruh negara yang diduduki oleh Jepang, kondisi ini juga menyebabkan Jepang dengan sangat cepat bisa ditaklukan oleh negara-negara sekutu dalam Perang dunia Ke II. Dalam konteks Indonesia penjajahan Jepang telah menimbulkan perubahan yang luar biasa, Berikut ini berbagai kebijakan pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia.

A. Bidang Politik

Pada masa awal pendudukan, Jepang menyebarkan propaganda yang menarik. Sikap Jepang pada awalnya menunjukkan kelunakan, misalnya mengizinkan bendera Merah Putih dikibarkan di samping bendera Jepang, melarang penggunaan bahasa Belanda, dan mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dan mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Kebijakan Jepang yang lunak ternyata tidak berjalan lama. Jenderal Imamura mengubah semua kebijakannya. Kegiatan politik dilarang dan semua organisasi politik yang ada dibubarkan. Sebagai gantinya Jepang membentuk organisasi-organisasi baru. Tentunya untuk kepentingan Jepang itu sendiri. Organisasi-organisasi yang didirikan Jepang antara lain Gerakan Tiga A, Putera, dan Jawa Hokokai.

a. Gerakan Tiga A

Gerakan Tiga A dibentuk pada bulan Maret 1942 dan diketuai oleh Mr. Syamsuddin. Gerakan Tiga A terdiri dari Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Tujuan gerakan ini adalah untuk menghimpun potensi bangsa guna kemakmuran bersama. Ternyata Gerakan Tiga A tidak berumur lama karena dirasa kurang efektif oleh Jepang sehingga dibubarkan, sebagai gantinya dibentuk Putera (Pusat Tenaga Rakyat).

b . Pusat Tenaga Rakyat (Putera)

Pada tanggal 1 Maret 1943 Jepang membentuk Putera. Gerakan ini dipimpin oleh tokoh empat serangkai yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansyur. Bagi para pemimpin Indonesia, Putera bertujuan untuk membangun dan menghidupkan segala apa yang dirobokkan oleh imperialis Belanda. Sedangkan bagi Jepang, Putera bertujuan untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha perangnya. Putera lebih bermanfaat bagi bangsa Indonesia daripada bagi Jepang. Putera lebih mengarahkan perhatian rakyat kepada kemerdekaan daripada kepada usaha perang pihak Jepang. Oleh karena itu kemudian Jepang membentuk Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa).

c . Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa)

Pada bulan Maret 1944 pemerintah Jepang membentuk Jawa Hokokai. Jawa Hokokai dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah sehingga pucuk kepemimpinan langsung dipegang oleh Gunseikan. Himpunan ini mempunyai tiga dasar yaitu mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bukti. Jawa Hokokai mempunyai tugas antara lain mengerahkan rakyat untuk mengumpulkan padi, besi tua, pajak, dan menanam jarak sebagai bahan baku pelumas untuk Jepang. Pada tanggal 5 September 1943 membentuk Cuo Sangi In (Badan Pertimbangan) atas anjuran Perdana Menteri Hideki Tojo. Ketua Cuo Sangi In dipegang oleh Ir. Soekarno. Tugas badan ini adalah mengajukan usul kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah mengenai tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer.

B. Bidang Ekonomi

Pada awal pendudukan Jepang, ekonomi Indonesia mengalami kelumpuhan obyek-obyek vital seperti pertambangan dan industri dibumihanguskan oleh Sekutu. Untuk menormalisasi keadaan, Jepang banyak melakukan kegiatan produksi. Semua kegiatan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang. Misalnya dengan

membangun pabrik senjata dan mewajibkan rakyat menanam pohon jarak. Oleh karena itu Jepang menerapkan sistem autarki. Sistem autarki adalah tiap-tiap daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk membangun fasilitas perang, Jepang memerlukan banyak tenaga kasar. Tenaga kasar yang digunakan untuk kerja paksa dinamakan romusha. Kehidupan romusha sangat mengenaskan. Mereka hidup menderita, miskin, kelaparan, dan tidak jarang terjadi kematian. Selain dengan romusha, Jepang juga mengeksploitasi sumber daya alam terutama batu bara dan minyak bumi.

C. Bidang Sosial

Pada masa Jepang banyak rakyat Indonesia yang dipaksa menjadi romusha. Mereka dipaksa bekerja keras tanpa diberi upah dan makanan. Akibatnya banyak romusha yang meninggal dan terjangkit wabah penyakit. Karena kemelaratan yang dialami para romusha tersebut, muncul golongan baru yang disebut golongan kere atau gembel. Jepang juga mengatur sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat. Stratifikasi sosial pada masa pendudukan Jepang terdiri dari Golongan atas atau pertama (Jepang), Golongan kedua (pribumi), dan Golongan ketiga (Timur Asing).

D. Bidang Militer

Dalam rangka memperkuat kedudukan dalam Perang Pasifik, Jepang melakukan mobilisasi para pemuda untuk dibina dalam latihan militer. Jepang membentuk organisasi-organisasi semi militer dan organisasi militer, seperti Heiho dan Peta, disamping itu Jepang juga membentuk Organisasi Semimiliter seperti Seinendan, Fujinkai, Keibodan, Suishintai, Gakukotai dan Jibakutai³⁴.

Berdasarkan cerita diatas terlihat bahwa kedatangan Jepang ke seluruh kawasan di Asia Tenggara lebih disebabkan oleh tingginya kebutuhan mereka akan sumber daya alam terutama minyak bumi dan batu bara. Kondisi ini sesungguhnya disebabkan oleh keputusan Amerika yang memaksa Jepang keluar dari politik isolasinya, sehingga mendorong Jepang menjadi negara yang terbuka terhadap dunia luar terutama barat. Kondisi inilah yang mendorong Jepang menjadi negara industri yang maju, sehingga bisa memiliki tentara perang yang kuat.

Kedatangan Jepang ke negara-negara Asia, terutama Indonesia telah menimbulkan dampak yang luar biasa dalam berbagai kehidupan masyarakat, baik bagi kalangan elit maupun masyarakat biasa. Kalangan elit merasa bahwa kedatangan Jepang akan mempercepat kemerdekaan

³⁴ Sejarah Penduduk Jepang di Indonesia diambil dari [www. wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) pada tanggal 22 Juli 2009

Indonesia sedangkan kalangan masyarakat telah dimanfaatkan Jepang sebagai romusha atau pasukan cadangan yang dipersiapkan untuk menghadapi sekutu dalam perang dunia ke II.

3. Kebutuhan Jepang terhadap Romusha

Pada masa Jepang berkuasa di Asia, mereka membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak, kondisi ini disebabkan karena ketika mereka merebut hampir seluruh negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dan Semenanjung Korea mereka terus menerus menghadapi perlawanan dari negara-negara yang sebelumnya telah menduduki kawasan tersebut. Langkah pertama yang dilakukan Jepang adalah upaya untuk menghapus kultural barat yang telah hinggap di seluruh kawasan tersebut, yang kedua Jepang mengeruk sumber sumber kekayaan alam strategi yang ada di masing-masing negara Asia yang telah dikuasai Jepang. Pasokan sumber sumber alam ini digunakan untuk membiayai dan bahan bakar bagi kapal perang Jepang yang saat itu sedang menghadapi Sekutu di Asia Timur dan Pasifik.

Luasnya daerah pendudukan Jepang, membuat Jepang memerlukan tenaga kerja yang begitu besar. Tenaga kerja ini dibutuhkan untuk membangun kubu pertahanan, lapangan udara darurat, gudang bawah tanah, jalan raya dan jembatan, dengan tujuan akhir bisa membantu Jepang dalam menghadapi Sekutu. Tenaga kerja ini diambil dari daerah-daerah yang memiliki penduduk cukup padat, seperti Cina dan Indonesia serta negara-negara lain yang dijajah Jepang. Dalam perkembangan selanjutnya para tenaga kerja ini dipaksa untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang diberikan Jepang dalam waktu yang singkat, melihat penderitaan yang mereka alami ketika bekerja maka para pekerja ini lebih populer dengan sebutan dengan Romusha.

Romusha dapat diartikan sebagai seorang pekerja sukarela yang melakukan pekerjaan sebagai buruh. Dalam pemahaman masyarakat Jawa, romusha lebih diartikan sebagai seorang kuli yang dimobilisasi oleh Jepang untuk mengerjakan proyek-proyek besar umumnya untuk pembangunan infrastruktur Jepang. Penduduk Pulau Jawa yang direkrut oleh tentara Jepang sebagai romusha umumnya berasal dari petani-petani biasa, yang terprovokasi oleh pengumuman Jepang³⁵.

Pengumuman yang dibuat Jepang, disampaikan oleh para lurah dan perangkat desa mereka inilah yang dimanfaatkan Jepang sebagai media propoganda dan intimidasi sehingga banyak pemuda yang tertarik atau terpaksa untuk mengikuti kebijakan Jepang dalam perang. Sebelum

³⁵ Julianto Ibrahim *makalah* "Politik Ekonomi Pendudukan Jepang di Surakarta (1942-1945) dipresentasikan dalam seminar internasional " Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang tanggal 28-29 Juli 2005

berangkat para pemuda tersebut dijanjikan akan mendapat gaji, makan dan jamian kesehatan selama dipekerjakan Jepang, sehingga ada yang sukarela untuk mendaftar sebagai tenaga kerja, namun kebanyakan mereka terpaksa untuk ikut sebagai tenaga kerja Jepang³⁶. Di samping itu dalam perekrutan romusha Jepang juga menyebarkan informasi mencari pemuda yang akan disekolah oleh Jepang, propogandi ini juga menjadi alat yang efektif bagi Jepang dalam merekrut romusha.

Romusha yang berasal dari Pulau Jawa lebih kurang 300.000 orang yang dikirim ke berbagai negara di Asia Tenggara, 70.000 orang diantaranya dalam kondisi menyedihkan dan berakhir dengan kematian³⁷. Jika ditambah dengan angka dari daerah dan negara lain maka bisa kita bayangkan jumlah korban yang meninggal akibat romusha pasti sangatlah banyak. Semua berawal dari ambisi Jepang menaklukkan Asia, sehingga terjadinya musibah kemanusiaan tersebut.

Bangsa Indonesia, kendati hanya 3,5 tahun di kuasai Jepang, namun tetap saja meninggalkan kenangan pahit yang luar biasa. Romusha dan Iugun Yanfu terbukti merupakan salah satu tragedi kemanusiaan yang luar biasa bagi negeri ini. Seperti yang terlihat Di Muara Cibadur, Pantai Bayah, Banten. Bayah saat itu dikenal sebagai penghasil batu bara, dan Negeri Matahari Terbit itu sangat antusias mengeksplotasi batu bara yang digunakan untuk biayai perang dan energi utama dalam mengerakan seluruh kapal-kapal perang Jepang, agar mampu menghadapi sekutu yang dikomandoi AS.

Di samping itu, batu bara Bayah juga dimanfaatkan Jepang untuk bahan bakar kereta api, kapal laut, dan pabrik-pabrik perusahaan Jepang. Untuk melakukan eksplotasi besar-besaran di Bayah tentara Jepang diperkirakan memakan korban kurang lebih 93.000 romusha. Sebagian besar romusha itu didatangkan dari Jawa Tengah, seperti Purworejo, Kutoarjo, Solo, Purwodadi, Semarang, Yogyakarta, dan lain-lain. Para romusha diperintahkan untuk membuat lubang-lubang tambang batu bara di Gunung Madur serta pembuatan rel kereta api Bayah-Seketi, dengan harapan batu bara yang dihasilkan di Bayah bisa segera sampai kelaut lepas.

Saat ini di Bayah masih terlihat beberapa peninggalan zaman romusha seperti Sumur romusha, stasiun kereta api, goa-goa bekas tambang batu bara di zaman penjajahan Jepang, kuburan romusha,

³⁶ Frank Dhont *Makalah* " Kesaksian Kami : Romusha yang masih tersisa" dipresentasikan dalam seminar internasional " Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang tanggal 28-29 Juli 2005

³⁷ Rahmat Hidayat, Resensi Buku Jejak-jejak Kekejaman Jepang, diambil dari Blog Rahmat Hidayat diambil pada tanggal 22 Juli 2009

makanan romusha. Disamping dipekerjakan di Pulau Jawa ada juga Romusha yang dipekerjakan oleh Jepang keluar dari daerah asal mereka, seperti Romusha dari Nusa Tenggara Timur di kirim oleh Jepang ke Bintuni, Papua untuk mengerjakan benteng pertahanan Jepang³⁸.

Romusha ternyata bukan saja bekerja di negara tempat mereka berasal. Para romusha ini juga dibawa ke luar negeri oleh tentara Jepang. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya para romusha terutama berasal dari Jawa yang dipekerjakan di luar negeri, seperti diungkapkan dalam perjalanan hidup Karja Wiredja meninggalkan desanya di Matukara, Banjarnegara, Jawa Tengah, untuk menjadi romusha di Thailand. "Waktu itu lurah bilang kita boleh ikut Nippon," sehingga berangkatlah pemuda lugu tersebut untuk jadi mandor pembangunan rel kereta api sepanjang 415 kilometer antara Thailand dan Burma³⁹.

Proyek rel kereta itu melibatkan 45.000 romusha Indonesia, 85.000 dari Malaysia (orang Cina, India maupun Melayu), 180.000 dari Burma serta 12.000 serdadu Jepang yang bertugas mengawasi dan mengatur pekerjaan. Selain romusha, proyek tersebut juga memperkerjakan 68.000 tawanan perang dari berbagai kebangsaan, terutama Inggris, Belanda dan Australia. dari semuanya, 100.000 di antaranya meninggal dunia akibat malaria maupun kebrutalan serdadu Jepang.

Tentara Jepang juga membangun sebuah jembatan di Thailand yang menghubungkan Thailand dengan Birma. Dalam mengerjakan proyek tersebut tentara Jepang melibatkan sebanyak 61.000 tawanan perang tentara sekutu, yang terdiri dari tentara Belanda, Inggris, Australia, dan tentara Amerika. Tidak kurang 16.000 orang dari pekerja tawanan perang itu meninggal dan dikuburkan pada pekuburan orang asing di sekitar lokasi jembatan tersebut. Jumlah ini belum terhitung 200.000 pekerja "romusha" dari Asia, termasuk Indonesia – di mana sekitar 80.000 jiwa di antaranya menjadi korban dalam pembangunan "jembatan maut" tersebut. Puluhan ribu "romusha" selebihnya, tetap terpendam sebagai bagian dari misteri keganasan Perang Dunia ke II – tidak ada satu-pun orang yang tahu, dan tidak juga pernah ada yang diberitakan selamat kembali ke negeri asalnya⁴⁰.

Besi bangunan yang dipergunakan untuk membangun Jembatan tersebut dibawa dari pelabuhan "Tandjoeng Priok", Jakarta. Setelah

³⁸ Jejak kekejaman Jepang di Romusha di Banten Selatan diambil dari Blog www.wongbanten.com diambil pada tanggal 22 Juli 2009

³⁹ "Kisah Hidup Romusha Jawa" sisa Kejahatan Perang Jepang di Perang Dunia kedua, diambil dari China History Forum pada tanggal 22 Juli 2009

⁴⁰ A. Hafied A. Gany "Terdampar Di Jembatan Api Maut Justru menemukan obsesi Makasar di saat remaja diambil dari www.geocities.com/hafiedgany pada tanggal 22 Juli 2009

jembatan selesai dibangun oleh romusha, pihak Jepang hanya mampu memanfaatkan bangunan tersebut selama 21 bulan untuk membawa logistik dari thailand ke Birma. Bangunan Jembatan ini dihancurkan oleh Tentara Sekutu, dengan senjata tercanggih pada masa itu, dikenal dengan “Revolutionary Radio Controlled Azimuth Only (AZON) Bomb”⁴¹.

Dalam konteks Sumatera Barat, tentara Jepang juga mengirim banyak romusha untuk bekerja di daerah ini, salah satu kawasan yang dijadikan pusat pekerjaan romusha di Sumatera Barat adalah di daerah Sijunjung, yaitu membangun lintas jalan kereta api dari Logas Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatra Barat sampai Logas Provinsi Riau yang jaraknya 220 kilo meter. Lebih dari 6000 orang Romusha mati akibat tertimbun batu di daerah Ngalau Cigak Nagari Silokek.⁴² Berdasarkan catatan sejarah banyak Romusha terutama yang berasal dari Jawa yang meninggal ketika membangun rel kereta api antara Muaro Sijunjung dan Loge. Tenaga romusha yang bekerja di suatu kawasan ternyata juga melibatkan penduduk di sekitar wilayah tersebut, namun penderitaan yang mereka alami jauh lebih ringan dibandingkan dengan romusha yang didatangkan dari luar daerah⁴³.

Cerita diatas menggambarkan bahwa kebutuhan Jepang untuk tenaga kerja sangatlah tinggi, sebab medan perang tentara Jepang sangatlah luas, disamping itu musuh yang harus dihadapi tentara Jepang sangatlah banyak, kondisi inilah yang menyebabkan Jepang harus bergerak cepat untuk memenuhi seluruh kebutuhan perang mereka. Akibatnya Jepang dalam mengerjakan sebuah proyek pembangunan atau membuka areal pertambangan selalu menggunakan jumlah masyarakat yang begitu banyak dengan harapan proyek yang mereka bangun bisa selesai secepat mungkin dengan tujuan bisa membantu mereka dalam menghadapi tentara sekutu.

Romusha yang dipekerjakan Jepang, umumnya berasal dari daerah yang mereka duduki. Kondisi inilah yang menyebabkan para romusha banyak berasal dari Indonesia terutama dari suku bangsa jawa, keadaan ini disebabkan saat itu penduduk di Indonesia telah cukup padat terutama penduduk yang berada di Pulau Jawa sehingga banyak romusha yang diambil dari jawa yang di kirim hampir keseluruh wilayah pendudukan Jepang. Disamping penduduk pribumi, Jepang juga memanfaatkan tentara tawan sekutu yang berasal dari Belanda, Inggris,

⁴¹ Ibid

⁴² Andwi Prima Valentina, Jejak-Jejak Romusha di Silokek Kabupaten Sijunjung diambil dari Blog AndwiPrima.Woorpress.com pada tanggal 26 Juli 2009

⁴³ Munir Taher “Romusha Aman di Silungkang” Silungkang Dalam Sejarah diambil dari Blog www.Munirtaher.woorpres.com diambil pada tanggal 22 Juli 2009

Australia dan lain-lain yang dipekerjakan Jepang dalam membangun proyek-proyek kebutuhan Jepang dalam perang.

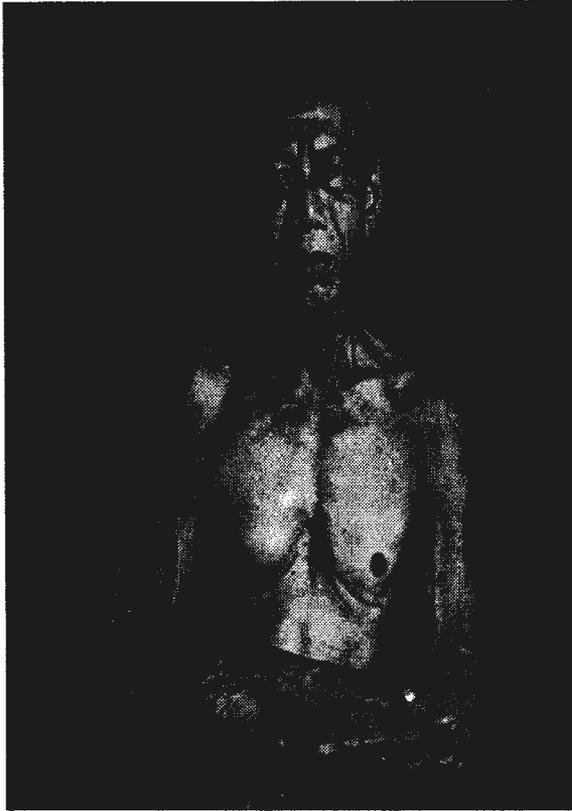


Foto 1.

Dulrahman : Salah Seorang Korban Romusha di Durian Gadang Sijunjung, Sumatera Barat yang berasal dari Jawa Tengah.

Disamping kaum laki-laki, tentara Jepang juga membutuhkan para-para wanita cantik yang dimanfaatkan untuk memuaskan “nafsu tentara Jepang” atau lebih dikenal dengan Jugun Yanfu. Jugun Yanfu diambil Jepang dari seluruh negara yang didudukinya sehingga korban Jugun Yanfu terdapat di Korea, Tiongkok, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Myanmar, Vietnam, Indonesia, India, Indo, dan wanita kepulauan Pasifik lainnya. Jumlah Jugun Yanfu selama perang diperkirakan jumlahnya mencapai 20.000 dan 30.000 wanita, tetapi menurut beberapa Jugun lanfu yang masih hidup jumlah ini sepertinya perkiraan terendah.⁴⁴

⁴⁴ Makna Jugun Yanfu diambil dari www.gontenk'sblong.wordpress.com diambil pada tanggal 26 Juli 2009



Foto 2.

Beberapa wanita yang menjadi Jugun Ianfu, mereka berasal dari beberapa daerah di Asia.

Sumber : Uchonnara (Internet) tanggal 29 Juli 2008.

Jugun Ianfu pada tahap awal dikumpulkan atau diambil dengan cara konvensional. Diantaranya melalui iklan di koran-koran yang terbit di Jepang dan koloni Jepang di Korea, Manchukuo, dan daratan Tiongkok. Kebanyakan yang menanggapi iklan tersebut adalah pelacur dengan menawarkan jasa mereka secara sukarela. Ada pula karena desakan ekonomi dijual oleh keluarga mereka sendiri kepada militer, tetapi kegiatan tersebut cepat berhenti, terutama dari Jepang, karena adanya reaksi yang menentang hal itu. Akhirnya Menteri Urusan Luar Negeri menolak pengeluaran visa perjalanan bagi pelacur Jepang, karena merasa akan mencemari nama Kekaisaran Jepang.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Jepang tersebut, membuat militer mengalami kesulitan untuk memperoleh perempuan yang berprofesi sebagai pekerja seks. Guna mengatasi hal itu, militer Jepang kemudian mencari wanita penghibur di luar Jepang, terutama dari Korea dan Tiongkok. Banyak wanita dibohongi dan ditipu untuk bergabung ke asrama Jugun Ianfu. Lainnya diculik oleh tentara Jepang di medan perang. Sedangkan Jugun Ianfu dari Indonesia diperoleh Jepang melalui jalan penipuan dan perampasan, Jepang melalui kaki tangan di desa-desa menyampaikan informasi akan menyekolahkan wanita-wanita Indonesia, sehingga menarik minat wanita untuk mengikuti propaganda Jepang tersebut.

Dalam sebuah kesaksian yang ditulis oleh wanita korban Iugun Yanfu di Yogyakarta, tergambar kisah sedih yang harus diterima oleh para korban Iugun Yanfu saat pendudukan Jepang. Menurut pengakuan Aminah, salah seorang yang mengalami pelayanan nafsu seks Jepang, "Ketika Jepang masuk ke Indonesia, tidak lama kemudian saya dan puluhan wanita lainnya dibawa ke Kalimantan dimasukkan ke dalam kamp. Di sana kami harus melayani nafsu seks militer Jepang pada malam hari dan sore, malam sampai pagi ganti orang sipil".



Foto 3.

Aminah Korban Nafsu Seks Jepang Pada Perang Dunia II
Sumber Foto : Internet)

Aminah diharuskan melayani nafsu binatang belasan hingga puluhan tentara Jepang. Tidak ada pengecualian, walaupun pada saat mereka sedang datang bulan. (Sebelum ke Kalimantan untuk menjadi budak seks, dia harus diperiksa dokter dan dinyatakan sehat serta bersih, Setelah mendapatkan surat keterangan tersebut, baru dia dipaksa untuk ikut ke kamp militer Jepang yang berada di Pulau Kalimantan. Ada 22 kamar berisikan perempuan muda di Kamp tersebut, sebagian besar masih anak-anak dan remaja. Dalam sehari-semalam, para Iugun Yanfu harus melayani 10-15 orang, penderitaan tersebut harus mereka jalani selama lebih tiga tahun menjadi budak nafsu⁴⁵.

Tentara Jepang dikenal sebagai salah satu kesatuan yang sangat membutuhkan wanita dalam aktifitas perang mereka, faktor utama yang mendorong mereka membutuhkan kaum wanita adalah karena semangat dan daya juang tentara Jepang sangatlah tinggi sehingga kehadiran wanita diharapkan mampu mempertahankan semangat yang mereka miliki.

⁴⁵ Ribuan Budak Seks Zaman Jepang Tunggu Sikap Pemerintah diambil dari www.YogyakartaCybernews.com, pada tanggal 26 Juli 2009.

Kondisi inilah yang menyebabkan Jepang membutuhkan Iugun Yanfu yang umumnya diambil dari kawasan-kawasan yang diduduki serta dari orang-orang Eropah yang tak sempat melarikan diri ketika tentara Jepang memasuki kawasan mereka.

4. Kebijakan Jepang Terhadap Romusha

Penduduk Jepang yang berlangsung dari 1941 -1945, merupakan masa kelam dalam sejarah kehidupan masyarakat yang telah dijadikan oleh Jepang sebagai romusha maupun Iugun Yanfu, mereka merasakan penderitaan yang sulit untuk dibayangkan oleh kita yang hidup hari ini. Berdasarkan sumber-sumber sejarah yang kita temukan jumlah romusha yang meninggal sangatlah banyak, sebab semua pembangunan yang dilaksanakan oleh Jepang harus diselesaikan dalam waktu singkat, sehingga Jepang mengeksploitasi tenaga kerja untuk dapat menyelesaikan pembangunan itu secepatnya.

Pola Jepang dalam mengambil Romusha, biasanya mereka langsung diambil oleh Jepang ke daerah-daerah asal mereka, biasanya dalam merekrut mereka Jepang menggunakan isu akan di sekolahkan atau dicarikan pekerjaan baru. Kondisinya yang mendorong banyaknya pemuda dari desa-desa terutama di Pulau Jawa yang ikut dan mendaftar ketika Jepang melakukan propoganda, biasanya dalam melaksanakan Propoganda Jepang juga melibatkan para kepala desa dan perangkat desa, sehingga mempercepat proses rekrutmen ini.

Prilaku Tentara Jepang ketika menghadapi Romusha sangatlah kejam dan keras, hal itu tergambar dari catatan sejarah yang disampaikan oleh seorang Romusha yang berasal dari Jawa yang dikirim oleh Jepang ke Birma. Pengakuan Ngadiyo, laki-laki kelahiran Gunung Kidul, Yogyakarta pada tahun 1912. Ia adalah salah satu korban romusha. Ngadiyo menjalani kerja paksa di Singapura, lalu dipindah di jalur kereta api Birma-Siam. Menurutnya, "Kami disuntik agar tetap sehat, tapi makanannya begitu sedikit. Banyak orang mati karena kelaparan." Ia menuturkan, jatah makanan untuk empat orang sebenarnya hanya cukup untuk satu orang. Ada juga yang mati karena beri-beri kering atau basah, juga malaria atau batuk darah. "Setiap hari tiga orang meninggal, lalu menjadi lima sampai sepuluh orang. Dua ratus orang yang berangkat bersama saya dari Singapura, mungkin hanya 70 orang yang selamat."⁴⁶ Lain lagi nasib bulan Karja pada Bulan Juli 1943 berangkatlah pemuda lugu tersebut untuk jadi mandor pembangunan rel kereta api sepanjang 415 kilometer antara Thailand

⁴⁶ Suara Merdeka (Benny Benke) "Jejak Getir Seorang Romusha" terbit 1 Maret 2004 diambil dari www.suaramerdeka.com pada tanggal 22 Juli 2009

dan Burma. Bayarannya, dua sen sehari. Selama sebulan kerja Karja mendapat gaji enam rupiah⁴⁷.

Penderitaan yang sama juga diungkapkan oleh romusha yang berasal dari negara lain seperti Tom Uren, yang berasal dari Australia, Dia mengatakan ingin memusnahkan semua orang Jepang dari muka bumi ini, karena begitu pahitnya penderitaan yang dialami ketika menjadi romusha⁴⁸. Kisah yang sama juga terjadi pada Harry Rynenberg, yang menjadi tawanan perang Jepang di Indonesia, Rynenberg mewakili ratusan ribu romusha di Thailand-Burma, maupun perempuan dari Cina, Korea, Indonesia, Inggris, Australia maupun Belanda yang dijadikan wanita penghibur yang sehari-harinya harus melayani –tepatnya diperkosa– oleh lebih dari sepuluh serdadu Jepang⁴⁹.

Dalam konteks Indonesia Kebijakan tentara Jepang terhadap romusha sesungguhnya beragam, antara satu romusha dengan romusha lainnya. Seperti yang tergambar dalam pembangunan jalan kereta api, antara Logas di Muaro Sijunjung dengan Loge di Provinsi Riau yang berjarak lebih kurang 220 kilometer. bagi romusha yang berasal dari luar etnik Minangkabau biasanya Jepang bertindak jauh lebih kejam dan keras dibandingkan dengan penduduk asli, disamping itu jenis pekerjaan yang akan dikerjakan oleh orang luar jauh lebih berat dibandingkan dengan masyarakat lokal. masyarakat pribumi atau entik minang, lebih banyak bertugas untuk mengantar logistik Jepang dari Muaro Sijunjung ke daerah pedalaman, membersihkan semak belukar, mencari kayu, sedangkan romusha dari Jawa dan luar minang biasanya diberikan pekerjaan yang berat seperti mengangkat besi rel kereta api, memasang jembatan, membelah tebing.

Romusha dari Jawa dan luar etnik minang, oleh Jepang diberikan pekerjaan berat sedangkan dalam fasilitas makan dan kesehatan ternyata tidak mendapat perhatian yang memadai dari Jepang. Jepang menerapkan kebijakan bahwa para romusha hanya diberi makan 2 kali sehari, yaitu jam 12 siang dan jam 5 sore, di luar itu para romusha dipersilahkan untuk mencari makan sendiri. Jatah nasi yang sedikit ternyata tidak dinikmati oleh semua romusha, sebab yang berhak mendapatkan jatah makan, harus telah mendapat tanda khusus dari mandor, barulah orang dapur umum memberikan mereka makan⁵⁰.

⁴⁷ Kisah Seorang Romusha Jawa ” Kejahatan Perang Jepang di Perang Dunia kedua” diambil dari <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/...09/02/ 0000. html> pada tanggal 22 Juli 2009

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Wawancara dengan Abdul Wahid mantan Walinagari Durian Gadang pada tanggal 3 Juli 2009 di Silokek Kabupaten Sinjujung.

Kondisi berbeda dihadapi oleh romusha yang berasal dari etnik lokal, disamping mereka mendapatkan pekerjaan yang tidak terlalu berat, soal makan mereka diberikan kebebasan oleh Jepang untuk memasak bahan-bahan makanan yang telah mereka bawa dari kampung masing-masing, sehingga penderitaan mereka jauh lebih berkurang dibandingkan dengan romusha dari luar minang. Dalam bidang kesehatan Jepang sama sekali tidak memperhatikan baik romusha yang berasal dari Jawa maupun etnik lokal, bagi yang sakit mereka harus berjuang sendiri untuk mencari obat. Namun romusha yang berasal dari etnik lokal umumnya hanya 15 hari, setelah itu masuk lagi rombongan berikutnya, ketika mereka sakit maka dengan cepat mereka telah kembali bebas tugas dan bisa melanjutkan pengobatan kembali di daerah mereka.

Romusha yang tidak mampu menahan sakit, akhirnya meninggal dunia, oleh Jepang jenazah ini tidak dikubur, namun dihanyutkan ke sungai-sungai yang berada di sekitar lokasi romusha. Sehingga sampai saat ini tidak ditemukan kuburan romusha, yang ada hanya jejak tempat romusha dikuburkan namun tidak ada lagi bukti-bukti nyata yang membenarkan daerah itu wilayah perkuburan romusha. Kondisi ini menyebabkan disekitar Logos dan Loge tidak kita temukan lokasi penguburan yang berisikan bekas-bekas romusha.

Bahkan ada yang lebih sadis lagi apa yang telah dilakukan tentara Jepang terhadap romusha, menurut informasi salah satu sumber yang menceritakan bahwa ada salah seorang romusha yang sedang sakit parah atau dapat dikatakan sekarat, dalam kondisi seperti itu tentara Jepang menyuruh menguburkannya, karena dianggap menjadi beban dalam melanjutkan pekerjaan.⁵¹

Begitu pula yang dialami oleh banyak kaum perempuan yang menjadi korban oleh kebijakan yang diterapkan oleh Jepang, ternyata tidak jauh berbeda dibandingkan dengan romusha. Perempuan di jadikan sebagai Jugun Ianfu adalah sebuah kebutuhan yang mendesak oleh serdadu dan pegawai sipil Jepang ketika mereka melakukan pendudukan di seluruh kawasan Asia. Hampir diseluruh kawasan yang diduduki oleh Jepang, kaum wanitanya dipaksa oleh Jepang untuk menjadi Jugun Ianfu.

Kawasan semenanjung Korea satu suara untuk mendesak Pemerintah Jepang untuk memberi ganti rugi atas semua tindakannya kepada kaum wanita di kawasan mereka. Desakan yang disuarakan oleh pemerintah dan NGO di kawasan tersebut telah memaksa pemerintah Jepang pada tanggal 18 Juli 1995, secara resmi mengeluarkan

⁵¹ Wawancara dengan

permintaan maaf atas kekejaan tentara Jepang dalam perang Asia Pasifik.

Dalam konteks Indonesia Jugun Ianfu merupakan sesuatu yang masih gelap, sebab penduduk Jepang yang singkat sehingga sulit untuk mencari data tertulis yang bisa menggambarkan bagaimana penderitaan Jugun Ianfu. Pada tahun 1993 Menteri Sosial mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa wanita-wanita Indonesia yang dijadikan Jugun Ianfu perlu dicari dan didata untuk kepentingan menuntut besarnya pampasan perang yang harus dibayar Jepang.

Kebijakan ini mendatangkan sebuah harapan cerah bagi bekas Jugun Ianfu yang hidup dalam kondisi yang memperhatikan berdasarkan data dari LBH Yogyakarta mereka mencatat bahwa pada tanggal 13 September 1993, 300 Jugun Ianfu telah melaporkan tentang kekejaman Jepang yang telah mereka rasakan. Semenjak itulah sejarah kelam yang diderita oleh Jugun Ianfu pada masa penjajahan Jepang mulai terungkap kepermukaan.

Momoye merupakan sebuah kisah yang bisa menggambarkan bagaimana kebijakan yang diterapkan Jepang kepada wanita Indonesia yang dijadikan Jugun Ianfu. Wanita yang bernama asli Mardiyem tersebut dipaksa Jepang untuk menjadi Jugun Ianfu, untuk mensukseskan dan melancarkan usahanya maka Jepang mengganti namanya menjadi momoye yang memberi kesan bahwa dia merupakan perempuan keturunan Jepang.

Buku yang diterbitkan oleh LBH Yogyakarta tersebut dengan sangat jelas menggambarkan bahwa para wanita itu diambil Jepang dengan jalan memberikan janji-janji yang menyenangkan, setelah itu para wanita tersebut dipaksa untuk menjadi Jugun Ianfu. Para wanita Jugun Ianfu buka langsung bekerja dibawah kendali tentara Jepang namun mereka bekerja pada orang-orang sipil Jepang yang memanfaatkan keberadaan tentara Jepang dengan membuka "rumah kuning" atau lokalisasi yang dipersiapkan untuk semua orang Jepang yang ada didaerah pendudukan.⁵²

Momoye atau Mardiyem dijadikan Jugun Ianfu di Telawang sebuah daerah yang terletak dipinggiran Banjarmasin. Dalam buku tersebut dia menceritakan bagaimana orang-orang Jepang memperlakukannya dan bagaimana proses keberangkatan ke Telawang. Jepang melalui kaki tangannya terutama orang-orang Indonesia yang bekerja untuk Jepang memberikan informasi bahwa mereka membutuhkan orang yang bisa bermain sandiwara dan bernyanyi. Informasi ini

⁵² A Budi Hartono dan Dadang Juliantara " *Budak Napsu Bangsa Jepang* " (Kisah Momoye, Perempauan Jugun Ianfu Pada Masa Pendudukan Jepang 1942 - 1945). Yogyakarta : LBH Yogyakarta

menarik perhatian Mardiyem kecil, apalagi informasi ini bersama dengan kedatangan grup “Panja Soerja”, sehingga memberikan keyakinan bagi Mardiyem bahwa dia betul-betul akan dilibatkan dalam kelompok kesenian.

Perjalanan Mardiyem dari Yogyakarta ke Surabaya, dari Surabaya baru dilanjutkan ke Borneo. Di Borneolah, Mardiyem baru menyadari bahwa dia direkrut bukan untuk menjadi penyanyi atau pemain sandiwara namun seorang perempuan yang dipersiapkan untuk menjadi Jugun Ianfu. Mulai saat itulah penderitaan dan kepediahan yang dideritanya sebagai Jugun Ianfu mulai dirasakannya, kondisi ini berlangsung sampai Jepang kalah.

Selama menjadi Jugun Ianfu Mardiyem sama sekali tidak pernah menerima uang, sebab pengelola Telawang berjanji akan menyerahkan uang hasil pekerjaan mereka berdasarkan kupon dan kercis yang mereka miliki. Namun ketika Jepang kalah dan perang dunia ke II, uang yang dijanjikan tidak pernah mereka terima. Pada tahun 1953, Mardiyem telah kembali ke Yogyakarta dan menikah dengan seorang suami yang memahami sejarah masa lalunya⁵³.

Mardiyem merupakan Jugun Ianfu yang bisa kembali ke daerah asalnya, ada juga Jugun Ianfu yang tidak kembali mereka terbuang dan hidup dalam keterbatasan. Sebagaimana tergambar dalam tulisan Pramudya Ananta Toer, yang menjelaskan tentang penderitaan yang sangat pedih dirasakan oleh beberapa romusha yang ditemukan ketika beliau di buang di Pulau Buru. Kebanyakan Jugun Ianfu ditinggalkan begitu saja oleh Jepang ketika mereka kalah dalam perang, sehingga banyak dari Jugun Ianfu yang tak bisa lagi kembali pulang⁵⁴.

Kegagalan Jugun Ianfu untuk kembali pulang disebabkan karena mereka tidak punya uang dan mereka malu untuk kembali sebab mereka merasa bukanlah perempuan yang suci dan bersih lagi. Kondisi inilah yang menyebabkan para Jugun Ianfu hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan karena mereka hidup dalam kondisi ekonomi yang lemah dan jauh dari komunitas mereka.

Dalam konteks Sumatera Barat, cerita tentang Jugun Ianfu sangat sulit untuk dicari, sebab masa lalu sebagai Jugun Ianfu merupakan sebuah kenangan yang ingin mereka hapus dan hilangkan dalam kehidupan mereka. Namun masyarakat mengakui bahwa masa penduduk Jepang di beberapa daerah yang jumlah konsentrasi tentara Jepang cukup banyak, pihak Jepang mendirikan “rumah kuning”. Sebagaimana yang terungkap dalam keterangan yang disampaikan oleh

⁵³ *Ibid.* hal 47

⁵⁴ Pramudya Ananta Toer “Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer” Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2001

Abdul Wahid yang menjelaskan ketika dalam pembangunan jalan kereta Api Logos ke Loge dirumah Kapiten Jepang terdapat seorang wanita yang dikenal sebagai “gundik” tentara Jepang.

C. ROMUSHA DI NAGARI DURIAN GADANG

1. Lokasi dan Jenis Pekerjaan Romusha

Nagari Durian Gadang adalah sebuah nagari yang terletak di kecamatan Sijunjung kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini terdiri dari beberapa buah jorong antara lain jorong Silukah, jorong Silokek dan jorong Padang Tarok. Penduduk Durian Gadang lebih kurang 4.100 jiwa dengan mata pencaharian masyarakat, sebagai petani dan pendulang emas. Jarak dari kota Muaro Sijunjung dan Durian Gadang lebih kurang 12 kilometer dan dapat ditempuh baik dengan kederaan roda dua maupun roda empat. Jalanya menyusuri kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kuantan, tidak mengherankan jika bepergian ke Durian Gadang, di sepanjang Batang Kuantan akan didapati tambang emas milik masyarakat disekitar itu.

Nagari Durian Gadang inilah saksi bisu kekejaman Jepang terhadap rakyat Indonesia, ribuan pekerja Romusha (kerja paksa) di datangkan dari seluruh pelosok tanah air untuk pembuatan lintas rel kereta api dari Muaro Sijunjung Kab Sijunjung sampai Logas Provinsi Riau yang berjarak lebih kurang 220 km. Logas saat ini masuk dalam kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) kabuapten baru di Riau. Logas sendiri merupakan sebuah wilayah atau daerah yang terletak antara Talauk Kuantan dan Pekanbaru. Rencananya jalan kereta api yang dibangun Jepang ini berfungsi untuk transportasi yang lebih cepat untuk menyambung ke perjalanan laut terutama menuju Jepang. Harapan Jepang adalah jika Jepang bisa dalam waktu lama berkuasa di Indonesia maka akan digunakan untuk mensuplai senjata dan membawa hasil bumi yang ada di Riau untuk dibawa ke Teluk bayur.



Foto 4.

Lokomotif ini adalah salah satu sisa perkereta apian yang pernah ada dan beroperasi dari Muaro Sijunjung menuju Logas begitu pula sebaliknya dan sekaligus menjadi saksi bisu terhadap penderitaan Romusha
(Sumber Foto: BPSNT)

Kerja Romusha di Durian Gadang berlangsung lebih kurang dua tahun 1943-1945 jalan kereta api yang dikerjakan Romusha dapat berfungsi hanya selama 6 bulan. Namun ketika lonceng Jepang menyerah kepada Sekutu, maka Lokomotif kereta api yang berada di Durian Gadang ditinggalkan begitu saja. Lokomotif ini sempat beroperasi selama enam bulan untuk mengangkut para pekerja Romusha dari Logas ke Muaro Sijunjung. Sistem pengerjaan jalan kereta api itu adalah, pekerja yang dari Muaro bergerak sampai ke Logas, sedangkan yang dari logas bergerak ke Muaro, maka bertemulah mereka di satu titik. Saksi bisu lain yang dapat kita jumpai di Jorong Silukah adalah kuburan masal Romusha yang mati tenggelam sebanyak 24 orang yang dimakamkan di suatu tempat.

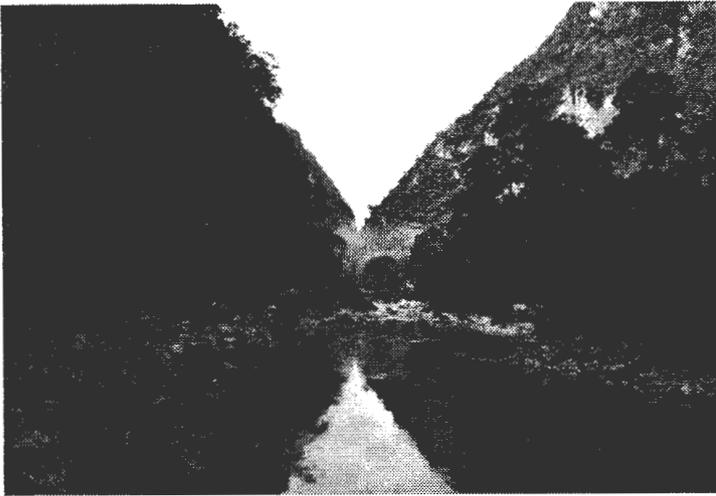


Foto 5.

Sungai Batang Kuantan ini adalah salah satu saksi bisu jatuhnya banyak korban romusha yang terkubur di sungai ini dan jalan kereta api yang di bangun itu ada di sepanjang sungai ini. (Foto : BPSNT)

Dalam merekrut Romusha ke Durian Gadang, umumnya mereka kena tipu oleh Jepang, Jepang melalui kaki tangannya bertanya kepada para pemuda di tanah Jawa siapa yang ingin sekolah pertanian ke Sukabumi umumnya mereka berumur 18 s.d 20 tahun, pengumuman ini menarik perhatian para pemuda untuk belajar pertanian ke Sukabumi, lalu berangkatlah mereka dengan kereta api, ke Tanjung Periok, dari Tanjung Periok mereka naik kapal ke Teluk Bayur, dari Teluk Bayur mereka dibawa dengan kereta api ke Muaro Sijunjung, baru setelah itu mereka dibawa dengan jalur sungai Kuantan atau jalan kaki ke Durian Gadang, untuk bekerja sebagai Romusha. Dalam propaganda biasanya juga melibatkan para pemuka masyarakat atau kepala desa, sehingga mempercepat proses mendapatkan para anggota yang akan dijadikan sebagai Romusha.

Para Romusha yang bekerja di Durian Gadang sebagian besar adalah dari Jawa, dan setelah Jepang angkat kaki dari Durian Gadang, pekerja Romusha ditinggalkan begitu saja dan mereka menyelamatkan diri masing-masing. Berdasarkan keterangan dari Abdul Wahid⁵⁵ setelah Jepang kalah, para pekerja Romusha menyelamatkan diri masing-masing, ada yang pergi meninggalkan nagari Durian Gadang dan ada juga yang berbaul dengan masyarakat setempat bahkan menikah dengan penduduk setempat. Antara lain mantan Romusha asal Jawa

⁵⁵ Abdul Wahid adalah mantan Walinagari Durian Gadang 1969-1973, ia mengaku pada saat Jepang memasuki nagari Durian Gadang ia berumur lebih kurang 13 tahun

yang menikah dengan penduduk setempat di nagari Durian Gadang adalah; Caik, (orang Sunda), Usman, Karim, Kiban, Latih, Madi, Wakidi (alias Jono), Slamet, Sanib, Sukatri, Katiran, Kasman, Wardi, Rahman, Sulaiman, Kutri dan Salim. Kebanyakan para Romusha ini berasal dari Kebumen dan Celacap. Ketika mereka datang ke nagari Durian Gadang berumur antara 14- 18 tahun. Para Romusha yang tinggal dan menikah dengan orang nagari Durian Gadang sudah banyak yang meninggal dunia, yang tinggal hanya satu orang yaitu bapak Usman itupun umurnya sudah 85 tahun.⁵⁶



Foto 6.

Usman, salah seorang bekas romusha yang bekerja membuat jalan kereta api di Muaro Sijunjung Sumber Foto : BPSNT.

Usman adalah salah seorang bekas romusha yang bekerja membuat jalan kereta api dari Muaro Sijunjung menuju Logas Provinsi Riau. Ia adalah salah seorang Romusha yang masih hidup saat ini. Usianya sudah 85 tahun, sekarang hidup di Durian Gadang, karena ia sudah menikah dengan perempuan setempat. Para mantan Romusha yang ada di Durian Gadang sudah banyak yang meninggal dunia salah satunya yang masih hidup dan bisa diajak bicara adalah Usman. Usman adalah salah seorang mantan Romusha yang tidak lagi kembali ke daerah asalnya di Kecamatan Wadas Kabupaten Wonosobo, bahkan ia sudah menikah dengan seorang gadis Jorong Silukah. Ketika ditanya kenapa Usman bisa sampai di Durian Gadang dan berkerja sebagai Romusha Usman menuturkan: "Saya datang kekawasan ini semenjak

⁵⁶ Wawancara dengan Abdul Wahid di Durian Gadang, tanggal 4 Juli 2009

tahun 1942, mulannya Jepang mengajak orang-orang di kampung saya untuk disekolahkan di sekolah pertanian di Sukabumi, dulu berangkat ke sini sebanyak 25 orang perkecamatan.

Prosesnya berangkat dari Wonosobo, Magelang ke Jakarta naik kereta api terus ke Tanjung Periuk, dari Tanjung Periuk ke Teluk Bayur dengan kapal laut. Kami diturunkan di pelabuhan Teluk Bayur, dari Teluk Bayur terus naik kereta api lagi ke Muaro Sijunjung, dari Sijunjung berjalan kaki sampai ke Jorong Silokek kenagarian Durian Gadang. Di Silokek kita diberi bekal berupa beras, lauk asin, cabe, dan perkakas untuk bekerja. Pertama dulunya kawasan Durian Gadang ini masih hutan semua. Yang mencari kami di Wonosobo dulu adalah tentara Jepang itu sendiri dibantu oleh kepala Desa, dengan alasan untuk disekolah, dijanjikan untuk disekolahkan ternyata dibawa untuk bekerja sebagai Romusha (kerja paksa) ke Sumatera Barat ini kerjanya adalah membuat jalan kereta api dari Muaro ke Pekanbaru. Dalam membuat jalan rel itu macam-macam pekerjaan yang harus dikerjakan antara lain ada yang menghancurkan tebing, memecahkan batu, merambah hutan, meratakan jalan mengangkat atau memasang rel”.⁵⁷

Selain orang Jawa yang dijadikan Romusha di Durian Gadang, terdapat juga orang Sumatera khususnya orang Sumatera Barat, terutama penduduk setempat, namun jenis pekerjaan yang diberikan agak berbeda dengan orang Jawa. Hal itu dapat dilihat dari pernyataan Usman.

“Selain orang Jawa, masyarakat pribumi juga dimanfaatkan sebagai Romusha, namun bagi kalangan pribumi lebih banyak sebagai anak *kendo*, yaitu sebagai orang yang membawa barang-barang dari daerah muko-muko ke daerah Durian Gadang dengan mempergunakan perahu dayung. Namun soal makan mereka juga banyak yang menderita, karena hanya dikasih makan dua kali dalam satu hari, tetapi bagi mereka yang bertugas sebagai anak *kendo* pembawa logistik ke daerah pedalaman punya banyak kesempatan untuk mendapat makanan tambahan. Sebab pada saat mereka mengantarkan logistik tersebut, disitulah mereka ada kesempatan guna menyembunyikan makanan, seperti beras, ikan asin, gula dan kebutuhan lainnya, dengan menyimpannya di dalam goni, kemudian ia simpan semuanya itu di dalam semak-semak di tepi sungai Batang Kuantan, setelah malam tiba baru mereka mengambil barang-barang tersebut, jadi mereka sangat hati-hati supaya tidak ketahuan oleh Jepang”.

Perlakuan Jepang terhadap Romusha di Durian Gadang sesungguhnya beragam, antara Romusha yang satu dengan yang lain. Bagi Romusha yang berasal dari luar etnik Minangkabau, biasanya Jepang bertindak jauh lebih kejam dan keras. Begitu pula dalam pembagian kerja, biasanya jenis pekerjaan yang akan dikerjakan oleh orang yang bukan berasal dari Minangkabau jauh lebih berat.

⁵⁷ Wawancara dengan Usman tanggal 4 Juli 2009 di Durian Gadang.

Hal itu dituturkan kembali oleh Usman, bagaimana pekerjaan romusha di Durian Gadang Sijunjung. Selama proses pelaksanaan pekerjaan pembuatan jalan kereta api, yang bekerja “Selain orang Jawa ada juga orang Sumatera Barat, namun dengan pembagian tugas yang berbeda. Bagi Romusha yang berasal dari Jawa biasanya dapat tugas untuk menghancurkan tebing, mengangkat atau memasang rel, memecahkan batu dan meratakan jalan atau bagian-bagian yang berat. Sedangkan masyarakat pribumi atau masyarakat di sekitar Durian Gadang bertugas membawa logistik dari Muaro ke pedalaman, transportasi saat itu menggunakan perahu dayung, orang sini rata-rata pandai mendayung perahu.

Bagi Romusha Sumatera Barat lainnya mereka bertugas untuk membuat bantalan kereta api, membersihkan semak belukar, mencari kayu, menebang pohon. Saya juga tidak tahu dari mana para Romusha yang dari Sumatera Barat ini berasal. Sebab orang Sumatera Barat pada umumnya sangat pintar dan ahli dalam merintis jalan, menebang pohon, jadi orang Sumatera Barat yang merintis atau merambah hutan yang akan di jadikan tempat lewat rel kereta api dari Sijunjung ke Logos”.⁵⁸ Demikian Usman mengungkapkan.

Selain orang Jawa dan Sumatra yang dijadikan Romusha di Durian Gadang, terdapat juga beberapa orang Belanda, namun jumlahnya sedikit. Berdasarkan pengakuan dari Abdul Wahid.

Diperkirakan ada sekitar 20 orang. Bagi orang Belanda yang dijadikan sebagai pekerja paksa di Durian Gadang ini, adalah orang Belanda yang menjadi tawanan Jepang, maupun orang Belanda yang tidak sempat pulang sebelum Jepang masuk. Mereka inilah yang dimanfaatkan oleh Jepang untuk kerja paksa, banyak diantara mereka yang lebih menderita dibandingkan dengan Romusha yang berasal dari daerah Jawa. Sebab mereka selama ini tidak pernah bekerja keras namun saat Jepang berkuasa mereka diperlakukan sebagai tenaga kasar”.⁵⁹

⁵⁸ Wawancara dengan Usman tanggal 4 Juli 2009 di Durian Gadang.

⁵⁹ Wawancara dengan Abdul Wahid tanggal 4 Juli 2009 di Durian Gadang.



Foto 7.

Ayah Jan Banning (Belanda) korban sebagai Romusha di Durian Gadang Sijunjung (Sumber Foto : Internet 2009).

2. Kondisi Pekerja Romusha

Pekerja Romusha yang berada di Durian Gadang kondisinya sangat memprihatinkan, masalah kesehatan para pekerja Romusha ternyata tidak mendapat perhatian yang memadai, bahkan hampir tidak diperhatikan sama sekali oleh Jepang. Berkaitan dengan kondisi Romusha di Durian Gadang ini Usman mengungkapkan:

Kami dikasih Jepang, makan dua kali sehari siang jam 1 dan sore jam 5, diluar itu para Romusha dipersilakan untuk mencari makan sendiri, dan tidak semua Romusha yang mendapat jatah makan atau beras. Yang berhak mendapatkan jatah makan, adalah mereka yang telah mendapat tanda khusus dari kayu bertuliskan huruf Jepang yang diberikan oleh mondor dan dikalungkan di leher, jika petugas dapur melihat tanda khusus ini, barulah petugas dapur memberi jatah makan atau beras untuk dimasak. Bahan makan yang diberikan Jepang sangatlah terbatas paling banyak dalam 3 hari itu pekerja mendapatkan beras 1 canting atau lebih kurang 1 kg untuk selama tiga hari. Beras yang diberikan Jepang ini oleh para Romusha dimasak sendiri-sendiri dengan peralatan seadanya, kadangkala ada sebagian yang menggunakan tempurung atau sayak kelapa untuk tempat memasak, biasanya nasi yang mereka masak jarang yang sampai matang karena waktu dan alat yang digunakan untuk memasak sangatlah terbatas. Jumlah Romusha sangat banyak bahkan ribuan, sehingga makan yang mereka terima sangat terbatas dan banyak diantara mereka mencari makan apa saja yang bisa dimakan”.⁶⁰
Selanjutnya Abdul Wahid mengungkapkan :

⁶⁰ Wawancara dengan Usman tanggal 4 Juli 2009 di nagari Durian Gadang.

“Pernah pada suatu kali saya melihat para Romusha yang tidak lagi mampu bekerja karena sakit. Di dekat jembatan di nagari Durian Gadang ada rumah panggung disitu bagi Romusha yang sakit ditidurkan di bawah rumah dengan alas tikar seadanya, karena kasihan kita melihatnya saat itu saya sudah remaja juga saya bersama teman yang lain mencoba untuk mengasi air minum, maaf ngomong karena saat itu serba keterbatasan maka kami kasi air dengan menggunakan tempurung kelapa. Yang sakit itu kita perhatikan tidak pernah diobati oleh Jepang, paling-paling ya teman-temanyalah yang mencarikan obat kampung, kalau ada yang meninggal, sebagian dikuburkan oleh teman-teman Romusha tetapi kebanyakan dihanyutkan ke sungai saja.

Berbeda dengan Romusha yang berasal dari etnik lokal, disamping mereka mendapatkan pekerjaan yang tidak terlalu berat, soal makan mereka diberi kebebasan oleh Jepang untuk memasak bahan-bahan makanan yang telah mereka bawa dari kampung mereka masing-masing, sehingga penderitaan mereka jauh lebih berkurang dibandingkan dengan Romusha dari luar Sumatera Barat.

Dalam bidang kesehatan Jepang sama sekali tidak memperhatikan baik Romusha yang berasal dari Jawa maupun etnik lokal, bagi yang sakit mereka harus berjuang sendiri-sendiri untuk mencari obat.

”Biasanya siapa yang sakit ya cari obat sendiri paling-paling diobati pakai obat kampung aja dan Jepang tidak peduli kepada Romusha yang sakit apalagi akan menyediakan obat. Jika sakit tidak sembuh-sembuh akhirnya meninggal dunia, maka oleh Jepang dianggap bagus, sebab tidak lagi membikin pusing bagi Jepang. Namun Romusha yang berasal dari etnik lokal ya yang berasal dari daerah Sumatera Barat lainnya mereka pada umumnya bekerja hanya selama 15 hari, karena mereka bergiliran untuk dikirim sebagai Romusha di daerah mereka. Ketika mereka sakit, maka mereka kembali ke daerah asalnya, selanjutnya digantikan oleh rombongan berikutnya”.⁶¹

Kondisi pekerja Romusha yang berasal dari daerah Sumatera Barat memang tidak separah yang dialami oleh Romusha yang berasal dari Jawa, sebab Romusha yang berasal dari Sumatera Barat dikirim dari nagari guna bekerja secara bergilir dengan membentuk kelompok, dan bekerjanya hanya selama 15 hari. Setiap kelompok yang pergi diperbolehkan membawa bekal sendiri. Setelah kelompok pertama selesai, akan digantikan oleh kelompok yang lain, begitu seterusnya. Walaupun ada yang sakit mereka dapat cepat dipulangkan ke daerah asalnya, namun tidak jarang pula yang pulang dengan selamat seperti kerja paksa Romusha di Silungkang selama 15 hari dengan anggota kurang lebih 100 orang. Setelah 15 hari kerja paksa, Romusha asal Silungkang anggotanya masih utuh. Kemudian 15 hari kemudian berganti orang. Saat menjadi Romusha, orang Silungkang diperbolehkan

⁶¹ Wawancara dengan Abdul Wahid taggal 4 Juli 2009 di Durian Gadang.

membawa bekal sendiri. Selama kerja paksa tersebut tak satupun rakyat Silungkang yang meninggal dunia dan diperlakukan sangat baik. Selanjutnya Romusha Silungkang dikirim ke Loge atau Logas untuk membuat rel kereta api dari Muaro ke Pekamaru.⁶²



Gambar Kondisi Romusha Pada Saat Istirahat di Barak
(Sumber Foto reproduksi dari Arsip)

Pada gambar terlihat kondisi romusha pada saat istirahat di barak romusha. Mereka kurus karena kurang makan dan sakit-sakitan. Romusha di Durian Gadang mendapatkan perlakuan yang sangat kejam dari tentara Jepang, sehingga banyak yang tidak tahan dengan perlakuan tentara Jepang tersebut. Bahkan saat sakitpun mereka tetap dipaksa untuk bekerja, kalau terlihat main-main, walaupun disebabkan oleh kondisi kesehatan, mereka tetap dipaksa. Hal itu menyebabkan banyaknya pekerja Romusha yang sakit meninggal dunia sia-sia. Walaupun para romusha banyak yang meninggal, namun tidak ditemukan kuburannya. Besar kemungkinan bagi Romusha yang tidak mampu menahan sakit, dan akhirnya meninggal dunia, oleh Jepang jenazahnya tidak dikuburkan, namun dihanyutkan ke sungai, apalagi menurut cerita salah satu sumber, ketika *ngarai cigak* diledakan oleh Jepang banyak menelan korban, namun makam Romusha tidak ditemukan di Durian Gadang. Kecuali hanyalah kuburan 24 orang Jawa, menurut pengakuan penduduk setempat orang Jawa dimakamkan di satu tempat, namun itu bukan korban romusha, tetapi adalah orang Jawa yang tengelam ketika mereka berlayar dari Muaro kekawasan ini.

⁶² MunirTaher "Romusha Aman di Silungkang Dalam Sejarah diambil dari Blok [www. Munirtaher.wordpress.com](http://www.Munirtaher.wordpress.com) diambil pada tanggal 28 Juli 2009

“Dulu sekitar tahun 1950 an ketika hasil panen padi gagal terus menerus dan tidak berhasil, maka ada keinginan dan inisiatif dari masyarakat nagari Durian Gadang untuk melaksanakan sholat gaib, sebab mereka merasa malapetaka ini mungkin disebabkan oleh banyaknya jenazah yang dihanyutkan hingga ke hulu sungai dan banyak dari jenazah itu yang tidak disholatkan, dimandikan dan dikapankan di zaman Jepang. Maka diadakanlah musyawarah bersama dan dapat kata sepakat akan diadakan *alek gadang* dengan memotong kerbau dan pada saat itulah diadakan sholat gaib bersama bagi para jenazah yang telah meninggal di zaman Jepang itu”.⁶³

Para pekerja Romusha bukan saja berkerja pada siang hari tetapi mereka juga ada yang disuruh kerja lembur pada malam hari. Berdasarkan pengakuan Usman bahwa ia juga pernah dan sering disuruh berkerja lembur pada malam hari, berikut penuturan Usman.

“Jepang itu tidak kenal malam atau siang, para Romusha sering disuruh kerja lembur pada malam hari. Kalau malam hari kerja lembur itu, ada yang mengangkut dan memasang rel, memecahkan batu atau meratakan jalan. Bentuk pekerjaan yang paling sulit adalah di *ngalau cigak* yaitu mereka menghanucurkan sebuah bukit karang dengan tangan, kondisi ini yang menyebabkan penderitaan bagi para romusha. Saya masih ingat pada suatu malam ketika itu orang sedang berkerja pada malam hari disebuah tebing yang namanya sampai sekarang *ngalau cigak* pada malam itu terdengar bunyi ledakan bom diatas tebing, lalu tebing itu runtuh dengan suara bergemuburu, saya dapat menyelamatkan diri, saat itu terdengar suara pekikan dan jeritan kawan-kawan yang lainnya, tidak bisa dibayangkan kejadian malam itu. Pagi hari kita sudah terkejut melihat mayat berserakan di tebing bahkan di atas pohon, diperkirakan tidak kurang dari enam ratus orang yang mati disana. Pada saat itu tidak sedikit mayat yang berserakan di sungai Batang Kuantan ini, kebanyakan mayat-mayat itu dihanyutkan di sungai sehingga dua bulan lebih bauhnya masih menyengat”.⁶⁴

Dulu saya pas Jepang kalah, saya langsung menikah dengan orang sini, sebab Romusha yang lainnya oleh Jepang dibiarkan saja untuk menyelamatkan diri masing-masing. Tujuan Jepang membuat jalur kereta api dari Sijunjung ke Logas Pekembaru diharapkan oleh Jepang adalah untuk membawa hasil bumi dari Sumatra ke Jawa, namun Jepang keburu kalah. Saya tidak bisa membayangkan betapa tersiksanya kami dulunya disini dan saya tidak menyangka nasib saya akan seperti ini karena telah ditipu oleh Jepang. Selama diperjalanan dari Jawa kesini diatas kapal kami diperlakukan dengan sangat baik, penderitaan yang mulai kami rasakan setelah sampai dikawasan ini. Rombongan yang berangkat dari jawa dengan sebuah kapal lebih kurang 3000 orang, satu kelurahan ada dua sampai lima orang dan sebahagiannya dibawa ke Durian Gadang ini. Setelah Jepang kalah dan kami tidak lagi menjadi perkerja paksa, maka teman-teman yang sekian banyaknya itu tidak tahlulagi, dan kebanyakan mereka tidak kembali lagi ke Jawa seperti saya”.

⁶³ Wawancara dengan Abdul Wahid tanggal 4 Juli 2009 di Durian Gadang.

⁶⁴ Wawancara dengan Usman, tanggal 4 Juli 2009 di Durian Gadang

Menyinggung masalah wanita penghibur khusus bagi pejabat tentara Jepang di Durian Gadang tidak ada menyediakan tempat khusus, berdasarkan pengakuan dari informan Jepang tidak mencari orang peribumi sebagai pemuas nafsu. Berikut pengakuan dari Abdul Wahab .

Jumlah tentara Jepang yang berada dikawasan ini tidak banyak hanya lebih kurang 20 orang tentara, Jepang tidak mencari orang pribumi sebagai pemuas nafsu, yang ada cuman seorang gundik yang dibawa dari daerah Lipat Kain Riau. Tentara Jepang juga tidak menyediakan rumah khusus untuk itu, yang ada hanya rumah tuan Gucci yang dijadikan tempat pusat kapiten di Durian Gadang di rumah itu ada menyimpan seorang Gundik yang bernama Nurlela. Sedangkan untuk pemuas nafsu tetara Jepang yang lain itu diangkut dengan kereta api, ada yang dari arah Padang dan Riau, tapi sehabis melayani dipulangkan kembali naik kereta api. Tapi ada suatu peristiwa yang tidak bisa saya lupakan selama hidup saya, ibu saya nyaris menjadi korban tentara Jepang ia sempat dikejar-kejar oleh tentara Jepang, untung dapat diselamatkan oleh Sonco.⁶⁵

3. Fasilitas Kerja Romusha

Fasilitas yang disediakan Jepang bagi para Romusha yang diperkerjakan di Durian Gadang memang tidak ada sama sekali, baik fasilitas kesehatan seperti obat-obatan maupun fasilitas keselamatan kerja bagi para Romusha. Berkaitan dengan fasilitas bagi kerja Romusha ini Usman mengungkapkan:

Jangankan fasilitas keselamatan kerja pakaian yang dipakai saja sangatlah menyedihkan, pakaian para pekerja compang camping, kebanyakan memakai pakaian dari kulit kayu (tarok)), goni bahkan ada yang memakai pakaian yang mereka pakai pada saat datang dari kampung halamannya dulu. Sebetulnya Jepang menyediaka pakaian dalam bentuk celana panjang warna putih, namun karena jumlah pekerja yang begitu banyak bahkan ribuan, sehingga tidak semua pekerja yang mendapatkan celana ini, tak jarang akhimya banyak para pekerja yang berkerja hanya mengenakan pakaian dari daun kayu atau kulit kayu yang hanya bisa menutup aurat mereka. Sebab bagi Jepang itu yang terpenting adalah berkerja dan berkerja, dalam satu hari berapa meter yang bisa mereka selesaikan, jika gagal mereka akan mendapatkan siksaan ”.⁶⁶

Peralatan kerja yang diberikan Jepang adalah berupa sekop, cagkul, linggis dan alat-alat pekerja lainnya. Waktu bekerja para Romusha adalah, apel jam 7 pagi dan 8 baru mulai kerja. Jepang juga tidak menyediakan tempat istirahat atau kamp bagi para pekerja, mereka hanya beristirahat dibawah pohon-pohon yang lindung atau dibawah rumah-rumah penduduk, lalu mereka juga akan tidur pada malam hari dibawah rumah-rumah penduduk tersebut.

⁶⁵ Wawancara dengan Abdul Wahid tanggal 4 Juli 2009 di Durian Gadang

⁶⁶ Wawancara dengan Usman tanggal 4 Juli 2009 di Durian Gadang

Saat berkerja sebagai Romusha itu betul-betul sangat tersiksa dan menderita, kita disuruh datang jam 7 pagi kalau kita terlalu cepat disiksa juga apalagi kalau datang terlambat mendapat penyiksaan dari mandor, apel jam 7 dan jam 8 baru mulai bekerja, jam 12 siang istirahat, tempat istirahat adalah dibawah pohon- pohon disekitar tempat kita bekerja, jam 5 sore baru kita selesai bekerja. Kami tidak disediakan tempat beristirahat, untuk beristirahat, kami hanya memanfaatkan rumah-rumah penduduk yang tinggi, lalu para Romusha tidur dibawah kolong rumah tersebut. Ada juga yang tidur di pondok-pondok sawah, dalam mushalla, atau dimana saja mereka bisa tidur. Dan beristirahat. Di Durian Gadang ini oleh Jepang para Romusha ini dipindahkan ke sebarang sungai untuk menghindari mereka melarikan diri, sebab Jepang itu susah mengawasi para Romusha pada malam hari dan Jepang tidak berani keluar pada malam hari.⁶⁷

Jumlah orang Jepang yang berada di sekitar Durian Gadang memang tidak banyak, berdasarkan informasi yang didapatkan mereka hanya berjumlah 20 orang, dan untuk mengawasi pekerja Romusha yang begitu banyak mereka mengalami kesulitan, justru mereka mempergunakan para mandor, para mandor bisa mengawasi Romusha siang dan malam hari. Walaupun para Romusha sudah dikawal oleh para mandor, namun karena tidak tahan menghadapi siksaan Jepang, maka Romusha banyak yang melarikan diri, terutama pada malam hari, namun jika tertangkap atau kedapatan oleh Jepang melarikan diri, maka yang bersangkutan akan mendapat siksaan yang lebih para lagi. Berikut pengakuan dari Usman:

“Banyak juga para Romusha yang melarikan diri, strategi yang mereka gunakan untuk lari adalah ketika hari telah beranjak malam, Jepang dan para pengawalnya tidak lagi mengawasi para Romusha, namun untuk menghindari para Romusha lari maka Jepang terlebih dahulu memindahkan para pekerja ke seberang sungai, banyak para pekerja yang takut untuk lari karena mereka merasa dalam sungai banyak buaya yang bisa mengacama mereka. Tapi karena tidak tahan mendapat siksaan terus menerus dari Jepang, maka sebahagian banyak juga yang nekat melarikan diri, namun jika mereka melarikan diri dipagi hari mereka dicari lagi bagi yang ditemukan mereka akan disiksa, yang menyiksa bukanlah orang Jepang tapi tentara yang bekas *Gaigun* dan *Heiho* yang berasal dari orang-orang Indonesia juga seperti orang Ambon, Jawa, Riau dan ada juga orang Sumatera Barat. Di Silukah dulu ada tempat pesanggrahan atau tempat para pejabat tentara Jepang disana ada tempat untuk penyiksaan bagi para Romusha yang ketahuan mencuri makanan atau beras karena lapar atau bagi yang melarikan diri dan tertangkap kembali, penyiksaanya sangat mengerikan dimandikan atau disiram pakai air panas yang mendidih. Justru para Romusha sangat berhati-hati kalau melarikan diri.

⁶⁷ Wawancara dengan Usman tanggal 4 Juli 2009 di Durian Gadang

Ketika Jepang kalah, di Durian Gadang para Romusha tidak lagi dikontrol oleh Jepang. Mereka menyelamatkan diri mereka masing-masing. Umumnya mereka pulang atau menyelamatkan diri dengan menempuh rute yang berbeda-beda dan mereka berpencar. Berdasarkan keterangan dari Abdul Wahid ada yang kembali ke Logos daerah Riu, ada yang menggunakan jalur memotong lewat Paru menuju Sijunjung dan ada juga yang melawati jalan Logos hingga ke Muaro, dan banyak juga diantara para Romusha itu yang menikah dengan orang Muaro sehingga mereka juga bermukim dikawasan itu.

Setelah tidak lagi berkerja sebagai Romusha, orang Jawa yang tidak kembali lagi ke daerah asalnya banyak juga yang menikah dengan penduduk setempat, dengan sendirinya mereka masuk ke dalam salah satu suku yang ada di daerah mereka menikah dengan penduduk setempat. Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat para bekas Romusha diawal kemerdekaan di Durian Gadang banyak yang berkerja sebagai pembawa bahan-bahan kebutuhan seperti minyak tanah, beras dan kebutuhan lainnya yang berasal dari Riau, jika akan diantar ke Muaro maka kapal yang membawa barang tersebut berhenti di sekitar Durian Gadang, lalu para Romushalah yang membawanya dengan memikul di atas pundak ke Muaro, sebab mereka memiliki tenaga yang cukup kuat untuk mengangkat barang tersebut.

Pada saat Romusha masih berada di Durian Gadang aktifitas kebudayaan seperti kesenian sama sekali tidak begitu terlihat, sebab para Romusha itu sudah letih berkerja pada siang hari, disamping itu mereka lebih banyak takut sama Jepang. Berikut pengakuan dari Usman.

Para Romusha, biasanya setelah bekerja ada juga yang menampilkan kesenian yang mereka miliki terutama rongeng, dulu dalam perkawinan yang diadakan Jepang para Romusha juga melaksanakan tari rongeng. Tarian ini dilaksanakan dan dilakukan oleh para Romusha yang laki-laki. Tapi setelah Jepang angkat kaki dari Durian Gadang, tidak ada lagi tarian rongeng itu ditampilkan, sebab orang-orangnya sudah tidak ada lagi”⁶⁸

Bagi para mantan Romusha yang tinggal di Durian Gadang umumnya mereka telah bergabung dalam satu suku, yang terdapat dalam daerah ini, proses yang mereka tempuh seperti mengakui induk atau mamak dari salah satu suku yang ada di Durian Gadang artinya ia bergabung dalam sebuah kelompok suku yang ada dan mengakui mamak yang ada dalam suku itu sebagai mamaknya. Cara mereka bergabung kepada salah satu suku yang ada adalah dengan mengadakan do'a bersama dengan mengundang seluruh masyarakat dan ninik mamak yang ada di dalam nagari, biasanya dalam acara ini juga ditandai dengan

⁶⁸ Wawancara dengan Usman tanggal 4 Juli 2009 di Durian Gadang.

memotong kambing atau ayam. Kemudian mamak dalam kaum itu mengungkapkan atau menyampaikan kepada seluruh masyarakat dalam nagari bahwa orang ini telah diakui sebagai bahagian dari suku mereka. Kondisi ini juga didukung oleh adanya sebuah kebudayaan dalam masyarakat Minangkabau yang menyatakan bahwa sebuah aib dalam masyarakat jika mereka harus membiarkan seorang pendatang yang dibiarkan menderita dalam kampung mereka.

Kebudayaan dan bahasa yang ditimbulkan oleh para Romusha ketika mereka tinggal di Durian Gadang ternyata tidak berpengaruh dalam kehidupan masyarakat setempat, kondisi ini disebabkan karena mereka datang tidak dalam komunitas yang utuh, disamping itu mereka datang dengan kondisi tertekan dan umumnya para Romusha adalah laki-laki, sehingga ketika mereka menikah dengan penduduk setempat, maka anak mereka masuk dalam klen ibu, kondisi ini menyebabkan mereka tidak munculnya sebuah kebudayaan baru.

D. ROMUSHA PASCA FASISME JEPANG

1. Romusha Pasca Jepang

Sebelum membicarakan masalah romusha pasca Fasisme Jepang, tidak ada salahnya jika mengulang kembali pengertian romusha. Romusha adalah istilah dari bahasa Jepang yang artinya adalah serdadu pekerja. Meski istilahnya sebagai serdadu pekerja, namun dipekerjakan sebagai romusha sangatlah getir. Banyak pengalaman mengerikan dirasakan para romusha asal Jawa yang ditempatkan di berbagai daerah di Sumatera, khususnya di Durian Gadang yang merupakan pekerja paksa di jalur rel keretya api yang membentang dari Riau hingga ke Sumatera Barat.

Untuk merekrut para serdadu pekerja ini di Durian Gadang, hanya kelanjutan saja dari pada apa yang dibuat orang-orang Jepang di Jawa. Sebenarnya ada juga penduduk setempat yang juga dipaksa menjadi romusha. Berapa jumlah tenaga romusha asal Sumatera Barat (Minangkabau) yang diromushakan, tidak dapat diketahui dengan pasti. Sementara orang mengatakan bahwa jumlahnya ada ribuan orang Minang yang dipaksa menjadi romusha. Dari ribuan orang Minang yang diromushakan diberbagai daerah di Summarea Barat, ada ratusan orang yang dipekerjakan di Durian Gadang.

Mengingat tenaga romusha asal Sumatera Barat tidak mencukupi kebutuhan tenaga kuli yang diperlukan bala tentara Jepang, maka perlu didatangkan tenaga romusha asal Jawa yang dikenal sebagai pekerja-pekerja ulet, tahan banting, tidak banyak tuntutan dan rajin bekerja.⁶⁹

⁶⁹ L.D.Jong, *Pendudukan Jepang di Indonesia*, (Jakarta : Kesaint Blanc, 1987), hal.62

Mereka pada umumnya merupakan petani biasa, yang diluar kehendak mereka, diperintahkan supaya bekerja pada proyek-proyek pembangunan jalan kereta api. Puluhan ribu orang Jawa dimobilisasi dengan cara ini dan tidak sedikit di antaranya meninggal karena kerja keras dan kondisi kesehatan yang sangat buruk Banyak lainnya yang cukup beruntung bertahan hidup, menderita akibat penyakit, kekurangan gizi dan luka-luka. Anggota keluarga yang ditinggalkan para romusha banyak yang menderita kemiskinan dan tanah pertanian mereka sering dibiarkan tidak ditanami karena langkanya tenaga kerja. Hal ini menyebabkan rendahnya produksi pertanian

Jepang berusaha membentuk kelompok-kelompok pribumi untuk menjadi tenaga kasar, yang digerakkan dan dikerahkan di bawah pengawasan militer. Para buruh paksa tersebut diharuskan bekerja untuk membangun pangkalan militer, pelabuhan, pangkalan terbang, bunker dan tempat-tempat lain yang sangat dibutuhkan militer Jepang dalam usahanya memenangkan perang Asia Timur Raya.

Untuk mendapatkan tenaga romusha secara besar-besaran, Jepang berusaha membujuk dengan menjanjikan upah yang layak dan fasilitas kerja yang baik dan diiming-imingi tunjangan hidup yang cukup. Berbagai tipu daya dilakukan Jepang untuk mendapatkan tenaga buruh kasar tersebut. Mereka yang bersedia menjadi serdadu pekerja, akan dianggap sebagai suatu kehormatan : kejayaan dari Bala Tentara Dai Nippon harus juga dipantulkan kepada barisan serdadu kerja itu. Dalam bahasa Indonesia, dapat diistilahkan sebagai prajurit ekonomi.⁷⁰

Meski Jepang berhasil merebut Indonesia dari tangan Belanda, namun akibat pertempuran dan politik bumi hangus yang dilakukan tentara Belanda, banyak fasilitas umum seperti jalan dan jembatan, pelabuhan dan landasan terbang yang rusak berat. Tidak hanya itu, termasuk juga berbagai fasilitas pertambangan seperti tambang batubara, minyak bumi, timah, bauksit dan lain-lainya yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia juga mengalami rusak berat dan harus segera diperbaiki. Untuk memperbaiki semua fasilitas yang hancur tersebut, tentu dibutuhkan tenaga kerja yang sangat besar. Dalam merekrut tenaga kerja (romusha), Jepang melakukan berbagai cara dan tipu daya terhadap rakyat Indonesia.

Untuk dapat merekrut tenaga romusha dalam jumlah besar dan waktu yang singkat, maka Pasukan Tentara Jepang ke-16 di Jawa mendirikan sebuah Biro Tenaga Kerja sebagai bagian dari Departemen Urusan Dalam Negeri. Biro itu berkewajiban mengurus dan menyediakan bahan-bahan pemikiran yang berguna dengan tujuan

⁷⁰ *Ibid.*, hal.61

menentukan bentuk kerja sama yang praktis di mana penduduk pribumi dapat memberikan sumbangan bagi Peperangan Asia Timur Raya.⁷¹

Tentara Jepang menuntut agar para penguasa pribumi, seperti lurah, kepala kampung, *kamituwo*, *jagaraga*, *demang* dan camat memberikan kepada mereka untuk keperluan tadi tenaga-tenaga romusha dalam jumlah besar. Untuk keperluan itu, Jepang terkadang juga melakukan rasia, umpamanya, seorang pribumi, di bulan April 1942 dari Boyolali bersepeda menuju kota Solo (Surakarta). Dalam perjalanan sampai di Kartosuro, ia *digeret* (ditarik paksa) oleh tentara Jepang dan dibawa ke Panasan (Lapangan Terbang Adisumarmo Surakarta) untuk membantu memperbaiki lapangan terbang yang rusak berat akibat politik bumi hangus Belanda. Dia selama hampir dua bulan dipaksa bekerja di bawah pengawasan yang keras dan ketat, menerima lebih banyak pukulan daripada makanan untuk santap siang dan petang. Hampir tiap hari ia merasakan betapa kejamnya tentara Jepang dalam memperlakukan pekerja dengan paksa tanpa diberi upah sama sekali. Pada suatu kesempatan di malam hari, ia beruntung dapat melarikan diri setelah bekerja berat selama dua bulan penuh⁷². Pengalaman orang ini adalah kisah satu dari beribu-ribu romusha yang jadi korban kekejaman dan keganasan bala tentara Jepang.

Sistem kerja yang bersifat rasia-rasia, tentara Jepang meneruskan langkahnya. Rekrutmen para romusha itu berlangsung terus-menerus dari tahun 1942 hingga pertengahan tahun 1943. Kaum laki-laki dan anak-anak muda dari desa-desa, kampung-kampung, digiring dibawah penjagaan pasukan bersenjata. Pada awal tahun 1943 para romusha yang berhasil dikumpulkan kemudian dikirim ke Sumatera, dikerahkan untuk membangun jalan kereta api Pekanbaru, suatu jalan kereta api yang harus dipertautkan dengan lintasan yang sudah ada menuju kota Padang dan juga menuju ke Durian Gadang. Jika jalur rel kereta api tersebut telah menjadi kenyataan, maka pasukan-pasukan Jepang yang ada di Singapura dapat datang sebagai tambahan kekuatan di Sumatera Barat, tanpa susah payah untuk menggerakkan kapal-kapal angkut mereka melalui Samudera Hindia yang sangat berbahaya.

Pada akhir tahun 1942, puluhan ribu romusha asal Solo, Boyolali, Ngampel, Solotigo, Semarang, Magelang, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen dan Wonogiri dikumpulkan di pelabuhan Tanjung Perak Suroboyo untuk dikirim ke luar Jawa, di antaranya yaitu ke wilayah Indonesia Tengah dan Timur, seperti ke Kalimantan, Sulawesi,

⁷¹ *Ibid.*, hal. 64.

⁷² Wawancara dengan Bapak Prono Wiyoto, mantan anggota Heiho pada zaman pendudukan Bala Tentara Jepang pada tanggal 23 Juni 2009 di Boyolali.

Maluku dan Irian/Papua.. Sedangkan yang dikirim ke Sumatera, Singapura dan Malaysia dikirim ke Jakarta dengan menggunakan kereta api. Sampai di Jakarta kemudian dibawa ke Tanjung Priok untuk diberangkatkan ke berbagai daerah di Sumatera. Sebagian lagi dari mereka juga ada yang dikirim ke luar negeri, di antaranya yaitu ke Singapura, Malaysia, Thailand dan Birma⁷³ Yang dikirim ke luar negeri ini sedikit sekali yang kembali dan diperkirakan sebagian besartelah tewas atau dibunuh Jepang. Romusha asal Jawa yang dikirim ke Sabang juga sedikit sekali yang masih hidup. Dari cerita seorang romusha yang berhasil lolos dengan bersembunyi di hutan, akhirnya diketahui bahwa romusha yang telah menyelesaikan pembangunan lapangan terbang, pelabuhan, bunker di Sabang kemudian ditembak mati oleh tentara Jepang. Hal ini dilakukan agar mereka tidak dapat membocorkan rahasia militer Jepang di Sabang.

Romusha yang dikirim ke Sumatera ditempatkan di beberapa tempat sebagai berikut : *Tanjungpinang*. Romusha yang dikirim ke Tanjungpinang kebanyakan dipekerjakan di pelabuhan untuk memuat dan membongkar barang-barang dari kapal.⁷⁴ Namun ada juga kelompok yang dipekerjakan di hutan untuk menebang pohon karet dan lahannya diubah menjadi kebun sayur yang ditanami terong, bawang merah, dan sebagainya. Kecuali itu juga dipaksa bekerja untuk membuat jalan, kolam, membersihkan WC dan mengubur orang mati. Romusha yang dipekerjakan di Pekanbaru dipaksa bekerja dalam pembuatan jalan dan mengangkut besi dari kapal. Mereka bekerja dari pukul 07.00 sampai pukul 17.00. Yang dikirim ke Bengkulu bekerja membuat lapangan terbang dan gua perlindungan.

Selanjutnya di awal tahun 1943 rombongan romusha yang pertama untuk Sumatera Timur dioperasikan di daerah rawa-rawa, di mana banyak berjangkit penyakit malaria, dimulai dengan pembuatan sebuah *beting* atau bedeng kereta api. Pada bulan Maret 1943 murid-murid kelas tiga dari sebuah sekolah lanjutan tingkat pertama di Yogyakarta, yang merupakan anak-anak remaja umur sekitar empat belas tahun, sewaktu keluar dari sekolah, dikepung oleh tentara Jepang, digiring ke stasiun dan dengan rombongan lainnya yang berjumlah tak terhitung banyaknya di dalam gerbong-gerbong terkunci dibawa ke Jakarta (Batavia). Dalam suatu perjalanan sehari, mereka tidak mendapat makan dan minum.⁷⁵

⁷³ Wawancara dengan Bapak Reso Sudarmo, mantan Romusha asal Boyolali yang pernah dikirim ke Kalimantan pada tanggal 25 Juni 2009.

⁷⁴ Suwarno, *Romusha Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, 1999), hal.47.

⁷⁵ L.D. Jong, *Pendudukan Jepang di Indonesia*, (Jakarta : Kesaint Blanc, 1987), hal. 62.

Setelah tiba di Jakarta, mereka disatukan dengan rombongan ribuan romusha lainnya yang telah duluan tiba. Kira-kira jumlahnya ada 8.000.000 (delapan ribu) orang romusha. Mereka kemudian diberangkatkan menuju Singapura dengan menggunakan dua buah kapal. Namun mereka sial. Diperjalanan kedua kapal tersebut dihadang kapal selam musuh dan diserang. Salah satu kapal tersebut kena torpedo dan tenggelam, sehingga 4.000.000 (empat ribu) romusha yang ada di dalamnya tewas. Sisanya yang empat ribu orang pada awal bulan April 1943 tiba di Pekanbaru.

Salah seorang murid yang berasal dari Yogyakarta, seorang tawanan perang dari KNIL (satu di antara yang banyak diselundupkan di kalangan romusha). Ia mendengar berita sebagai berikut : “Segera saja sesudah sampai di tempat, oleh orang-orang Jepang telah diadakan demonstrasi gila kuasa di hadapan para romusha yang baru sampai”. Delapan orang di antara mereka ditunjuk untuk mengangkat ril kereta api. Mereka tidak ada yang sanggup berbuat sedemikian itu. Orang Jepang tadi mengurangi jumlahnya (yang delapan itu), senantiasa dengan dua orang, sehingga empat orang. ... mereka juga gagal. Empat orang ini dipenggal kepalanya dengan pedang samurai. Sang komandan Jepang mengutarakan kepada para romusha yang sedang dalam barisan: “Hal semacam ini akan dialami bagi mereka yang malas”. Kemudian dimulailah kehidupan yang kejam dan sengsara di sepanjang jalan kereta api : makan sedikit, tanpa pakaian, tak ada uang harian, dan tanpa pemeliharaan kesehatan.

Barak-barak untuk tempat tinggal mereka harus mereka bangun atau dirikan sendiri. Sementara itu belum rampung, maka kehidupan ditempuh diudara terbuka ... pakaian tidak diberikan, tidak juga kelambu. Yang terbanyak bermatian lantaran tidak cukup makan, H.O., dysentri, malaria dan luka-luka di kulit dan penyakit kulit lainnya”.⁷⁶

Bukti kekejaman Jepang terhadap romusha di Sumatera ini dapat dinukilkan di sini sebagai kesaksian salah seorang mantan romusha asal Gunung Kidul yang diwawancarai. Mantan romusha tersebut bernama Ranuwidjojo berasal dari Desa Jatiayu, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Petikan wawancaranya sebagai berikut :

Saya seorang petani yang tidak mempunyai tanah, dan ketika Jepang datang, saya berumur 20 tahun dan telah menikah. Sekitar pertengahan tahun 1943 saya benar-benar terbujuk oleh *komicho* kami (ketua rukun tangga) untuk pergi ke Sumatera sebagai seorang romusha. Pada waktu itu saya berbadan kurang sehat, tetapi *komicho* mengatakan “Seorang dokter di Wonosari akan menilai apakah kamu benar-benar

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 63.

sakit atau tidak". Kemudian saya dipaksa untuk mematuhi perintah tersebut dan turun ke kota kabupaten, di Wonosari.

Saya diangkut ke Padang Sumatera Barat melalui Yogyakarta, Jakarta, Palembang, dan Bengkulu. Di Padang, kami bekerja membangun jalan dan lapangan terbang di bawah perintah seorang mandor Jawa. Pekerjaan tersebut sangat berat dan kami hanya dibayar tiga ketip (F. 0,30) per hari. Saya mengirim uang kepada keluarga beberapa kali, tetapi mereka hanya menerima sebagian saja. Makanan tidak begitu buruk dalam pengertian mutunya, dibandingkan dengan apa yang biasa kami makan di rumah. Cukup enak karena kami diberi nasi dicampur dengan makanan lain. Tetapi jumlahnya tidak cukup, sehingga kami selalu lapar. Bahkan kadang-kadang kami diberi daging. Tetapi daging tersebut diperoleh dengan membantai sapi milik petani setempat. Kalau seekor sapi masuk ke lapangan terbang, Jepang memerintahkan supaya disembelih. Dengan cara inilah Jepang biasanya memperoleh makanan istimewa. Kalau mereka memerlukan kelapa, mereka tinggal memetik dari pohon kelapa milik penduduk setempat. Nanas dan makanan lain juga diambil dengan cara itu. Karena kondisi kesehatan dan kerja yang buruk, dua atau tiga orang meninggal setiap hari akibat penyakit dan kecapaian. Empat teman sedesa saya juga meninggal di sana.

Suatu hari saya mendengar berita bahwa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, dan sebentar kemudian kami diangkut kembali ke Jawa. Ketika saya tiba di desa, semua pejabat di desa telah diganti. Semua keluarga saya masih hidup, tetapi saya mendapati bahwa, karena terpisah dari pencari nafkah utama, mereka mengalami penderitaan yang luar biasa dan mereka tidak pernah menerima bantuan apa pun dari lembaga resmi mana pun⁷⁷.

Menarik untuk dicatat adanya fakta bahwa informasi dari Gunungkidul mengatakan bahwa makanan tidak begitu buruk dibandingkan dengan yang biasanya mereka makan di desanya pada waktu itu. Hal ini bukan berarti mereka dilayani dengan makanan yang relatif baik selama bekerja sebagai romusha, tetapi agaknya ini mencerminkan betapa buruknya keadaan makanan mereka di rumah selama pendudukan Jepang. Penderitaan yang dirasakan oleh setiap romusha berbeda-beda, tergantung kepada gaya hidup mereka sebelumnya di rumah.

Selanjutnya tenaga romusha yang dikerahkan bekerja untuk membangun jaringan jalan kereta api dari Lagos, Riau hingga ke Durian Gadang di Dharmasraya jumlahnya cukup banyak, meski tidak diketahui berapa ribu orang. Perkiraan kasar menurut keterangan mantan romusha asal Jawa yang sekarang masih hidup di Durian Gadang, ada puluhan ribu orang. Mereka didatangkan dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, di antaranya yaitu Wonosobo,

⁷⁷ Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol : Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, (Jakarta : Gramedia, 1993), hal. 136-137

Magelang, Semarang, Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Prambanan, Banyumas, Kebumen, Bagelen, Purworejo, Wates, Kulonprogo, Bantul, Sleman, Gunung Kidul dan lain-lain.

Beratnya pekerjaan dan minimnya fasilitas kesehatan dan kekurangan bahan pangan, para romusha asal Jawa tersebut, selama masa kerja paksa, banyak yang mati kelelahan, kelaparan, sakit atau terserang wabah penyakit lainnya. Diperkirakan hampir separuh tenaga romusha yang mati sia-sia di tempat kerja paksa.

Setelah Jepang menyerah kalah pada tanggal 14 Agustus 1945, tentara Jepang yang berada di Durian Gadang langsung pergi meninggalkan kamp kerja paksa. Kepergian Jepang membuat para romusha dapat berafaskan lega, lepas dari penindasan dan kekejaman Jepang, namun mereka juga tidak tahu mengapa Jepang pergi meninggalkan daerah tersebut.

2. Romusha Ikut Berjuang Mempertahankan Kemerdekaan

Setelah berita proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diumumkan oleh Presiden Sukarno tanggal 17 Agustus 1945 sampai di kota Padang dan Bukittinggi, dengan cepat berita proklamasi itu tersiar dari mulut kemulut hingga sampai ke pelosok-pelosok kampung, tak terkecuali di Durian Gadang.

Para aktivis setempat segera memanfaatkan situasi untuk membentuk Pemerintahan Republik di daerah ini karena kekosongan kekuasaan sejak pertengahan Agustus 1945 hingga mendaratnya tentara Sekutu pada pertengahan Oktober 1945. Menjelang Akhir Agustus, di Padang tokoh-tokoh lokal anggota Hokokai bentukan Jepang melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan di Jakarta, serta mengganti nama organisasi tersebut menjadi Komite Nasional Indonesia (KNI). Pada tanggal 29 Agustus, Muhammad Syafei atas nama rakyat Sumatera mengeluarkan pernyataan umum menerima Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia⁷⁸. Setelah selesai membacakan teks proklamasi, Syafei melanjutkan dengan : “Maka kami bangsa Indonesia di Soematera dengan ini mengakoei Kemerdekaan Indonesia seperti dimaksoed dalam proklamasi di atas dan mendjoendjoeng keagoengan kedoea pemimpin Indonesia itu. (Soekarno dan Hatta)”⁷⁹.

Dua hari kemudian, tanggal 1 September, Komite Nasional Indonesia menyelenggarakan rapat pertama di Padang, sidang itu memilih Mohammad Syafei sebagai Residen Sumatera Barat yang

⁷⁸ Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi : Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 155.

⁷⁹ Kementerian Penerangan, *Provinsi Sumatera Tengah*, hal. 85-86.

pertama. Pada akhir September 1945, Gubernur Sumatera yang baru ditunjuk, yakni Muhammad Hasan, akhirnya mengumumkan kepada publik di Medan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia telah diproklamasikan di Jawa.

Pada bulan-bulan pertama setelah kemerdekaan, tokoh-tokoh setempat membuat keputusan-keputusan menyangkut respon Sumatera Barat terhadap situasi yang cepat berubah pada masa itu. Yang terkemuka di antaranya yaitu adalah anggota-anggota KNI Sumatera Barat yang merupakan cabang dari KNIP, serta organisasi militer dan sipil bentukan Jepang, khususnya Laskar Rakyat (Giyu Gun) bersama organisasi-organisasi pendukungnya, dan beberapa pengikut Syahrir yang tidak suka bekerja sama dengan Jepang.⁸⁰

Pendudukan Jepang membantu dan sekaligus menghambat kemampuan tokoh-tokoh Sumatera Barat yang terkemuka di masa pendudukan Jepang untuk mengatur posisi mereka di pemerintahan karesidenan. Orang-orang yang selama ini menjadi anggota lembaga-lembaga perwakilan ciptaan Jepang (Shu Sangi Kai dan Hokokai), dan sebelumnya anggota Dewan Minangkabau bentukan Belanda pada tahun 1938, pada mulanya mengisi jabatan-jabatandi pemerintahan Republik. Mereka menjadi mayoritas di cabang Komite Nasional Indonesia (KNI) yang dibentuk di Padang pada awal kemerdekaan. Komite ini berfungsi sebagai badan legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, sebagian besar pejabat Pemerintahan Republik di awal kemerdekaan adalah pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh adat yang pernah bekerja sama dengan penjajah, sehingga tidak aspiratif terhadap tuntutan perubahan yang menggema di daerah ini.

Tokoh-tokoh Komite Nasional Indonesia cenderung menjalankan kebijakan-kebijakan yang terlalu moderat di mata masyarakat setempat yang ingin melihat kemerdekaan sebagai momentum untuk memutus habis keterkaitan dengan masa lalu. Namun pertentangan ini tidak menghambat munculnya rasa persatuan di antara warga masyarakat, tetapi sebaliknya justru melahirkan kepemimpinan inti yang pragmatis, moderat, memiliki kesetiaan mutlak terhadap kepemimpinan nasional Republik Indonesia, dan anti Belanda.⁸¹

Selanjutnya di Durian Gadang, setelah penduduk setempat dan para romusha mengetahui kekalahan Jepang dan Indonesia telah merdeka, mereka bersorak kegirangan. Ada yang melakukan sujud syukur, ada yang melepas kaul dengan memotong kambing dan kerbau untuk kenduri, ada yang berpesta dan bersorak kegirangan. Setiap bertemu kawan atau orang lain, orang selalu mengangkat tangan

⁸⁰ Audrey Kahin, *Op.cit.*, hal. 156.

⁸¹ *Ibid.*, hal. 157.

kanannya dengan kepalan tinju disertai teriakan/pekik “Merdeka”. Namun kebahagiaan dan kegembiraan masyarakat Durian Gadang tersebut tidak berlangsung lama, karena ada kabar tentang kehadiran tentara sekutu dan tentara Belanda yang ingin menjajah dan menguasai Indonesia lagi. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Palembang, Pekanbaru, Bukittinggi, Padang dan lain-lain terjadi pertempuran sengit antara kaum pejuang Indonesia dengan pihak Belanda.

Seluruh rakyat bersatu padu melawan kehadiran kaum penjajah karena diilhami oleh semangat kemerdekaan. Tidak terkecuali masyarakat yang bermukim di Durian Gadang. Para romusha asal Jawa yang merasa pahit getirnya hidup dibawah penjajahan Jepang, merasa terpanggil untuk ikut bertempur melawan kaum penjajah. Mereka (mantan romusha) berbaur bersama masyarakat setempat untuk ikut bersama-sama melawan kehadiran Belanda di daerahnya. Di mata mereka Jepang atau Belanda sama saja, yang namanya kaum penjajah adalah kejam dan harus dienyahkan dari bumi pertiwi Indonesia. Mereka sudah bosan hidup di bawah telapak kaum penjajah dan ingin hidup merdeka.

Semangat merdeka atau mati, masyarakat setempat dan para mantan romusha asal Jawa bersatu padu membentuk laskar rakyat yang kemudian diberi nama Tentara Keamanan Rakyat disingkat TKR. Pasukan TKR ini terdiri dari kaum muda usia antara 17 hingga 45 tahun. Di Durian Gadang, mereka membentuk laskar rakyat dengan senjata apa saja yang dapat digunakan untuk bertempur. Ada yang hanya menggunakan bambu runcing, atau kampak, pedang, keris, badik, parang dan lain-lainnya yang dapat menjadi senjata. Ada pula yang berhasil merakit senjata api atau merampas dari Jepang yang sudah kehilangan semangat juang dan tak bernafsu lagi menindas rakyat.

Kelompok-kelompok Laskar Rakyat (Giyu gun) yang telah bubar mulai berkumpul lagi di berbagai daerah Sumatera Barat. Letnan Satu Ismail Lengah memimpin mantan anggota Giyu gun dan organisasi pendukungnya (Giyu gun koenkai) di Padang. Ia mendirikan Badan Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI), yang hampir seluruh anggotanya adalah eks laskar Giyu gun. Dalam rangka ini, Ismail Lengah mulai merekrut laskar yang dipimpin oleh para mantan laskar Giyu gun.

BPPI kelak menjadi elemen inti Badan Keamanan Rakyat (BKR), cikal bakal angkatan bersenjata Republik. Dahlan Jambek, perwira Giyu gun Padang yang juga berpangkat Letnan Satu, membentuk cabang BKR di Bukittinggi. Pada minggu-minggu berikutnya, tokoh-tokoh BPPI pergi ke kampung-kampung sekitar kota Padang untuk mengumpulkan mantan rekan-rekan dan bawahannya dan

memberi pengarahan tentang pembentukan BKR di kampung-kampung setempat. Karena Padang merupakan pusat utama perekrutan dan pelatihan Laskar Rakyat, satuan-satuan militer Republik yang terorganisir paling baik pada awal kemerdekaan ditempatkan di Padang dan sekitarnya⁸².

Pasukan Inggris mendarat di Padang pada tanggal 10 Oktober 1945 dipimpin oleh Mayor Jenderal H.M. Chambers dan didampingi oleh Mayor Jenderal A.I. Spits (mantan Gubernur Sumatera) sebagai Wakil Belanda.⁸³ Pada tanggal 21 Oktober, para perwira sekutu ini menerima penyerahan semua kekuatan militer Jepang di Sumatera, yang ditandatangani oleh Letnan Jenderal Moritake Tanabe, Panglima Tentara Ke-25 dan Laksamana Madya Sueto Hirose.

Selama tiga belas bulan di Sumatera Barat (dari Oktober 1945 – November 1946), hubungan pasukan Inggris dengan pihak Indonesia selalu tegang. Ketika mendarat di Pelabuhan Teluk Bayur Padang, pasukan Sekutu diikuti oleh perwira-perwira Belanda. Kenyataan ini membuat pihak Indonesia curiga apakah Inggris benar-benar akan menjalankan tugas membebaskan tawanan perang dan memulangkan tentara Jepang saja atau membiarkan misinya diboncengi Belanda untuk kembali menjajah negeri ini. Meskipun ada rasa was was kuatir, pihak Indonesia tetap percaya bahwa pasukan Sekutu datang hanya menjalankan tugasnya.

Pasukan Inggris berhasil membentuk beberapa daerah kantong (*enclave*) di kota Padang, tetapi tidak pernah dapat memperluas kontrolnya sampai keluar kota. Tentara Inggris juga mempunyai prioritas pengamanan lain, menjamin kelancaran jalur komunikasi dengan landasan udara Tabing di utara dan Pelabuhan Teluk Bayur sekitar 5 km sebelah selatannya. Padang adalah satu-satunya kota yang diduduki tentara Sekutu selama tiga belas bulan bertugas di Sumatera Barat dan selama sekitar dua tahun pertama kemerdekaan kontak senjata antara Republik dengan tentara Sekutu dan kemudian Belanda, hanya berlangsung di kota Padang.

Jumlah mantan rumusha asal Jawa ini yang mendaftarkan diri menjadi laskar TKR (Tentara Keamanan Rakyat), tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun tidak kurang dari separuh yang tersisa dari seluruh rumusha asal Jawa tersebut, ikut berbakti dan menyumbangkan tenaganya dalam perjuangan melawan penjajah. Mereka telah siap sebagai laskar rakyat dan siap bertempur jika Belanda berani memasuki kawasan Durian Gadang. Selama beberapa bulan mereka mendapat latihan militer dan taktik perang gerilya. Sebagian dari mereka ada yang

⁸² *Ibid.*, hal. 157.

⁸³ *Ibid.*, hal. 158.

ditugaskan ke daerah di luar Dharmasraya untuk ikut bertempur di front terdepan. Sebagian lagi tetap menjaga keamanan di Durian Gadang. Dengan menggunakan taktik perang gerilya, mereka berusaha menghambat kehadiran tentara Belanda di daerah ini. Jalan-jalan yang membelah hutan belantara banyak yang dirintangi dengan batu dan pohon-pohon besar yang ditumbang di tengah jalan. Ada yang sengaja merusak jembatan agar tak dapat dilewati panser Belanda.

Pada kenyataannya selama perang kemerdekaan (1945-1949) Belanda hampir tidak pernah berhasil memasuki wilayah durian Gadang. Belanda hanya mampu menyerang dan menduduki kota-kota di Sumatera Barat, seperti Padang, Bukittinggi, Padangpanjang, dan kota-kota Kabupaten lainnya. Namun untuk daerah perkampungan tetap dikuasai para gerilyawan.

Perjuangan sebagai laskar rakyat di Durian Gadang berlangsung hingga akhir tahun 1949. Setelah persetujuan KMB (Konferensi Meja Bundar), Belanda bersedia menyerahkan kedaulatan kepada pihak Republik Indonesia., yang kemudian menjadi Negara Republik Indonesia Serikat pada awal tahun 1950.

Setelah penyerahan kedaulatan tersebut, pihak Indonesia ingin kembali kenegara Kesatuan Republik Indonesia, dan menggantinya RIS menjadi RI. Setelah musuh tidak ada lagi, maka keberadaan tentara rakyat tidak diperlukan lagi. Pemerintah Indonesia kemudian menyerukan demiliterisasi. Sebagian dari laskar rakyat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan militer harus kembali menjadi orang sipil untuk bekerja membangun negeri sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuannya masing-masing. Yang ahli dagang kembali berdagang, yang ahli tukang bekerja dipertukangan. Demikian juga yang biasa bertani, kembali menjadi petani.

Para mantan romusha asal Jawa, setelah proses demiliterisasi berjalan lancar, mereka ada yang kembali pulang kampung, dan ada pula yang menetap di Durian Gadang dan menikah dengan perempuan Minang, hidup berbaur dengan masyarakat setempat.

Tidak ada data pasti mengenai mata pencaharian mereka setelah Indonesia merdeka. Namun dari pengakuan seorang mantan romusha yang bermukim di Durian Gadang, di antara mereka ada yang bertani, berdagang, tukang bangunan, buruh, jualan, pengrajin dan sebagainya. Ada juga yang mencari hidup ke kota-kota yang ada di Sumatera Barat, seperti Padang, Solok, Bukittinggi, Padangpanjang, Batusangkar dan kota-kota lainnya untuk bekerja apa saja, seperti jualan es krim, bakso, pangsit, atau menjadi buruh bangunan.

3. Romusha dan Masyarakat Lokal

Pembahasan masalah romusha dan masyarakat setempat, tidak lepas dari pembahasan masalah adat-budaya dan bahasa yang mereka miliki. Perbedaan yang kontras antara budaya dan bahasa masyarakat setempat dengan para romusha dapat terjadi karena para romusha tersebut hampir seluruhnya didatangkan dari luar Sumatera.

Para romusha yang didatangkan Jepang ke kawasan Durian Gadang, Kabupaten Dharmasraya ini berasal dari Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang nota bene adalah pendukung budaya dan bahasa Jawa. Bahasa Jawa memiliki beberapa dialek, seperti dialek Surakarta (Solo), dialek Jogjakarta, Semarang, Banyumasan, Tegal, Cilacap, Kebumen, Bagelen dan lain-lain.

Bahasa Jawa mengenal *krama* dan *ngoko*, yang masing-masing mengenal tingkatan. Untuk *Krama* ada *krama andap*, *krama madya* dan *krama inggil*. Demikian juga bahasa *ngoko* juga ada tingkatan-tingkatannya. Di samping itu juga ada bahasa *bagongan* yang banyak digunakan di lingkungan kraton. Di masyarakat Jawa dalam penggunaan bahasa disesuaikan dengan siapa dia berbicara atau bergaul, sehingga penggunaan istilah atau bahasa, gaya dan intonasinya berbeda sesuai dengan siapa yang diajak bicara.

Perlu diketahui bahwa di Jawa ada perbedaan antara perkotaan (Kraton) dan perkampungan. Jika daerah perkotaan merupakan budaya yang banyak dipengaruhi oleh adat-istiadat keraton yang merupakan pusat budaya dan pusat pemerintahan kerajaan, sehingga *unggah-ungguh*, *tata krama*, *etika sopan santun* sangat ditekankan untuk ditaati dan dijalani sebagai hal yang wajib. Ada strata dan perbedaan penggunaan bahasa, gerak-gerik dan tingkah laku antara bangsawan, priyayi dan kawula (rakyat jelata).

Selanjutnya penggunaan adat budaya dan bahasa daerah perkampungan cenderung kurang memperhatikan budaya kraton. Hal inilah yang menyebabkan mengapa bahasa dan budaya orang kampung di Jawa terkesan kasar, lugu dan terus terang. Dalam berkomunikasi antara ucapan, gertak, mimik dan gaya bicaranya disesuaikan dengan siapa ia berbicara.

Berbeda dengan orang perkotaan yang menyebut dirinya orang nagari, artinya orang yang berasal dari nagari atau keraton (Kerajaan) yang menganggap dirinya sebagai keturunan *ningrat*, *sentono*, *priyayi*, atau bangsawan, maka dalam berbicara, bergaul, dan berkomunikasi ada *unggah-ungguh*, *tata krama*, *sopan santun* disertai gerak tubuh, mimik wajah dan gaya bicara yang nampak sangat halus budi bahasanya. Tingkat pengetahuan, terutama pengetahuan tentang budi pekerti, adat-istiadat, bahasa, filsafat, kesenian dan aliran kepercayaan Jawa sangat

dipahami dan dimengerti, sehingga mereka sangat taat dan menjadi pelindung dan pendukung budaya dan bahasa yang mereka miliki.

Hal ini tidak dimiliki oleh mereka yang tinggal di daerah perkampungan. Mereka yang berada di kampung-kampung yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten yang ada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, rata-rata merupakan orang yang tingkat pendidikannya sangat rendah, lugu dan sederhana dalam segala hal. Maka tidak mengherankan jika masyarakat di daerah perkampungan ini kurang memahami *unggah ungguh, tata krama, agama, kesenian, filsafat*. Mereka hidup sederhana dan miskin, sehingga ada istilah yang menyebutkan bahwa orang kampung adalah *wong pidak pendarakan, wong cilik, unglak-anglik, wong ngulandoro* yang jauh dari *suba-sita* dan *unggah-ungguh*. Masyarakat yang *adoh ratu cedhak watu* (jauh dari raja, dekat dengan batu). *Adoh ratu* maksudnya adalah orang kampung itu jauh dari pusat budaya, tidak mungkin memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi tentang filsafat, kesenian dan budaya Jawa. *Cedhak watu*, maksudnya orang kampung itu adalah orang yang bodoh, miskin, *gumunan*, penakut, rendah diri dan lugu.

Adapun penduduk setempat merupakan pendukung adat-istiadat, budaya dan bahasa Minangkabau. Jika di Jawa ada perbedaan antara daerah satu dengan daerah lain sehingga menimbulkan banyak dialek, maka di Sumatera Barat juga ada sedikit perbedaan antara daerah satu dengan daerah lain. Adanya perbedaan antar daerah ini juga diperjelas dengan munculnya istilah lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya, lain kampung lain adatnya. Orang Minangkabau sendiri mengakui adanya istilah "*Adat salingkar nagari*", maksudnya bahwa masing-masing nagari berhak menentukan aturan, tata tertib dalam mengatur hidup dan kehidupan warganya.

Penduduk setempat yang mendiami kawasan Durian Gadang ini merupakan bagian dari masyarakat Minangkabau yang tinggal di kawasan Kabupaten Dharmasraya, yang dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Daerah kabupaten ini merupakan daerah rantau pedalaman karena jauhnya masuk ke pedalaman dan jauh dari pantai.

Sistem kekerabatan masyarakat Minang di kawasan Durian Gadang ini adalah sistem matrilineal, sama seperti masyarakat Minangkabau yang mendiami kawasan Sumatera Barat lainnya. Sistem matrilineal ini berbeda dengan sistem yang berlaku di Jawa yang lebih menekankan pada garis keturunan ayah, meskipun garis keturunan ibu juga diakui, sehingga di Jawa juga berlaku sistem parental, artinya menganut garis keturunan ayah dan ibu.

Sistem matrilineal adalah garis keturunan seseorang dan segala aspek-aspeknya dihitung menurut garis keturunan ibu. Adapun ciri-ciri

masyarakat Minangkabau dengan sistem matrilinealnya itu sebagai berikut :

1. Suku dan keturunan dihitung berdasarkan garis keturunan ibu.
2. Tiap orang tidak dibenarkan kawin dengan orang sesuku atau orang seketurunan dari garis ibu.
3. Kekuasaan di dalam suku terletak di tangan ibu, tetapi jarang digunakan, karena dalam prakteknya yang berkuasa saudara laki-laki dari ibu.
4. Perkawinan bersifat matriloal, yaitu suami mengunjungi rumah istrinya.
5. Hak dan pusaka diwarikan oleh mamak kepada kemenakannya yaitu dari saudara laki-laki kepada anak dari saudara perempuan.
6. Rasa sehinu, semalu dan rasa dendam pembalasan merupakan satu kewajiban bagi seluruh anggota suku.⁸⁴

Dalam masyarakat Minangkabau, kelompok kekerabatan terkecil adalah "se-ibu" (semandeh) yaitu mereka yang lahir dari ibu yang sama dengan pimpinan saudara laki-laki ibu yang disebut *mamak*. Selanjutnya gabungan dari kelompok semandeh (se-ibu) disebut "saparuiik" (satu perut) yang biasanya dihitung sampai lima keturunan. Kelompok kekerabatan satu perut yang kecil mungkin sama dengan kelompok kekerabatan se-ibu, sedangkan kelompok dari kekerabatan "satu perut" yang besar, mungkin terjadi pecahan-pecahan yang mendiami "rumah gadang" yang berlainan sesuai dengan kebutuhan⁸⁵.

Kelompok kekerabatan "satu perut" yang mendiami satu daerah tertentu disebut kampung, yang dipimpin oleh seorang penghulu, yaitu salah seorang dari mamak.. Jika kelompok kekerabatan ini lebih besar dari kampung, makatimbulah suku. Kata suku berarti sama dengan seperempat dan karena itu pula maka setiap nagari akan dijumpai paling kurang empat suku. Segala keturunan itu, otomatis menjadi anggota suku ibunya.

Jika terjadi perkawinan, mereka harus mencari jodohnya di luar suku, karena perkawinan antara sesama anggota kelompok kekerabatan dilarang. Setelah menikah, si suami tinggal di rumah istri sebagai semenda. Saudara laki-laki istrinya diakui sebagai mamak rumah. Seluruh kerabat temanten wanita disebut "*pasumandan*", sedangkan

⁸⁴ Anwar Ibrahim, dkk., *Arti Lambang dan Fungsi Tata Rias Pengantin Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1984/1985), hal. 25.

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 25

anaknyanya menyebut kerabat bapaknya dengan istilah “*bako*” (*Induak bako*). Anak dari anggota kelompok kekerabatan *semandeh*, seperti maupun sekampung disebut *anak pisang*.

Adapun agama yang dianut orang Minang adalah agama Islam. Orang Minang seratus persen beragama Islam. Maka tidak aneh jika di Minangkabau ada istilah “*adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah*”. Maksudnya, adat-istiadat dan budaya Minangkabau yang dijalani selalu selaras dengan syariat Islam. Jika ada orang Minang tidak beragama Islam, maka dia akan dikatakan sebagai bukan orang Minangkabau dan akan diusir dari kampung halamannya. Namun sebaliknya, jika ada pendatang yang berasal dari daerah lain, jika beragama Islam dan berbudaya Minang, maka dia akan dikatakan sebagai telah menjadi orang Minang dan harus diakui sebagai orang Minang.

Para romusha yang nota bene berasal dari tanah Jawa, tentu adat budaya dan bahasanya juga benuansa Jawa. Setelah berada di Durian Gadang, mereka dihadapkan pada pilihan untuk mengakui dan menghormati budaya setempat, seperti kata peri bahasa “*Di mana bumi dipijak, di situ langit musti dijunjung*”. Sadar sebagai mantan romusha asal Jawa, yang nota bene adalah warga pendatang, maka mau tidak mau mereka harus beradaptasi dengan adat budaya masyarakat setempat.

Dalam proses adaptasi tersebut pada awalnya mereka tidaklah mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kebiasaan, adat budaya, dan bahasa baru harus dipelajari. Pada hal mereka bukanlah kelompok orang yang memiliki ilmu pengetahuan, tetapi hanya sebagai romusha yang didatangkan dari daerah miskin yang masyarakatnya masih jauh dari sejahtera, maka tingkat pengetahuannya pun juga masih sangat rendah. Jika mereka harus belajar adat budaya dan bahasa baru tentu akan banyak mengalami kendala dan kesulitan.

Pasca runtuhnya Jepang bagi para romusha menjadi hal yang sangat menyenangkan sekaligus juga dilematis. Dikatakan menyenangkan karena para romusha tersebut telah terbebas dari kekejaman dan keganasan Jepang dalam memperkerjakan mereka di proyek pembangunan jalan kereta api dari Pekanbaru ke Durian Gadang.

Pada sisi lain juga sangat dilematis karena mereka dihadapkan pada keharusan untuk dapat menyesuaikan diri dengan adat-istiadat, budaya dan bahasa penduduk setempat, yaitu Minangkabau. Bagi mereka tidak mudah belajar bahasa Minang, apalagi adat budayanya yang terasa sulit dipahami bagi mereka yang lemah dan bodoh.

Bagi mereka yang tidak betah atau tidak mampu beradaptasi dengan budaya dan bahasa setempat, maka tidak ada pilihan lain selain kembali pulang ke kampung halamannya di Jawa. Namun untuk pulang ke Jawa juga tidaklah mudah karena biaya transportasi tidak ada. Lagi

pula alat transportasi baik darat maupun laut sulit dicari. Kondisi inilah yang kemudian menjadi bahan pikiran bagi para mantan romusha di Durian Gadang tersebut.

4. Integrasi dengan masyarakat lokal

Meskipun para mantan romusha berada pada situasi yang sangat dilematis, namun kenyataannya mereka juga senang berada di lingkungan masyarakat setempat yang nota bene berbudaya Minangkabau. Orang-orang Minang di Durian Gadang dengan senang hati membantu mereka (romusya asal Jawa) untuk belajar adat budaya dan bahasa Minangkabau. Kendala bahasa dan budaya yang berbeda tidak menghalangi kedua etnis itu untuk saling mengenal dan saling memahami, sehingga meski lambat adaptasi dapat berjalan dengan lancar. Penduduk setempat juga dapat memahami kesulitan para mantan romusha asal Jawa tersebut, sehingga mereka dengan senang hati mau membantu mereka untuk belajar dan memahami budaya dan bahasa Minangkabau.

Bagi mereka yang telah bersedia belajar dan memahami adat budaya dan bahasa Minang, maka mereka dianggap sebagai bagian dari orang Minang. Mantan romusha yang ingin menikah juga dibantu untuk dinikahkan dengan wanita setempat yang bersedia menjadi istrinya. Setelah menikah, ia diberi tanah sesuai dengan kemampuannya untuk menggarap tanah dan mengolahnya sesuai dengan kebutuhan.

Orang yang berhak menyerahkan tanah garapan untuk para mantan romusha di Durian Gadang adalah ninik mamak. Sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di Minangkabau, para ninik mamak, pemangku adat dan para datuk berhak mengurus dan memberikan tanah kepada mereka, sekuat mereka mampu menggarapnya. Mereka diberi tanah tanpa harus membeli. Asalkan syarat-syarat *adat diisi, limbago dituang*, maka mereka akan dapat menerima tanah sesuai dengan yang diinginkan. Ketika itu, tanah di Durian Gadang masih sangat luas dan belum banyak dikerjakan atau diolah untuk pertanian, sehingga banyak yang terbengkelai. Tanah yang tidak produktif diserahkan secara cuma-cuma oleh para datuk, ninik mamak, pemangku adat kepada para mantan romusha yang ingin bercocok tanam (bertani) supaya tidak terlantar.

Mereka yang telah menikah dan mempunyai anak, maka anak-anaknya di samping diakui sebagai anak Jawa, juga diakui sebagai anak Minang. Dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di samping mendapatkan pengetahuan tentang budaya Jawa juga budaya Minang, sehingga proses pembauran dan adaptasi dapat berjalan lancar.

5. Pengaruh Romusha Pasca Jepang Pada Masyarakat Lokal

Kehadiran mantan romusha di Durian Gadang dampaknya kecil sekali pada hubungan antar budaya dengan masyarakat setempat. Berbeda dengan masyarakat di lokasi transmigrasi yang dilakukan pada masa Orde Baru di kawasan Sawah Lunto Sijunjung. Masyarakat transmigran yang mengelompok dalam jumlah yang cukup besar, menyebabkan budaya masyarakat pendatang (Jawa) dengan budaya masyarakat setempat terjadi saling pengaruh mempengaruhi. Artinya, apabila dua atau lebih kebudayaan hidup berdampingan dan saling berinteraksi satu sama lain, maka terjadilah proses saling pengaruh mempengaruhi secara timbal balik di antara kebudayaan-kebudayaan tersebut, baik terhadap perkembangan kebudayaan pendatang maupun perkembangan kebudayaan masyarakat setempat.

Hubungan antar budaya menyangkut hubungan interaksi antar warga yang berbeda asal daerah dan berbeda pula adat istiadat, tradisi dan budayanya. Mereka disatukan dalam pergaulan yang saling pengertian, saling menghormati dan saling menghargai. Demikianlah yang terjadi di lingkungan masyarakat transmigran di Sawah Lunto Sijunjung yang sekarang telah menjadi bagian dari Kabupaten Dharmasraya.

Mengingat para mantan romusha yang berasal dari Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ini jumlahnya tidak begitu banyak dan mereka terdiri dari para pekerja laki-laki yang tidak disertai anak dan istri, maka adat istiadat, tradisi dan budayanyapun tidak nampak menonjol.

Sebagai warga minoritas di tengah-tengah lingkungan penduduk setempat, mereka harus dapat menyesuaikan diri dengan kehidupannya yang baru, seperti kata pepatah "*di mana bumi dipijak, di situ langit musti dijunjung*". Orang yang datang dari Jawa (mantan romusha) harus mentaati tiga naskah. Pertama, tidak boleh membawa *cupak* dan *gantang* ke daerah yang baru. Artinya tidak boleh menonjolkan adat dan budaya di daerah yang baru, misalnya kalau di Jawa itu menyebut bilangan satu itu *siji*, maka di Durian Gadang harus *ciek*. Kedua, harus mentaati pepatah "*di mana ranting dipatah, di situ air disauh*". Ketiga, "*di mana tembilang dipacak, di situ tanaman tumbuh*". Akan Tetapi dengan adanya sosialisasi, tampaknya warga eks romusha sudah mengarah ke situ, sudah mulai menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan setempat.

Lancarnya proses adaptasi di lingkungan warga setempat, maka para mantan romusha asal Jawa harus masuk salah satu suku yang ada di Nagari Durian Gadang. Secara keseluruhan memang belum semua dapat masuk salah satu suku yang ada di Durian Gadang.

Pada awalnya para mantan romusha belum tahu tentang adat, tradisi dan budaya serta bahasa warga masyarakat setempat yang nota bene berbudaya dan berbahasa Minangkabau. Untuk sosialisasi dan penyesuaian dengan daerah dan lingkungannya yang baru membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi selama ini dari pihak *ninik mamak* belum maksimal dalam memberikan sosialisasi kepada warga minoritas asal Jawa tersebut, sehingga wajar jika masih ada yang belum faham dan belum mengerti. Jadi perlu belajar dan sosialisasi untuk menyerap budaya setempat.

Ada aturan tidak tertulis di Durian Gadang yang mengharuskan para mantan romusha asal Jawa masuk salah satu suku dari suku-suku yang ada di Nagari Durian Gadang. Apalagi jika mereka (para mantan rumusha asal Jawa) ingin menikah dengan salah satu perempuan Minang, maka mereka harus masuk suku. Mengingat yang dapat meneruskan garis keturunan hanya pihak ibu, maka yang dapat berkembang keturunannya adalah keturunan dari ibu. Pihak mantan romusha yang masuk suku tidak akan berkembang, namun demikian, pihak laki-laki harus masuk suku sehingga di Durian Gadang tidak ada lagi yang tidak bersuku. Jika seorang romusha masuk suku, maka seluruh saudara kandungnya secara otomatis juga masuk suku yang sama, karena ada pertalian darah itu tidak boleh berbeda suku. Dalam perkawinan, ada aturan bahwa seorang laki-laki tidak dibenarkan menikah dengan seorang perempuan yang satu suku karena dianggap bersaudara.

Pada awalnya ada kendala ketika para mantan romusha asal Jawa ini ingin masuk suku. Setelah masuk suku ia ingin menikah dengan wanita dari suku yang sama dengan dirinya. Hal ini terjadi karena jauh sebelum ia masuk suku, ia sudah jatuh hati pada salah seorang perempuan dari suku tersebut. Setelah masuk suku dari keluarga perempuan tersebut, ia baru mengutarakan keinginannya untuk menikahi perempuan itu. Namun karena satu suku itu adalah bersaudara, maka ia tidak dibenarkan untuk menikahi perempuan dari suku yang sama. Setelah diberi pengertian, ia baru menyadari dan kemudian bersedia menikahi perempuan dari keluarga suku yang lain.

Setelah menikahi perempuan Minang, ia harus tinggal di rumah istrinya dan bertindak sebagai *sumando*. Jika ia tidak mempunyai tanah dan ingin memiliki tanah, maka ia harus datang membuat surat permintaan kepada *datuk/ninik mamak/penghulu* suku dengan membayar adat. Dalam membayar adat ini tidak membebankan karena harus dibayar menurut kemampuan.

Membayar adat itu dalam bentuk uang, sebab pada masa dulu-dulunya itu, kalau kita meminta tanah kepada *datuk-datuk* itu memakai *sirih carano*, datang kepada penghulu, dengan mengatakan “kami mau

berladang, adakah tanah yang bisa diambil ?". Dihadapkanlah *sirih carano* itu yang di atasnya ditaruh uang berupa uang adat, yang maksudnya "*adat diisi limbago dituang*". Jadi, pecahan-pecahan KK (Kepala Keluarga) di Durian Gadang jika meminta tanah kepada datuk penghulu suku akan dikasih, setelah membawa *sirih carano* yang telah diisi dengan uang adat. Dengan kata lain telah memenuhi syarat *adat diisi limbago dituang*. Mengisi *sirih carano* dengan uang itu kalau zaman penjajahan Jepang dulu satu ringgit atau dua setengah rupiah. Setelah zaman kemerdekaan, sekitar tahun 1950-an pada umumnya mengisi *sirih carano* dengan uang senilai Rp. 2,5,- per hektar dengan catatan orang itu sudah masuk suku dan menjadi anak kemenakan.

Untuk masuk suku ini para mantan romusha bebas memilih salah satu suku dari suku yang ada di Durian Gadang. Untuk masuk suku, harus dihadiri seluruh mamak-mamak suku dan datuk yang menjadi kepala suku dengan berdoa dan kenduri berupa nasi kunyit, panggang ayam, nasi dan lauk pauk lainnya. Berdoa dan kenduri itu dilakukan di rumah orang yang sukunya dimasuki. Setelah masuk suku ia diangkat sebagai *anak kemenakan*. Yang perempuan bilang mamak, bukan bapak lagi, misalnya dengan menyebut *cuk*. Seluruh datuk yang ada hadir untuk memberi kesaksian.

Adat perkawinan yang dipakai ketika terjadi perkawinan antara mantan romusha dengan gadis setempat, adalah adat perkawinan Minangkabau. Para mantan romusha yang lain juga ikut hadir. Sedangkan adat budaya temanten Jawa tidak dilakukan, karena mereka tinggal di Nagari Durian Gadang sehingga harus menyesuaikan adat budaya yang berlaku di Durian Gadang.

Mengenai lamaran, biasanya dirundingkan dulu dari kedua belah pihak yang akan menikahkan anaknya. Dari pihak mantan romusha yang mewakili keluarganya adalah keluarga dari suku yang ia masuki dan datuk penghulu suku ikut membantu mensukseskan prosesnya hingga selesai. Karena ia sudah menjadi anak kemenakan, maka ia bukan orang lain lagi dan harus diperlakukan sebagai mana anggota keluarga Minang lainnya.

Para mantan romusha asal Jawa ini biasanya mencari sendiri calon pasangannya, dan keluarga yang ditumpangi atau keluarga sesukunya tinggal merestuinnya. Namun ada juga yang minta tolong pada mamaknya untuk dicarikan jodohnya. Setelah ada kecocokan, baru minta pada pihak-pihak yang berkompeten untuk melamar atau menikah.

Lamaran dilakukan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan biasanya tidak datang sendiri, tetapi ada perantaranya dan yang menjadi perantara adalah wali kampung atau orang yang biasanya diutus untuk melamar. Yang ikut hadir biasanya tiga sampai lima orang.

Pihak keluarga dari calon mempelai laki-laki datang melamar melalui perantara. Pada saat dilakukan lamaran, sekaligus juga dibicarakan kelanjutan hubungan kedua pasangan tersebut. Dibicarakan pula kapan hari nikahnya, jika belum siap perlu tunangan dulu, yang dalam istilah Jawa disebut *peningset* atau tanda tunangan. Biasanya benda yang dijadikan sebagai alat tunangan berupa cincin, gelang atau kalung sesuai dengan kesepakatan. Biasanya 5 emas atau 12 ½ gram.

Setelah tunangan selesai, maka keduanya sudah terikat untuk menjalin hubungan pernikahan dikemudian hari. Jika salah satu pihak ingkar janji, maka yang ingkar didenda. Jika yang ingkar dari pihak laki-laki, maka benda tunangan yang diberikan hilang, hal ini juga disebut denda lepas, artinya benda yang sudah diserahkan habis, tidak bisa dikembalikan lagi. Jika yang ingkar pihak perempuan, maka benda tunangan yang diterimanya dulu harus dikembalikan dua kali lipat kepada pihak laki-laki yang telah memberi tanda tunangan. Dalam setiap tunangan yang dilakukan oleh mantan romusha selama ini di daerah Durian Gadang, belum ada yang ingkar, sudah memilih sendiri atau sudah dijodohkan sehingga mereka tidak dapat ingkar, apalagi ia berada di lingkungan warga setempat, harus bisa menjaga perasaan dan hati warga di lingkungan di mana ia tinggal.

Menurut adat di Nagari Durian Gadang, yang pertama dilakukan adalah mendudukkan mamak dari pihak laki-laki dengan orang tua dari pihak perempuan. Setelah duduk dan bermusyawarah, kemudian diserahkan kepada pemangku adat yang kemudian berkewajiban untuk mengurusnya. Orang tua kedua belah pihak memohon kepada pemangku adat membantu untuk terselenggaranya prosesi pernikahan menurut adat Minang. Menurut tradisi di Durian Gadang, yang mengurus kenduri dan prosesi pernikahan adalah penghulu adat.

Dalam pesta pernikahan, biasanya membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak, ada yang harus memasak, mengatur tata rias, mengatur ini, itu dan sebagainya. Maka perlu diundang warga se RT untuk membantu. Jika masih kekurangan tenaga, perlu mengundang dari RT lain. Ada pembagian tugas, seperti urusan kue, memasak rendang, mencuci piring, menghidangkan, menerima tamu dan sebagainya.

Peralatan pesta biasanya menyewa sesuai dengan kemampuan. Para tamu biasanya diundang dengan memakai kartu undangan. Mereka biasanya hadir makan secara prasmanan dan kemudian menaruh uang dalam amplop, sesuai dengan kemampuan dan status sosial orang tersebut. Saat pulang, pihak yang mempunyai hajat memberi kue. Masakan untuk pesta perkawinan ini ada gulai nangka, rendang, sambal balado, dan masakan khas Minang lainnya.

Setelah menikah, temanten laki-laki harus tinggal di rumah pihak mempelai perempuan. Mengingat para mantan romusha di Durian

Gadang hampir semuanya tidak ada istri, atau istrinya masih tinggal di Jawa, maka yang tidak pulang terpaksa harus menikah lagi dengan perempuan Minang, sehingga mereka hampir semuanya menikah dengan perempuan Minang. Ada yang mendapatkan seorang gadis muda, ada pula yang menikah dengan janda yang telah mempunyai beberapa orang anak. Biasanya bagi para mantan romusha yang sudah agak tua lebih suka menikah dengan janda. Meskipun sudah mempunyai beberapa orang anak, namun lebih bisa membahagiakan karena umumnya terpaut tidak terlalu jauh. Jika menikah dengan gadis yang rata-rata masih terlalu muda, atau bahkan usianya hampir sama dengan usia anaknya, maka dirasa kurang harmonis dan kurang serasi, sehingga kebahagiaan kurang dapat diciptakan.

Setelah mempunyai anak, mereka mendidiknya dengan adat-istiadat dan bahasa Minang. Meskipun demikian, ada juga yang mengajarkan budaya dan bahasa Jawa kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak mereka di samping mengerti adat-istiadat dan bahasa Minang juga dapat mengerti adat budaya dan bahasa Jawa.

Demikian juga tradisi, dan upacara daur hidup dari lahir, kitan anak, menikahkan anak mereka tetap mengikuti adat budaya Minang, sesuai dengan peri bahasa “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”.

Demikianlah proses integrasi warga pendatang yang nota bene adalah mantan romusha asal Jawa ini untuk dapat berjalan dengan lancar. Meskipun dalam prosesnya memang memakan waktu cukup lama untuk dapat mengetahui, memahami, dan melaksanakan adat tradisi dan budaya serta bahasa Minangkabau. Lambat tapi pasti mereka dapat berbahasa Minang, sehingga proses integrasi dapat berjalan dengan baik. Apalagi warga masyarakat setempat juga ikut membantu dan mendukung memberikan bimbingan dan arahan untuk dapat berinteraksi dengan budaya masyarakat setempat.

Kalau anak kemenakan tergolong miskin di Durian Gadang, dalam urusan kenduri dan pesta adat seperti perkawinan, maka pengadaan biayanya dengan kekuatan suku, satu datuk itu iuran supaya perempuan tersebut tidak malu. Di Durian Gadang pada khususnya dan Minangkabau umumnya, kalau sudah satu suku itu ditanggung bersama, sakit sama dirasa, senang sama dinikmati, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun.

Menurut adat Minang di Durian Gadang, pembagian harta warisan menurut garis keturunan ibu, sedangkan saudara laki-laki hanya berwenang mengawasi. Hak menikmati hasil itu ada di pihak perempuan, tetapi untuk yang laki-laki kalau ada hal-hal yang mendesak itu dikasih juga sesuai dengan hasil musyawarah antara kakak dan adik, misalnya dengan menggadaikan sawah atau menjual ladang.

Untuk harta pusaka menjadi hak milik anak perempuan, tetapi kepada anak perempuan diamanahkan andai kata itu kepepet harus dibantu dengan harta pusaka tersebut. Untuk anak-anak mantan romusha juga demikian, berlaku seperti yang disebutkan di atas.

6. Romusha Pulang Kampung

Ketika Jepang menyerah kalah pada tanggal 14 Agustus 1945, maka para romusha asal Jawa di Durian Gadang terbebas dari pengawasan Jepang. Ikatan kerja yang menekan dan pengawasan ketat serta perlakuan yang kejam, bengis, disertai pukulan dan cambuk yang diderita oleh para romusha itu berakhir. Seperti terbebas dari himpitan batu yang sangat berat, mereka dapat lepas dan bemaafas lega.

Tidak ada data yang valid mengenai jumlah romusha yang masih tersisa setelah Jepang menyerah kepada tentara Sekutu. Namun ada yang mengatakan masih sekitar beberapa ribu orang. Ada romusha yang mengatakan bahwa mereka tidak membenci Jepang, tetapi pada suatu waktu mereka memang merasa jengkel terhadap Jepang. Kebanyakan perasan jengkel mereka ditujukan kepada lurah, *kamituwo*, atau *jagaraga* yang merekrut mereka menjadi romusha. Setelah pulang kebanyakan mereka kembali bekerja seperti sebelum berangkat. Mereka melakukan apa saja yang mereka bisa.

Ribuan romusha yang tersisa setelah Jepang pergi dari Durian Gadang, timbulah kerinduan dan keinginan untuk pulang ke kampung halamannya di Jawa. Ada bermacam-macam cara yang ditempuh dan di tempat satu berbeda dengan yang berada di tempat lain, meski sama-sama ditempatkan di Sumatera Tengah. Di antara mereka ada yang sudah pulang sebelum berakhirnya kekuasaan bala tentara Dai Nippon di Sumatera, karena berhasil melarikan diri. Untuk mengetahui bagaimana kelompok-kelompok romusha itu pulang ke kampung halamannya akan diikuti pengalaman mereka sebagai romusha di Durian Gadang.

Pengalaman mereka dari tempat bekerja sampai ke Jawa Tengah atau Daerah Istimewa Yogyakarta bermacam-macam. Romusha yang bekerja di Durian gadang ini ada yang mengatakan bahwa setelah mendengar kabar Jepang menyerah kepada Sekutu, ada yang ingin pulang kampung. Mereka yang ingin pulang diangkut menggunakan perahu/rakit dengan menyusuri Batang Kuantan hingga sampai Siak di Riau. Mereka menunggu beberapa hari di pelabuhan kemudian diberangkatkan dengan kapal menuju Tanjung Priok. Mereka istirahat di Tanjung Priok selama enam hari lalu berangkat ke kota Jakarta berjalan kaki, sebab rel yang ada dulu sudah dicabuti.

Mereka naik kereta api di Jakarta menuju Jawa Tengah. Setelah sampai di Stasiun Gowongan disuruh menunggu selama lima hari untuk

menunggu giliran pendaftaran. Setelah gilirannya tiba didaftar dan diberi kain satu setengah meter, lalu baru diizinkan pulang ke desa masing-masing. Tidak kurang seratus lima puluh orang yang ikut rombongan kepulauan mereka hingga sampai di Gowongan. Mereka yang berasal dari Boyolali, Sragen, Karanganyar, Ngampel dan sekitarnya, turun di Stasiun Balapan Solo. Kemudian mereka terus pulang ke kampungnya masing-masing. Sedangkan mereka yang berasal dari Kebumen dan Banyumas turun di Stasiun Purwokerto.

Mereka merasa terbebas untuk berbicara mengenai pengalaman mereka sebagai mantan romusha kepada siapapun. Akan tetapi romusha yang diwawancarai juga mengatakan bahwa setelah perang tidak ada satupun yang memberikan mereka bantuan nyata. Mereka merasa bahwa tidak pernah ada pihak yang bertanggung jawab atas nasib mereka yang buruk selama menjadi romusha. Mereka merasa dilupakan atau diabaikan, tidak hanya oleh Jepang, tetapi juga oleh administrasi Indonesia sendiri.

Saat ini sudah banyak romusha yang meninggal tetapi masih ada yang tersisa yang masih hidup. Mereka yang masih hidup dibedakan menjadi dua, yaitu romusha yang pulang dan tidak pulang. Kebanyakan yang tidak pulang karena memang tidak bisa pulang. Sedangkan yang bisa pulang pasti pulang, walaupun ada juga yang tidak mau pulang. Mereka mencoba hidup di tempat yang mengizinkan mereka untuk hidup.

Romusha asal Durian Gadang ini tidak ada yang mendapat bantuan dari Jepang atau Inggris, tetapi ada yang mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah. Namun demikian sebagian besar pulang dengan biaya sendiri. Uangnya diperoleh dari upah yang mereka kumpulkan selama bekerja sebagai romusha. Namun mereka yang tidak dapat mengumpulkan uang karena habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari, maka ketika ingin pulang, ia tidak dapat ongkos sehingga terpaksa harus menunda sampai beberapa tahun kemudian baru bisa pulang.

Ada juga sekelompok romusha asal Sumatera Barat yang pulang lewat Padang. Mereka yang berasal dari Durian Gadang sebagian menuju Sijunjung, kemudian naik kereta api menuju Padang. Mereka yang telah sampai di kota Padang menuju pelabuhan Teluk Bayur. Mereka menunggu di Teluk Bayur selama beberapa hari, kemudian setelah kapal tiba, diangkut menuju ke Tanjung Priok, Jakarta dan dari Jakarta diberangkatkan ke Jawa Tengah menggunakan transportasi kereta api.

Romusha yang ditempatkan di luar negeri seperti di Saigon, Birma, Thailan ada yang mendapat bantuan Belanda untuk pulang, tetapi hanya sampai di Singapura. Selebihnya harus ditanggung sendiri. Dari Singapura, sebagian besar memilih untuk menetap di berbagai

daerah di Sumatera, seperti di Riau, Jambi, dan Sumatera Utara. Jadi tidak sampai ke Jawa.

Apa yang terjadi dengan mereka setelah pulang ? Tidak ada. Mereka dibiarkan begitu saja dan sampai sekarang mereka masih menunggu uang ganti rugi. Organisasi yang mewakili Romusha LBH (Lembaga Bantuan Hukum) di Yogyakarta menurut kesaksian romusha yang diwawancarai di sana juga sampai saat ini belum berhasil mendapat ganti rugi. Menurut keterangan salah seorang romusha yang diwawancarai tersebut, ia belum mendapat apa-apa sebagai ganti rugi walaupun banyak romusha asal Yogyakarta yang mendaftarkan diri ke sana.⁸⁶

Kritik mereka adalah bahwa mereka tidak pernah mendapat bantuan. Paling tidak kehidupan mereka diganggu oleh Jepang. Banyak yang meninggal, walaupun itu tergantung tempatnya. Banyak yang sakit dan terluka diabaikan. Romusha selalu dibohongi dan ditindas, maka logis kalau setelah merdeka, mereka menuntut dan merasa berhak mendapat ganti rugi. Namun kenyataannya sampai detik ini, mereka tidak pernah menerima atau dibayar sepentasnya.

Meskipun banyak yang dulu mungkin karena alasan ekonomis mendaftarkan diri itu tetap tidak memberikan Jepang hak untuk mengeksploitatif mereka. Akan tetapi juga ada kesadaran bahwa pihak Indonesia dan pihak Jepang keduanya tidak terlalu mau diingatkan mengenai masalah romusha. Memang rumit, tetapi jelas juga bahwa romusha telah menjadi korban dari keganasan Jepang. Pada pokoknya sampai sekarang romusha tidak pernah mendapat apa-apa dari Jepang maupun Indonesia.

Di antara mantan romusha ada yang bertemu kembali dengan anak istrinya, ada pula yang istrinya sudah menikah dengan lelaki lain. Pernikahan dengan laki-laki lain dapat terjadi karena selama menjadi romusha di Sumatera Barat, tidak ada kabar beritanya, sehingga keluarganya menganggap bahwa ia telah meninggal. Jandanya meski sudah mempunyai beberapa orang anak, dilamar lelaki lain sehingga melahirkan anak dari perkawinannya yang kedua.

Bagi yang istrinya meninggal atau dinikahi lelaki lain, mereka kemudian menikah lagi dengan perempuan sedesanya. Ada yang mendapat janda ada pula yang mendapat perawan. Mengingat waktu itu masih zaman sulit, maka pemikahan mereka dilakukan secara sederhana, tidak ada pesta atau perayaan.

Selama berada di kampung halamannya masing-masing, para mantan romusha tersebut mulai membangun kehidupannya yang baru

⁸⁶ Wawancara dengan Kerto Pawiro, mantan romusha asal Yogyakarta pada tanggal 22 Juni 2009 di Yogyakarta.

Yang punya tanah pertanian, mereka kembali bertani dan mengolah sawahnya untuk ditanami padi, palawija, atau sayur mayur lainnya. Yang tidak mempunyai tanah pertanian, ada yang bekerja sebagai buruh tani atau buruh bangunan. Yang punya keahlian, ada yang menjadi tukang bangunan, tukang kayu, tukang perabot, pengrajin dan sebagainya. Ada juga yang bekerja sebagai pedagang kecil-kecilan, seperti dagang beras, sayur, dan jualan bahan kebutuhan hidup sehari-hari lainnya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Tokutomi mengemukakan bahwa semenjak restorasi, Jepang telah banyak mengetahui tentang dunia, tetapi dunia belum lagi mengenal Jepang. Lebih jelek lagi dari itu, orang Jepang sendiri belum lagi mengenal dirinya sendiri. Hal ini menjadi salah satu motivasi bagi Jepang dalam melakukan ekspansi pada negara-negara lain. Ini dibuktikan kemudian dalam melakukan berbagai ekspansi Jepang selalu mendapat sukses, sehingga hal itu menumbuhkan kebanggaan nasional bagi Tokutomi yang sangat mendukung ekspansi Jepang.

Alasan lain Jepang melakukan ekspansi ke negara-negara lain adalah alasan ekonomi, pengembangan pasar dan kebutuhan akan bahan baku. Selain itu Tokutomi dalam sebuah tulisannya pada tahun 1895 mengatakan, bahwa Jepang mempunyai tugas suci "untuk menyebarkan kebajikan-kebajikan organisasi politik ke kawasan-kawasan Asia Timur dan Pasifik Selatan". Apapun alasan Jepang untuk melakukan ekspansi ke berbagai Negara di Asia Timur dan Pasifik Selatan, tetap tidak dapat dibenarkan. Hal itu terbukti, tidak sedikit korban yang berjatuh atas tindakan tersebut, hampir semua negara yang pernah berada dibawah kekuasaan Jepang dapat merasakan pengalaman yang sama. Begitu pula dengan Indonesia, banyak bukti yang ditemukan bagaimana kejamnya Jepang selama berada di daerah jajahannya. Banyak korban yang berjatuh, baik manusia, maupun korban harta. Salah satu bukti kekejaman Jepang yang menjadi saksi bisu dan masih dapat kita buktikan sampai sekarang adalah lokomotif tua yang berada di Durian Gadang Sijunjung Sumatera Barat. Lokomotif tua yang terdapat di Durian Gadang menjadi saksi, banyaknya korban yang berjatuh selama proses pembukaan jalan kereta api yang dimulai dari Sijunjung sampai Logas Riau. Korban siksaan yang dilakukan oleh tentara Jepang kepada para pekerja yang dikenal sebagai romusha yang di datangkan dari berbagai daerah di Indonesia.

Kekejaman Jepang selama melaksanakan roda kekuasaannya, tidak pernah dapat dibayangkan akan sanggup dilakukan oleh manusia kepada sesamanya. Akan tetapi Jepang pada saat itu sanggup

melakukannya. Setelah melalui masa-masa yang penuh siksaan selama pendudukan Jepang, nasib para romusha yang masih hidup saat ini masih saja berada dalam penderitaan, seperti nasib pak Usman yang jauh dari kehidupan yang layak.

2. Saran

Sebuah pengalaman sejarah yang telah dilalui bangsa ini, sepahit apapun pengalaman itu, tentu ada sebuah makna pembelajaran di dalamnya. Penelitian terhadap pengalaman para romusha yang telah dilaluinya selama masa pendudukan Jepang itu perlu di ketahui dan dipahami oleh generasi muda. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama adalah :

1. Seharusnya semua peninggalan yang berhubungan dengan romusha di daerah Kabupaten Sijunjung tetap di pertahankan dan dipelihara secara baik, karena hal itu dapat menjadi monument guna mengingatkan generasi yang akan datang bahwa bangsa Indonesia pernah mendapat perlakuan harga diri bangsa yang diinjak-injak.
2. Semua peninggalan yang berhubungan dengan romusha seperti, lokomotif tua, jalan kereta api kalau masih ada sisanya, lokasi-lokasi kerja romusha yang banyak memakan korban seperti gua cigak, adalah asset daerah yang jika dikelola secara baik dan professional akan menjadi sumber penghasilan pariwisata bagi daerah.
3. Apalagi kalau pemerintah daerah dapat mewujudkan jalur kereta api Muaro Sijunjung menuju logas, maka hal itu dapat di jadikan sebagai kereta api wisata bernuansa sejarah romushanya sebagai pendukung perjalanan wisata tersebut, hal itu akan menjadi daya tarik sendiri bagi pengunjung atau wisatawan. Apalagi pemandangan yang ada sangat luar biasa indahny dan sangat eksotis serta mempesona.

DAFTAR PUSTAKA

- A Budi Hartono dan Dadang Juliantara “*Budak Napsu Bangsa Jepang*” (*Kisah Momoye, Perempauan Jugun Ianfu Pada Masa Pendudukan Jepang 1942 – 1945*). Yogyakarta : LBH Yogyakarta
- Abbink, A.J. *Cultures of Violence: A Comparative studi of Cultural Form of Violent Behavior. A Reseach Proposal*, Nijmegen: Intitute for Cultural and Social Anthropology, University of Nijmegen. 1994.
- Ahmad Husen, et al., *Sejarah Perjuangan RI di Minangkabau / Riau 1945 – 1950*, edisi kedua, Jakarta : BPSIM. 1991. jilid 1
- Andwi Prima Valentina, Jejak-Jejak Romusha di Silokek Kabupaten Sijunjung diambil dari Blog Andwi Prima.Woorpress.com pada tanggal 26 Juli 2009
- Anwar Ibrahim, dkk., *Arti Lambang dan Fungsi Tata Rias Pengantin Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1984/1985
- Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi : Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Bambang Purwanto, Sejarah Lisan dan Upaya Mencari Format Baru Historiografi Indonesiasentris dalam buku, *Dari Samudra Pasai ke Yogyakarta Persembahan kepada Teuku Ibrahim Alfian*, Jakarta: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia. 2002.
- Bangsa Jepang diambil dari www.wikipedia.com pada tanggal 21 Juli 2009
- DJB pada masa pendudukan Jepang* unit Khusus Museum Perbankan di Indonesia : Sejarah Pra Bank Indonesia diambil dari Laporan Sejarah Bank Indonesia www.bankindonesia.com Pada tanggal 22 Juli 2009
- Gany A. Hafied A. “ Terdampar Di Jembatan Api Maut Justru menemukan obsesi Makasar di saat remaja diambil dari www.geocities.com/hafiedgany pada tanggal 22 Juli 2009
- Gottschalk, Louis., *Mengerti Sejarah*. Penterjemah Nugroho Notosusanto, Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1985.
- Graghan, Gilbert J., *A Guide to Historical Method*, New York: Fordham University Press. 1984.

- Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar konflik Sepanjang Zaman: Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Ibrahim Alfian, *Tentang Metodologi Sejarah Dalam Buku T. Ibrahim Alfian, et al., ed., Dari babad Dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis: Kumpulan Karangan dipersembahkan kepada Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1992.
- Jejak kekejaman Jepang di Romusha di Banten Selatan diambil dari Blog www.wongbanten.com diambil pada tanggal 22 Juli 2009.
- Jong, L. D. (editor), *Pendudukan Jepang di Indonesia*, Jakarta : Kesaint Blanc. 1987.
- Kurasawa, Aiko., *Mobilisasi dan Kontrol ; Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942 – 1945*. Jakarta : Grsindo. 1993.
- Koran Dagblad Radio*, Sabtu 10 Januari 1942 no 8 th ke 21
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. III, Jakarta : Balai Pustaka. 2001,
- Kiefer, T.M., *The Tausung: Violence and Law in a Philippine Moslem Society*, New York: Holt, Rinehart and Wisnton, 1972,
- Kisah Seorang Romusha Jawa ” Kejahatan Perang Jepang di Perang Dunia kedua” diambil dari <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/...09/02/0000.html> pada tanggal 22 Juli 2009
- Mardjani Martamin, et al., *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatra Barat*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978.
- Masmimar, et al., *Pemuda dan Proklamasi: Gerakan Pemuda Merealisasikan Proklamasi Dan Mewujudkan Pemerintah RI di Bukittinggi-Sumatra*, Jakarta: Panitia Penulisan Sejarah Pemuda dan Proklamasi 1945 Bukittinggi-Sumatra, 1990.
- Meta Sekar Puji Astuti. *Apakah Mereka Mata-mata ?; Orang-orang Jepang Di Indonesia (1868-1942)*. Yogyakarta : Ombak. 2008.
- Munir Taher “ Romusha Aman di Silungkang” Silungkang Dalam Sejarah diambil dari Blog www.Munirtaher.woordpres.com diambil pada tanggal 22 Juli 2009
- Makna Jugun Yanfu diambil dari www.gontenk'sblong.wordpress.com diambil pada tanggal 26 Juli 2009
- Nagazumi, Akira., *Pemberontakan Indonesia di Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 1988.

- Perang Dunia II Dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia diambil dari "<http://www.crayonpedia.org/> pada tanggal 21 juli 2009.
- Perang Dunia Ke Dua dan Pendudukan Jepang* diambil dari www.swaramuslim.com diambil pada tanggal 22 Juli 2009
- Pramoedya Ananta Toer “ *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer*” Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2001
- Rahmat Hidayat, Resensi Buku Jejak-jejak Kekejaman Jepang, diambil dari Blog Rahmat Hidayat diambil pada tanggal 22 Juli 2009
- R. P. Suyono, *Seks dan Kekerasan Pada Zaman Kolonial : Penelusuran Kepustakaan Sejarah*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2005.
- Ribuan Budak Seks Zaman Jepang Tunggu Sikap Pemerintah* diambil dari www.YogyakartaCybernews.com, pada tanggal 26 Juli 2009.
- Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, Jakarta : Garba Budaya dan Kalyanamitra. 1999.
- Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2001.
- Sejarah Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) diambil dari www.wikipedia.com diambil pada tanggal 22 Juli 2009
- Suara Merdeka (Benny Benke) “ Jejak Getir Seorang Romusha” terbit 1 Maret 2004 diambil dari www.suaramerdeka.com pada tanggal 22 Juli 2009
- Suwarno, Romusha Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, 1999.
- Zusneli Zubir, : *Kekerasan Terhadap perempuan pada masa pendudukan Jepang di Sumatera Barat 1942-1945: Sebuah Studi Awal*. Makalah, dalam Seminar Internasional, pada tanggal 28-29 Juli 2005 di Yogyakarta:
- Zusneli Zubir, : *Kekerasan Terhadap perempuan Minangkabau masa pendudukan Jepang*. Yogyakarta: Tesis, Universitas Gajah Mada 2006

SEJARAH KONFLIK TANAH ULAYAT DI NAGARI KAPA KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT 1981 - 2005¹

Jumhari²

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Konflik tanah di Indonesia sepertinya tidak pernah habis-habisnya. Berbagai kasus yang menyangkut sengketa kepemilikan tanah di berbagai daerah seperti Meruya Selatan Jakarta maupun di Pasuruan Jawa Timur pada akhir-akhir ini, menunjukkan bahwa persoalan tanah masih merupakan tema utama yang memicu terjadinya konflik sosial dalam masyarakat Indonesia. Konflik tanah dengan berbagai bentuk variasi sengketa yang melibatkan petani *vis a vis* tuan tanah atau pemilik tanah melawan kelompok pemilik modal yang berkolaborasi dengan penguasa. (www.sinarharapan.co.id)

Fenomena konflik sosial yang menyangkut pemilihan tanah bukanlah isu baru dalam domain publik pada masa kini, realitas historis munculnya bentuk perlawanan rakyat terhadap penguasa kolonial di Nusantara, salah satunya bersumber pada penguasaan tanah, baik yang bersifat individual komunal seperti peristiwa pemberontakan petani Banten 1988 yang ditulis oleh maha guru sejarah, Sartono Kartodirdjo. (Sartono Kartodirdjo, 1984)

Konflik pertanahan dari masa kolonial sampai Indonesia merdeka tidak pernah selesai, sebab masing-masing rezim yang berkuasa dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkannya hanya bertujuan untuk mengamankan kepentingan ekonomi mereka. Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda pernah mengeluarkan UU Agraria 1870 (Renske Biezeveld dalam Frans von Benda-Beckmann, 2001), yang mengizinkan para pengusaha perkebunan untuk mendapatkan hak *erpacht* (hak guna usaha) yakni hak menyewa tanah dalam jangka panjang, tetapi dilarang mereka memiliki secara permanen. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah pernah mengeluarkan UU pokok Agraria 1960, yang salah satu amanatnya melahirkan kebijakan *landreform* kepada rakyat Indonesia. Meskipun telah ada peraturan agraria diatas, tidak berarti dengan sendirinya persoalan sengketa tanah menjadi surut.

¹ Artikel ini merupakan gagasan ulang dari Laporan Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2008.

² Peneliti Muda Pada BPSNT Padang

Bahkan pada periode selanjutnya, yakni pada pemerintahan Orde Baru, corak dan watak sengketa agraria mulai memperlihatkan terjadinya intensitas konflik sosial di masyarakat sebagai konsekuensi dari paradigma pembangunan Orde Baru dengan jargon peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, yang memposisikan tanah sebagai salah satu asset utama sumber ekonomi. Setidaknya ada 3 (tiga) faktor penting menurut Salman Drajat yang memicu konflik pada masa ini, pertama proses ekspansi dan perluasan skala modal, baik modal domestik maupun internasional, kedua watak otoritarian rezim Orde Baru serta ketiga, berubahnya strategi dan orientasi pengembangan sumber-sumber agraria dari strategi agraria yang populis menjadi agraria yang kapatalistik. (Salman Drajat dalam www.sinarharapan.co.id)

Dalam konteks persoalan konflik tanah di Sumatera Barat, sengketa tanah ulayat menjadi salah satu persoalan utama konflik agraria yang sering terjadi di daerah ini. Bahkan beberapa kasus menyangkut perselisihan kepemilikan dan penggunaan tanah, berjalan paralel dengan rezim yang berkuasa. Sebagai contoh pada masa kolonial. Kebijakan pemerintah mengeluarkan UU Agraria, yakni *Domain Declaration* Sumatera pada tahun 1874, merupakan bentuk strategi penguasa untuk melakukan klaim kepemilikan tanah ulayat milik anggota masyarakat nagari sebagai *property right* yang syah dari komunitas adat mereka. Penyebutan istilah 'lahan tidur' yang terdapat dari salah satu pasal dari *Domain Declaration*, yakni bahwa semua tanah yang terbukti tidak diolah dengan hak milik (*eigendom*) dianggap milik Negara. Perspektif dari dasar persepsi hukum kolonial ini, sering menimbulkan perselisihan sebab hal ini bertolak belakang dengan kenyataan sosial, bahwa prinsip kepemilikan tanah ulayat dalam terminologi hukum adat di Minangkabau adalah milik nagari. (Renske Biezeveld), : 142)

Kedudukan dan fungsi tanah menurut adat Minangkabau adalah untuk kepentingan kaum ulayat nagari. Secara filosofi kepemilikan tanah di minangkabau merupakan lambing dan martabat hidup seseorang atau kaum. Kaum atau individu yang tidak memiliki tanah 'barang sebingkah' dianggap sebagai orang yang kurang. Siapa yang tidak mempunyai tanah dipandang sebagai orang *malakok* (menempel). (A.A. Navis, 1986: 150). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya arti kepemilikan tanah dalam tatanan sosial masyarakat Minangkabau.

Sengketa tanah ulayat di Sumatera Barat tidak hanya melibatkan antar anggota kaum dalam kepemilikan harta pusaka, baik melalui proses hibah, jual beli maupun gadai. Hal ini yang pada gilirannya menyebabkan kepemilikan tanah pusaka semakin terpecah-pecah, sehingga tanah komunal perlahan-lahan menjadi milik individu,

misalnya pemberian lahan kepada anak perempuan bersama keluarga batihya. (Iriani, 2007:4)

Berbeda dengan daerah Sumatera Barat lainnya, konflik di daerah Pasaman tidak hanya karena proses konversi pemindahan kepemilikan tanah secara konvensional, akan tetapi juga karena adanya migrasi pendatang dari daerah sekitarnya (Mandailing) dan transmigran Jawa serta pembukaan perkebunan di daerah ini (Undri, 2006). Kenyataan geografis Pasaman yang merupakan daerah perbatasan antara Sumatera Barat dan Sumatera Utara, memungkinkan terjadinya arus migran Mandailing dari wilayah Tapanuli Selatan ke wilayah ini.

Di antara beberapa kasus konflik tanah muncul di daerah ini adalah konflik tanah ulayat terjadi di Nagari Kapa di Kecamatan Pasaman Barat pada tahun 1990-an, ketika Organisasi Tunas Mekar yang merupakan organisasi masyarakat asli nagari dan anggota Persaudaraan Tani Nelayan Nusantara (P2TANTRA) Sumatera Barat berusaha memperjuangkan tanah ulayat nagarinya seluas 4000 hektar yang dikuasai oleh Pemda, perusahaan perkebunan kelapa sawit (PT. Permata Hijau, Pasaman) dan kelompok tani dari luar Nagari Kapa. Kejadian ini sampai menjurus pada tindakan kriminal, yakni dengan ditangkannya beberapa orang dari Nagari Kapa oleh Aparat Kepolisian.⁷³

Akan tetapi jauh sebelumnya muncul peristiwa konflik terbuka di Nagari Kapa tersebut di atas, benih-benih persoalan konflik di wilayah ini telah mulai muncul, ketika pada tahun 1980-an pemerintah ingin menjadikan kawasan ini sebagai kawasan perkebunan. Semula daerah ini diproyeksikan oleh pemerintah untuk percontohan sawah baru dengan irigasi dari Batang Tonggar. Namun karena proyek ini gagal maka lahan tersebut dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan. (Bulletin Suara Rakyat, 2006:15)

Untuk memudahkan proses pengambil alihan kepemilikan tanah dari masyarakat pada tanggal 23 Januari 1980 dibuatkanlah surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh beberapa *ninik mamak* Nagari Kapa⁷⁴. Salah satu butir kesepakatan dari surat keputusan bersama tersebut, antara lain menyatakan bahwa areal tanah ulayat sesuai dengan kesepakatan pucuk adat *ninik mamak* Nagari Kapa serta

³ Kabupaten Pasaman Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Pasaman yang berdiri sebagai kabupaten baru mulai tahun 2003. Untuk kronologi munculnya konflik bisa dibaca Bulletin Suara Rakyat, media komunikasi yang diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, no.4/Januari-Maret/2006 dengan judul "Kriminalisasi Petani Kapar", hal. 15.

⁴ *Ninik Mamak* Nagari Kapa yang ikut menanda tangani kesepakatan ini adalah mereka yang disebut *Pucuk Adat Luak Saparampek Kapar*, yakni antara lain Syahrin Gampo Alam, Azis Rajo Mahmud, Bahar A. Jando Lela, Baka Udik Rangkyo Mudo dan Jafar Sutan Ameh.

mendapat persetujuan dari *Daulat Parit Batu* serta *Hakim Parit Batu*, membolehkan pihak investor untuk menanamkan modalnya di wilayah ini. Berawal dari kesepakatan inilah, perlahan-lahan tanah di Nagari Kapa berpindah tangan melalui mediasi *ninik mamak*, berturut-turut seluas 60 Ha tanah ulayat (1990), 240 Ha (1991), 70 Ha (1994), 2.200 Ha (1995), 40 Ha (1996), dan 12 Ha (1997), sisanya tanah ulayat yang luasnya tinggal 200 Ha dikelola dan dimanfaatkan oleh anak Nagari Kapa. (Bulletin Suara Rakyat, 2006: *ibid*)

Penjualan tanah ulayat tersebut membuat anak Nagari Kapa menjadi resah, apalagi terdengar rencana untuk menjual sisa tanah ulayat yang masih tersisa. Bagaimanapun dalam struktur sosial Minangkabau tanah ulayat berfungsi sebagai cadangan sosial ekonomi *anak-kemenakan* dikemudian hari. Akan tetapi justru ada beberapa *ninik mamak* mengabaikan perantara adat ini, alih-alih membimbing kemenakan, justru kemenakan yang ditelantarkan. Wujud keresahan anak nagari yang didukung oleh beberapa *ninik mamak* yang masih peduli terhadap keberlangsungan tanah ulayat melakukan penolakan terhadap rencana penjualan tersebut. Akibatnya muncul pihak yang pro dan kontra dalam persoalan tanah ulayat di wilayah ini. Proses ini berlanjut dengan pihak yang berwenang (Polsek dan Koranmil Simpang Empat), yang disertai teror oleh beberapa oknum pemuda terhadap pihak yang menolak penjualan tanah ulayat.

Kejadian selanjutnya pihak berwenang melakukan penangkapan terhadap 7 orang warga Nagari Kapa yang dianggap sebagai kelompok yang gigih menolak rencana penjualan, yakni Firdaus, Iwan, Pingai, Acong, Siyam, Ijen dan Ucok. Tindakan ini menyulut amarah warga, maka mereka mendatangi Malpolsek Simpang Empat, yang selanjutnya secara spontan membebaskan rekan mereka yang ditahan. Pihak aparat tidak tinggal diam, mereka melakukan balasan dengan melakukan *sweeping* pada tanggal 29 April 2009. Akibat intimidasi ini, banyak anggota masyarakat Nagari Kapa, terutama kaum laki-laki bersembunyi di hutan-hutan, kebun, dan tempat lain bahkan ada yang lari keluar dari Sumatera Barat. Kasus ini bergulir sampai ke lembaga legislatif, setelah ibu-ibu warga Nagari Kapa yang tidak tahan terhadap intimidasi aparat melaporkan kepada anggota DPRD Pasaman pada tanggal 17 Mei 2009. Akhirnya setelah melalui mediasi anggota dewan beberapa orang yang ditahan dilepaskan dengan membayar uang jaminan Rp. 500.000,- perorang disertai surat segel kesepakatan dengan pihak keamanan. Kiranya menarik bait lagi klasik Minang dibawah ini:

”Simpang Empat kedai sebelah,
sesimpang jalan ke Kinali,
buah lebat dahannya lemah,
masak ranum tergantung tinggi,

mudik pedati orang Andaleh,
tiap kelok berpendakian,
yang kukira buah akan rareh,
ternyata tampuknya dipartriakan,

entah dengan apa akan dijuluak,
penjuluak punya, tapi panjangnya kurang,
jika renggang buah dari tampuak,
menumpuk karung menunggunya.”

Lagu ini menceritakan ketidakmampuan seseorang untuk meraih sesuatu. Dalam konteks perkebunan sawit, besarnya buah harum minyak sawit seolah jatuh dengan sendirinya ketangan masyarakat nagari di Pasaman, tetapi ternyata tidak, karena tangkai buahnya teramat kuat dipegang orang lain seperti dipatri. Kalaupun berhasil, akan melahirkan masalah baru, karena ada banyak orang yang berkepentingan terhadap sawit tersebut.

Realitas empirik kasus konflik tanah di Nagari Kapa diatas, posisi rakyat berada dibawah kendali pemilik modal yang berkolaborasi dengan penguasa. Konflik yang terjadi di Nagari Kapa ini bersifat kompleks, yakni tidak hanya melibatkan antara pemilik tanah ulayat sebuah kaum dengan kaum pendatang, akan tetapi juga dengan pihak pemilik modal dan penguasa, yakni pihak perkebunan. Kalau meminjam terminologi pemilahan konflik tanah Salman Drajat diatas masuk kesemua kategori model konflik apa yang menjadi ciri umum atau watak model relasi petani pemilik tanah dengan penguasa.

Pada era reformasi sudah selayaknya cara penanganan konflik tanah tidak hanya melihat dari perspektif hukum belaka, juga harus dilihat dari kontek yang lebih luas seperti persoalan ekonomi maupun budaya. Artinya dalam perspektif kemajemukan hukum juga harus diakui sebagai kenyataan masih bekunya hukum adat yang hidup dalam masyarakat yang mampu bersinergi dengan hukum nasional seperti penerapan mekanisme konflik di Minangkabau, *bajanjang naik, batanggo turun*.

Bertitik tolak dari uraian diatas maka penulis mengambil judul “Sejarah Konflik Tanah Ulayat di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat 1981-2005”. Penelitian ini berusaha mencari model penyelesaian dan mekanisme resolusi konflik tanah di

daerah Pasaman, yang tidak hanya melihat dari aspek politis dan hukum saja. Akan tetapi juga menempatkan persoalan sosial budaya dalam bingkai penyelesaian konflik sosial di atas.

2. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini mengambil batas spatial Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dan daerah sekitarnya, sedangkan batasan temporal dari tahun 1981-2005. Batasan awal tahun 1981 dengan pertimbangan bahwa sejak adanya surat kesepakatan *ninik mamak* di Nagari Kapa merupakan titik awal masuknya investor untuk menanamkan modal mereka pada usaha perkebunan. Sedangkan batas akhir tahun 2005, dengan asumsi kasus mulai mereda, meskipun belum sepenuhnya selesai setelah pihak legislatif dan Pemerintah Pasaman Barat turun tangan menangani kasus ini. Akan tetapi batasan temporal tidaklah bersifat kaku karena fakta dan peristiwa sejarah bagaimanapun merupakan suatu hal yang sifatnya berkesinambungan. Ada beberapa permasalahan yang cukup aktual untuk dibawa dalam kajian ini antara lain:

- a. Bagaimanakah posisi tanah ulayat dalam struktur sosial masyarakat di Nagari Kapa pada Masa Orde Baru?
- b. Apakah penyebabnya terjadinya konflik ulayat di Nagari Kapa?
- c. Bagaimanakah mekanisme dan resolusi konflik yang dipergunakan dalam menangani konflik di Nagari Kapa?

3. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini berusaha mencari model dan solusi alternative penyelesaian konflik sosial di daerah Pasaman sekaligus memetakan akar persoalan konflik di tataran *grass root* dan para pengambil kebijakan dan *stakeholder* di wilayah ini.

4. Kerangka Konseptual

Konflik menurut Husni adalah suatu proses interaksi antara dua atau lebih individu atau kelompok dalam memperebutkan objek yang sama demi kepentingan masing-masing (Lalu Husni, 2005:5). Sedangkan menurut Ihromi konflik tidak dapat dipisahkan dalam kerangka struktur sosial masyarakatnya, meskipun pada dasarnya manusia selalu mengharapkan warga masyarakat berlaku menyesuaikan diri terhadap norma, akan tetapi ada saja individu yang tidak mengindahkan norma tersebut (T.O. Ihromi, 1993:20).

Dalam konteks masyarakat Minangkabau konflik adalah sesuatu hal yang penting untuk menemukan kesepakatan atau konsensus. Hal ini bahwa setiap kehidupan sosial diwarnai dengan konflik, hanya saja yang membedakan adalah frekuensi konflik dan sikap individu terhadap

konflik. Artinya dalam satu masyarakat atau kebudayaan tertentu proses penanganan konflik tentulah berbeda, sebab bahwa mekanisme penyelesaian setiap sengketa tidaklah selalu dapat dipilah secara tepat, termasuk di daerah Pasaman. Selanjutnya masalah yang berbeda pada fase tertentu, akan berbeda pula tahapan penyelesaiannya. Kemudian dalam konteks pluralisme hukum dikemukakan bahwa hukum sebagai bagian dari kebudayaan, secara umum dianggap dapat memberi pedoman bagi masyarakat mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak (normatif) dan dalam hal apa (kognitif).

Pendekatan prosedural yang diperkenalkan Franz Benda Beckmann memberi penekanan, bahwa setiap orang memiliki penafsiran atau menanggapi suatu aturan hukum tertentu dengan cara berbeda, karena adanya dasar pengetahuan, harapan-harapan dan kepentingan-kepentingan, atau tepatnya budaya hukum yang dimiliki berbeda satu sama lain. Selain itu pandangan pluralisme hukum juga menolak pandangan sentralisme hukum (*legal centralism*) yang menganggap hukum adalah satu, yakni hukum Negara atau satu-satunya hukum adalah berasal dari Negara. Menurut Griffiths : *legal pluralism is the fact, and legal centralism is a myth, an ideal, a claim, an illusion* (Irianto dalam Masinambaw, 2003 : 78-79).

5. Tinjauan Pustaka

Franz von Benda-Beckman dalam bukunya “Property dan Kesenambungan Sosial”, membahas proses perubahan sosial dan kepemilikan property masyarakat di Minangkabau seperti harta pusaka, dasar hukum serta sengketa yang pernah muncul di daerah candung kota lawas, meskipun menggunakan pendekatan studi antropologis karya menjadi menarik karena dimensi diakroniknya juga dianalisis secara mendalam. (Franz Von Benda-Beckman, 2000)

Kemudian Keebet Von Benda-Beckman mengulas lebih dalam mengenai penyelesaian sengketa melalui konsep yang disebut ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) yakni proses penyelesaian alternatif diluar media jalur pengadilan formal (pengadilan Negara) sebagai cara terbaik *win-win solution* dalam penanganan pihak yang berkonflik di Minangkabau serta dalam terminologinya dan istilah “forum shopping atau shopping forum” untuk menyebut mekanisme sosial dalam penyelesaian konflik di daerah ini (Keebet von Benda-Beckman, 2000).

Kurnia Warman, menyoroti persoalan penyimpangan konversi hak tanah di Sumatera Barat dalam konteks perubahan *ganggam batuwak* menjadi hak milik, ia melihat proses perubahan tanah komunal di Minangkabau seharusnya dalam konteks sosiologi hukumnya. Menurutnya tidak seharusnya hak pakai beralih menjadi hak milik meskipun mekanisme konversi (Kurnia Warman, 2006).

Dalam konteks studi perbatasan Iriani melihat perlunya kita melihat keberagaman hukum dalam konteks penyelesaian konflik tanah, kajian mengenai pluralisme hukum di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman, menunjukkan perpektif keberagaman hukum adalah sesuatu yang tidak bisa dinafikan dan keberadaan realitas hukum sosial masyarakatnya masih berfungsi (Iriani, 2007).

Terakhir studi Undri menyorot persoalan konflik tanah di daerah Pasaman sebagai akibat migrasi pendatang baik orang Mandailing maupun orang Jawa yang menempati tanah komunal orang Minangkabau dengan pendekatan sejarah. Ia menyebut akar persoalan konflik di daerah ini bermula dari kehadiran migran Mandailing secara besar-besaran pada tahun 1930, yang kemudian diikuti dengan orang Jawa tahun 1950-an melalui program transmigrasi dari pemerintah pusat. Resolusi konflik yang terbukti cukup ampuh adalah melalui pendekatan soasial budaya, yakni lebih mengefektifkan peranan pranata hukum adat. Dan faktor sosial budaya lainnya yang cukup mendukung proses resolusi konflik tersebut antara terjadinya proses *amalgamasi* (kawin campur) serta penamaan kampung sesuai dengan etnik yang mendiami.

6. Metode

Dalam penelitian penulis menggunakan metode sejarah kritis. Metode sejarah kritis adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imijinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses yang disebut historiografi (Louis Gottshalk, 1986: 312). Metode penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, diantara tahapan permulaan dengan tahapan berikutnya saling berkaitan satu sama lain. Secara garis besar tahapan adalah metode sejarah terdiri dari 4 tahap yaitu :

- a. Pencarian dan pengumpulan sumber data (heuristik), baik yang berupa sumber-sumber tertulis maupun sumber-sumber lisan, baik yang bersifat sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dengan melacak arsip maupun dokumen yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh penulis, yakni dengan melakukan studi perpustakaan (*library research*) dengan mengunjungi berbagai perpustakaan yang terdapat di Kota Padang, Lubuk Sikaping seperti perpustakaan wilayah Provinsi Sumatera Barat, Unand, UNP, Pengadilan Negeri Kabupaten Pasaman, Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, serta instansi terkait lainnya, maupun melacak data tersebut ke Arsip Daerah. Sedangkan sumber lisan dilakukan dengan

melakukan wawancara kepada para narasumber yang memiliki otoritas berkaitan dengan tema penelitian diatas, seperti tokoh adat (*ninik mamak*), pihak yang terlibat perkara, pengamat hukum adat, budayawan di Nagari Kapa serta menjangring informasi dari lapangan dari pihak yang terkait dengan menggunakan pendekatan analisis *life historis* dalam kaidah ilmu antropologi atau oral *history* (sejarah lisan) dalam perspektif ilmu sejarah.

- b. Kritik, yaitu tahap penyeleksian sumber-sumber sejarah, meliputi kritik ekstern dan kritik intern, kritik ekstern ini dilakukan untuk menguji tingkat keabsahan sumber (ontentisitas sumber), sedangkan kritik intern dilakukan untuk menguji tingkat kepercayaan sumber (kredibilitas sumber).
- c. Interpretasi yaitu tahap penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah diseleksi melalui upaya analisa dan sintesa fakta-fakta sejarah.
- d. Historiografi, yaitu tahap penulisan sejarah pada tahap terakhir ini akan dilakukan koreksi baik secara bertahap maupun secara total. Metode koreksi bertahap dan koreksi total diterapkan guna menghindari kesalahan-kesalahan yang sifatnya substansial sehingga menghasilkan penulisan sejarah analitis structural yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

7. Gambaran Umum Nagari Kapa

a. Letak Geografis

Berdasarkan undang-undang No. 38 Tahun 2003 tentang pembentukan 3 Kabupaten baru di Provinsi Sumatera Barat, dimana salah satunya adalah Kabupaten Pasaman Barat. Sejak tahun 2003, secara resmi Kabupaten Pasaman Barat dimekarkan dari Kabupaten induknya, Kabupaten Pasaman. Kabupaten baru ini yang berada di pesisir pantai barat Sumatera Barat, dengan batas wilayah, yakni sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Duo Koto, Kecamatan Panti, Kecamatan Lubuk Sikaping, dan Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Semula Kabupaten ini terdiri dari 7 Kecamatan, yakni Kecamatan Sungai beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang, Gunung Tuleh, Pasaman, Kinali, dan Talamau. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2003 menjadi tambahan 4 Kecamatan baru, yakni Kecamatan Koto Balingka, Sungai Aua, Sasak, Ranah Pasisie dan Luhak Nan Duo (BPS Pasaman Barat, 2007).

Secara administratif, Nagari Kapa merupakan salah satu Nagari yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo. Dahulu Nagari ini dikenal dengan Lubuak Pudiang-Luhak Saparampek Kapa dengan luas wilayah 7.200 Ha. Sebelum sampai ke Nagari Kapa bagi pendatang akan melewati Simpang Padang Sawah, Nagari Kinali, Koto Baru Simpang Tiga, Nagari Jambak dan terakhir pada hitungan ke-180 km dari titik berangkat dari Kota Padang ke arah utara sampai di Kabupaten Pasaman Barat yang berpusat ibukota di Simpang Ampek, dengan waktu tempuh lebih kurang 5 jam. Pada perempatan jalan, di tengah-tengah jalannya terdapat tugu berbentuk tandan kelapa sawit. Persimpangan yang mengarah ke kiri tugu menuju barat sekitar 8 km terdapat Nagari Kapa.

Wilayah tersebut dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum berupa roda dua dan roda empat. Berhubung tidak semua pelosok dapat dilalui oleh mobil, maka untuk menjangkauanya adalah dengan menggunakan sepeda motor berupa ojek. Adapun batas-batas wilayah Nagari Kapa adalah sebagai berikut : Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Sasak, Sebelah utara berbatasan dengan Lingkung Aua, Sebelah barat berbatasan dengan Lingkung Aua, dan Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Koto Baru.

Sebelum diundangkannya Perda Sumbar No. 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari, Nagari Kapa terbagi atas tiga desa, yaitu Desa Kapa Timur, Desa Kapa Utara, dan Desa Kapa Selatan. Luas area tanah ulayat nagari sekitar \pm 3500 Ha. Namun setelah berubah kembali menjadi pemerintahan Nagari maka desa-desa tersebut berubah dan hilang, sehingga kembali menjadi jorong sebagai perpanjangan tangan wali nagari untuk sampai ke kampung-kampung.

Secara topografi di Nagari Kapa, curah hujan merata dan seimbang sepanjang tahun yakni berkisar antara 3000 mm sampai 4000 mm pertahun, sehingga menyuburkan tanah di daerah pesisir dan daratan. Sedangkan suhu rata-rata berkisar antara 25° - 32°. Kondisi Nagari Kapa yang cukup air, membuat daerah tersebut sangat potensial untuk dijadikan lahan persawahan dan juga untuk tanaman kelapa sawit. Sehingga kelapa sawit merupakan sumber penghasilan masyarakat yang dapat diandalkan. Hal tersebut menyebabkan kelapa sawit merupakan potensi konflik yang cukup signifikan

b. Demografi

Penduduk di Nagari Kapa sama halnya dengan Kabupaten Pasaman Barat secara umum, yakni bersifat heterogen, etnis Minang merupakan mayoritas dan dianggap sebagai penduduk asli. Berkaitan dengan wilayahnya yang berada di perbatasan Sumatera Utara, maka

Nagari Kapa juga banyak didiami oleh penduduk yang berasal dari Sumatera Utara (Batak Mandailing), bahkan ada pula etnis Jawa dan Aceh. Secara historis orang Jawa bermigrasi ke Pasaman Barat khususnya yang ada di Nagari Kapa sejak zaman Belanda. Mereka dijadikan sebagai pekerja di perkebunan orang Belanda dan tinggal menetap di Pasaman hingga melahirkan beberapa keturunan dan menyebar ke nagari-nagari yang ada di Pasaman Barat, seperti Nagari Kapa.

Secara keseluruhan penduduk di Nagari Kapa pada tahun 2005/2006 sekitar 16478 jiwa, yang masing-masing menyebar di seluruh jorong. Adapun penyebaran jumlah penduduk di Nagari Kapa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Nama Jorong dan Jumlah Penduduk Nagari Kapa

No.	Jorong	Tahun	
		2005	2006
1	Kapa Utara	588	638
2.	Lubuk Pudiang	509	699
3.	Malasiro	801	845
4.	Kapa Selatan	1.417	1.072
5.	Kapa Timur	472	488
6.	Padang Laweh	4.362	4.587
Jumlah		8.149	8.329

Sumber: Data Kependudukan Nagari Kapa 2006

Tabel di atas mengungkapkan bahwa tidak ada peningkatan jumlah penduduk yang begitu signifikan dalam Nagari Kapa dalam rentan waktu satu tahun (tahun 2005-2006). Bahkan di Jorong Kapa Selatan terjadi penurunan jumlah penduduk, yakni dari 1.417 menjadi 1.072. Fenomena tersebut tidak ada keterangan yang jelas penyebab terjadinya penurunan jumlah penduduk di Jorong yang bersangkutan.

Sebagai perbandingan komposisi penduduk daerah Pasaman yang heterogen lebih jelas kalo kita melihat dari statistik yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Data kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial didasarkan atas komposisi etnik, sedangkan sejak Indonesia merdeka sensus penduduk yang dilakukan pemerintah sama sekali tidak mencantumkan asal etnik. Untuk melihat kemajemukan serta jumlah penduduk Pasaman pada masa kolonial dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.
Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 1852 dan 1920

Daerah	Orang Eropa	Pribumi	Orang Cina	Orang Asia Lainnya	Budak	Total
Sensus 1852						
Daerah dataran rendah padang						
Padang	662	35.126	1.140	953	2.227	40.158
Daerah Selatan	32	34.075	73	17	8	34.205
Pariaman	48	59.887	223	209	151	60.518
Air Bangis	9	4.039	3	3	2	4.056
Ophir	1	19.078	7	7	-	19.093
Rau (Rao)	3	12.729	2	13	-	12.747
Daerah dataran tinggi Padang						
Tanah Datar	21	153.147	12	100	-	153.604
Agam	30	196.927	49	190	21	197.217
L. Kota	9	103.541	3	10	4	103.567
XII&IX Kota Solok	12	70.709	5	24	2	70.752
Total	827	689.582	1.157	1.526	2.465	695.917
Sensus 1920						
Daerah Dataran Rendah						
Padang	2.447	136.216	6.909	1.190	-	146.782
Daerah Selatan	82	124.772	844	79	-	125.777
Pariaman	335	250.410	1.027	193	-	251.965
Air Bangis	4	22.190	79	-	-	22.273
Sensus Daerah Dataran Tinggi Padang						
Opsir	23	46.214	18	1	-	46.256
Lubuk Sikaping (Rao)	7	38.389	8	-	-	38.404
Tanah Datar	566	238.741	638	64	-	240.009
Agam	404	245.736	583	167	-	246.890
L.Kota	126	220.218	832	56	-	221.232
Solok	153	182.323	148	48	-	182.672
Total	4.147	1.505.209	11.086	1.796	-	1.522.240

Sumber : Elizabeth E. Graves, Asal-Usul Elite Minangkabau Modern, Respon Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX, Mestika Zed (ed), Jakarta: YOI, 2007, hal 92-93.

Tabel diatas jumlah penduduk di daerah Air Bangis, Ophir dan Rao yang kini menjadi bagian dari wilayah Pasaman mengalami perubahan. Sebagai contoh untuk daerah Ophir yang awal abad ke-20 yang dikenal sebagai daerah perkebunan kelapa sawit berubah dari semula berjumlah 19.093 orang pada tahun 1852 menjadi 46.256 orang pada tahun 1920 atau naik menjadi 2 kali lipat selama kurang lebih setengah abad lebih dari jumlah awal.

Lingkungan alam dimana penduduk berdomilisi memberikan kemungkinan untuk ia memproses dan mengolah sumber daya yang lama yang ada dalam rangka mendapat benda-benda dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Walaupun pada dasarnya manusia di dalam mempertahankan hidupnya harus menundukkan alam dan mengolahnya, akan tetapi ia harus memilih pola kegiatan yang akan dilakukan tempat ia berdomilisi. Seperti halnya penduduk di Nagari Kapa mempunyai jenis mata pencaharian yang beraneka ragam dan sangat terkait dengan keadaan alamnya dan bakat dan keahlian setiap orang untuk mencari sumber penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Nagari Kapa Tahun 2005-2006

No	Jorong	Petani	Pedagang	Buruh	Lain-lain
1.	Kapa Utara	548	41	71	12
2.	Lubuk Pudiang	455	53	112	17
3.	Malasiro	426	49	101	21
4.	Kapa Selatan	2309	73	149	11
5.	Kapa Timur	401	55	61	9
6	Padang Laweh	631	43	69	11
Jumlah		4770	314	563	81

Sumber: Data Kependudukan Nagari Kapa 2005

Tabel di atas menunjukkan, bahwa di Nagari Kapa sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, yaitu bercocok tanam. Hal ini sangat terkait dengan kondisi alam yang ada di Nagari Kapa. Namun bukan berarti setiap belanja harian yang bersifat rutin akan diambil dari hasil padi tersebut. Selagi usaha sambilan bias mendatangkan hasil, biasanya hasil usaha (padi) yang diperoleh hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan saja. Selain bercocok

tanam penduduk Nagari Kapa juga sebagian besar bekerja sebagai buruh, ini berkaitan dengan banyaknya pabrik kelapa sawit dan buruh petani kelapa sawit yang bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Sama seperti daerah Pasaman lainnya, Nagari Kapa juga mempunyai penduduk yang tergolong penduduk miskin. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.
Jumlah Kepala Keluarga (KK) Miskin di Nagari Kapa
Tahun 2005-2006

No	Jorong	Tahun	
		2005	2006
1.	Kapa Utara	44	62
2.	Lubuk Pudiang	51	36
3.	Malasiro	109	26
4.	Kapa Selatan	153	65
5.	Kapa Timur	63	21
6.	Padang Laweh	72	20
Jumlah		492	230

Sumber: Data Kependudukan Nagari Kapa 2006

Tabel di atas menunjukkan, bahwa pada tahun 2005 hingga 2006 terjadi dinamika kehidupan keluarga miskin dalam Nagari Kapa, yakni ada yang mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan. Namun sebagian besar mengalami penurunan, hanya satu jorong saja yang penduduk miskinnya bertambah, yakni Jorong Kapa Utara, sementara penduduk di Jorong lainnya mengalami penurunan keluarga miskin. Penyebab bertambahnya jumlah penduduk miskin di Jorong Kapa Utara belum diketahui secara jelas. Apabila dicermati dengan seksama, maka secara logis di Nagari Kapa tidak terdapat penduduk miskin, sebab wilayah tersebut memiliki perkebunan besar, tentunya tingkat kesejahteraan penduduk setempat akan meningkat. Bahkan pernah dikabarkan oleh Koran Kompas, bahwa pada tahun 2000 sebagian besar penduduknya mengalami rawan pangan, sehingga banyak balita yang mengalami gizi buruk (Andika, 2009).

c. Kehidupan Sosial Ekonomi

Perekonomian masyarakat Pasaman Barat termasuk di Nagari Kapa sebagaimana halnya dengan kondisi kehidupan ekonomi masyarakat Minangkabau bertumpu pada kegiatan ekonomi pertanian. Selain mengusahakan pertanian sebagaimana halnya orang

Minangkabau umumnya mereka juga bergiat di lapangan perdagangan. Sejak masa kolonial usaha pertanian di Minangkabau dibedakan dalam dua kategori, yakni pertanian lahan basah (tanaman padi) dan pertanian lahan kering atau peladangan (jagung dan palawija). Selain itu mereka juga menanam tanaman perkebunan seperti karet, kopi, the, kelapa sawit dan lainnya yang mulai diperkenalkan di Belanda di Sumatera Barat pada awal abad ke -19. (Doblin, 1992:32-40 dalam Undri, 2006:56)

Beberapa daerah di Pasaman sejak masa kolonial telah dikenal sebagai daerah perkebunan seperti *onderafdeeling* Rao Mapat Tunggul. Menurut laporan Ballot, salah seorang Belanda yang pernah berkuasa di Sumatera Barat menyebutkan bahwa daerah Rao Mapat Tunggul merupakan salah satu daerah penghasil Karet. Sebagai catatan luas lahan areal perkebunan karet di daerah Pasaman pada zaman kolonial tercatat kurang 37.962 bahu di *onderafdeeling* Lubuk Sikaping serta 18.900 bau di Rao Mapat Tunggul (Undri, 2006:57).

Budidaya perkebunan karet di daerah Pasaman ini tidak terlepas dari usaha pemerintah kolonial Belanda untuk menggantikan pendapatan dari sektor pertanian setelah kegagalan sistem tanam paksa kopi yang berakhir tahun 1908. Tanaman karet dipilih karena tanaman ini dianggap cocok dengan struktur tanah di wilayah ini. Sebab untuk pembudidayaan tanaman karet menggunakan tanah yang sebelumnya dipakai untuk tanaman kopi. Tanah yang dipakai untuk budidaya perkebunan karet merupakan tanah ulayat nagari.

Semula usaha budidaya tanaman karet dilakukan oleh pemerintah kolonial baru terbatas di daerah Rao Mapat Tunggul pada tahun 1901. Kemudian diperluas oleh pemerintah Belanda pada tahun 1930 ke beberapa daerah Pasaman lainnya seperti Muara Sungai Lolo, Koto Rajo, dan Silayang. Ketiga daerah letaknya tidak jauh dari daerah Rao (Undri, 2006:59). Selain tanaman karet, komoditas lain yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda di daerah Pasaman adalah kelapa sawit yang diusahakan dalam bentuk perkebunan, yakni di daerah Ophir. Perkebunan kelapa sawit mulai dikembangkan di wilayah ini pada tahun 1934. tanaman kelapa sawit dipilih pengusaha perkebunan swasta menggantikan kopi yang produksinya mengalami penurunan serta harga jualnya yang rendah pula. Dan sejak tahun itu luas areal untuk perkebunan sawit di daerah meningkat dari semula 2 hektar menjadi 4.348 hektar pada akhir kekuasaan kolonial Belanda di daerah ini, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.**Luas Perkebunan Kelapa Sawit di Daerah Ophir Tahun 1934-1940**

No.	Tahun	Luas Lahan (Ha)
1.	1934	2
2.	1935	Tidak ditemukan data
3.	1936	64
4.	1937	1.096
5.	1938	2.288
6.	1939	3.648
7.	1940	4.348

Sumber: Undri, *Konflik Tanah di Daerah Perbatasan: 1930-1960 (Studi Kasus Konflik Tiga Etnik Dalam Memperebutkan Tanah di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat*, Laporan Akhir Penelitian, Kerjasama PMB LIPI dan NIOD, Padang, 2006, hal. 62

Luas areal perkebunan kelapa di Nagari Kapa selama proses masuknya perkebunan swasta mulai periode 1980-an sampai tahun 2000-an sejauh ini belum ditemukan data yang pasti, karena sampai tahun 2006, daftar isian monografi mengenai luas lahan dan peruntukannya tidak ditemukan di lapangan. Akan tetapi sebagai perbandingan bisa dijelaskan bahwa Nagari Kapa yang kini merupakan bagian wilayah Kecamatan Lubuk Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan daerah budidaya perkebunan kelapa sawit seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.**Luas Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007**

No.	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)
1.	Sungai Beremas	7.711
2.	Ranah Batahan	7.471
3.	Koto Balingka	9.932
4.	Sungai Aua	10.421
5.	Lembah Melintang	9.847
6.	Gunung Tuleh	9.006
7.	Talamau	2.689
8.	Pasaman	9.191
9.	Luhak Nan Duo	5.330
10.	Sasak Ranah Pasisie	3.438
11.	Kinali	9.998

Sumber : BPS Pasaman Barat, 2007: hal 177.

Tabel di atas menggambarkan luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Luhak Nan Duo, termasuk di dalamnya Nagari Kapa yakni 5.330 ha. Untuk ukuran daerah Kabupaten Pasaman Barat, luas lahan perkebunan sawit tidak cukup besar, bila dibandingkan dengan luas lahan perkebunan sawit di daerah Kinali maupun Sungai Aua. Akan tetapi posisinya masih diatas daerah kecamatan Ranah Pasisie (3.438 ha) dan Talamu yang terkecil (2.689 ha).

Dinamika ekonomi masyarakat Nagari Kapa juga terlihat dari keberadaan pasar yang ada di wilayah ini. Aktifitas perekonomian seperti jual beli pedagang dan penduduk berjalan normal sebagaimana keberadaan pasar-pasar di daerah Sumatera Barat lainnya, yang mengalami keramaian tertentu pada saat hari pasar atau *pakan*. Barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti sembilan bahan pokok misalnya beras, minyak serta sayur-sayuran bisa ditemukan di pasar ini. Untuk kebutuhan barang yang lebih besar atau tidak ada tersedia di pasar Nagari Kapa, biasanya penduduk disini pergi ke pasar di Simpang Empat, ke Bukittinggi atau kalau perlu ke Kota Padang.

d. Kehidupan Sosial Budaya

Manusia secara alami tidak mungkin hidup sendiri karena membutuhkan prang lain untuk hidup bersama dan bekerjasama. Gan (Hadikusuma, 2005:240). Sama halnya dengan nagari-nagari lain yang ada di daerah rantau Minangkabau, penduduk asli Nagari Kapa adalah orang Minang, yang mana kelompok terkecil adalah kampung dan kelompok terbesar adalah nagari. Nagari Kapa yang merupakan salah satu daerah rantau, penduduknya tidak hanya orang minang, akan tetapi orang Jawa dan Mandailing. Meski mayoritas penduduk di Nagari Kapa adalah dari etnis Minangkabau, namun mereka juga berbaaur dengan beberapa etnis lainnya seperti Etnis Jawa, Batak, Mandailing, Aceh, Dan Nias.

Kedatangan etnis lain akibat dari adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah Pasaman yang cukup luas dan sangat potensial untuk dikembangkan sebagai lahan perkebunan. Untuk mengembangkan lahan yang kaya tersebut sekitar tahun 1980 pemerintah pusat membuat program transmigrasi. Meraka yang datang ke daerah Pasaman tersebut dalam program transmigrasi ini adalah berasal dari daerah Jawa. Dengan adanya transmigrasi ini maka mulai terjalin pembauran antara penduduk asli dan penduduk transmigrasi.

Terjadinya akulturasi di Nagari Kapa dapat dilihat dengan adanya perkawinan campuran antara penduduk asli dan pendatang. Selain itu juga dalam hal penggunaan bahasa ketika berkomunikasi. Kadangkala orang Jawa menggunakan bahasa Minang berdialek jawa ketika berkomunikasi dengan orang minang. Demikian juga hal nya

dengan orang Mandailing, kadangkala berbahasa minang dengan berdialek Mandailing.

Bahasa yang dipakai sehari-hari di Nagari Kapa saat berkomunikasi adalah percampuran antara bahasa minang dengan bahasa Mandailing. Disamping itu juga ada bahasa yang dipakai oleh masyarakat yang bertransmigrasi yakni suku Jawa. Mereka memakai bahasanya hanya didalam lingkungan komunikasi antara sesama mereka selalu memakai bahasa yang dominan yaitu antara bahasa Minang dan Mandailing. Walaupun memiliki dialek yang berbeda-beda antara satu sama lainnya, namun masing-masing anggota masyarakatnya dapat memahaminya.

Interaksi antara orang Minang, Mandailing, Jawa, dan Aceh telah terjadi sejak dahulu. Bahkan interaksi antara orang Mandailing dan orang Minang terjadi sejak masa pengislaman orang Mandailing oleh Minang (perang Paderi) pada tahun 1816 (Undri, 2006:108).

Seiring dengan perjalanan waktu, dan semakin seringnya terjadi interaksi, maka terjadi akulturasi antara pendatang dan penduduk asli, yakni dapat dilihat dengan terjadinya perkawinan campuran. Dengan adanya perkawinan capuran tersebut, maka mereka saling menerima dan memberi budaya masing-masing.

Pada dasarnya penerimaan budaya Minang terhadap para pendatang, berawal dari kedatangan mereka, yakni adanya syarat bagi para pendatang untuk *malakok*. Kesiediaan pendatang untuk *malakok* merupakan wujud penerimaan adat atau budaya Minang sebagai penduduk setempat. *Malakok* sama dengan “adat diisi limbago dituang” mengandung makna, yaitu serangkaian usaha-usaha memenuhi ketentuan adat untuk memperoleh hak tertentu dan dalam konteks ini adalah hak berladang.

Hal ini, antara lain karena di antara dua etnis tersebut banyak terjadi asimilasi melalui jalur pernikahan. Tidak adanya dikotomi soal Minang-Mandailing dan Jawa, yang tegas selama ini dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Walau sudah ada pembaruan, sesungguhnya, kedua etnis masing-masing juga masih mempertahankan identitas. Setidaknya itu dilihat dari bahasa Ibu yang digunakan. Etnis Minang memakai bahasa minang, demikian juga dengan Mandailing. Namun, bagi mereka yang ‘gaul’ biasanya menguasai kedua bahasa tersebut, dari manapun asalnya.

Sistem kekerabatan di Nagari Kapa, sama halnya dengan sistem kekerabatan di nagari lain yang ada di Sumatera Barat, yakni bersifat matrilineal. Harta pusaka tinggi termasuk tanah diwariskan kepada anak perempuan dan saudara laki-laki. Pusaka itu diturunkan dari saudara laki-laki dari ibu, yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum.

Mamak kepala warislah yang mengontrol harta pusaka milik keluarga/kaum tersebut.

Eksistensi para pendatang (Jawa, Mandailing) di Nagari Kapa yang diiringi dengan intensitas interaksi yang cukup intens, membuat sebagai orang minang melakukan perkawinan campuran kepada para pendatang (Jawa, Mandailing). Hal tersebut membuat sistem kekerabatan di Nagari Kapa semakin kompleks, yakni ketika perempuan Minang menikah dengan laki-laki mandailing dan perkawinan tersebut mengikuti adat mandailing (*jujuran*), maka anak perempuan tidak berhak atas harta pusaka.

Sebaliknya bagi laki-laki Mandailing atau Jawa yang menikah dengan perempuan Minang dengan mengikuti perkawinan Minang (*sumando*), maka laki-laki tersebut tinggal menetap di rumah keluarga perempuan/istrinya, karena istrinya berhak memperoleh pusaka tinggi.

Bagi laki-laki Jawa atau Mandailing yang menikah dengan perempuan Minang tidak berhak memiliki tanah warisan istrinya, kecuali tanah tersebut sudah diberikan kepada istrinya, seperti tanah perumahan. Pemberian itu pun harus ada persetujuan dari seluruh anggota kaum. Apabila kaum tidak setuju maka hal tersebut tidak dilakukan.

Berbeda dengan halnya tanah tersebut adalah hasil pemberian dari ibunya, yang bukan berstatus sebagai tanah kaum berupa pusaka tinggi. Akan tetapi merupakan hasil pencaharian ketika seseorang berumah tangga yang dikenal dengan tanah pusak rendah. Tanah tersebut dapat dimiliki bahkan dapat dibuatkan setifikat atas nama pribadi. Terjadinya perkawinan campuran antara orang Minang dan para pendatang, Semakin mempermudah para pendatang untuk memperoleh tanah di Nagari Kapa, walaupun hanya berstatus sebagai hak pakai. Hal itu sebabkan karena mereka sudah menganggap orang semenda (Jawa dan Mandailing) tersebut sebagai keluarga mereka sendiri.

Sebagai daerah rantau, secara historis Pasaman tunduk dalam rentang kendali Raja Alam Minangkabau. Sebagian wilayah yang saat ini menjadi Kabupaten Pasaman Barat berada dalam struktur kerajaan Minangkabau yang berpusat di Pagaruyung, berada di bawah kendali Daulat Yang Dipertuan Parik Batu yang berpusat di Nagari Lingkuang Aur Simpang Ampek, Pasaman Barat.

Kemudian Daulat Yang Dipertuan Parik Batu mengorganisasikan nagari-nagari semi otonom dibawah rentang kendalinya. Kerajaan Parik Batu mulai dibangun di Lereng Gunung Pasaman. Tempat asal mereka bernama Koto Sibuluan. Pada awal perkembangan wilayah, Daulat Parik Batu mengangkat pimpinan-pimpinan adat di nagari-nagari di bawah kendalinya. Adapun wilayah kekuasaan Daulat Yang dipertuan Parik Batu pada saat itu adalah: (1)

Sibadaguang Ampek Koto, (2) Sariak Baraleh Limo Koto, (3) Koto Tinggi Tabiang Tinggi, dan (4) Lubuk Basiku Koto Birah. Untuk mengkoordinir wilayah tersebut dibentuk struktur adat, yaitu Tuan Kadi mengatur masalah agama dan Hakim nan Sambilan mengatur masalah pemerintahan. Selain itu ditunjuk pejabat-pejabat yang ditempatkan di wilayah-wilayah nagari (Jambak Nan Ampek Induak), yaitu; (1) Majo lelo di lubuk batang, (2) datuak jalelo di kampuang jambak, (3) Jolelo di Aur Kuniang, (4) Panji Alam di Aie Gadang.

Setelah daerah-daerah kekuasaan berkembang. Daulat Yang Dipertuan Parik Batu kemudian mengorganisasikan kekuasaan nagari-nagari di bawahnya. Daulat kemudian membentuk wilayah otonom yang disebut dengan Luak Saparampek. Luak Nan Saparampek terdiri dari : (1) Aua Kuniang yang dipimpin oleh Majo Indo, (2) Aie Gadang dipimpin oleh Sutan Lauik Api, (3) Lubuak Pudiang (Kapar) di bawah pimpinan Gampo Alam, dan (4) Koto Baru di bawah pimpinan Sinaro.

Kemudian berkembanglah nagari-nagari dan akhirnya berdirilah Lembaga Rajo Nan Batujuah. Nagari-nagari yang dimaksud adalah : (1) Kanaikan di bawah pimpinan Majolelo, (2) Tampek digungguang dibawah pimpinan Dt. Sati, (3) Sikabau di bawah pimpinan Dt. Pancang, (4) Bungo Tanjung (Aia Bangih) dibawah pimpinan Rangkayo, (5) Sikiliang di bawah pimpinan Dt. Basa, (6) Tanah taban di bawah pimpinan kapalo Dewa, dan (7) Ampalu di pimpin oleh Sutan

Seiring dengan perjalanan waktu, maka seluruh kekuasaan adat Daulat Yang dipertuan Parik Batu menjelma menjadi nagari-nagari administrasi saat ini. Ikatan adat masih kuat tetapi secara administrasi pemerintahan, nagari-nagari berada dalam rentang kendali pemerintahan administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seluruh nagari di Minangkabau atau daerah yang merupakan bagian dari Minangkabau tunduk kepada aturan adat dan di impelmentasikan dalam kehidupan nagari, selain itu secara geonologis syarat terbentuknya suatu nagari adalah adanya empat suku atau lebih. Tiap-tiap suku terdiri dari paruik-paruik (perut) dari perkembangan kumpulan rumah-rumah yang sedarah (geneologis) yang dipimpin oleh tungganai, kemudian kampung dipimpin oleh kepala keluarga yang dituakan, yaitu tuo kampung dan suku dipimpin oleh penghulu suku, seperti bunyi pepatah di bawah ini:

*Nagari bakampek suku
Bahindu babuah paruik
Kampung batuo
Suku bapanghulu
Rumah batungganai*

Artinya:

Nagari berempat suku
Berhindu berbuah perut
Kampung bertua
Suku berpenghulu
Rumah bertungganai

Makna pepatah tersebut diatas, secara ideal perangkat pimpinan suku terdiri dari;

- *Tungganai*

Sering juga disebut sebagai mamak kepala waris, yaitu laki-laki tertua dalam sebuah paruk. Tungganai tersebut bertugas untuk mengkoordinir anggota-anggota paruknya dan memiliki kewenangan hukum keluar paruknya. Tungganai tidak memangku gelar/sako adat tertentu

- *Tuo Kampung*

Tuo kampung adalah laki-laki yang menjadi pimpinan dalam kampung, merupakan koordinator dari Tungganai yang berada dalam wilayahnya. Dibeberapa daerah Tuo Kampung memangku gelar/sako adat.

- *Mamak Kaum*

Mamak kaum atau penghulu kaum adalah seorang laki-laki yang mengepalai sebuah kaum tertentu. Mamak kaum/penghulu kaum memangku gelar/sako adat tertentu. Jabatan ini juga disebut sebagai andiko kaum yang berarti pimpinan yang memiliki kewenangan langsung untuk mengurus anggota kaumnya.

- *Mamak Suku/Penghulu Suku*

Mamak suku/penghulu suku adalah seorang laki-laki yang mengepalai beberapa kaum dan merupakan koordinator mamak kaum/penghulu suku. Penghulu suku memangku gelar/sako adat tertentu dan memiliki kewenangan bertindak keluar sukunya. Penghulu suku/mamak suku tidak mempunyai kewenangan langsung mengurus anggota sukunya. Karena kewenangan tersebut telah di delegasikan kepada andiko kaum/ mamak kaum/ penghulu kaum.

Berdasarkan perkembangan suku yang terjadi di Nagari Kapa, maka terdapat beberapa suku, yakni Suku Jambak dengan mamaknya bernama Datuak Majo Sadeo; Suku Tanjung dengan mamaknya bernama Datuak Reno Manti; Suku Caniago dengan mamaknya bernama Datuk Batuah; Suku Piliang dengan mamaknya bernama Datuak Rajo Amat; Suku Melayu dengan mamaknya bernama Datuak Iman Rajo; dan Suku Sikumbang dengan mamaknya bernama Datuak Tuah.

Masing masing suku dalam Nagari Kapa dipimpin oleh seorang penghulu pucuk, yaitu penghulu suku yang kedudukannya tetap berasal

dari suku yang bersangkutan atau salah satu pecahan suku. Setiap pecahan suku dipimpin oleh seorang Tunggana Korong yang antara lain berfungsi sebagai pemutus persengketaan di suku, baik persengketaan yang timbul dalam kehidupan berkeluarga maupun persengketaan yang timbul dalam kehidupan bersuku dan berkaum.

Walaupun di Nagari Kapa sangat kaya dengan aneka warna etnis tetapi pengaruh dominant terhadap suku masih kuat dan mengakar ke dalam lapisan masyarakat yang diyakini oleh sebagian besar masyarakatnya karena adanya suatu kekuatan yang mempersatukan diantara mereka yaitu adanya sebuah kerajaan sebagai panutan dan pedoman yang mengatur tata karma dan tata kehidupan di wilayah mereka yaitu Kerajaan Parit Batu.

Pada tahun 1974 lahir undang-undang baru yaitu undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah dan di Sumatera Barat bertindak lanjut dengan surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 155/GBS/1974 yang mengatur tentang Nagari. Dalam surat keputusan ini disebutkan, bahwa nagari merupakan kesatuan hukum di Sumatera Barat yang merupakan pemerintahan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tertentu batas-batas wilayahnya, mempunyai harta benda sendiri, dan berhak untuk mengatur rumah tangganya dan memilih penguasa sendiri (Iriani, 2007:36).

Pada masa ini struktur pemerintahan nagari terdiri dari wali nagari yang dibantu oleh sekretaris nagari dan kepala jorong yang merupakan bagian dari administratif nagari yang melaksanakan urusan rumah tangga sendiri dan tugas pembantuan serta tugas-tugas yang dibebankan oleh pemerintah daerah di atasnya. Untuk urusan rumah tangga dan tugas pembantuan di pertanggungjawabkan kepada Kerapatan Adat Nagari, sedangkan tugas yang dibebani Pemerintah kecamatan di pertanggungjawabkan secara langsung kepada pemerintah tingkat atas. Pada masa ini wali nagari tidak lagi merangkap sebagai ketua Kerapatan Adat Nagari. Kerapatan Nagari bertugas untuk menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dan Melaksanakan peradilan adat serta membentuk peraturan salingka nagari.

Pada tahun 1979, lahir Undang-Undang Nomor 5 tentang pemerintahan desa. Sehingga pada tahun 1983, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 162/GBS/1983, berlakulah sistem pemerintahan desa dan penghapusan sistem pemerintahan nagari di seluruh alam Minangkabau, termasuk di Nagari Kapa. Sehingga setiap jorong-jorong dalam nagari berubah menjadi desa.

Setelah masa reformasi, telah dibuka kembali ruang politik masyarakat adat di Minangkabau untuk merektualisasikan nilai-nilai kearifan lokalnya di Nagari. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2000 tentang ketentuan pokok pemerintahan Nagari. Pada saat ini sistem

pemerintahan nagari mulai diberlakukan kembali, termasuk Nagari Kapa. Adanya perda tersebut Wali Nagari sebagai pemimpin nagari mempunyai kekuasaan yang sangat besar terutama dalam mengatur dan mengelola hak ulayat nagari yang dimasukkan sebagai kekayaan nagari. Sementara saat ini ulayat nagari menjadi kewenangan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang notabene adalah ninik mamak nagari, artinya KAN tidak lagi mempunyai kekuatan secara politik dalam pengambilan kebijakan nagari yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam atau hak ulayat, sebab ninik mamak dalam KAN hanya bertugas sebagai hakim pemutus dan dalam proses menyelesaikan sengketa sako dan pusako (sumber daya alam) di Nagari.

Nagari Kapa sama halnya nagari lainnya yang ada di Pasaman atau Sumatera Barat, yang secara administratif pemerintahan dipimpin oleh seorang wali nagari dan dibantu oleh wali jorong sebagai perpanjangan tangan untuk sampai ke kampung-kampung. Susunan pemerintahan adat tersebut kemudian diperkuat oleh adanya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari Pasal 1 ayat 9, menyatakan “wali nagari adalah pemimpin pemerintahan nagari” dan ayat 10 menyatakan “wali jorong atau dengan nama lain yang setingkat yang terdapat dalam nagari adalah bagian dari wilayah nagari.

Dalam pemerintahan Nagari Kapa, wali nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan nagari untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta memberikan pelayanan pada masyarakat dalam nagari yang bersangkutan. Pemerintahan nagari merupakan pemerintahan terendah yang berlaku dan ditetapkan di seluruh Kabupaten Sumatera Barat. Oleh karena Nagari merupakan satu kesatuan hukum adat yang memiliki batas-batas tertentu, yakni mengurus masalah pemerintahan, maka ada lembaga khusus yang menangani konflik. Secara adat Nagari Kapa berada dalam rentang kendali Daulat yang dipertuan Parit Batu.

Pada saat ini Nagari Kapa disebut sebagai “Luhak Saparampek Kapa” dibawa pimpinan Gampo Alam (dianggap sebagai penghulu pucuk). Dibawa Gampo Alam terdapat struktur ninik mamak yang dikenal dengan ampek didalam dan ampek diluar. Ampek didalam terdiri dari : jando lelo, rajo mahmud, rangkayo mudo, sutan ameh, dan ninik mamak ampek diluar, terdiri atas; rangkayo basa, sutan majo lelo, tan kabasaran, dt. Bungsu (panyambah tuah) mejaga kebesaran Gampo Alam, sebagai penegak hukum pidana adat dan perdata adat. Mamak ampek didalam bertugas untuk mengelola sumberdaya alam (ulayat) di Nagari Kapa atau dalam bahasa adat disebut dengan “Panaani Sako”. Sedangkan ninik mamak ampek diluar bertugas untuk menegakkan

hukum adat untuk menjaga kebesaran Gampo Alam atau dalam mahasa adat disebut dengan “panyambah tuah”.

Mekanisme penyelesaian permasalahan dalam Nagari Kapa sama halnya dengan nagari-nagari lain di Sumatera Barat, yakni *bajanjang naik batangga turun*, yakni kesepakatan tidak terwujud, secara berjanjang naik anak kemenakan tersebut akan menyampaikan kepada mamak kaum. Jika tidak juga tercapai, maka pada level penyelesaian sengketa selanjutnya adalah kepada mamak suku/kampung yang tergabung dalam ninik mamak Ampek didalam. Contohnya mamak suku Tanjung adalah Rangkayo Mudo. Pada tingkat selanjutnya, jika Rangkayo Mudo tidak juga mengizinkan maka anak kemenakan tersebut dapat meminta izin kepada ninik mamak lain yang menjadi anggota Ampek didalam. Jika tidak juga dapat diputuskan maka secara hirarkis, Rajo Mahmud sebagai yang tertua (koordinasi) dari ninik mamak Ampek Didalam akan menyampaikan hal tersebut kepada Pucuk Adat Gampo Alam. Berdasarkan hal tersebut kemudian Gampo Alam akan memutuskan apa yang terbaik. Tapi jika ternyata urusan lancar-lancar saja, semua ninik mamak di Nagari Kapa mempunyai kewenangan untuk memutuskan perkara yang menyangkut anak kemenakannya. Sesuai dengan levelnya masing-masing.

Pada semua tingkatan penyelesaikan sengketa tersebut, anak kemenakan mempunyai hak untuk di ikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. Bisa dalam bentuk diskusi, tanya jawab dan lain-lain. Tindakan ini diambil untuk mendapatkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Proses pendiskusian ini di dalam adat disebut dengan istilah “pancang silao”. Beberapa ninik mamak di Nagari Kapa tidak mempunyai hak untuk memutuskan perkara anak kemenakannya. Ninik mamak yang tergabung kedalam “ninik mamak yang tagaknyo indak tansundak, duduaknyo indak taampeh” (Dt. Sutan Majo Lelo dan Majo Lelo) tidak mempunyai kewenangan “gantiang yang mamutuihan, biang nan mancabiak” atau kewenangan untuk memutuskan. Jika terjadi sengketa dalam kaumnya, maka yang berhak memutuskan adalah mamak suku yang tergabung kedalam ninik mamak Ampek Didalam. Tentang pembagian ulayat, mereka sangat tergantung atas kemurahan ninik mamak yang tergabung dalam ninik mamak Ampek Didalam. Sebenarnya kedua orang ini lebih dekat berhubungan dengan Daulat yang Dipertuan Parit Batu, karena beliau adalah orang yang ditempatkan di dalam Nagari Kapar. Dalam beberapa kasus, posisi Daulat Yang Dipertuan Parit Batu sangat menentukan dalam penyelesaian sengketa, mengingat posisi ini level tertinggi dari semua *ninik mamak* di Pasaman, termasuk Nagari Kapa. Fungsi ini dijalankan oleh Hakim Nan Sambilan.

Mayoritas penduduk Nagari Kapa menganut agama Islam, meskipun data terbaru belum ditemukan. Akan tetapi bisa diperkirakan sebagaimana daerah Minangkabau lainnya, yang dikenal luas sebagai daerah yang Islam yang taat. Hal ini tidak lepas dari proses sejarah Islamisasi yang berkembang di daerah ini. Sebab sebagian daerah pengaruh dari gerakan Paderi yang berpusat di Bonjol, yang menganut faham Islam puritan. Untuk ke khususan jalannya kegiatan keagamaan di Nagari Kapa terdapat sejumlah Masjid dan Musholla yang tersebar di berbagai jorong yang ada seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.
umlah Masjid dan Musholla Tiap Jorong di Nagari Kapa

No	Jorong	Tahun			
		2005		2006	
		Masjid	Musholla	Masjid	Musholla
1.	Kapa Utara	1	2	-	-
2.	Lubuk Pudiang	3	2	-	-
3.	Malasiro	2	10	-	2
4.	Kapa Selatan	2	8	-	1
5.	Kapa Timur	1	5	-	1
6.	Padang Laweh	1	9	-	1
Jumlah		10	36	-	5

Sumber : Data Kependudukan Nagari Kapa 2006

Kalau dilihat dari tabel diatas bahwa keberadaan tempat ibadah baik masjid dan musholla telah merata di tiap Jorong, artinya kemudian tersebut menandakan bahwa telah ada kesadaran masyarakat Nagari Kapa akan pentingnya sarana ibadah bagi kebutuhan spiritual mereka. Adanya bangunan tempat ibadah spirit keberagaman tetap terbangun dan internalisasi nilai-nilai keagamaan kepada generasi muda tetap berlanjut.

Indikator lainnya terkait dengan aspek sosial budaya di Nagari Kapa adalah tingkat pendidikan. Sebab kemajuan sebuah daerah juga tergantung dari jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya, berarti semakin berkualitas. Paling tidak hal bisa dilihat jumlah penduduk yang telah mengenyam dunia pendidikan dari tingkat pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Dalam konteks ini pendidikan merupakan alat yang ukur yang tepat untuk melihat sejauh sebuah daerah telah maju setahap dalam pengembangan sumber

daya manusia. Demikian pula dengan kondisi pendidikan di Nagari Kapa sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 8.
Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan Tiap Jorong di Nagari Kapa 2006

No	Jorong	Tingkat/Jenjang Pendidikan			
		SD	SLTP	SLTA	PT
1.	Kapa Utara	204	92	89	7
2.	Lubuk Pudiang	231	78	65	11
3.	Malasiro	340	229	296	9
4.	Kapa Selatan	1.371	341	302	12
5.	Kapa Timur	157	75	49	5
6.	Padang Laweh	143	58	167	6
Jumlah		2.446	873	968	50

Sumber : Data Kependudukan Nagari Kapa 2006

Tabel di atas jumlah diatas penduduk pada tiap jorong di Nagari Kapa sebagian besar hanya menyelesaikan pada jenjang pendidikan tingkat dasar (SD), yakni dengan jumlah mencapai 2.446 orang yang berarti 50 kali lipat daripada mereka yang tamat perguruan tinggi. Kemudian untuk jenjang menengah, baik ditingkat SLTP dan SLTA jumlah tidak terpaut jauh yakni SLTP (873 orang) dan SLTA (968 orang).

B. NAGARI KAPA DALAM DERAP PEMBANGUNAN MASA ORDE BARU

1. Tanah Ulayat dan Hierarki Sosial

Menurut Ter Haar dalam bukunya asas-asas dan susunan hukum adat, terjemahan K.N. Soebakti Poesponoto, halaman 12 (Syahmunir, 2004:96) menyatakan:

“Bilamana orang meneropong suku bangsa Indonesia manapun juga, tampilkan dimatanya lapisan bagian bawah yang amat luas suatu masyarakat yang terdiri dari gerombolan-gerombolan yang bertalian satu sama lain terhadap alam yang tidak kelihatan mata terhadap dunia luar dan alam kebendaan, maka mereka bertingkah sedemikian rupa sehingga mendapat gambaran sejelas-jelasnya gerombolan-gerombolan tadi dapat disebut *rechtsgemeenschap* (masyarakat hukum).

Uraian Ter Har di atas disimpulkan oleh Syahmunir bahwa setidaknya ada lima masyarakat hukum yakni masyarakat yang terdapat pada lapisan bawah di Indonesia, dengan ciri-ciri antara lain: adanya rasa solidaritas antar warga masyarakat hukum, asa manfaat dari kekayaan hukum adat yang bisa dinikmati oleh masyarakat adat, adanya rasa tanggung jawab masyarakat adat terhadap terpeliharanya dan dipertahankannya benda-benda kekayaan masyarakat adat, tiadanya pemikiran masyarakat adat untuk berpikir meniadakan hukum adat serta sebuah masyarakat adat adalah apa yang dirasakan serta dialami oleh masyarakat adat yang tidak mungkin dibubarkan oleh pihak luar (Syahmunir:ibid).

Masyarakat Nagari Kapa sebagaimana halnya masyarakat Minangkabau lainnya merupakan masyarakat yang menganut garis *matrilineal* dalam menarik garis keturunan dalam keluarga. Artinya dalam sistem ini, pola pewarisan maupun identitas kesukuan yang melekat ditarik dari pihak ibu. Pola pewarisan harta pusaka tersebut bersifat *genealogis-teritoroial*, dimana pewarisan harta pusaka diberikan kepada anggota kerabat yang punya garism keturunan dari pihak perempuan yang terdapat dalam satu kawasan geografis (Azwar, 2005:59). Secara konseptual harta pusaka di Minangkabau menurut Hamka (Naim, 1968:29 dalam Azwar, 2005:59) terbagi dua yakni:

Harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi diperoleh dengan *tembilang besi*, sedangkan harta pusaka rendah diperoleh dengan *tembilang emas*. Pengertian *tembilang besi* dan *tembilang emas* dalam filosofis masyarakat Minangkabau menjelaskan sumber dari harta pusaka itu sendiri. Pada harta *tembilang besi*, memiliki makna harta yang diperoleh dari nenek moyang, sedangkan harta *tembilang emas* adalah harta yang diperoleh dari pencarian orang tua. Akan tetapi harta *tembilang emas* akan menjadi *tembilang besi* setelah lebih dari empat generasi.

Harta pusaka Minangkabau pada umumnya berupa tanah. Tanah yang dimiliki secara bersama-sama oleh masyarakat Minangkabau disebut tanah ulayat (Boerhan, 1977:304 dalam Azwar, 2005:60). Tanah Ulayat di Minangkabau ada 3 macam menurut kepemilikannya, yakni tanah ulayat kaum, tanah ulayat suku dan tanah ulayat nagari. Tanah Ulayat kaum adalah tanah ulayat yang dimiliki oleh suatu kaum dengan penguasaan Kepala Kaum atau Mamak Kepala Waris, kemudian tanah ulayat suku adalah tanah ulayat yang dimiliki oleh suatu suku dengan penguasaan Kepala Suku atau Penghulu Suku dan tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat yang dimiliki oleh anak nagari atau anak kemenakan dengan penguasaan penghulu-penghulu suku yang ada di nagari bersangkutan. Selain itu menurut Boerhan disamping tanah ulayat dibedakan menurut kepemilikannya, juga ada tiga golongan tanah ulayat

menurut bentuknya, yakni hutan lepas, tanah yang telah dibuka kemudian ditinggalkan lagi serta tanah yang terus diusahakan. Hutan lepas berfungsi sebagai hutan cadangan bagi anak-kemenakan dikemudian, tanah ulayat yang kemudian di tinggalkan kembali menjadi hak ulayat kaum.

Tanah ulayat (pusaka tinggi) dalam perspektif adat Minangkabau memiliki posisi yang penting. Tanah ulayat baru digadaikan atau dijual sementara, apabila menghadapi hal-hal yang sangat penting dan mendesak seperti : *maik tabujua di tengah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah), *gadiah gadang tak balaki* (gadiah dewasa belum bersuami), *rumah gadang katirisan* (rumah adat yang sudah bocor), dan *mambangkik batang tarandam* (membangkit batang tarandam) (Azwar, 2005:64). Jika ditemui kondisi keempat ini, maka cara-cara yang dalam keadaan normal tidak boleh dipergunakan, yakni menggadaikan atau menjual sementara harta pusaka tinggi dalam hal ini tanah ulayat, sebab adat telah menfatwakan ; “*tak aia buluah dipancuang, tak kayu janjang dikapiang, tak ameh bungka diasah*” (tak ada air bamboo dipancung, tidak ada kayu jenjang dikapiang dan tidak ada emas bungkal diasah).

Tanah ulayat dalam struktur sosial Minangkabau memiliki posisi yang penting, menurut Navis (1984: 150-151) menyatakan bahwa masyarakat Minangkabau sebagai masyarakat agraris, dimana tanah merupakan lambing bagi martabat hidup anggota kerabat. Kaum ataupun orang-orang yang tidak memiliki tanah dianggap kurang, sebab bagi mereka yang tidak mempunyai tanah dipandang sebagai orang *malakok* (menempel) yang tidak jelas asal-usulnya. Bahwa setiap nagari di Minangkabau memiliki batas tanah ulayat yang telah disesuaikan dengan keadaan alam sekitarnya. Navis juga menyatakan bahwa ada dua jenis tanah ulayat dalam suatu nagari, yakni: ulayat nagari dan ulayat kaum, dimana ulayat nagari berada dibawah kekuasaan penghulu andiko (penghulu empat suku), sedangkan ulayat kaum berada dibawah kekuasaan penghulu suku yang menjadi pucuknya.

Manggis (1971: 130 dalam Azwar, 2005: 109) menekankan bahwa tanah ulayat sebagai salah satu harta asli adalah lambing ikatan kaum yang bertali darah, agar pertalian darah tidak terputus, maka dilarang menjualnya. Larangan ini menurut adat berbunyi : “*terjual tidak dimakan beli, dipinjam tidak dimakan gada*”, artinya fungsi tanah ulayat merupakan pengikat sosial kekerabatan sekaligus memiliki fungsi untuk menghindari terjadinya kepemilikan tanah komunal secara individual.

Menurut Navis (1984: 152) hasil hutan tanah ulayat nagari yang menganut aliran Koto Piliang boleh diambil siapa saja setelah mendapat izin dan membayar pajaknya kepada penghulu yang mempunyai wewenang, sedangkan hasil hutan ulayat nagari yang beraliran Bodhi

Chaniago hanya boleh diambil oleh kaumnya dengan persyaratan yang sama. Demikian pula izin penggarapan ulayat untuk dijadikan sawah atau lading. Pengambilan hasil hutan seperti kayu untuk dipakai sendiri, tidak dikenakan bea yang disebut *Bungo* (Bunga). Ada empat macam bunga yang dipungut, yakni sebagai berikut:

- a. *Bungo kayu* yaitu pajak hasil kayu yang diperniagakan besarnya 10%
- b. *Bungo aleh* yaitu pajak hasil hutan lainnya, seperti dammar dan rotan yang di perdagangkan besarnya 10%
- c. *Bungo ampiang* yaitu pajak hasil penggarapan sawah dan lading besarnya 10%
- d. *Bungo tanah* yaitu pajak hasil tambang besarnya 10%

Di daerah Pasaman Barat termasuk di Nagari Kapa sebagaimana daerah Minangkabau lainnya juga dikenal pula konsep pemilikan tanah, mereka mengakui keberadaan tanah ulayat, akan tetapi dalam pengawasan dana pengendalian tanah ulayat di daerah ini dikenal adanya konsep *babingkah adat* dan *babingkah tanah*. (Afrizal, 2007:40). *Babingkah adat* adalah kepemilikan tanah ulayat nagari yang berada di tangan yang *Dipertuan*, artinya kewenangan kepemimpinan kaum dibatasi dalam hal pemanfaatan setelah mendapat keputusan dari yang *Dipertuan*, sedangkan *Babingkah tanah*, yakni tanah ulayat yang dimiliki oleh pemimpin kelompok kaum, fungsi Yang *Dipertuan* hanya bersifat memberikan nasehat, sedangkan keputusan tetap berada di tangan pemimpin kaum ini.

Batas tanah ulayat di daerah Pasaman, sebagaimana batas tanah ulayat yang batasnya ditentukan oleh masyarakat berdasarkan batas-batas yang ada disekitarnya, seperti sungai, gunung, pepohonan atau lainnya. Batas alam yang cenderung abstrak menjadikan persoalan perbedaan penentuan batas tanah ulayat, acap kali menimbulkan konflik dikenal dengan *bacakak kampuang*. Untuk meredakan situasi ini, kepemimpinan tradisional memiliki peran penting. Dalam konsepsi budaya Minangkabau, Pasaman sebagai wilayah rantau mengakui raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sebagaimana pepatah minang '*luhak bapanghulu, rantau baraja*'. Maka daerah-daerah di Kapupaten Pasaman, seperti Rao Mapat Tunggul di perintah Yang *Dipertuan* Padang Nunang, sedangkan di Kinali yang memerintah adalah Yang *Dipertuan* Parit Batu. (Undri, 2006 : 43-44).

Kemudian dalam konsep pemilikan lahan di Minangkabau termasuk di daerah juga dikenal dengan istilah penduduk asli (*urang asa*) dan penduduk pendatang (*urang datang*). Perbedaan terletak pada empat hal yakni: pertama, pemilikan harta pusaka yang dimiliki oleh mereka menetap lebih dahulu (*manaruko*); kedua, dimilikinya *pandam pakuburan*; ketiga, dimilikinya gelar kebesaran serta keempat adanya

rumah adat yang *bagonjong* disesuaikan dengan kebesaran didalam lapisan masyarakat. (Undri, 2006:64).

Dalam perspektif sejarah keberadaan tanah ulayat Minangkabau sejak periode kolonial sampai akhir pemerintahan orde baru mengalami dinamika perubahan seiring dengan kebijakan pemerintah yang berkuasa. Ketika pemerintah Hindia Belanda dibawah kekuasaan Van den Bosch, mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan kepemilikan tanah, yang pertama dengan keluarnya sistem tanam paksa (1830) dan kebijakan agraria (1870). Kebijakan penguasa kolonial ini di Sumatera Barat tidak berani mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat, karena berbagai konsekuensi yang dapat mengganggu jalannya pemerintahannya. Sehingga sampai berakhirnya penguasa kolonial Belanda, undang-undang tidak pernah diterapkan dan berlaku efektif di Sumatera Barat (Azwar, 2005:68).

Pada tahun 1960, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 secara Nasional. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam masyarakat Indonesia yang heterogen secara sosial dan budaya. Kepemilikan tanah secara kolektif tetap diakui oleh pemerintah nasional, akan tetapi kepemilikan tersebut harus tunduk kepada peraturan Negara untuk dikelola dan dipelihara. Kemudian setiap tanah di Indonesia harus didaftarkan status kepemilikannya yang mengatasnamakan kelompok. Menurut Nasrun (Naim, 1968:54 dalam Azwar, 2005:69), Undang-Undang Pokok Agraria ini sebenarnya berdasarkan milik perseorangan terhadap tanah, lain halnya dengan struktur kepemilikan tanah yang ada di Minangkabau, dimana kepemilikan tanah Minangkabau tidak berdasarkan perseorangan tetapi adalah berdasarkan kekeluargaan yaitu kolektif.

Adanya undang-undang, upaya pemerintah untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 1945 dan demi kesejahteraan rakyat dengan menghapuskan praktek politik eksploitatif dari dua sistem yang berkembang sebelumnya yaitu sistem pemerintahan yang bercorak kolonial. Menurut Soemardjan (1984:160 dalam Aprianto, 2006: 67) terdapat tiga penjelasan resmi dari undang-undang agraria, dari sistem kolonial ke suatu sistem agraria nasional sesuai dengan kepentingan Negara dan rakyat Indonesia, khususnya kaum petani. Kedua, untuk mengakhiri sistem dualisme dan meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan terutama didasarkan atas hukum adat. Ketiga, untuk memberi kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Spirit dari UUPA tahun 1960 mengakomodasi terhadap struktur kepemilikan tanah ulayat dalam bentuk penguatan kepemilikan tanah. Akan tetapi dalam jangka panjang memiliki implikasi terhadap

kemungkinan untuk merombak struktur kepemilikan tanah komunal di Sumatera Barat. Gejala ini menurut Naim (1977:69 dalam Azwar, 2005:69) bisa mengarah pada adanya individualisasi kepemilikan tanah, karena tanah ulayat bisa didaftarkan dan disertifikasi, sehingga secara hukum kepemilikan tanah lebih tunduk kepada UUPA tahun 1960 dibandingkan kepada hukum adat. Dengan sendirinya tanah ulayat yang telah didaftarkan sebagai hak milik, maka kepemilikan akan mudah jatuh ke tangan pihak lain, baik melalui pemindahan hak milik, jual-beli dan sebagainya. Sehingga secara adat konsekuensi dari diterapkan undang-undang akan berbenturan dalam konteks kepemilikan dan fungsi sosial tanah ulayat di Minangkabau.

Meskipun undang-undang memiliki kemungkinan didalam mengurangi keberadaan tanah komunal. Akan tetapi dalam konteks Sumatera Barat, sampai tahun 1970-an sejak diberlakukan UU ini pada tahun 1960, proses kehilangan pegangan tanah ulayat tidak terjadi. Hal ini karena pemahaman tanah ulayat yang masih kokoh dalam masyarakat Minangkabau (Naim, 1977:70 dalam Azwar, 2005:69). Hutan ulayat masih dipertahankan dan sekaligus berfungsi sebagai cadangan jika kampung, sawah, dan tidak bisa lagi menampung pertambahan anak-kemenakan. Kesatuan keluarga, kaum dan kampung bisa dipertahankan, karena hak pakai tanah dipegang oleh wanita. Meskipun sering kali bertukar, tanah, rumah tetap menjadi milik mereka. Sistem tanah ulayat dengan struktur masyarakat yang matrilineal kiranya berjalan secara harmonis, saling mendukung dan menguatkan satu sama lainnya.

Implementasi UUPA tahun 1960, meskipun tidak sampai merubah posisi tanah ulayat di Minangkabau. Akan tetapi bukan berarti tidak ada perubahan sama sekali, beberapa riset yang dilakukan para peneliti asing maupun local, seperti Screeke, Evers, Oki, Benda-Beckmann maupun Afrizal, menunjukkan terjadinya pengenduran pembatasan atas pemilikan tanah ulayat, yakni sebagian kecil tanah ulayat telah dijual kepada pihak lain. Pada tahun 1955 daerah Air Dingin Solok, tanah ulayat telah mengalami perubahan kepemilikan sebagai akibat penggadaian. Kemudian di daerah Sungai Puar Agam, sekitar 4,32 % tanah ulayat menjadi hak milik pribadi dan sisanya milik kerabatnya (Azwar, 2005:70). Artinya meskipun telah terjadi pergeseran kepemilikan lahan tanah ulayat, akan tetapi tetap berada dalam koridor tradisi budaya Minangkabau.

Pada tahun 2000, Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 9 Kabupaten dan 6 Kota terbagi atas ; 114 Kecamatan, 535 Nagari serta 2.157 desa/kelurahan, memiliki luas lahan 4.229.730 Ha, dimana 55,22% merupakan kawasan budi daya sedangkan sisanya 44,78% merupakan kawasan lindung (Syahmunir, 2004:101). Kawasan budi

daya dan Kawasan lindung merupakan tanah ulayat yang dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat Hukum Adat. Berdasarkan Permenag/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 mengartikan tanah ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat sumber daya alam termasuk tanah dan wilayah tersebut.

Masalah yang timbul sehubungan keberadaan tanah ulayat ini adalah pelaksanaan pasal 28 UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 terhadap penguasaan tanah ulayat nagari oleh perusahaan perkebunan dengan cara pelepasan hak. Adapun kecemasan dan ketakutan masyarakat hukum adat bilamana hak ulayat yang diserahkan itu berubah menjadi HGU yang dikuasai oleh Negara. Sebab bunyi pasal 4 ayat 1 dari Permenag BPN No. 5 tahun 1999, kalau ditelisik lebih jauh tidak secara tegas menyebutkan apakah pelepasan hak ulayat tersebut mengakibatkan tanah itu menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara dan selanjutnya sesudah HGU (Hak Guna Usaha) berakhir atau tanah ulayat tidak dipergunakan lagi atau ditelantarkan dapat kembali menjadi hak ulayat.

2. Perubahan Sosial Ekonomi : Dari Ekonomi Pertanian Subsistensi ke Ekonomi Perkebunan.

Produk komoditas ekspor di Indonesia telah dikembangkan sejak zaman kolonial kurang lebih pada abad ke-17, akan tetapi produk ekspor yang dihasilkan masih berskala kecil seperti kopi, gula yang dijual dari petani ke penguasa kolonial. Sistem produksi yang berkembang pada saat itu lebih berorientasi dari hasil pertanian dari lahan perladangan penduduk local. Ekonomi capital mulai berkembang di Indonesia mulai abad pertengahan abad ke -19 setelah pembukaan perusahaan swasta. Kemudian mengalami perkembangan yang cukup berarti setelah keluarnya UU tentang gula tahun 1870. sistem perekonomian Indonesia yang bercorak kapitalis, menemukan titik puncaknya, ketika pemerintah orde baru berkuasa. Pemerintah orde baru dengan label nya "pembangunan memberikan prioritas utama kepada pertumbuhan ekonomi" (Afrizal, 2007:45).

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah orde baru melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) mendorong terhadap keberadaan para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dua kebijakan penting pemerintah orde baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yakni : pertama, Negara mendorong investasio yang berbasis sumber daya alam di daerah pedesaan; kedua, pemerintah berkonsentrasi untuk mengundang investor secara intensif. Pemerintah orde baru berasumsi bahwa Negara memerlukan dana yang besar untuk membangun dan salah satu cara yang jitu adalah suatu

kewajiban untuk mendatangkan investor asing. Sehingga tidak mengherankan pada saat ini Indonesia dikatakan sebagai “surga bagi pemodal asing” (Taylor, 1974: 18 dalam Afrizal, 2007 : 45). Sebagian besar investasi yang masuk merupakan modal intensif yang berorientasi ekspor, yang hanya menciptakan lapangan pekerjaan yang terbatas, seperti di sektor pertambangan, minyak dan kehutanan. Investasi yang lebih berorientasi ekspor tidak dapat membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Negara yang kaya akan sumber daya alam.

Kebijakan pembangunan pemerintah orde baru tidak hanya merubah struktur ekonomi Indonesia, akan tetapi juga penggunaan tanah (lahan). Sistem ekonomi masyarakat Indonesia mulai bergeser dari sistem ekonomi subsistensi dan pertanian untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bergeser ekonomi skala besar yang padat modal. Bahkan pemerintah orde baru memfasilitasi berbagai hal yang terkait spirit pembangunisme dengan mengeluarkan peraturan menyangkut tanah dan sumber daya alam secara umum, agar penanaman modal bisa berjalan secara kondusif di sektor kehutanan, pertanian dan pertambangan yang untuk di akumulasi. Ini berarti sebagian besar penguasaan tanah berada kendali para pemodal besar. Pemerintah orde baru mengeluarkan UU No. 5 tahun 1967 yakni memberikan hak kepada investor swasta untuk mengeksploitasi hutan kita. Melalui aturan pemerintah orde baru memberikan konsesi pengelolaan hutan yang disebut Hak Penguasaan Hutan (HPH). Sebagai akibatnya baik perusahaan Negara maupun swasta diperbolehkan untuk melakukan eksploitasi hasil hutan. Hal ini berdampak hutan Indonesia banyak dikendalikan oleh Kelompok pengusaha besar, sehingga berjuta-juta kubik kayu dihasilkan hutan Indonesia dari tahun 1967-1980. pada tahun 1988 kira-kira 53 juta hektar hutan (37,1% dari total hutan di tanah air) dikendalikan oleh 531 perusahaan di seluruh Indonesia. Di Sumatera Selatan dilaporkan 12 perusahaan besar memiliki kepemilikan konsensi dan mengontrol lebih dari 1 juta areal hutan di daerah ini selama (1997-1999) (Afrizal, 2007 : 46).

Menurunnya pendapatan pemerintah orde baru dari hasil minyak bumi menyebabkan pemerintah orde baru harus mencari sumber-sumber pendapatan lain selain dari minyak bumi. Salah satunya yakni dengan melirik sektor pertanian “sebagai katalisator untuk pembangunan ekonomi”. Dan sebagai kelanjutannya sektor agro industri berkembang pesat. Sehingga banyak perusahaan yang bergerak di sektor ini, tercatat 2137 perusahaan yang bergerak pada usaha komoditas pertanian untuk tujuan ekspor seperti karet, kelapa sawit, koi dan teh.

Perkebunan kelapa sawit merupakan agro-industri dasar yang penting, bahkan dewasa ini pertumbuhan produk kelapa sawit untuk tujuan ekspor meningkat secara tajam baik dari segi jumlah dan lahan

yang dipergunakan untuk perkebunan ini. Posisi perusahaan kelapa sawit yang berjumlah 170 tercatat pada urutan ke empat dibawah perkebunan karet, teh dan kopi pada tahun 1985. namun pada tahun 1999, jumlah melonjak tajam kira-kira 4 kali, kalau pada tahun 1985 areal untuk perkebunan kelapa sawit 4312 Hektar kemudian tahun 1992 menjadi 2 juta hektar diseluruh tanah air.

Dalam konteks daerah Minangkabau sampai tahun 1870, penduduk daerah ini masih bergerak dalam lingkaran ekonomi skala kecil. Tambang emas yang menjadi komoditas utama di Tanah Datar pada abad ke -17 dan 18. selanjutnya dengan pertambahan jumlah penduduk serta mulai habisnya deposit tambang ini, yang kemudian ditutup pada tahun 1870-an. Pertanian kopi pada gilirannya menggantikan tambang emas selama tahun 1790-1830. Tanaman kopi yang dihasilkan oleh penduduk lokal dari tanah ulayat mereka dimana pemerintah kolonial Belanda hanya mengawasi kopi yang sudah dikirim ke gudang dan bukan produksinya kopinya. Dengan diberlakukan Agraria Wet tahun 1870 oleh pemerintah kolonial, dimana pemerintah memberikan izin menyewa lahan dalam jangka waktu yang panjang (erfpacht) dan konsesi pertambangan bagi perusahaan swasta. Selama tahun 1877 sampai tahun 1926 tercatat 241 perusahaan perkebunan di Sumatera Barat. Dan dari tahun 1898 – 1924 terdapat 242 konsensi pertambangan yang diberikan pemerintah kolonial kepada pihak investor yang umumnya dimiliki oleh orang Barat dan Cina (Afrizal, 2007 : 47).

Selama periode pemerintahan orde baru, ekonomi Sumatera Barat tumbuh pesat, dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1991, angka pertumbuhan ekonomi mencapai 6,13% kemudian tahun 1995 tumbuh 8,37%. Kemudian turun menjadi 3% ketika terjadi krisis moneter tahun 1998. selepas krisis moneter, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat perlahan bangkit kembali, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan pendapatan domestik daerah, sebagai indikator kemajuan ekonomi. Dimana pada tahun 1999 tercatat Rp. 7,8 triliun menjadi Rp. 8,11 triliun. Pendapatan per kapita penduduknya juga meningkat dari Rp. 6,27 Milyar pada tahun 2001.

Kontribusi sektor industri pada perkembangan ekonomi juga terus meningkat, akan tetapi sektor pertanian masih memegang peranan penting. Hal ini bisa dilihat dari fakta yang ada, dimana tercatat 904.440 perusahaan pada tahun 1996 dimana 69,7% (549.410) bergerak disektor pertanian. Kemudian sektor perdagangan, perhotelan dan restoran menduduki tempat kedua. Dengan demikian sektor pertanian masih merupakan sektor yang menjadi penopang bagi tenaga kerja yang berjumlah 1.372.850 (50,3%). Sektor pertanian yang di dominasi oleh tanaman padi, lahan pertanian meningkat 50% antara tahun 1973 dan

1983. pada tahun 1983 terdapat 423.102 hektar lahan yang dipergunakan lahan pertanian yang terdiri dari lahan basah 411.045 hektar dan 12,057 lahan kering. Sehingga pada tahun 1999, Sumatera Barat mengalami surplus beras. Pada umumnya penanaman padi masih berorientasi pada ekonomi subsistensi, mereka akan menjual hasil panen padi mereka, bila jumlahnya telah melebihi dari kebutuhan mereka (Afrizal, 2007:48).

Menyadari bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam ekonomi Sumatera Barat, maka pemerintah daerah memberikan perhatian besar pada sektor ini, akan tetapi karena sebagian besar wilayah Sumatera Barat terdiri perbukitan dan lembah dimana hanya 20% dari lahan yang ada bisa dikembangkan untuk lahan pertanian. Untuk itu lahan yang ada ini harus dikelola lebih intensif, dengan cara mengkonversi lahan paya menjadi lahan pertanian. Pemerintah Sumatera Barat melihat lahan paya (rawa) memiliki potensi besar untuk pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pertanian yang mengarah kepada agribisnis dan agro industri menjadi program pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan diatas. Maka sektor perkebunan rakyat dan perkebunan besar harus dikembangkan, maka untuk tujuan ini pemda Sumatera Barat mengundang investor.

Kebijakan pemerintah daerah Sumatera Barat yang membuka lebar bagi para pemilik modal untuk terlibat dalam sektor perkebunan, mengakibatkan perkebunan dengan skala besar tumbuh pesat. Periode tahun 1989 – 1990 merupakan puncak dari perkebunan besar berkembang dari jumlah wilayah yang semula 55% pada tahun 1989 menjadi 95% pada tahun 1990. Pada tahun 2001 di Sumatera Barat tercatat 55 perusahaan besar, dimana 41 buah merupakan perkebunan kelapa sawit. Dengan tingkat penguasaan kira-kira 336.674 hektar seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 9.
Jumlah Perkebunan Besar di Sumatera Barat Tahun 2001

No.	Kabupaten	Jumlah	Luas Lahan (Ha)
1.	Agam	8	33.409
2.	50 Kota	4	7.627
3.	Padang Pariaman	1	697
4.	Pasaman	16	94.050
5.	Pesisir Selatan	4	35.700
6.	Mentawai	4	37.800
7.	Sawahlunto Sijunjung	9	87.617
8.	Solok	8	39.500
9.	Tanah Datar	1	274

Sumber: Laporan Dinas Perkebunan Sumbar tahun 2001 tentang Perkebunan Swasta Nasional di Sumbar, dokumen PT. Perkebunan Nusantara VI dalam Afrizal, *The Nagari Community, Business and State*, Bogor: Sawit Watch & Forewst People Program, 2007.

Sebelum perkebunan kelapa sawit sampai di Nagari Kapa lebih dulu perkebunan sawir di daerah Simpang Empat yang dikenal dengan kawasan Gunung Ophir, yakni diperkenalkan oleh pengusaha Belanda (Andika, 200) dengan membangun perkebunan kelapa sawit. Hal ini terjadi setelah nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda berdasarkan UU no. 56 Tahun 1958, perkebunan ini menjadi milik PTPN VI.

Kemudian pada tahun 1981 perkebunan inti-plasma pertama kali diperkenalkan oleh Perkebunan Terbatas Perkebunan Nusantara VI juga di Ophir. Dengan mengolah 10.000 ha, lahan tersebut dikelola dengan pola 50% untuk perkebunan inti dan 50% untuk perkebunan plasma. Kemudian PTPN IV membagikan 2 ha perkebunan sawit beserta 0,2 ha lahan perumahan kepada setiap petani plasma.

Bagi Nagari Kapa sendiri perkebunan mulai menyentuh wilayah tersebut pada tahun 1980, yakni ketika dicadangkan pencetakan sawah baru dengan Irigasi Batang Tonggar. Tetapi karena proyek tersebut gagal, maka mulailah perkebunan besar merambah Nagari Kapa. Hal ini dimulai sejak adanya keputusan bersama yang ditandatangani oleh beberapa *ninik mamak* Nagari Kapa pada tanggal 23 Januari 1980 (Andika, 2009).

Adapun bunyi surat keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan tanah ulayat adalah tanah Luak Saparampek Nagari Kapa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Dengan Nagari Lingkuang Aur (mulai dari Tarok Tongga, Padang Durian Hijau terus ke Bintungan sarang alang di Talao

- Titisan kiduak, terus ke Rantiang Tibarau sampai ke Lubuk Languang).
- b. Dengan Nagari Koto Baru (mulai dari Tarok Tongga, terus ke anak air Pabatuan, Sailiran Batang sungai sampai ke Tikalak Basi).
 - c. Dengan Nagari Sasak (mulai dari Takalak Basi , terus ke Tunggua Hitam Pamatang Sariak sampai ke Sigor-goro/Pulau Kalimonyo).
 - d. Dengan Batang Pasaman (mulai dari Lubuk Languang, Sapatakan Gajah (sejauh lontaran gajah) dari Batang Pasaman, seiliran Batang Pasaman terus ke Lubuak Sigoro-goro/pulau kalimonyo).
2. Bahwa tanah ulayat tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembangunan, baik untuk kepentingan pemerintah maupun kepentingan Nagari Kapa sendiri berupa:
- a. Proyek landasan udara yang terletak di Kampung Laban, Jorong Kapa Utara.
 - b. Proyek pencetakan sawah baru di Baramban Sasak, Pematang Jambu
 - c. Mulai perbatasan Lubuak Languang, seiliran Batang Pasaman menuju Rantau Panjang akan digunakan untuk cadangan lahan perkebunan tanaman tua dan tanaman pertanian lainnya.
3. Bahwa setiap badan hukum/ badan usaha lain yang ingin mendapatkan lahan tersebut seizing pucuk adat bersama ninik mamak yang menandatangani surat ini dengan persetujuan Daulat Parit Batu beserta Hakim Parit Batu, Pasaman.
4. Bahwa kebulatan ini dibuat adalah demi kepentingan serta untuk mengangkat taraf hidup cucu kemenakan yang berekonomi lemah.

Bunyi surat keputusan diatas mengindikasikan, bahwa tanah ulayat dapat diberikan kepada para investor, dengan catatan sebagai hak guna usaha. Dengan adanya surat keputusan tersebut diatas, maka mulai saat itu juga para investor menanamkan sahamnya untuk membuka perkebunan kelapa sawit di Nagari Kapa.

Sejak surat kesepakatan maka secara perlahan-lahan tanah ulayat yang merupakan cadangan untuk anak-kemenakan di Nagari Kapa, mulai berganti kepemilikan semula hanya 60 ha pada tahun 1991, 4 tahun kemudian pada tahun 1994 menjadi 220 ha yang dijual kepada pihak PT. Perkebunan Permata Hijau. Hal ini pada gilirannya menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat Nagari Kapa yang kemudian berujung terhadap munculnya konflik, sebagaimana akan dijelaskan pada bab berikutnya.

Sejauh ini belum ditemukan data yang akurat seberapa besar kontribusi perkebunan kelapa sawit, seperti keberadaan PT. Permata Hijau Pasaman bagi masyarakat Nagari Kapa. Akan tetapi berdasarkan data dari BPS Pasaman Barat Tahun 2007, kita bisa melihat jumlah produksi kelapa sawit di Kecamatan Luhak Nan Duo yang didalamnya terdapat Nagari Kapa, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 10.
Jumlah Produksi Kelapa Sawit Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007

No.	Kecamatan	Jumlah Produksi (Ton)
1.	Sungai Baremas	17.602.56
2.	Ranah Batahan	17.245.44
3.	Koto Balingka	24.140.16
4.	Sungai Aua	25.721.28
5.	Lembah Melintang	9.847.00
6.	Gunung Tuleh	18.178.56
7.	Talamau	4.484.16
8.	Pasaman	15.693.12
9.	Luhak Nan Duo	11.661.12
10.	Sasak Ranah Pasisie	6.531.84
11.	Kinali	14.722.56

Sumber: BPS Pasaman Barat Tahun 2007

Dari tabel diatas wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo, pada tahun 2007 menghasilkan produksi kelapa sawit 11.661.12 Ton. Meskipun bila dibandingkan dengan Kecamatan Kinali yang dikenal sebagai penghasil kelapa sawit (14.722.56 Ton), masih kalah banyak. Apalagi jika dibandingkan dengan hasil kelapa sawit dari Kecamatan Sungai Aua (25.721.28 Ton) yang menempati posisi pertama di Kabupaten Pasaman Barat. Jumlah produksi dari Kecamatan Luhak Nan Duo lebih besar bila dibandingkan dengan hasil kelapa sawit dari Kecamatan Talamau (4.484.16 Ton) dan Sasak Ranah Pasisie (6.531.84 Ton).

C. KONFLIK TANAH ULAYAT DI NAGARI KAPA TAHUN 1981-2001

Laura Nader dan Harry Todd (dalam Sulistyowati, 2005:53) menyatakan bahwa ada tiga fase dalam sengketa, yaitu tahap pra konflik (*grievance/preconflict*), tahap konflik (*conflict*), dan tahap sengketa

(*despute*). Tahap pra-konflik mengacu kepada keadaan atau kondisi dimana seseorang atau kelompok merasakan adanya ketidakadilan, dan mengadakan keluhan. Perasaan sakit hati bisa berupa imajinasi atau nyata, tergantung pada persepsi pihak yang merasa diperlakukan tidak adil tersebut, pada prinsipnya ia merasa dirugikan. Tahap ini bisa mengalami eskalasi melalui konfrontasi atau berubah menjadi konflik, tetapi sebaliknya bisa juga merendam. Tahap ini dicirikan sebagai tahap monadic (*monadic*).

Apabila pihak yang merasa dirugikan tersebut memberitahukan keluhannya kepada pihak yang melanggar haknya, ini disebut tahap konflik (*diadik/dyadic*). Kedua pihak menyadari adanya masalah diantara keduanya. Tahap ini pun bisa mengalami eskalasi atau sebaliknya bisa juga rendam melalui upaya pemaksaan (*coercion*), atau negosiasi dengan pihak lawan.

Tahap sengketa merupakan akibat adanya eskalasi tahap konflik, dan konflik tersebut diumumkan ke publik. Pihak ketiga (*individu* atau kelompok) kini secara aktif terlibat dalam permasalahan (*triadik/triadic*). Ketiga tahap diatas tidak perlu terjadi secara berurutan. Pihak yang merasa dirugikan bisa saja mengeskalisasi keluhan langsung ke tahap sengketa tanpa melalui tahap konflik, misalnya bisa saja pihak yang merasa dirugikan langsung pergi ke pengadilan. Namun peredam (*descalation*) setiap saat bisa juga terjadi bila salah satu pihak berusaha membiarkan atau menghindari terjadinya konflik.

1. Faktor-Faktor Penyebab Konflik

Pada dasarnya tanah yang berada di Nagari Kapa bukan menjadi sumber konflik satu-satunya, namun sudah terakumulasi, yakni bersumber pada persoalan ekonomi, juga dimensi sosial budaya, politik serta pertahanan keamanan yang tinggi. Anggapan inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya kontak dan konflik antara kelompok masyarakat dengan masyarakat (*horizontal*) dan kelompok masyarakat dengan Negara (*vertikal*).

Secara garis besar, penyebab konflik yang terjadi di Nagari Kapa dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

a. Penyerahan Tanah Ulayat Kepada Pihak Perkebunan dan Penjualan Tanah Kepada Para Pendatang

Nagari Kapa sama halnya dengan nagari lain yang ada di Ranah Minang, yakni sistem penguasaan tanah adalah secara komunal. Yang dikenal dengan tanah ulayat. Tanah tersebut digunakan untuk kepentingan anggota kaum atau nagari. Berdasarkan hukum adat Minangkabau, ada 4 (empat) tipe kepemilikan tanah; (1) tanah ulayat nagari, yaitu tanah yang secara turun temurun dipergunakan untuk

kepentingan nagari dan pengawasannya berada di tangan wali nagari, (2) tanah ulayat suku, yaitu tanah yang secara turun temurun dikelola oleh suku dan dipergunakan untuk kepentingan suku tersebut, pengawasannya berada ditangan penghulu suku, (3) tanah ulayat kaum, yaitu tanah yang dimiliki oleh suatu kaum yang diperoleh secara turun temurun, dimana pengawasannya berada di tangan mamak kepala waris, (4) tanah pencaharian, yaitu tanah yang diperoleh berdasarkan pembelian.

Ketiga tanah ulayat tersebut diatas, pada dasarnya tidak boleh diperjual belikan dan dipindah tangankan kepada siapapun, kecuali dengan alasan-alasan tertentu, seperti untuk kepentingan anak perempuan yang semestinya sudah menikah, namun belum menikah., rumah gadang yang telah rusak, dan untuk pelantikan penghulu. Namun seiring dnegan perjalanan waktu, di Nagari Kapa tanah ulayat sudah mengalami perubahan menjadi tanah individu, yakni tanah ulayat sudah dapat dibagi kepada anak-kemenakan untuk dijadikan sebagai tempat perumahan. Bahkan tanah ulayat Nagari Kapa sebagian besar sudah diserahkan oleh ninik mamak kepada pihak perkebunan untuk dijadikan sebagai tempat usaha.

Penyerahan lahan kepada pihak perkebunan di Nagari Kapa, berawal dari adanya surat keputusan ter tanggal 23 Januari 1980, yang merupakan surat keputusan bersama yang di tanda tangani oleh beberapa *ninik mamak* Nagari Kapa. Salah satunya pasalnya berbunyi “bahwa setiap badan hukum/usaha lain yang ingin mendapatkan lahan tersebut meski se izin pucuk adat bersama *ninik mamak* yang menandatangani surat ini dengan persetujuan Daulat Parit Batu beserta Hakim Parit Batu Pasaman. Bunyi keputusan tersebut mengundang investor untuk membuka usaha perkebunan di Nagari Kapa.

Seiring dengan adanya program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan Negara, maka Nagari Kapa merupakan salah satu wilayah yang dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Sesuai dengan keputusan tersebut diatas, maka pihak perkebunan meminta tanah kepada *ninik mamak* untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Atas persetujuan para *ninik mamak* di Nagari Kapa, maka ada sekitar 800 ha tanah ulayat nagari diserahkan kepada pihak perkebunan untuk ditanami kelapa sawit.

Penyerahan tanah ulayat Nagari kepada pihak perkebunan menjadi peluang bagi anak kemenakan untuk meminta bagian lahan perkebunan kepada *ninik mamak*. Selain itu ada anak kemenakan yang tidak setuju dengan adanya penyerahan tanah ulayat kepada pihak perkebunan untuk dijadikan kebun sawit, sehingga hal ini menjadi salah potensi konflik di Nagari Kapa. Baik konflik antar anak kemenakan

dengan *ninik mamak* maupun konflik antara pihak perkebunan dengan anak kemenakan.

Selain penyerahan tanah kepada pihak perkebunan, juga terjadi jual beli tanah di Nagari Kapa yang dimulai sejak adanya hasil rapat *ninik mamak* pada tanggal 3 April 1981. Hasil rapat tersebut berbunyi: (1) penerimaan pendatang baru dari daerah Jambak/Padang sari disetujui dan adanya pemberian lahan kepada pendatang. Mengacu kepada hasil rapat dari *ninik mamak*, maka mulailah diadakan penjualan tanah ulayat nagari oleh *ninik mamak* kepada para pendatang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat daftar pelepasan tanah ulayat Nagari Kapa yang dilakukan oleh *ninik mamak*, yakni sebagai berikut:

Tabel 11.
Daftar Pelepasan Tanah Yang Dilakukan Oleh Ninik Mamak

No	Tahun	Jumlah/Luas Lahan	Keterangan
1.	1991	60 Ha	Dijual kepada Zainir pengusaha di Padang
2.	1991	240 Ha	Sedang diolah keluarga tani 3 desa dan akan dijual kepada PT. Permata Hijau Pasaman (PHP)
3.	1995	70 Ha	Bahar menjual kepada Juyus
4.	1995	220 Ha	Kepada PT. Permata Hijau Pasaman
5.	1995	10 Ha	Bahar menjual kepada H. Sarmal
6.	1996	400 Ha	Sedang dikerjakan oleh Kelompok tani yang dibentuk oleh Bahar dkk. Didanai oleh Dt. Dawar pengusaha dari Nagari Aur Gadang
7.	1997	12 Ha	Tanah Ulayat Nagari Kapa dijual oleh Bahar kepada karyawan RS. Yarsi Pasaman.
8.	Sisa Tanah ulayat nagari	200 ha	

Sumber : (Rantau Net) Kronologis Kasus Kapar tempat Pak Yulisman

Tabel tersebut diatas mengindikasikan, bahwa tanah ulayat Nagari Kapa secara drastic mengalami perubahan dan bahkan berkurang. Hampir semua tanah ulayat Nagari Kapa telah dijual *ninik mamak* yang diwakilkan atas nama Bahar, baik yang diserahkan/dijual kepada pihak perorangan maupun kepada pihak perusahaan.

Dengan demikian, maka Nagari Kapa hanya memiliki sisa tanah ulayat Nagari sekitar 200 ha. Itupun sudah ada kecenderungan untuk dialih hakkan atau di pindah tangankan ke pihak lain. Hal ini dapat dilihat dengan adanya larangan kepada masyarakat untuk mengolah lahan sisa tersebut. Yaitu pada tahun 1999 masyarakat Nagari Kapa mengolah sisa tanah ulayat Nagari Kapa seluas 200 ha, akan tetapi kelompok *ninik mamak* yang diakomodasi oleh Bahar kemudian mengadakan intimidasi kepada masyarakat yang ikut terlibat mengolah lahan tersebut.

Adanya keinginan kedua belah pihak yang bertentangan, yakni pihak *ninik mamak* dan anak kemenakan menyebabkan potensi konflik akan mudah terjadi. Yakni di satu sisi anak kemenakan memperjuangkan haknya untuk mengembalikan tanah ulayat nagari, sementara disisi lain pihak *ninik mamak* ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan tanah ulayat nagari tanpa memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak kemenakan.

b. Penyalahgunaan Otoritas *Ninik Mamak*

Saat ini di Ranah Minang, sudah mengalami perubahan struktur masyarakat akibat pengaruh modernisasi dengan cara individualisme atau pengaruh pergeseran nilai dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada peranan *ninik mamak* dalam keluarga luas. Mamak tidak lagi sebagai pengayom anak kemenakan, tanggungjawab *mamak* sekarang lebih berfokus kepada keluarga inti (anak dan istri), sehingga hal ini seringkali memunculkan konflik, sebab kadang-kadang demi eksistensi keluarga intinya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga inti (*nuclear family*). Mamak menyerahkan/menjual tanah ulayat kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan anak kemenakan, seperti halnya kasus tanah di Nagari Kapa, yaitu pada tahun 1980, dimana kelompok *ninik mamak* menyerahkan tanah ulayat nagari kepada pihak ketiga tanpa keterlibatan anak kemenakan. Bahkan *ninik mamak* meminta ganti rugi kepada pihak ketiga, tanpa adanya transparansi dengan anak kemenakan. Hasil ganti rugi dan penjualan tanah hanya dinikmati oleh kelompok *ninik mamak*, padahal tanah ulayat nagari secara normatif hanya diperuntukan untuk kesejahteraan anak kemenakan dalam nagari. Bahkan secara idela menurut hukum adat di Minangkabau, tanah ulayat nagari tidak dapat diperjualbelikan atau dipindah tangan kepada siapapun.

Berkaitan dengan penguasaan tanah, maka *ninik mamak* diberikan otoritas untuk mengontrol penggunaan dan membuat penggunaan tanah, termasuk siapa aja yang boleh menggunakan dan mengambil ailih termasuk cara menggadai, hibah ataupun pewarisan. Navis (dalam Iriani, 2007:14) menyatakan, bahwa kekuasaan *mamak* dalam kaitannya dengan tanah adalah sekedar mengambil hasil atau mengambil pajak hasil hutan yang diperdagangkan. Sebenarnya aturan tersebut sesuai dengan aturan nagari masing-masing yang disebut dengan adat “salingka nagari”, artinya setiap nagari diberi otonom untuk mengatur sesuai adat mereka inginkan.

Fatwa adat menyatakan “airnya yang boleh diminum, hasilnya boleh dinikmati, tanahnya tetap tinggal” artinya tanah dapat dimanfaatkan dan dinikmati hasilnya oleh seluruh anggota *kaum*, namun tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain atau pihak lain, karena tanah tersebut merupakan milik *kaum*. Apabila suatu waktu anggota *kaum* sudah tidak ingin memanfaatkan tanah tersebut, maka tanah akan dikembalikan kepada *kaum*.

Uraian tersebut diatas sangat bertentangan dengan apa yang terjadi di Nagari Kapa, yakni sejak tahun 1980 hingga saat ini tanah ulayat sudah mulai dipindah tangankan, baik kepada individu maupun kepada pihak perusahaan. Hal ini semakin diperparah dengan terjadinya perebutan lahan tanah ulayat nagari antar anak kemenakan dengan kelompok *ninik mamak*. Kelompok *ninik mamak* bukan lagi sebagai lembaga yang meluruskan permasalahan dalam nagari, akan tetapi malah sebaliknya, *ninik mamak* yang menimbulkan konflik dalam Nagari Kapa.

Penjualan-penjualan tanah yang dilakukan oleh *ninik mamak* kepada pihak perusahaan dan individu menimbulkan keresahan pada anak kemenakan. Perjuangan ingin mengembalikan tanah ulayat nagari yang dilakukan oleh anak nagari dan sebagian *ninik mamak*, bahkan menimbulkan konflik. Kelompok *ninik mamak* yang melakukan penjualan tanah membiayai polisi dan tentara untuk memanggil orang-orang yang dianggap menentang keinginannya, bahkan menyewa para pemuda untuk menteror anak nagari yang berjuang mengembalikan tanah ulayat Nagari Kapa.

2. Jenis – Jenis Konflik

Sebelum membahas mekanisme dan resolusi konflik lebih dulu dikemukakan jenis konflik yang terjadi di Nagari Kapa, sebab mekanisme yang digunakan sangat terkait dengan jenis konflik yang terjadi. Kadangkala jenis konflik yang sama menggunakan mekanisme penyelesaian yang berbeda. Adapun yang dimaksud dengan jenis konflik dalam penelitian ini adalah merujuk pada level kelompok mana

konflik tanah tersebut muncul. Dari data yang diperoleh di lapangan, maka konflik di Nagari Kapa dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

a. Konflik Antara Anak Kemenakan (Masyarakat) Dengan Pihak Perkebunan

Konflik yang terjadi antar anak kemenakan dengan pihak perkebunan berawal dari adanya janji dari pihak perkebunan pada saat tanah ulayat nagari tersebut diserahkan oleh *ninik mamak* kepada pihak perkebunan, bahwa akan membagi dua perkebunan tersebut, yakni perkebunan inti dan plasma. Dengan rincian, bahwa perkebunan inti adalah milik perusahaan sedangkan perkebunan plasma akan dibagikan kepada seluruh anak kemenakan yang ada di Nagari Kapa.

Setelah perjanjian dengan *ninik mamak* dan pihak perkebunan telah disetujui maka tanah tersebut diukur dan diberikan kepada pihak perkebunan untuk ditanami kelapa sawit. Akan tetapi setelah tanah tersebut telah dibersihkan dan akan ditanami kelapa sawit, tanah untuk dijadikan perkebunan plasma berkurang. Sehingga janji pihak perkebunan untuk membagikan kebun plasma kepada seluruh anak kemenakan di Nagari Kapa tidak terpenuhi, sebab tanahnya berkurang. Dengan demikian, maka ada sebagian anak kemenakan yang tidak mendapatkan plasma.

Apabila di klasifikasikan dalam tahap-tahap konflik, maka tahap ini merupakan tahap pra konflik, yaitu suatu tahapan yang menggambarkan suasana dimana seseorang atau kelompok orang merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan tidak adil, dengan adanya keluhan yang mengandung suatu potensi untuk konfrontasi.

Dalam kasus ini tergambar, bahwa adanya suatu kelompok tertentu yang merasa diperas, dan selanjutnya pemerasan itu terjadi dalam hubungan dimana kekuatan yang menindas menggunakan elite Negara dalam hal ini *ninik mamak*, sehingga menjadikan tidak puas di kalangan yang tertindas (masyarakat atau anak kemenakan). Hal ini dapat dilihat, dimana masyarakat/ anak kemenakan merasa tidak mendapatkan keadilan dan ketidakjelasan tentang kebun plasma. Ketika terjadi ketidakpastian plasma oleh perusahaan, maka ini menimbulkan rasa tidak puas yang bermuara pada perlawanan atau konflik oleh masyarakat/ anak kemenakan. Yakni adanya anak kemenakan yang tidak mendapatkan plasma, mengakibatkan mereka merusak kebun-kebun yang telah ditanami kelapa sawit. Bahkan pernah terjadi pemogokan kerja selama 2 bulan, sebab masyarakat melarang untuk masuk ke perkebunan tersebut.

Kresberg yang dikutip oleh Mozakki (dalam Maulana, 2006:68), bahwa:

Peristiwa konflik memiliki akar permasalahan yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut dapat mengakibatkan terjadinya konflik secara tiba-tiba. Konflik berjalan dari tahap permulaan mengalami peningkatan dan penurunan, yang kemudian berakhir. Berakhirnya konflik membuahkan hasil-hasil yang membuat konflik itu berhenti sama sekali atau hasilnya berupa sesuatu yang menjadi penyebab timbulnya konflik baru.

Apabila uraian tersebut diatas dikaitkan dengan konflik anak kemenakan/masyarakat dengan pihak perkebunan di Nagari Kapa adalah karena tidak ditepatinya perjanjian saat penyerahan lahan untuk dijadikan plasma dengan janji seluruh masyarakat/ anak kemenakan mendapatkan plasma. Namun karena lahan yang diberikan saat perjanjian tidak sama jumlah lahan yang ada setelah akan ditanami kelapa sawit, karena sebagian anak kemenakan mengambil tanah yang sudah diberikan oleh *ninik mamak* ke pihak perkebunan. Pengambilan tanah secara diam-diam oleh sebagian anak kemenakan merupakan salah satu bentuk protes atas penyerahan tanah kepada pihak perkebunan. Hal ini mengalami peningkatan ketika pihak perkebunan akan membagikan plasma kepada masyarakat, karena tidak semua masyarakat/anak kemenakan mendapatkan plasma seperti perjanjian semula. Dengan demikian masyarakat/ anak kemenakan yang tidak mendapatkan plasma semakin berani menuntut hak mereka kepada perusahaan perkebunan.

Perlawanan yang dilakukan oleh anak kemenakan/ masyarakat Nagari Kapa terhadap perkebunan dalam rangka memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan plasma dari perusahaan tidak muncul seketika, namun melalui suatu rangkaian yang menyebabkan munculnya perlawanan dari pihak masyarakat/anak kemenakan. Bentuk perlawanan tersebut diwujudkan dengan merusak kebun-kebun kelapa sawit yang telah ditanami, melakukan penjarahan dan akhirnya bentrok dengan aparat keamanan.

b. Konflik Antar Anak Kemenakan (Masyarakat) Dengan *Ninik Mamak*

Tanah ulayat menurut hukum adat di Minangkabau tidak dapat diperjualbelikan. Namun saat ini sudah mengalami perubahan yang kemungkinan disebabkan oleh pengaruh modernisasi dan pergeseran nilai dalam masyarakat. Fenomena ini dapat dilihat pada tahun 1980, di Nagari Kapa sudah terjadi penjualan tanah ulayat nagari yang dilakukan oleh para *ninik mamak* kepada pendatang/pengusaha dari luar Nagari Kapa.

Tanah ulayat Nagari Kapa diberikan kepada para pendatang, berupa tempat perumahan dan lahan perkebunan, dengan pemberian

ganti rugi oleh para pendatang kepada *ninik mamak*. Uang ganti rugi tanah yang harus dibayar oleh pendatang sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan tiga kali pembayaran. Akan tetapi uang ganti rugi tersebut hanya dinikmati oleh kelompok *ninik mamak* tanpa adanya transparansi terhadap anak kemenakan.

Tidak adanya transparansi antara *ninik mamak* dengan anak kemenakan, menyebabkan anak kemenakan berusaha mengembalikan tanah ulayat yang telah dijual oleh *ninik mamak* kepada pendatang. Namun anak kemenakan yang mengadakan protes terhadap penjualan tanah tersebut malahan dipanggil oleh pihak kepolisian dan ABRI (Polsek Simpang Empat dan Koramil). Bahkan *ninik mamak* yang terlibat dalam penjualan tanah ulayat nagari berusaha mempertahankan tanah ulayat yang telah dijual dengan cara menyewa pemuda untuk menteror orang-orang yang tidak berpihak kepadanya. Salah satu korbannya adalah Boy Martin yang dibacok oleh Buyung Picak ketika sedang menggarap tanah, akibatnya kepala sebelah kiri robek.

Pada tahun 1999 masyarakat Nagari Kapa mulai mengolah lahan yang tersisa yaitu 200 ha. Namun kelompok *ninik mamak* tidak setuju, sehingga menyewa para pemuda untuk mengintimidasi dan menteror masyarakat/anak kemenakan yang menggarap lahan tersebut. Walaupun sudah diteror dan diintimidasi oleh kelompok *ninik mamak*, namun masyarakat tetap bersikeras mengolah lahan yang tersisa. Akhimya ketika masyarakat sedang mengolah lahan, tiba-tiba Bahar dkk datang dengan membawa pihak kepolisian (Polsek Simpang Empat). Kedatangan Bahar beserta polisi adalah untuk mengintimidasi masyarakat yang sedang mengolah lahan. Kedatangan polisi dan bahar tersebut akhimya menangkap 7 orang masyarakat, yaitu Firdaus, Iwan, Pingai, Acong, Sisyan, Ijen, dan Ucok.

Ketujuh orang tersebut kemudian ditahan di Polsek Simpang Empat. Setelah masyarakat mengetahui ada anak Nagari Kapa yang ditahan oleh pihak kepolisian Simpang Empat, maka secara spontan masyarakat berkumpul di Pasar Kapa dan membahas masalah penangkapan anak Nagari Kapa yang dilakukan oleh Kepolisian Pasaman atas perintah Bahar. Penangkapan tersebut dianggap tidak beralasan oleh Masyarakat Nagari Kapa, sehingga masyarakat/ anak kemenakan berusaha untuk melepaskan teman-temannya yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian secara sepihak.

Setelah masyarakat membicarakan tentang penangkapan anak Nagari Kapa, mereka kemudian mengutus empat orang untuk pergi ke Polsek Pasaman untuk meminta keterangan dari kepolisian tentang alasan penangkapan ke tujuh orang tersebut. Sesampai di Polsek Simpang Empat, utusan tersebut bertanya kepada petugas, bahwa “apakah ada saudara kami yang diambil dari lahan?” lalu petugas tersebut

menjawab, bahwa “orang tersebut adalah titipan Bapak Bahar dan Wakapolres”. Keempat orang utusan tersebut meminta kepada petugas agar tujuh orang yang ditangkap segera dilepaskan karena kesalahan yang dilakukan tidak jelas. Petugas tersebut tetap menjawab, tidak bisa, karena orang tersebut merupakan titipan Wakapolres Lubuk Sikaping, sementara Wakapolres tersebut sudah pulang ke Lubuk Sikaping. Keempat orang utusan tersebut tetap memaksa petugas agar melepaskan ke tujuh orang yang ada di dalam tahanan. Menurut mereka, “kalau tidak dilepaskan akan local massa yang lebih banyak lagi”. Beberapa menit setelah utusan tersebut mengatakan massa akan local, maka dengan tiba-tiba tersebut local dan langsung menyerbu sel tahanan dan membuka kunci tahanan sehingga ketujuh orang berhasil lari keluar.

Pada saat penyerbuan massa ke Polsek Simpang Empat, massa tidak hanya berhasil meloloskan ke tujuh tahanan, akan tetapi juga menimbulkan kegaduhan dengan memecahkan kaca-kaca di kantor Kapolsek Simpang Empat. Setelah melihat kegaduhan tersebut polisi lalu melepaskan peluru karet dan peluru tajam ke udara, sehingga ada beberapa masyarakat yang kena peluru karet. Setelah polisi melancarkan peluru beberapa kali ke udara dan bahkan ada masyarakat yang terkena peluru, maka massa tersebut bubar dan kembali ke rumah masing-masing.

c. Konflik Antara Masyarakat dan Aparat Kepolisian

Konflik yang terjadi antar *ninik mamak* dengan anak kemenakan yang melibatkan pihak kepolisian akhirnya berubah menjadi konflik antara masyarakat dengan aparat kepolisian (local lm). Konflik tersebut sudah mulai sejak tahun 1980, yakni *ninik mamak* menggunakan aparat keamanan (koramil dan Kapolsek Pasaman) untuk mengamankan anak kemenakan atau siapapun di Nagari Kapa yang dianggap menentang keinginannya dalam hal penyerahan dan penjualan tanah ulayat nagari.

Kemudian mencapai puncaknya pada tanggal 29 April 2000, Nagari Kapa di datangi satu truk petugas polisi dan satu Toyota kijang, serta beberapa motor dan dilengkapi dengan senjata. Aparat tersebut mengadakan sweeping, bahkan menyatakan perang kepada masyarakat Nagari Kapa disertai dengan berbagai ancaman dan melepaskan tembakan ke udara.

Pada saat itu polisi betul-betul mengadakan gerakan yang membabi buta, yakni beberapa orang yang sedang duduk di warung dan saat bekerja diambil paksa dan dipukuli oleh polisi. Orang-orang yang sempat ditemukan oleh polisi, ditangkap kemudian di bawa ke Polsek Simpang Empat. Karena sebagian masyarakat melarikan diri pada saat polisi local, maka polisi mengadakan penggeledahan di rumah-rumah

penduduk. Akibatnya penduduk merasa ketakutan, sehingga laki-laki melarikan diri ke kebun-kebun dan hutan-hutan untuk menyelamatkan diri dari tangkapan polisi. Bahkan ada yang sampai lari ke Jakarta.

Pada tanggal 30 April 2000, polisi bersama kaki tangan Bahar berkunjung ke Nagari Kapa untuk mencari penduduk laki-laki untuk ditangkap. Mereka menganggap bahwa semua laki-laki di Nagari Kapa pada saat itu melakukan penyerbuan di kantor Polsek Pasaman, sehingga polisi ingin menangkap semua laki-laki yang berada di Nagari Kapa. Pada saat pencarian dilakukan, ditemukan bujang (zulkilfi) yang sedang membersihkan motomya di rumahnya. Akhirnya bujang di tangkap dan dibawa ke kantor Polsek Simpang Empat, disepanjang jalan bujang dipukuli hingga sampai kantor polisi Simpang Empat. Polisi terus melakukan operasi, sehingga lima hari kemudian ditemukan salah seorang anak nagari bernama Alisman yang sedang berada di rumah Ibu tirinya. Alisman tersebut dianggap melarikan diri oleh polisi.

Situasi tersebut memicu ibu-ibu untuk melakukan demonstrasi, karena merasa diintimidasi oleh pihak aparat kepolisian. Dengan demikian ibu-ibu tersebut mendatangi DPRD Pasaman untuk mendesak anggota Dewan agar menyelesaikan persoalan yang terjadi di Nagari Kapa.

3. Mekanisme dan Resolusi Konflik di Nagari Kapa

Setiap masyarakat atau individu memiliki kepercayaan sendiri dalam menentukan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang dihadapinya. Kepercayaan untuk menggunakan cara penyelesaian sengketa dipengaruhi oleh banyak local, diantaranya adalah tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak yang bersengketa, kredibilitas lembaga yang hendak digunakan, hubungan kedekatan pihak-pihak yang bersengketa, dan budaya dari masyarakatnya.

Masyarakat di Nagari Kapa mengenal 2 (dua) locallm yang diyakini dipercaya dan digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa, pertama adalah locallm non-litigasi (PnLg) atau penyelesaian sengketa/konflik melalui lembaga informal. Paradigma ini dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan "locallm1" dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa, serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa berupa *win-win solution*. Kedua adalah locallm litigasi (PLg) atau mekanisme penyelesaian sengketa/konflik secara formal yaitu pendekatan untuk mendapatkan keadilan melalui perlawanan (*the adversary system*) dan menggunakan paksaan (*covercion*) dalam mengelola sengketa serta menghasilkan *win lose solution*. Penyelesaian semacam ini dilakukan pada institusi Negara

atau pemerintah, seperti Lembaga Kepolisian, Koramil, dan sampai pada Pengadilan Negeri.

a. Penyelesaian Konflik Melalui Hukum Adat (Non Litigasi)

Penyelesaian konflik melalui jalur informal maksudnya konflik diselesaikan dengan cara musyawarah, yakni lebih dulu mengadakan negosiasi atau perundingan antara pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah untuk mendiskusikan penyelesaian konflik guna mencari solusi terbaik pada persoalan yang dihadapi. Apabila konflik belum dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka penyelesaian dilanjutkan dengan cara mengikutsertakan pihak lain atau orang ketiga untuk menjadi penengah/penasehat dalam menyelesaikan konflik yang sering juga disebut sebagai mediasi.

Dalam hal ini suatu rangkaian kejadian dalam suatu struktur tertentu menghadapi pilihan-pilihan, karena setiap masyarakat dimanapun berada pada dasarnya memiliki cara penyelesaian sengketa sendiri dengan bantuan orang-orang yang berada di sekitarnya. Misalnya di Minang pada umumnya dan di Nagari Kapa khususnya yang berwenang menyelesaikan konflik adalah *ninik mamak*. Secara ideal *ninik mamak* dianggap sebagai pemimpin informal yang disegani didalam masyarakat.

Dalam penyelesaian konflik di Minangkabau selalu terlebih dahulu diupayakan dengan jalan musyawarah yang ditangani oleh *ninik mamak* selaku pemimpin formal dalam nagari. Konflik diselesaikan dengan “bajanjang naik batangga turun” artinya mekanisme penyelesaian konflik dalam masyarakat harus dimulai dari jenjang yang paling rendah sampai pada jenjang yang paling tinggi. Mekanisme melalui lembaga adat ini diperkuat dengan surat keputusan Gubernur KDH TK I Sumatera Barat, No. 8 tahun 1994, Bab II, Pasal 2, (dalam Iriani, 2007:80) yang menyatakan:

1. Setiap sengketa yang ada, harus diselesaikan secara jenjang naik, tangga turun, yakni mulai dari lingkungan kaum, suku, dan nagari, (2) Apabila penyelesaian kaum tidak diperoleh, dapat dilanjutkan ke tingkat Kerepatan Adat Nagari atau Lembaga Nagari.

Apabila dikaitkan dengan bunyi surat keputusan tersebut diatas, maka kasus konflik di Nagari Kapa, seharusnya terlebih dahulu diselesaikan di tingkat *mamak kum* (*mamak* kepala waris), apabila *mamak* kepala waris belum dapat menyelesaikan konflik, maka kasus naik pada jenjang yang lebih tinggi yaitu *mamak suku*, apabila *mamak*

sukuy juga belum mampu menyelesaikan sengketa tersebut, maka kasus tersebut dibawa ke Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan persetujuan seluruh ninik mamak yang terlibat dalam penyelesaian konflik. Jika dalam penyelesaian konflik belum mencapai titik temu, maka ditempuh jalur pengadilan.

Pada dasarnya fungsi ninik mamak dalam nagari adalah mengatur anak kemenakan dan menyelesaikan masalah dalam Nagari. Konflik tanah yang terjadi di Nagari Kapa adalah konflik antar anak kemenakan/masyarakat dengan ninik mamak dan konflik antara anak kemenakan/masyarakat dengan pihak perkebunan.

Upaya penyelesaian konflik antara anak kemenakan dengan pihak perkebunan adalah dengan melibatkan ninik mamak, yakni terlebih dahulu anak kemenakan bermusyawarah dengan pihak ninik mamak sebagai mediator. Musyawarah antara anak kemenakan dengan pihak perkebunan akhirnya menemui kesepakatan, yaitu pihak perkebunan bersedia membayar atau berupa ganti rugi kepada anak kemenakan yang tidak kebagian plasma. Pembayaran tersebut berupa uang setiap bulan selama 5 tahun. Setelah ada kesepakatan tersebut, maka konflik berakhir pada level ninik mamak melalui negoisasi dan mediasi.

Berbeda halnya dengan kasus konflik yang terjadi antara anak kemenakan dengan ninik mamak, yaitu kasus memperebutkan tanah ulayat Nagari Kapa seluas 200 ha. Upaya penyelesaian kasus tersebut sudah sampai ke Kerapatan Adat Nagari (KAN), karena pada tingkat ninik mamak penyelesaian kasus tersebut tidak membuahkan hasil, pada akhirnya kasus tersebut dibawa ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan salah satu lembaga adat yang menangani masalah adat dalam nagari.

Pada dasarnya lembaga nagari telah dirancang untuk menangani berbagai macam konflik/sengketa yang terjadi di dalam nagari. Keanggotaan dari Kerapatan Adat Nagari terdiri dari local-unsur: ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, yang masing-masing memimpin kaum atau sukunya. Di Nagari Kapa dikenal ada 13 ninik mamak yang menjadi pemimpin suku, yaitu empat di dalam empat diluar ditambah 5 *andiko* yang dikenal dengan *ninik mamak langgam*. Empat didalam dikenal penani sako yang terdiri atas: (1) rajo local memimpin suku tanjung, (2) Rangkayo Mudo memimping suku Jambak, (3) Jando Lelo memimpin suku Melayu, dan (4) Dt. Tan Ameh Memimpin suku Koto. Empat diluar disebut dengan Penyembah Sako, yang terdiri atas: (1) Rajo Lelo pemimpin suku Melayu, (2) Dt. Tankan Basaran Pemimpin suku Tanjung, (3) Dt. Rajo bungsu pemimpin suku Tanjung, dan (4) Dt. Kayo Basa Pemimpin suku Koto, ditambah dengan lima (5) *andiko*.

Ketika mengadakan perundingan, semua ninik mamak yang telah diuraikan diatas berhak dan wajib hadir untuk membuat keputusan bersama dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam Nagari Kapa. Ketika diadakan perundingan juga dilakukan tawar menawar diantara orang-orang yang terlibat sampai tercapai kata mufakat “sakato” sebagai bentuk penyelesaian secara ideal.

Hal ini berarti secara ideal hasil musyawarah antara para ninik mamak dalam penyelesaian konflik selalu diusahakan berakhir dengan kata sepakat, masing-masing pihak yang berkonflik merasa senang dengan hasil keputusan, dalam artian tidak ada pihak yang merasa dirugikan (*win-win solution*). Seperti ungkapan pepatah “barajo katomufakat, bana kato baito”, artinya harus berdasarkan mufakat yang didasarkan pada kebenaran,. Selain itu ada pepatah lain yang menyatakan :

Bulek aie dek pembuluh bulek kato dek mufakat
Aie batitisan batuang-bana batitisan urang
Bulat air oleh pembuluh bulat kata oleh mufakat
Air titisan betung (bambu) benar titisan orang

Makna pepatah diatas, adalah secara ideal kesepakatan yang bulat inilah yang disebut kebenaran yang umum yang dicari melalui proses rujukan kepada yang lebih tua, bertingkat dan musyawarah. Pada kasus ini konflik dibawa ke ninik mamak kemudian naik ke Lembaga Kerapatan Adat Nagari, namun penyelesaian konflik tidak dapat dicapai. Hal tersebut diasumsikan karena ninik mamak tidak memahami fungsi dan kedudukannya. Selain itu para ninik mamak kurang memahami soal adat Minangkabau khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian konflik dan Undang-Undang tentang pertanahan, dan paling utama adalah hilangnya wibawa para ninik mamak. Hal ini juga sangat bertentangan dengan pepatah minang yang berbunyi :

Rumah nan bamamak adalah mamak yang bertugas untuk menghadapi kusuik nan akan manyalasakan, karuah nan manjaniahkan, mamalihara harato pusako, membimbing anak kemenakan, parik paga dalam nagari, maliharo adat jolimbago

Artinya:

Mamak rumah dalam keluarga luas (ninik mamak) adalah bertugas meluruskan dan menjemihkan setiap masalah dalam keluarga dan menjaga harta pusaka, membimbing anak kemenakan, menjadi pagar dalam nagari dan selalu memelihara dan mematuhi adat istiadat (Hasan Basri, dikutip oleh Iriani (2007:81)

Pepatah tersebut di atas masih dipegang oleh orang Minangkabau walaupun telah terjadi beberapa perubahan. Konflik tanah

tidak semua dapat diselesaikan melalui lembaga adat, misalnya kasus perebutan tanah antara anak kemenakan dengan ninik mamak di Nagari Kapa belum mampu diselesaikan pada Lembaga Adat yang merupakan lembaga yang dianggap mampu menyelesaikan konflik secara musyawarah pada zaman dahulu.

Tidak adanya kesepakatan antara ninik mamak dan anak kemenakan dalam penyelesaian konflik di tanah Nagari Kapa menunjukkan, bahwa ninik mamak atau lembaga adat tidak berperan lagi dalam menyelesaikan konflik di Nagari Kapa. Padahal menurut Narihisa (dalam Iriani, 2007: 88), masyarakat di Minangkabau secara umum memiliki cara penyelesaian konflik yaitu dengan jalan musyawarah mufakat. Secara ideal proses pembuatan keputusan secara adat merupakan jalan terdekat dan terpasti dalam menyelesaikan konflik tanah yang akan menghasilkan *win-win solution*. Namun pada kenyataannya di Nagari Kapa ada berbagai macam cara yang ditempuh oleh pihak-pihak yang sedang ber konflik untuk menyelesaikan masalahnya. Misalnya dengan menggunakan aparat keamanan seperti kasus Bahar dan anak kemenakan. Hal ini mengindikasikan, bahwa ninik mamak di Nagari Kapa tidak mampu memberikan konsep penyelesaian konflik yang loci diterima oleh semua pihak.

Harun (dalam Iriani, 2007:27) menyatakan, bahwa semakin meningkatnya intensitas konflik tanah di Minangkabau akhir-akhir ini, mengakibatkan tidak semua konflik dapat diselesaikan oleh lembaga adat. Akibatnya kasus-kasus tanah sebagian di teruskan ke Lembaga Hukum Negara, seperti ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan sampai ke Mahkamah Agung. Kemudian Putra (dalam Iriani, 2007: 26) menyatakan, bahwa ada berbagai macam cara penyelesaian perkara di Minangkabau, yakni bukan hanya dilakukan oleh satu lembaga, melainkan ada beberapa lembaga seperti : Lembaga Kerapatan Adat Nagari, penghulu atau *ninik mamak (tungan⁵ rumah)* polisi, dan kepala desa.

Uraian di atas menunjukkan, bahwa bukan hanya lembaga adat yang dipilih guna menyelesaikan konflik tanah di Nagari Kapa, tetapi juga lembaga pemerintahan/Negara. Hal ini berarti adat sejalan dengan lembaga Negara dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau. Realitas ini mengacu pada realitas locia yang kompleks dalam suatu jaringan hubungan sosial.

Hal ini dapat dilihat bahwa jalan keluar yang diambil tidak hanya dilandasi oleh suatu pemikiran dari norma tertentu saja, melainkan juga dilandasi oleh beberapa macam norma yang temyata

⁵Tunganai adalah penghulu atau pemimpin dalam keluarga luas (*extended Family*) matrilineal yang diperoleh oleh seseorang laki-laki tertua berdasarkan keturunan.

dapat mendorongnya menjadi kekuatan dari segala perilaku seseorang. Begitu banyak yang berperan dalam Nagari Kapa, sehingga dalam tindakan tertentu dan situasi tertentu akan mempengaruhi dan bahkan tumpang tindih sesuai dengan kondisi sosial yang berlangsung.

b. Mekanisme Penyelesaian Secara Normal

Disamping lembaga adat, negara juga dianggap dan dijadikan sebagai mekanisme penyelesaian konflik di Nagari Kapa. Apabila suatu permasalahan tidak mampu diselesaikan oleh lembaga adat, maka masalah tersebut dibawa ke lembaga negara, seperti kasus perebutan tanah antara anak kemenakan dan ninik mamak. Kasus tersebut mengindikasikan bahwa lembaga negara sangat berperan dalam menyelesaikan konflik antara anak kemenakan dan ninik mamak. Pada kasus perebutan tanah tersebut, ninik mamak tidak sanggup lagi menghasilkan kata sepakat dalam penyelesaian konflik. Bahkan ninik mamak yang secara ideal sebagai orang yang duduk dalam lembaga adat untuk menyelesaikan segala permasalahan, malah menggunakan lembaga Negara/aparat Negara untuk menyelesaikan konflik. Ninik mamak menggunakan aparat (polisi dan tentara) untuk menangkap orang-orang yang dianggap menentang keinginannya. Bahkan orang-orang yang ditangkap dijebloskan ke dalam penjara. Bahkan ada yang dipukul hingga dirawat di Rumah Sakit Lubuk Sikaping.

Hal ini sangat terkait dengan konsep yang dikemukakan oleh Ury (dalam Sulistiyono, 2007 : 163) bahwa ada tiga hal yang mempengaruhi seseorang dalam penyelesaian sengketa /konflik, yaitu kepentingan (*interest*), hak-hak (*right*), dan status kekuasaan (*power*). Ketiga hal tersebut secara hierarki digunakan dalam proses penyelesaian konflik, namun dari ketiga hal tersebut yang paling dominan dalam penyelesaian konflik adalah kekuasaan yang berada di atas hak-hak dan kepentingan. Sama halnya dengan kasus di Nagari Kapa, dimana ninik mamak sebagai penguasa dalam nagari menggunakan kekuasaannya untuk lebih mudah mengakses lembaga Negara (aparat polisi dan tentara) untuk menangkap semua orang-orang/ anak kemenakan yang dianggap menghalangi kepentingannya. Berkaitan dengan pilihan tersebut, maka dengan demikian secara tegas ninik mamak memilih menggunakan pranata lembaga negara dan tidak menggunakan lembaga adat. Menurut Friedman (dalam Sulistyowati, 2005 :153) menyatakan, bahwa pergi tidaknya seseorang ke pengadilan akan tergantung pada perhitungan untung rugi atau kepentingan yang disebut sebagai *sub-legal culture*.

Pada saat polisi/aparat keamanan masuk ke Nagari Kapa, mereka bukan menyelesaikan konflik, malahan semakin memperparah konflik. Akhirnya para ibu-ibu merasa terintimidasi oleh aparat kepolisian dan

segera menyampaikan keluhannya ke DPRD Pasaman, agar persoalan di Nagari Kapa segera diselesaikan. Namun hal itu tidak dihiraukan oleh pihak pemerintah. Hal ini sangat terkait dengan ketidakmampuan institusi peradilan adat dalam menyelesaikan konflik tersebut, sehingga anak kemenakan dalam hal ini ibu-ibu terpaksa bersentuhan dengan peradilan negara.

Anak kemenakan yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara pada kasus perebutan lahan antara anak kemenakan dan ninik mamak, merupakan permintaan ninik mamak kepada aparat keamanan. Perlakuan tersebut tidak diterima oleh masyarakat Nagari Kapa dan meminta supaya anak nagari yang ditangkap segera dikeluarkan dari kantor polisi. Namun ada syarat yang harus dipenuhi oleh pihak anak kemenakan, yakni apabila anak kemenakan tersebut ingin dikeluarkan, ia harus membayar uang jaminan sebesar Rp. 500.000/orang kepada pihak kepolisian. Demi membebaskan anak nagari dari tahanan polisi, maka masyarakat menyanggupi permintaan dari pihak kepolisian. Akhirnya kedua anak nagari yang ditangkap dan ditahan oleh pihak Kapolres Simpang Empat dapat dibebaskan.

Cuplikan kasus tersebut menunjukkan bagaimana anak kemenakan “bersentuhan” dengan institusi Negara secara terbatas, yaitu dalam keadaan terpaksa. Bagaimana terbatasnya jangkauan anak kemenakan kepada lembaga negara yaitu hanya dalam keadaan terpaksa.

Kondisi keterpaksaan tersebut terungkap lagi ketika kedua anak kemenakan dibebaskan dari kantor polisi, kemudian dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan menggunakan pendamping dari LBH Padang yang bertindak sebagai mediator. Kedua anak tersebut (Yurisman dan Alisman) dituduh telah menghancurkan kantor Polsek Pasaman dan hasil keputusan dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada bulan Agustus 2000, Yurisman dan Alisman diputuskan bersalah dan dihukum masing-masing 3 (tiga) bulan 15 Hari.

Setelah perkara pidana telah diputuskan, anak nagari melanjutkan proses pengembalian tanah ulayat nagari seluas 200 ha dan juga tanah yang telah diberikan kepada pihak perkebunan. Walaupun kasus pengembalian tanah tersebut belum selesai, akan tetapi anak nagari telah berhasil menguasai dan mengolah lahan seluas 200 ha.

Upaya pengembalian tanah ulayat nagari, anak kemenakan melibatkan LBH sebagai mediator di Lembaga Kepolisian dan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Upaya tersebut sampai saat ini belum berhasil, saat belum ada kata sepakat dari ninik mamak, yakni ada sebagian ninik mamak yang tetap menginginkan ada kebun plasma, sementara ada ninik mamak yang menginginkan semua tanah ulayat di kembalikan ke Nagari Kapa, termasuk perkebunan yang digunakan oleh

pengusaha, apabila telah habis masa kontraknya dikembalikan ke nagari sebagai tanah ulayat Nagari Kapa.

Menurut Emerzon (dalam Iriani, 2007 : 20), cara penyelesaian tersebut diatas merupakan cara penyelesaian melalui jalur formal atau lembaga-lembaga Negara yang diberi kewenangan untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan konflik. Proses penyelesaian konflik diselesaikan melalui peradilan tingkat pertama, bila menyangkut pidana lebih dulu diselesaikan oleh polisi, kemudian dilanjutkan pada pengadilan pertama seperti Pengadilan Negeri yang berada atau berkedudukan di Tingkat Kabupaten yang mana wilayah hukumnya meliputi wilayah kabupaten dan Pengadilan Tinggi merupakan tingkat banding, kemudian berpuncak pada Mahkamah Agung.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Konflik pertanahan dari masa kini merupakan persoalan yang tidak pernah tuntas. Berbagai fenomena konflik sosial yang bersumber dari sengketa tanah tampaknya terus berlangsung meskipun rezim pemerintahan silih berganti. Demikian pula halnya dengan konflik sosial di Sumatera Barat, yang sering bersumber pada sengketa yang menyangkut keberadaan tanah ulayat. Kepemilikan tanah ulayat dalam konsep kultural Minangkabau memiliki peranan penting, baik sebagai cadangan untuk anak keturunan mereka sekaligus sebagai lambang martabat kaum atau individu dalam tantangan sosial kemasyarakatan.

Konflik pertanahan tetap berlangsung sejalan dengan dikeluarkannya kebijakan menyangkut kepemilikan oleh rezim yang sedang berkuasa. Sebagai contoh pada masa penjajahan Belanda dengan dikeluarkannya adanya UU Agraria pada tahun 1870 yang mengizinkan pengusaha swasta diperbolehkan untuk mendapatkan hak guna usaha (*erpacht*), hal ini tentu saja berpengaruh pada struktur kepemilikan tanah masyarakat pribumi. Untuk daerah Sumatera Barat dengan dikeluarkannya *Domen Verklaring* Sumatera pada tahun 1874, merupakan strategi pemerintah untuk melakukan klaim terhadap kepemilikan tanah ulayat milik anggota masyarakat nagari sebagai *property right* yang syah dari komunitas adat mereka, yakni dengan menyebut tanah yang tidak memiliki hak kepemilikan (*eigendom*) dianggap milik Negara. Hal ini tentunya bertentangan dengan norma adat dan kenyataan sosial di Minangkabau, bahwa semua tanah ulayat adalah milik nagari.

Kemudian setelah Indonesia merdeka persoalan sengketa tanah tidak berarti surut dengan sendirinya dalam arti mengalami perbaikan dalam hal proses penyelesaiannya. Kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, yang

mengatur tentang tata kelola dan kepemilikan tanah di Indonesia, belum juga mengatasi persoalan sengketa agraris. Ketika rezim Orde Baru berkuasa, justru konflik pertanahan di tanah air semakin meningkat. Atas nama kebijakan pembangunan pemerintah Orde Baru berusaha menarik kelompok pemodal untuk menanamkan investasinya di tanah air.

Sektor pertambangan dan kehutanan merupakan bidang yang banyak diminati oleh kelompok investor. Ketika pendapatan negara dari minyak bumi mengalami penurunan, maka agro pertanian menjadi pilihan kebijakan pemerintah Orde Baru untuk menarik investasi dari kaum pemodal, baik investor nasional maupun asing. Sehingga pada fase ini, terutama tahun 1980-an sampai tahun 1990-an banyak kawasan hutan di tanah air yang beralih fungsi menjadi perkebunan sawit.

Berbeda dengan sengketa pertanahan di daerah Minangkabau pada umumnya. Konflik pertanahan di daerah Pasaman, selain disebabkan adanya konversi tanah, juga sengketa akibat adanya kelompok pendatang dari luar Minangkabau seperti orang Mandailing dan transmigran Jawa. Menyangkut konflik tanah di Nagari Kapa yang terjadi pada tahun 1990-an keatas, selain tidak terlepas dari adanya kebijakan pemerintah, juga mulai hilangnya kepercayaan kepada otoritas kepemimpinan tradisional (nirik mamak).

Konflik berawal ketika pemerintah daerah setempat pada tahun 1980-an yang ingin menjadikan kawasan ini sebagai kawasan perkebunan. Akan tetapi sebelumnya daerah ini diproyeksikan oleh pemerintah untuk percetakan sawah baru dengan irigasi dari Batang Tongar. Proyek ini gagal sehingga lahan tersebut di alih fungsikan menjadi lahan perkebunan. Proses pengambil alihan kepemilikan tanah dari masyarakat di Nagari Kapa terwujud setelah pada tanggal 23 Januari 1980 dibuatkanlah surat keputusan bersama yang di tanda tangani oleh beberapa ninik mamak Nagari Kapa. Dimana dalam satu butir kesepakatan dari surat keputusan bersama tersebut, antara lain menyatakan bahwa areal tanah ulayat sesuai dengan kesepakatan *pucuk ada ninik mamak* Nagari Kapa serta mendapat persetujuan dari *Daulat Parit Batu* berserta *Hakim Parit Batu*, membolehkan pihak investor untuk menanamkan modalnya di wilayah ini. Berawal dari kesepakatan inilah, perlahan-lahan tanah di Nagari Kapa berpindah tangan melalui mediasi ninik mamak. Sehingga hal itu pada akhirnya menyebabkan anak kemenakan serta masyarakat Nagari Kapa resah yang akhirnya bermuara kearah terjadinya konflik diantara mereka.

Konflik pertanahan yang terjadi di Nagari Kapa pada periode ini disebabkan oleh beberapa faktor, serta penyerahan tanah ulayat kepada pihak perkebunan dan penjualan tanah kepada para pendatang serta penyalahgunaan otoritas ninik mamak. Jenis-jenis konflik yang muncul

konflik didaerah ini antara lain konflik antara anak kemenakan (masyarakat) dengan pihak perkebunan.

Konflik yang terjadi antara anak kemenakan dengan pihak perkebunan berawal dari adanya janji dari pihak perkebunan pada saat tanah ulayat nagari tersebut diserahkan oleh ninik mamak kepada pihak perkebunan, bahwa akan membagi dua perkebunan tersebut, yakni perkebunan inti dan plasma. Kemudian konflik antara anak kemenakan (masyarakat) dengan ninik mamak.

Sebagaimana disebutkan dalam adat Minangkabau bahwa tanah ulayat tidak dapat diperjualbelikan. Akan tetapi seiring dengan pengaruh modernisasi dan pergeseran nilai dalam masyarakat, ditambah dari upaya dari pihak pemerintah yang ikut terlibat dalam proses kebijakan pertanahan di daerah ini. Munculnya fenomena ini tidak terlepas dari pergeseran orientasi perekonomian masyarakat dari semula ekonomi subsistensi ke ekonomi perkebunan. Hal ini dilihat di Nagari Kapa pada tahun 1980. Pada tahun ini di Nagari Kapa sudah terjadi penjualan tanah ulayat nagari yang dilakukan oleh para ninik mamak kepada para pendatang/pengusaha dari luar Nagari Kapa.

Konflik selanjutnya yakni melibatkan antara masyarakat Nagari Kapa dan aparat keamanan (Kepolisian). Konflik yang semula terjadi antar ninik mamak dengan anak kemenakan yang kemudian melibatkan pihak kepolisian, yang pada akhirnya berubah menjadi konflik antara masyarakat dengan aparat kepolisian. Konflik tersebut sudah mulai sejak tahun 1980, yakni ninik mamak menggunakan aparat keamanan (Koranmil dan Kapolsek Pasaman) untuk mengamankan anak kemenakan atau siapapun di Nagari Kapa yang dianggap menentang keinginannya dalam hal penyerahan dan penjualan tanah ulayat nagari. Dan puncaknya pada tanggal 29 April 2000, ketika aparat kepolisian terlibat konflik dengan masyarakat Nagari Kapa seperti tindakan mendatangi masyarakat Nagari Kapa serta melakukan sweeping.

Dalam konteks pertanahan di Nagari Kapa, mekanisme dan solusi konflik dilakukan dengan beberapa cara. Ada 2 (dua) cara yang dipercaya dan digunakan oleh masyarakat disini untuk menyelesaikan sengketa, pertama adalah penyelesaian sengketa/konflik melalui lembaga informal adat, dan kedua adalah mekanisme penyelesaian sengketa/konflik secara formal lembaga peradilan negara.

Penyelesaian konflik melalui lembaga informal adat, konflik diselesaikan dengan cara musyawarah, yakni lebih dulu mengadakan negoisasi atau perundingan antara pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga. Apabila konflik belum dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka penyelesaian dilanjutkan dilanjutkan dengan cara mengikutsertakan pihak lain atau orang ketiga

untuk menjadi penengah/penasehat dalam menyelesaikan konflik yang sering juga disebut sebagai mediasi.

Dalam penyelesaian konflik di Nagari Kapa selalu terlebih dahulu diupayakan dengan jalan musyawarah yang ditangani oleh ninik mamak selaku pemimpin formal dalam nagari. Konflik diselesaikan dengan berpegang norma adat Minangkabau “Bajanjang naik batangga turun” artinya mekanisme penyelesaian konflik dalam masyarakat harus dimulai dari jenjang yang paling rendah sampai pada jenjang yang paling tinggi.

Selanjutnya adalah upaya penyelesaian konflik melalui mekanisme penyelesaian secara Formal (Litigasi), maksudnya apabila suatu permasalahan tidak mampu diselesaikan oleh lembaga adat, maka masalah tersebut akan di bawa ke peradilan Negara. Artinya bukan hanya lembaga adat saja yang dapat menyelesaikan konflik, tetapi lembaga pemerintah/Negara. Hal ini berarti adat sejalan dengan lembaga Negara dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau. Realitas ini mengacu pada realitas yang kompleks dalam suatu jaringan hubungan sosial.

2. Saran

Bercermin dari realitas konflik yang terjadi di Nagari Kapa, serta melihat akar konflik seperti beberapa hal yang menyebabkan munculnya konflik serta mekanisme dan resolusi konflik yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dalam konteks memahami serta mencari solusi terbaik penyelesaian perlu memahami adanya perspektif kemajemukan dalam memandang konflik yang sedang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan sosial budaya berjalan seimbang dalam mengupayakan setiap penyelesaian konflik, baik menyangkut konflik pertanahan, maupun konflik sosial lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, *The Nagari Community, Business and The State*, Bogor : Sawit Watch and Forest People Programme, 2007.
- , *Sosiologi Konflik Agraria, Protes – Protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, Padang: Unand Press, 2006.
- Apriyanto, *Tri Candra, Tafsir(an) Land Reform Dalam Alur Sejarah Indonesia, Tinjauan Kritis Atas Tafsir(an) yang ada*, Yogyakarta: Karsa, 2006.
- Azwar, *Eksistensi Tanah Ulayat Kaum dan Dinamika Relasi Sosial Masyarakat Minangkabau di Wilayah Perkotaan*, Padang : Labor Sosiologi Unand, 2005.
- Biezeveld, Renske, “Nagari, Negara dan Tanah Komunal di Sumatera Barat” dalam Frans vob Benda Beckmann (ed), *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Bigalke, Terry, “The Oral History Methode” dalam *Sejarah Lisan*, Jakarta: Lembaran Berita ARNAS RI, No. 9 Oktober 1982.
- Bulletin Suara Rakyat, PadangL LBH Padang, No. 4 Januari-Maret 2006.
- Drajat, Salaman, *Mencuatnya Kasus Sengketa Tanah* dalam <http://sinarharapan.co.id>
- Graves, Elizabeth E, *Asal – Usul Elite Minangkabau Modern, Respon Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*, Mestika Zed (ed) Jakarta: YOI, 2007.
- Husni Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- <http://www.google.com/rantau-net>, : “Kronologis Kasus Kapar Tempat Pak Yulisman, 29 Agustus 2001.
- Ihromi, T.O, *Antropologi Sebagai Bunga Rampai*, Jakarta: YOI, 1993
- Iriani, 2007, Mekanisme Penyelesaian Konflik Tanah di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Nagari Tarung – Tarung Kec. Rao, Kab. Pasaman, Prop. Sumatera Barat, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Irianto, Sulisyowati, 2005, *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum, Yayasan Obor Indonesia*, Jakarta.
- Kartodirdjo, Sartono, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.

- Koentjaraningrat, “Metode Penggunaan Pengalam Individu” dalam *Metode– Metode Penelitian Masyarakat*, Koentjaraningrat (ed), Jakarta:Gramedia, 1986.
- Navis, A.A, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafiti Pers, 1986.
- Maulana, Altas, 2006, *Konflik Tanah Perkebunan PT. Anam Kota di Nagari Aia Gadang Kec. Pasaman, Kab. Pasaman 1990 – 2001*, Skripsi tidak diterbitkan pada jurusan Ilmu Sastra Fakultas Sastra Universitas Andalas, Padang.
- Syahmunir, *Eksistensi Tanah Ulayat Dalam Perundang – Undangan di Indonesia*, Padang: PPIM, 2004.
- Sumardjono, Maria SW dkk, *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Undri, *Konflik Tanah di Daerah Perbatasan: 1930 – 1960 (Studi Kasus Konflik Tanah Tiga Etnik Dalam Memperebutkan Tanah di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat)*, Laporan penelitian kerjasama PMB LIPI dan NIOD, Padang, 2006.
- Von Benda – Beckmann, Frans, *Properti dan Kesenambungan Sosial*, Jakarta: Grasindo. 2000.
- Von Benda – Beckmann, Kebeet, *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat, Peradilan Nagari dan Pengadilan Negeri di Minangkabau*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Warman, Kurnia, *Ganggam Bauntuk Menjadi Hak Milik*, Padang: Unand Press, 2006.
- Zed, Mestika dkk, *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945 – 1995*, Jakarta : Sinar Harapan, 1998.

DINAMIKA ORANG JAWA DI NAGARI SITIUNG 1974 – 2009¹

Efrianto A²

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sitiung merupakan salah satu nama nagari dan nama kecamatan di Kabupaten Dharmasraya. Pada awalnya Sitiung merupakan bagian dari Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, sebelum menjadi kecamatan defenitif, pada tahun 1996 Sitiung merupakan sebuah kecamatan pembantu dari Kecamatan Pulau Punjung. Saat itu, Kecamatan Sitiung terdiri dari 17 Desa dan 72 dusun.³ Ketika wacana pembentukan Kabupaten Dharmasraya bergulir dan terbentuk pada tanggal 7 Januari 2004, Sitiung tergabung dalam Kabupaten Dharmasraya.

Kabupaten Dharmasraya merupakan kawasan yang banyak didiami oleh transmigran dari berbagai daerah di Jawa dan Sumatera atau transmigran lokal dari beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang ditransmigrasikan ke kawasan ini akibat pemukiman mereka dimasa lalu terkena bencana seperti korban gempa bumi dan longsor Malalak dll.⁴ Kedatangan migran ke Dharmasraya bertujuan untuk memanfaatkan lahan tidur yang terhampar luas di kabupaten ini dan mendukung tumbuhnya perekonomian di kawasan tersebut. Proses migrasi penduduk ke Dharmasraya mulai terjadi semenjak tahun 1954,⁵ kedatangan transmigran menyebabkan komposisi penduduk di Dharmasraya mengalami perubahan dari homogen menjadi heterogen. Sensus penduduk tahun 2008 menyebutkan hampir 32% (tiga puluh dua persen) penduduk Dharmasraya berasal dari Pulau Jawa.⁶

¹ Artikel ini merupakan gagasan ulang dari Laporan Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2011.

² Peneliti Muda pada BPSNT Padang

³ Nazar Syamsu " Pelaksanaan Pemberian Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Perumahan dan Lahan pertanian di Kecamatan Sitiung Kabupaten Sawahlunto Sijunjung" *Skripsi*. Padang: Fakultas Hukum Unand, 2000

⁴ Antara " Menteri Kehutanan memberi izin penggunaan lahan untuk areal Transmigrasi" diambil dari www.antara.com pada tanggal 20 April 2011

⁵ M. Amral Samsu *Dari Kolonisasi ke transmigrasi* Jakarta : Jembatan tahun 1960, hlm 62

⁶ *Ibid* hal. 69 tentang penduduk Dharmasraya berdasarkan suku bangsa dari 180.915 Jiwa penduduk Dharmasraya pada tahun 2008, 113.832 dari suku bangsa Minang, 59.620 Jiwa suku bangsa Jawa, 2.701 suku bangsa Sunda, 1.591 Jiwa suku bangsa Batak, 746 Jiwa suku bangsa Melayu Jambi, 566 Jiwa suku bangsa Melayu dan 1.860 Jiwa suku bangsa lain-lain.

Sitiung menjadi terkenal ketika pemerintah melalui Departemen Transmigrasi pada tahun 1976 harus memindahkan penduduk dari Wonogiri ke Sumatera Barat karena pembangunan waduk Gajah Mungkur. Program pemindahan penduduk Wonogiri ke Sumatera Barat dinamakan dengan Sitiung. Sehingga nama Sitiung menjadi perluasan makna dari nama sebuah nagari menjadi nama program pemerintah yang jauh lebih luas dibandingkan dengan luas nagari Sitiung.

Sejarah perpindahan penduduk (migrasi) di Indonesia terkait erat dengan perluasan ekonomi kapitalistik Barat. Perluasan ekonomi tersebut dijalankan oleh para pemilik modal swasta melalui perluasan dan pembukaan perkebunan, industri dan pertambangan, baik di Pulau Jawa, Pulau Sumatera maupun Pulau Kalimantan. Berbagai perkebunan maupun industri yang diperluas maupun sedang dibuka, membutuhkan tenaga kerja dari berbagai wilayah yang jumlahnya banyak, baik tenaga kerja laki-laki maupun wanita.⁷

Perkembangan selanjutnya memperlihatkan bahwa migrasi merupakan pilihan yang terus dilakukan dan dipertahankan oleh pemerintah Indonesia dengan menggunakan berbagai alasan. Sejak tahun 1948 Pemerintah Republik Indonesia membentuk panitia untuk mempelajari program serta pelaksanaan transmigrasi yang diketuai oleh A. H. D. Tambunan. Bulan Desember 1950 merupakan awal mula Pemberangkatan transmigran di jaman kemerdekaan ke Sumatera Selatan.⁸ Program transmigrasi merupakan awal dari perpindahan besar-besaran orang dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa, kondisi ini menyebabkan hampir seluruh daerah di Pulau Sumatera didiami oleh orang Jawa, termasuk Sumatera Barat.

Pada zaman orde baru, tujuan utama transmigrasi tidak semata-mata memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke luar Jawa, namun untuk menyukseskan program swasembada pangan. Pada periode ini dikenal dua kategori transmigrasi umum dan transmigrasi spontan. Pada transmigrasi spontan pemerintah hanya mengorganisir perjalanan dari daerah asal ke tempat tujuan, semua biaya yang timbul dalam program pemindahan tersebut ditanggung peserta. Sementara transmigrasi swadaya, semua ongkos ditanggung pemerintah, mulai dari biaya pemberangkatan dan biaya hidup 12 bulan pertama di tanggung pemerintah. Seluruh transmigran mendapatkan tanah seluas dua hektar, rumah, dan alat-alat pertanian.⁹

⁷ Lucia Yuningsih, Migrasi tahun 1870 – 1942 : Kajian Migrasi Wanita Pribumi antar Wilayah di Pulau Jawa, *Makalah* tahun 2008

⁸ Nugraha Setiawan “ Sejarah Satu Abad Transmigrasi di Indonesia” Bandung : Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Padjajaran Bandung, 2007

⁹ *Ibid*

Nagari Sitiung merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang dijadikan tempat bermukimnya transmigran. Transmigran yang dipindahkan ke Sitiung ini umumnya adalah masyarakat yang dipindahkan akibat pembangunan Waduk Gajah Mungkur.¹⁰ Waduk Gajah Mungkur dibangun tahun 1976 sampai dengan tahun 1981. Dalam pembangunan waduk tersebut pemerintah membebaskan lahan seluas 90 km² yang terdiri dari 51 desa di 7 Kecamatan. Pengerjaan pembangunan Waduk Gajah Mungkur dilakukan secara swakelola dengan bantuan konsultan dari Nippon Koei Co, Ltd Jepang.¹¹ Pada saat pembebasan daerah genangan ini mengorbankan 12.525 kepala keluarga (KK) terdiri dari + 68.750 jiwa yang secara sukarela melakukan transmigrasi.¹²

Nagari Sitiung merupakan nagari pertama yang dijadikan lokasi penempatan transmigran dari Wonogiri. Dalam perkembangan selanjutnya kehidupan masyarakat Jawa di Sitiung jauh lebih lambat dibandingkan dengan masyarakat transmigrasi di nagari-nagari sekitar Sitiung. Hal ini dibuktikan dengan bentuk rumah dan fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat Jawa di Nagari Sitiung dan pola kehidupan masyarakat Sitiung yang masih mempertahankan tradisi di Jawa.

2. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Fokus tulisan ini melihat proses perpindahan orang Jawa ke Nagari Sitiung dimulai dari proses kedatangan transmigran dan kehidupan transmigran di Nagari Sitiung. Untuk menjawab permasalahan di atas maka tulisan ini akan menjawab beberapa pertanyaan berikut.

- a. Kapanakah transmigrasi di Nagari Sitiung?
- b. Siapakah yang ditransmigrasi ke Nagari Sitiung?
- c. Mengapakah mereka ditransmigrasi ke Nagari Sitiung?
- d. Bagaimanakah proses kedatangan transmigran ke Nagari Sitiung?
- e. Bagaimanakah kehidupan transmigran di Nagari Sitiung?

Batasan temporal dalam penelitian ini, diawali dari tahun 1974, saat keluarnya Keputusan Presiden No 29 tahun 1975 tentang pemindahan orang Wonogiri akibat pembangunan waduk Gajah

¹⁰ Mas Tris " Waduk Gajah Mungkur" diambil dari www.wonogiri.go.id pada tanggal 27 Januari 2011.

¹¹ <http://giy4n.blogspot.com/2010/01/waduk-gajah-mungkur-diantara-dua-musim.html>

¹² *Ibid*

Mungkur.¹³ Pembangunan waduk Gajah Mungkur harus menenggelamkan 51 desa di tujuh (7) kecamatan yang dihuni sekitar 12.157 kepala keluarga. Mereka secara sukarela mengikuti Program Bedhol Desa dengan bertransmigrasi ke berbagai daerah di Sumatera. Umumnya warga Wonogiri yang ikut transmigrasi ditempatkan di Propinsi Sumatera Barat (Sitiung, Jujuhan), di Propinsi Jambi (Rimbo Bujang, Alai Ilir, Pemenang). Di Propinsi Bengkulu (Air Lais, Sebelat, Ketahun, Ipuh) sedangkan di Propinsi Sumatera Selatan (Baturaja).¹⁴

Pada tahun 2009 dijadikan batasan akhir dari penelitian ini karena berakhirnya pemerintahan Marlon dan Tugimin sebagai bupati dan wakil bupati, sebab Tugimin adalah lambang keberhasilan kaum transmigran. Batas spasial penelitian ini adalah Nagari Sitiung karena Nagari Sitiung merupakan daerah pertama yang dihuni oleh transmigrasi dari Wonogiri. Diharapkan dengan menjadikan Nagari Sitiung sebagai fokus penelitian akan menjawab pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini.

3. Tujuan dan Manfaat

Tulisan ini bertujuan menjelaskan tentang proses transmigrasi orang Jawa ke Nagari Sitiung dan kehidupan mereka dikawasan baru. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang masyarakat yang menjadi transmigran ke Nagari Sitiung, motivasi mereka menjadi transmigran, proses kepindahan ke Nagari Sitiung, dan mengungkapkan kehidupan migran di daerah baru.

Tulisan ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat tentang bagaimana proses kepindahan orang Jawa ke Nagari Sitiung dan proses mereka menjalani kehidupan dari awal hingga saat ini. Di samping itu tulisan ini bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam memahami kondisi para transmigran yang terdapat di wilayah mereka. Sehingga bisa mengeluarkan kebijakan untuk mempercepat kemajuan dan mengatasi persoalan yang timbul akibat kedatangan transmigran.

¹³ Imawati "Sikap Penuturan Orang Jawa di Sitiung" Makalah Padang : Universitas Bung Hatta, 2007

¹⁴ <http://www.kabarimut.co.cc/2009/10/bedhol-desa-demi-pembangunan-waduk.html>

4. Tinjauan Pustaka

Tulisan yang membahas tentang transmigrasi di Sumatera Barat telah banyak dilakukan oleh peneliti. Karya Eny May “Transmigrasi dan Pengentasan Kemiskinan : Sejarah Program Transmigrasi di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat tahun 1941–1999”¹⁵. M Fatchurrahman, Lindayanti, Samuel Gunawan “Dari Gelandangan Menjadi Buruh Kebun, Studi Tentang Sosio Ekonomi Transmigran Asal Jakarta di Desa Kota Gadang Jaya Kinali Pasaman” mengungkapkan pola kehidupan dan perilaku yang dilakukan oleh transmigrasi dari Kinali yang ternyata berasal dari kaum gelandangan di Jakarta¹⁶. Seno dan Yondri tentang “ Transmigrasi di Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan” Tulisan ini membahas tentang pola akulturasi para transmigrasi di daerah Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan¹⁷. Tulisan–tulisan di atas lebih banyak mengungkapkan tentang upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan melalui program transmigrasi dan bagaimana kehidupan para transmigran di daerah barunya.

Di samping itu ada peneliti yang fokus membahas tentang kehidupan masyarakat transmigran di Kecamatan Sitiung. Dalam Dedi Asri “ Transmigrasi : Proses Interaksi Sosial di UPT Sitiung II 1979–1990. Membahas tentang bagaimana proses interaksi yang terjadi di Unit Penempatan Transmigrasi Sitiung II.”¹⁸ Setyaningsih menulis “Dampak Perubahan Pola Pertanian terhadap kehidupan Masyarakat Desa Padang Bintungan Kecamatan Pulau Punjung”.¹⁹ Minyarso dalam tulisannya menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap partisipasi masyarakat dalam program Pengembangan Pembangunan Kecamatan Situang, Nagari Situng Kabupaten

¹⁵ Eny May “Transmigrasi dan Pengentasan Kemiskinan : Analisa Sejarah Program Transmigrasi di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat tahun 1941 – 1999” Tesis Padang : Pascasarjana Unand. Tahun 2000

¹⁶ M Fatchurrahman, dkk “Dari Gelandangan Menjadi Buruh Kebun, Studi Tentang Sosio Ekonomi Transmigran Asal Jakarta di Desa Kota Gadang Jaya Kinali Pasaman” *Laporan Penelitian* diambil dari Portal Penelitian Universitas Andalas <http://lp.unand.ac.id>, pada tanggal 16 Desember 2009

¹⁷ Seno & Yondri *Transmigrasi di Lunang Silaut* Padang : Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, tahun 2007

¹⁸ Dedi Asri “Transmigrasi : Proses Interaksi Sosial di UPT Sitiung II 1979 – 1990” *Skripsi* Padang : Fak Sastra Unand, 1995

¹⁹ Setyaningsih “Dampak Perubahan Pola Pertanian terhadap kehidupan Masyarakat Desa Padang Bintungan Kecamatan Pulau Punjung” *Skripsi* Padang : Fak. Sastra Unand Tahun 2003

Dharmasraya.²⁰ Karya di atas lebih banyak membahas tentang bagaimana proses interaksi para transmigran di kawasan baru dan perubahan pola pertanian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ketika kawasan tadah hujan menjadi sebuah kawasan irigasi.

Penelitian terbaru tentang kehidupan transmigran di Kabupaten Dharmasraya dilakukan oleh Hesti Wiratmi yang menulis tentang *Dinamika Kehidupan Sosial Ekonomi Transmigrasi di Jorong Sungai Atang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dari tahun 1977 – 2007*. Pokok tulisan yang dibahas adalah bagaimana kehidupan para transmigran ketika mereka telah sampai di Sungai Atang dan bagaimana perjalanan program bantuan yang diberikan pemerintah terhadap para transmigrasi.²¹

Penelitian dan pengkajian yang akan dilakukan jauh berbeda dengan pengkajian dan penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih fokus membahas tentang bagaimana proses kedatangan migran dari Jawa dan bagaimana kehidupan para migran setelah mendiami kawasan baru.

5. Kerangka Analisis

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke wilayah atau pulau lain yang penduduknya masih sedikit, namun masih dalam satu negara.²² Transmigrasi di Indonesia muncul karena dua sebab pertama karena kebijakan pemerintah dan keinginan dari migran sendiri untuk pindah ke daerah baru. Transmigrasi kebijakan pemerintah biasanya diawali dengan keluarnya surat keputusan pemerintah yang mengajak masyarakat yang berminat untuk pindah ke daerah baru atau sebuah keputusan yang mengharuskan seluruh masyarakat untuk berangkat meninggalkan kampung halamannya. Transmigrasi pola ini lebih dikenal dengan nama “bedhol desa”. Dalam konteks transmigran di Sitiung kedua jenis transmigrasi ini ditemukan.

Kedatangan transmigran menyebabkan masyarakat di Pulau Punjung dan Sitiung menjadi heterogen. Ciri khas dari masyarakat yang heterogen adalah meningkatnya interaksi sosial. Interaksi sosial dapat

²⁰ Minyarso “Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap partisipasi masyarakat dalam program Pengembangan Pembangunan Kecamatan Situang, Nagari Situang Kabupaten Dharmasraya” *Tesis* Padang : Pasca Sarjana Unand, Tahun 2008

²¹ Hesti Wiratmi, “Dinamika Kehidupan Sosial Ekonomi Transmigrasi Jorong SUndang Atang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya 1977 – 2007”, *Skripsi* : Padang : Fakultas Sastra, 2010

²² Harry Hariawan Saleh *Transmigrasi : antara kebutuhan masyarakat dan kepentingan pemerintah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005

diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial, hubungan sosial yang dimaksud berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu.²³ Proses interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat di Pulau Punjung dan Sitiung dengan sendirinya menyebabkan akulturasi kebudayaan antara masyarakat pendatang dengan penduduk pribumi.

Akulturasi menurut koentjaraningrat adalah proses sosial yang terjadi antara sebuah kelompok masyarakat yang dihadapkan dengan kelompok masyarakat yang berbeda, sehingga terjadi penyatuan kebudayaan yang berbeda, namun masing-masing dari unsur-unsur kebudayaan tersebut masih terlihat.²⁴ Proses interaksi sosial menghasilkan akulturasi dan akulturasi menghasilkan sebuah perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Selo Soemardjan mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial seperti nilai-nilai sosial, sikap dan pola tingkah laku antar kelompok masyarakat. David mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Moore mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur sosial dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah pola perilaku dan pola interaksi.²⁵

Dalam mengkaji perubahan sosial terdapat 4 teori yang membahas hal tersebut yaitu : teori evolusioner dalam teori dinyatakan bahwa perubahan sosial memiliki arah yang tetap diawal dengan perubahan awal sampai dengan perubahan akhir. Teori kedua adalah teori siklus yang menyatakan bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat adalah laksana roda kadangkala ada saatnya naik dan ada saatnya turun. Sedangkan teori ketiga adalah teori konflik berdasarkan teori ini dinyatakan bahwa sebuah perubahan bisa terjadi karena konflik dan perubahan tersebut juga bisa menimbulkan konflik baru. Teori keempat yang membahas tentang perubahan adalah *teori fungsional* dalam teori ini lebih difokuskan bahwa perubahan terjadi karena terjadi hubungan saling keterkaitan antara sistem yang terdapat dalam satu

²⁴. Soekanto. S. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo 2002

²⁵ Koentjaraningrat "Pengantar Antropologi " Jakarta : Aksara Baru, 2006, Hlm

²⁶ Wahyu, MS "*Perubahan sosial dan Pembangunan*", Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005, hlm 3 . Pengertian yang sama juga ditemukan dalam tulisan Robert H. Louer *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, Jakarta Rineka Cipta 2003, hlm 3 – 57

kelompok masyarakat.²⁶ Dalam membahas perubahan sosial yang terjadi di Kecamatan Pulau Punjung dan Sitiung akan digunakan teori fungsional karena perubahan sosial yang terjadi berkaitan erat dengan hubungan antara berbagai elemen dikawasan tersebut.

Perubahan sosial akan memunculkan mobilitas sosial ditengah-tengah masyarakat Sitiung. Mobiltas dapat dikelompokkan menjadi dua bahagian yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal, mobilitas vertikal adalah pergeseran dari satu keadaan ke sebuah kondisi yang berbeda.²⁷ Sedangkan mobilitas horizontal adalah pergeseran kehidupan namun dalam status yang masih sama yaitu dari seorang petani, pindah ke wilayah baru namu tetap sebagai petani.²⁸ Mobilitas masyarakat di Nagari Sitiung merupakan gabungan dari mobilitas vertikal dan horizontal, sebab dalam kenyataannya banyak masyarakat pendatang di kawasan tersebut mengalami peningkatan status dan kedudukannya. Selain itu ada juga masyarakat di daerah tersebut tidak mengalami pergeseran status dan kedudukan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan landasan pemikiran di atas, maka penulisan ini menggunakan pendekatan sejarah sosial dengan mengambil fakta sosial sebagai bahan kajian, yaitu bagaimana proses kepindahan migran dari Jawa ke Sitiung serta kehidupan migran di daerah baru.

6. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Sesuai dengan metode penelitian sejarah, tulisan ini dimulai dengan tahap pertama yaitu pengumpulan data yang disebut heuristik. Tahap berikutnya adalah melakukan kritik terhadap data-data yang telah diperoleh baik kritik ekstern maupun intern, guna menjamin otensitas dan kredibilitas dari data. Setelah melalui tahap kritik, maka dilanjutkan dengan interpretasi dan penulisan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Dalam Penelitian pustaka ditemukan data-data primer seperti, arsip-arsip dan dokumen yang menyangkut masalah transmigrasi orang Wonogiri dan masyarakat Jawa lainnya ke Nagari Sitiung. Untuk mendukung data primer juga didapatkan data sekunder dalam surat kabar lokal (Singgalang, Haluan, Padang Ekspers) maupun nasional (Kompas, Sinar Harapan) maupun *webset*. Tempat yang akan dikunjungi Padang, Dharmasraya, Sawahlunto Sijunjung dan Jakarta. Dalam penelitian pustaka juga dicari sumber-sumber sekunder yang bisa

²⁶ *Ibid*, Hlm 5-18

²⁷ Yulfitra Rahardjo, *Dinamika Sosial Pemuda di Perkotaan Jakarta*: Pustaka Sinar Harapan, 1996 hal. 253 - 160

²⁸ *ibid*

menunjang penelitian ini seperti laporan penelitian yang telah dilakukan oleh dinas-dinas terkait atau lembaga-lembaga lain.

Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan jalan wawancara, yang lazim dalam kajian sejarah kontemporer. Sejarah kontemporer menurut Nugroho Notosusanto adalah sejarah yang jarak kejadiannya relatif dekat dengan masa sekarang, sehingga para pelaku dalam suatu peristiwa banyak yang masih hidup dan bisa diwawancarai.²⁹ Wawancara dengan ketua Bamus dan ketua KAN Nagari Sitiung, Kepala Desa dari Jawa, tokoh-tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang relevan untuk memberikan keterangan tentang hal tersebut.

7. Gambaran Umum Daerah

a. Letak dan Kondisi Geografis

Sitiung merupakan salah satu nama nagari dan kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2007, Kecamatan Sitiung terdiri dari 3 nagari yaitu Nagari Sitiung, Siguntur dan Timpeh sedangkan sebagai sebuah nagari Sitiung terdiri dari 6 Jorong yaitu Koto Agung, Sungai Duo, Piruko, Gunung Medan, Sitiung dan Pulai.³⁰ Semenjak tahun 2009 Timpeh berdiri menjadi kecamatan sendiri dan Sitiung mengalami pemekaran menjadi 3 nagari. Sebagai sebuah Kecamatan Sitiung saat ini terdiri dari 4 (empat) nagari yaitu Nagari Siguntur, Gunung Medan, Sungai Duo, dan Sitiung. Sedangkan sebagai sebuah nagari Sitiung terdiri dari 6 (enam) jorong yaitu Jorong Piruko Utara, Piruko Selatan, Pulai, Sitiung, Lawai dan Padang Sidondang.³¹ Kondisi tersebut menjelaskan bahwa Sitiung sebagai sebuah kecamatan maupun sebagai sebuah nagari telah mengalami perkembangan dan pemekaran.

Kecamatan Sitiung berdasarkan geografis terletak di $101^{\circ}27'19''$ - $101^{\circ}44'49''$ Bujur Timur dan $0^{\circ}47'7''$ - $1^{\circ}5'47''$ lintang selatan. Dengan ketinggian dari permukaan laut 115 meter sedangkan curah hujan pertahun hampir 244 mm/tahun. Kondisi ini menyebabkan kawasan ini banyak memiliki dataran rendah dengan suhu berkisar 24 –

²⁹ Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, (Jakarta: Inti Idayu Press.1984), hal.6-8.

³⁰ Badan Pusat Statistik : Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2007 Dharmasraya: BPS, tahun 2008

³¹ Badan Pusat Statistik : Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2009 Dharmasraya: BPS, tahun 2010

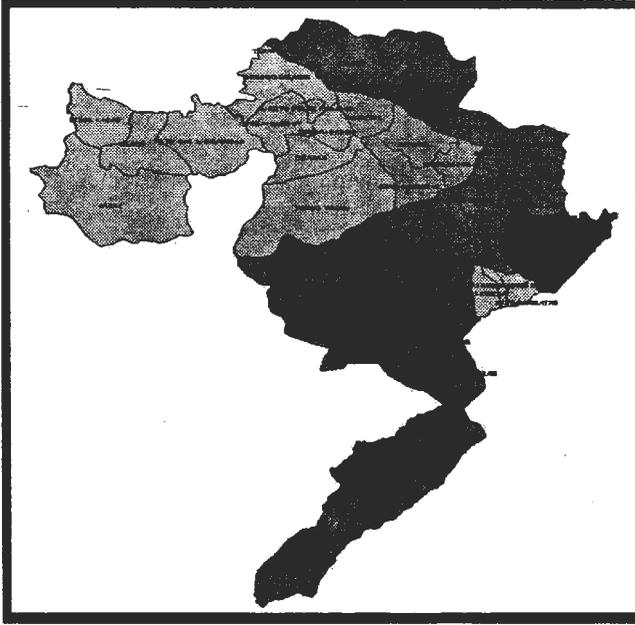
32 C. Kecamatan Sitiung terdiri dari 4 (nagari) nagari³², yaitu Nagari Siguntur, Nagari Gunung Medan, Nagari Sungai Duo, dan Nagari Sitiung.

Kecamatan Sitiung merupakan pemekaran dari kecamatan Pulau Punjung, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya ekonomi di kawasan Sitiung maka pemerintah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung saat itu merasa perlu untuk membentuk sebuah kecamatan baru. Sebelum tahun 1990, masyarakat di Nagari Sitiung tergabung dalam kecamatan Pulau Punjung yang terletak 8 km dari pusat kenagarian. Ketika kecamatan Pulau Punjung dimekarkan maka nagari Sitiung bergabung dengan Kecamatan Sitiung. Laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya tahun 2009 menyatakan bahwa Kecamatan Sitiung memiliki luas wilayah 32 563 Km², dan Nagari Sitiung sebelum pemekaran memiliki luas 47.18 Km².³³

Berdirinya Kecamatan Sitiung membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat di Nagari Sitiung. Sebab ibukota kecamatan berada di Sitiung sehingga mempermudah masyarakat Sitiung untuk menyelesaikan setiap persoalan. Sedangkan jarak dengan Ibu Kota Kabupaten sekitar 12 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 30 menit dengan menggunakan kendaraan roda dua ataupun roda empat. Sementara jarak dari ibu kota Provinsi (Padang) sekitar 200 km, dengan waktu tempuh sekitar 5 jam dengan menggunakan kendaraan roda dua ataupun roda empat. Adapun batas atau daerah yang melingkungi Nagari Sitiung adalah sebelah utara dengan Nagari Sungai Duo, sebelah selatan berbatasan dengan Siguntur, sebelah barat berbatasan dengan Nagari Penyubarang Kecamatan Timpeh, dan sebelah timur berbatasan dengan Nagari Gunung Medan.

³² Nagari, sebagaimana diketahui, wilayah merupakan kesatuan masyarakat adat di Minangkabau yang sekaligus menjadi unit pemerintah terendah, menjadi wilayah bagian dari kecamatan si setiap kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

³³ *Op.cit* (BPS 2010)



Gambar I
Peta Kecamatan dan Persebaran Nagari-nagari di Kabupaten
Dharmasraya
Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya

Peta di atas memperlihatkan bahwa nagari Sitiung (warna hijau daun) terletak di bagian tengah dari Kecamatan Sitiung. Kondisi ini menyebabkan pemerintah Kabupaten Dharmasraya menjadikan kawasan ini sebagai ibukota kecamatan. Dengan tujuan mempermudah masyarakat dari nagari sekitarnya berkoordinasi dan berurusan ke pusat pemerintahan Kecamatan Sitiung.

b. Penduduk

Penduduk yang mendiami Nagari Sitiung pada tahun 2009, merupakan gabungan antara penduduk asli dan masyarakat pendatang. Penduduk asli banyak mendiami Jorong Pulai, Sitiung, Lawai sedangkan penduduk pendatang mendiami kawasan Piruko Utara, Piruko Selatan dan Padang Sidondang. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah penduduk asli dan pendatang di Nagari Sitiung relatif seimbang. Untuk menjaga keterwakilan masyarakat pendatang dan penduduk asli, pemerintah nagari Sitiung selalu mengambil staf kantor wali nagari 3 dari penduduk asli dan 3 dari penduduk pendatang.³⁴

³⁴ Wawancara dengan H. Syafriadi Ketua Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Sitiung di Sitiung pada tanggal 26 April 2011

Berdasarkan data monografi Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung tahun 2008 terlihat bahwa Kenagarian Sitiung dihuni oleh penduduk sebanyak 17.384 jiwa yang terdiri dari 8.838 laki-laki dan 8.546 perempuan. Dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 4.773. Pada tahun 2009 jumlah penduduk di Nagari Sitiung mengalami peningkatan yaitu menjadi 17.915 Jiwa dengan jumlah KK menjadi 4.878.³⁵

Akhir tahun 2009, Nagari Sitiung dimekarkan menjadi 3 nagari itu Nagari Sitiung Induk, Gunung Medan dan Sungai Duo. Kondisi tersebut menyebabkan komposisi penduduk yang mendiami Sitiung menjadi berubah, setelah pemekaran jumlah penduduk yang mendiami Sitiung sebanyak 6.597 Jiwa.³⁶ Berdasarkan klasifikasi penduduk, sebagian besar penduduk yang mendiami Nagari Sitiung, termasuk keluarga Sejahtera. Kondisi ini disebabkan tingkat perekonomian masyarakat di Nagari Sitiung telah berlangsung dengan baik.

Pola pemukiman penduduk di Nagari Sitiung terkait erat dengan asal usul penduduk yang mendiami kawasan tersebut. Pada awalnya penduduk yang mendiami Sitiung terkonsentrasi di jorong Pulau dan Sitiung dalam perkembangan selanjutnya ketika orang Jawa datang maka kawasan lain di Sitiung mulai dihuni oleh penduduk. Berikut penyebaran penduduk berdasarkan Jorong di Nagari Sitiung sebelum Nagari Sitiung mengalami pemekaran :

Tabel 1
Jumlah Penduduk berdasarkan Jorong
Di Kenagarian Sitiung Tahun 2008

No	Jorong	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Koto Agung	2118	2034	4152
2	Gunung Medan	2287	2199	4486
3	Sitiung	2097	2014	4111
4	Piruko	1333	1286	2619
5	Sungai Duo	651	673	1324
6	Pulai	325	340	675
Total		2234	2496	4730

Sumber : Papan Pengumuman di Kantor Walinagari Sitiung

³⁵ Kantor Walinagari Sitiung 2009 “ Monografi Nagari Sitiung”
Dharmasraya: Kantor Walinagari Sitiung, hlm 6

³⁶ Kantor Walinagari Sitiung 2011 “ Monografi Nagari Sitiung”
Dharmasraya: Kantor Walinagari Sitiung, (Papan Informasi)

Data di atas memperlihatkan bahwa penduduk terbanyak di Nagari Sitiung berada di Jorong Gunung Medan dengan jumlah penduduk 4486 jiwa. Hal ini sejalan dengan keberadaannya jorong tersebut berada di pinggir jalan lintas sumatera sehingga banyak penduduk yang mendiami kawasan tersebut. Sedangkan jorong Koto Agung dengan jumlah penduduk 4152 merupakan jorong terpadat kedua di nagari Sitiung. Kepadatan penduduk dikawasan ini terkait erat dengan keberadaan jorong sebagai pusat pemukiman masyarakat Jawa di nagari Sitiung. Penduduk yang paling sedikit berada di Jorong Pulau dengan jumlah penduduk sebanyak 675 jiwa. Kondisi ini lebih disebabkan tidak adanya masyarakat pendatang yang bermukim di kawasan ini. Komposisi penduduk Nagari Sitiung mengalami perubahan pasca pemekaran nagari sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Di Kenagarian Sitiung
Setelah Pemekaran Tahun 2009

No	Jorong	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Piruko Selatan	579	515	1094
2	Piruko Utara	404	382	786
3	Pulai	346	340	686
4	Sitiung	975	1003	1978
5	Lawai	152	162	314
6	Padang Sidondang	943	796	1739
Total		3399	3198	6597

Sumber : Papan Pengumuman Kantor Walinagari Sitiung

Data di atas memperlihatkan bahwa komposisi penduduk terbanyak di Nagari Sitiung setelah pemekaran berada di Jorong Sitiung. Hal ini disebabkan kawasan ini tidak termasuk wilayah yang dimekarkan sedangkan Jorong Piruko pecah menjadi 2 jorong yaitu Piruko Selatan dan Piruko Utara. Penduduk yang paling sedikit berada di Jorong Lawai, kondisi ini lebih disebabkan karena jorong ini baru terbentuk setelah Nagari Sitiung dimekarkan menjadi 3 nagari.

Penduduk di Kenagarian Sitiung memiliki tingkat pendidikan yang beragam, kondisi ini sejalan dengan kesejahteraan keluarga yang beragam pula. Penduduk Nagari Sitiung berdasarkan pendidikan, sebagaimana diungkapkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3
Penyebaran Penduduk Nagari Sitiung
Berdasarkan Pendidikan tahun 2009

No	Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah/ tidak pernah	1376
2	sekolah	1512
3	Tamat SD/Sederajat	535
4	SLTP/Sederajat	385
5	SLTA/ Sederajat	63
6	D1- D3	109
	Perguruan Tinggi	
Jumlah		3927

Sumber : Monografi Nagari Sitiung tahun 2009

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa jumlah penduduk Nagari Sitiung yang paling banyak merupakan tamatan SLTA/Sederajat ke bawah. Kondisi ini membawa pengaruh terhadap mata pencarian yang ditekuni oleh masyarakat di Nagari Sitiung yang mayoritas merupakan petani. Hal itu terlihat dari pemanfaatan lahan di Nagari Sitiung lebih banyak untuk areal perkebunan dan sawah.

c. Konteks Sosial Budaya

Dalam konteks budaya, Sitiung merupakan daerah rantau di Minangkabau. Sebagaimana diketahui, Minangkabau dibagi dalam dua daerah budaya yaitu *darek* dan *rantau*. Daerah *darek* terdiri dari *Luhak Limo Puluh Koto*, *Luhak Agam* dan *Luhak Tanah Datar*, sedangkan daerah *rantau* merupakan perluasan dari daerah *luhak*. Dharmasraya/ Nagari Sitiung merupakan salah satu daerah rantau di Minangkabau. Nagari Sitiung dan daerah Dharmasraya umumnya merupakan rantau dari *luhak Tanah Datar*.

Sejarah/Asal Usul

Nagari Sitiung merupakan salah satu nagari di Kabupaten Dharmasraya yang memiliki sejarah panjang. Berdasarkan cerita yang berkembang di kawasan ini pernah berdiri sebuah kerajaan yang merupakan bagaian dari kerajaan *Nan Tigo Selo*. Kejadian tersebut berlangsung ketika kerajaan Siguntur dipimpin oleh Sri Maharajo Dirajo Sultan Abdud Jalil Bin Sultan Muhammad Syah Tuanku Bagindo Ratu II dengan menyatakan Kerajaan *Nan Tigo Selo* Batang Hari terdiri dari: Siguntur sebagai Rajo Alam dengan gelar Tuanku Bagindo Ratu. Kerajaan Sitiung sebagai Rajo Adat dengan gelar Tuanku Rajo Nan

Itam sedangkan kerajaan Padang Laweh sebagai Rajo Ibadat dengan gelar Tuanku Bagindo Muhammad.³⁷ Saat ini sisa-sisa peninggalan kerajaan tersebut tidak lagi ditemukan dalam kehidupan masyarakat di Sitiung.

Berdasarkan cerita yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, asal usul nama Sitiung berasal dari kata adanya sebuah sungai, oleh masyarakat disebut dengan nama batang tiung, anak sungai yang bermuara ke Sungai Batanghari. Dalam kehidupan masyarakat sungai tersebut memiliki kesaktian yang melambangkan sebuah kejadian yang akan dialami oleh masyarakat Sitiung. Jika anak sungai tersebut mengeluarkan bunyi dentuman, maka bisa dipastikan bahwa nagari Sitiung akan mendapatkan azab dan bala. Kepercayaan tersebut berlangsung hingga saat ini. Versi lain juga menjelaskan bahwa nama Sitiung berasal ketika agama Hindu Budha masih berkembang dikawasan ini, sebagaimana diketahui Sitiung merupakan sebuah daerah yang dekat dengan Candi Padang Roco. Ketika candi tersebut masih dimanfaatkan sebagai tempat pemujaan maka para orang-orang sakti pengikut ajaran Budha bermukim dikawasan ini, sehingga nama Sitiung berasal dari kata sakti.³⁸

Sistem Kekerabatan

Penduduk nagari Sitiung, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu penduduk asli yang memakai sistem kekerabatan sebagaimana masyarakat Minangkabau umumnya, yaitu matrilineal (nasab ibu) dalam kehidupannya sehari-hari. Keturunan diatur berdasarkan garis keibuan (perempuan) dimana seseorang akan masuk pada lingkungan kerabat (*suku*) ibunya, bukan kerabat ayahnya. Sejak berusia anak-anak hingga berumah tangga dia akan tinggal di lingkungan kerabat ibunya. Apabila sebuah keluarga tidak memiliki anak perempuan maka mengindikasikan keluarga itu terancam punah atau terputus garis keturunannya. Ikatan geneologis berdasarkan garis keibuan itu dengan sendirinya berpengaruh pada bentuk pengelompokan kekerabatan yang berputar pada lingkaran seorang ibu (perempuan). Pengelompokan itu mulai dari unit *samande*, *sajurai*, *saparuik*, dan *sasuku*³⁹.

³⁷ Efrianto, 2010 Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Dharmasraya” Padang : BPSNT Padang Pres, hlm 56

³⁸ *Ibid* 57

³⁹ *Samande* artinya satu ibu, *saparuik* artinya satu nenek/ninik (kumpulan dari beberapa orang *samande*/ibu), *sajurai* artinya satu buyut (kumpulan dari beberapa *ninik*) dan *sasuku* artinya kumpulan dari beberapa *jurai*.

Kelompok kedua adalah masyarakat pendatang yang didominasi oleh orang Jawa, kondisi ini menyebabkan sistem kekerabatan masyarakat Jawa juga berlaku di Nagari Sitiung yaitu Bilatrineal yaitu garis keturunan di bisa dihitung dari ayah maupun dari ibu. Kondisi ini menyebabkan anak yang lahir dalam lingkungan masyarakat Jawa akan dihitung dalam lingkungan keluarga ayah dan keluarga ibu. Sedangkan berdasarkan tempat tinggal adakalanya sang suami ikut ke tempat istri dan adakalanya suami ikut ke tempat istri semua tergantung pada kemampuan keluarga istri dan suami.

Azas (sistem) matrilineal menentukan bentuk kelompok kekerabatan pada masyarakat penduduk asli yang dicirikan dengan pengelompokan terkecil dikenal dengan sebutan *samande* atau *saibu* (satu ibu), yang menghimpun orang-orang yang berasal dari ibu yang sama walaupun berlainan ayah misalnya. Kelompok kekerabatan berikutnya adalah *saniniak* atau senenek yang menghimpun beberapa kelompok *samande* dan berasal dari nenek yang sama. Antara orang *saniniak* ini yang berlainan ibu, oleh masing-masing disebut sebagai "sanak ibu" yang bisa disamakan dengan saudara sepupu dari pihak ibu. Orang-orang yang *saniniak* ini biasanya mendiami rumah yang sama yakni *rumah gadang*. Gabungan dari beberapa keluarga *saniniak* ini adalah orang-orang yang *sapayuang* atau sekaum yang dipimpin oleh seorang penghulu yang bergelar *datuak* (datuk). Diatas dari kaum, adalah pengelompokan dalam wujud *suku* yang biasanya terdiri dari 4 kaum dan dipimpin oleh penghulu suku atau penghulu pucuk.

Suku merupakan pengelompokan kerabat di Minangkabau yang utama karena suku sekaligus menjadi identitas seorang Minangkabau dalam berhubungan dengan orang lain. Suku sebagai bentuk kelompok kekerabatan masyarakat Minangkabau memiliki pusaka milik bersama yakni berupa *sako* dan *pusako*. Sako merupakan milik kaum/suku berupa gelar kepenghuluan atau adat yang diwarisi secara turun temurun, sedangkan pusako menyangkut harta fisik seperti tanah, rumah dan lainnya yang pewarisannya menurut garis perempuan. Gelar *sako* atau penghulu akan diwarisi oleh anak laki-laki dari saudara perempuan, dan pusaka pada pihak perempuan dengan pengawasan oleh pihak laki-laki.

Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan dalam kerabat terwujud dalam tatakrama yang menekankan pada penghormatan pada orang yang lebih tua, dan menyayangi yang muda. Sedangkan kerabat yang sebaya atau seumur menjadi teman dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana tergambar dari ungkapan adat Minangkabau;

*"Nan gadang dihormati,
Nan ketek disayangi,
Samo gadang dibao baiyo"*

(Yang tua dihormati,
Yang kecil disayangi
Sama besar dibawa beriya)

Ungkapan di atas menjadi dasar pergaulan dalam kerabat maupun di luar kerabat, yang diimplementasikan diantaranya dalam bentuk panggilan yang disesuaikan dengan posisi seseorang dalam kerabat. Artinya, anggota kerabat yang lebih tua tidak boleh dipanggil dengan namanya langsung, tetapi harus dengan tambahan sapaan yang menunjukkan ketuaannya. Apalagi bagi penghulu yang merupakan pemimpin kaum, dipantangkan memanggil namanya dan harus dipanggil *datuak* oleh yang lebih muda atau sebaya, dan *penghulu* oleh yang lebih tua. Apabila ada yang memanggil seorang penghulu dengan namanya langsung, maka akan mendapatkan teguran ataupun sanksi adat. Bagi seorang laki-laki yang baru menikah akan dipanggil dengan gelar yang diberikan pada waktu *baralek* (pesta perkawinan), terutama oleh kerabat isterinya.

Sistem Pemerintahan Tradisional

Sistem pemerintahan tradisional di Nagari Sitiung, pada hakikatnya sama dengan masyarakat Minangkabau umumnya, yang menentukan nagari sebagai unit pemerintahan terendah yang dipimpin oleh walinagari. Bagian dari nagari adalah jorong yang dipimpin oleh wali jorong dan statusnya adalah pembantu wali nagari di jorongnya.⁴⁰ Wali Nagari dan Wali Jorong dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pada tingkat keluarga atau kaum, dipimpin oleh penghulu bergelar datuk yang pewarisannya adalah dari *mamak* ke *kamanakan*⁴¹.

⁴⁰ Pada masa sistem pemerintahan desa diterapkan di seluruh Indonesia, di Minangkabau wilayah jorong inilah yang dijadikan sebagai desa (unit pemerintahan terendah), sedangkan nagari tetap menjadi kesatuan masyarakat adat. Setelah otonomi daerah, masyarakat Minangkabau mengikrarkan kembali ke nagari dimana nagari kembali sebagai unit pemerintahan terendah dibawah kecamatan. Masa pemerintahan desa telah menimbulkan erosi nilai-nilai sosial Minangkabau.

⁴¹ *Mamak* adalah saudara laki-laki dari ibu, sedangkan *kamanakan* adalah anak dari saudara perempuan.



Gambar 2
Kantor Wali Nagari Sitiung

Nagari Sitiung dalam struktur adat istiadatnya menerapkan sistem kelarasan Koto Piliang, yang mana penghulu rajo bertindak sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur adat. Dalam menjalankan roda pemerintahannya penghulu rajo dibantu oleh *penghulu pucuk* dan penghulu-penghulu kaum yang merupakan perpanjangan raja di daerah. Kerajaan Sitiung terdiri dari 3 (tiga) orang *penghulu pucuk* yang menjadi perpanjangan penghulu rajo, 3 (tiga) orang penghulu pucuk tersebut adalah Penghulu Marajo dari suku Malayu, Datuk Mangkuto dari suku Tigo Ninik dan Datuk Paduko Rajo Lelo dari Suku Piliang. Sedangkan yang bertindak sebagai penghulu rajo adalah Datuk Rajo Tamanggung. Pada setiap pertemuan Datuk Rajo Tamanggung selalu di dampingi oleh 3 (tiga) orang penghulu pucuk. Kelarasan Koto Piliang merupakan sebuah kelarasan yang dipakai oleh nagari yang bercorak kerajaan, sehingga bentuk dan susunan orang yang duduk dalam balerong adat⁴² mencerminkan status mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat nagari Sitiung terdiri dari 4 (empat) suku yaitu Malayu, Tigo Ninik, Piliang dan Mandiling. Masing-masing suku memiliki penghulu pucuk kecuali suku Mandailing, sebab suku ini adalah orang paling terakhir datang ke Sitiung. Di samping penghulu pucuk masing-masing suku memiliki penghulu kaum yaitu Datuk Jo Indo suku Malayu, Datuk Paduko dari suku Tigo Ninik, Datuk Labiah dari Suku Piliang dan Datuk Kayu Basao dari Suku Mandailing.

⁴² Rumah gadang yang dimaksud adalah rumah panggung beratap gonjong yang dahulunya menjadi istana dari raja Siguntur, yang sekarang dikelola oleh keturunannya.

Dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dalam masyarakat, Nagari Sitiung memiliki mekanisme sendiri. Jika masalah mengenai kaum malayu maka yang menyelesaikan pertama adalah penghulu kaum malayu Datuk Jo Indo. Jika permasalahan masih berlangsung tidak berhasil diselesaikan oleh Datuk Jo Indo maka permasalahan tersebut dilanjutkan ke penghulu pucuk kaum melayau Datuk Marajo. Jika masih belum terselesaikan baru penghulu rajo Datuk Rajo Tumanggung terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut. Sebab dalam kehidupan masyarakat ada istilah *"bajanjang naaik batanggo turun"* (berjenjang naik bertangga turun) yang berarti setiap persoalan yang terjadi harus diselesaikan ditingkat kaum, suku, nagari baru ke penghulu tertinggi.



Gambar 4

Kantor Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) Sitiung

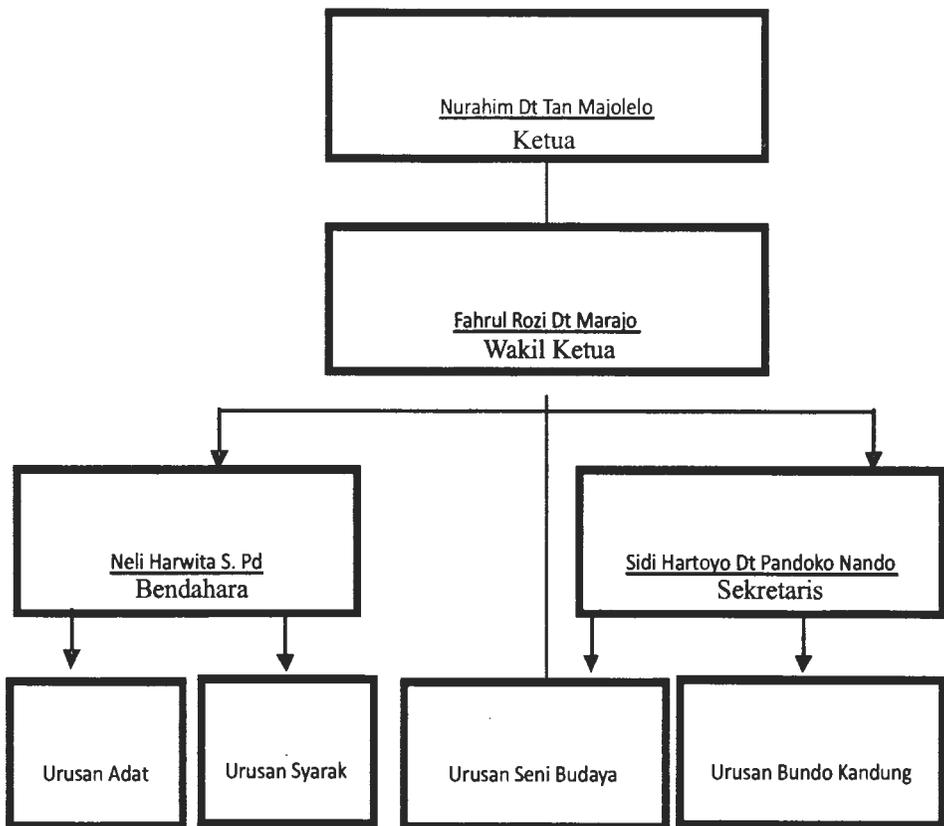
Masyarakat Nagari Sitiung yang dikenal sebagai kawasan perbauran antara masyarakat asli dan pendatang sehingga organisasi sosial yang dimiliki diisi oleh orang dari penduduk asli dan pendatang. Organisasi sosial yang terdapat di Nagari Sitiung dapat dikelompokkan menjadi dua jenis organisasi sosial yaitu organisasi sosial yang hanya terdapat di Nagari Sitiung dan membahas persoalan dalam konteks nagari. Di Nagari Sitiung juga terdapat organisasi yang menjadikan Nagari Sitiung sebagai unit terkecil dari organisasi yang dimiliki.

Organisasi yang fokus membahas masalah Nagari Sitiung adalah Badan Musyawarah Nagari (Bamus), Lembaga Pembangunan Masyarakat Nagari (LPM), Perkumpulan Pemuda Nagari Sitiung, Organisasi Pasar Sitiung Sedangkan Pemerintahan Nagari, Organisasi Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan organisasi yang memiliki hubungan dengan lembaga lain di luar Nagari Sitiung.

Organisasi sosial di Nagari Sitiung memiliki, struktur, peranan dan fungsi yang berbeda diantara mereka, keberadaan mereka diperlukan untuk mengatasi setiap persoalan dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh setiap masyarakat di Nagari Sitiung. berikut ini ada beberapa contoh dan peranan dari organisasi sosial di Nagari Sitiung. Seperti Lembaga Kerapatan Adat (KAN) Sitiung merupakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengatasi persoalan *Sako* dan *Pusako* yang selama ini sering menimbulkan masalah dan gesekan dalam kehidupan masyarakat.

Kasus perebutan tanah ulyat nagari yang melibatkan pemerintah Nagari Sitiung dengan Pemerintahan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Kasus ini akhirnya dimenangkan oleh pemerintah Nagari Sitiung. Pemerintah Nagari yang diwakili oleh KAN mampu membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik nagari. Kondisi tersebut tercipta karena struktur organisasi yang dimiliki oleh KAN seperti dibawah ini :

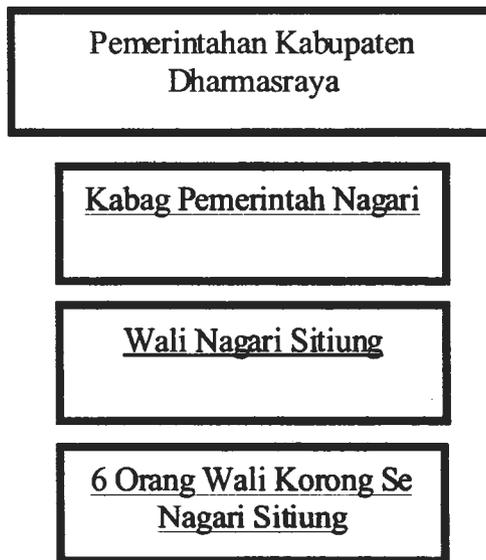
**Bagan/Skema 1
Kerapatan Adat Nagari Sitiung**



Struktur bagan di atas menjelaskan dan mempertegas kepada kita bahwa adat istiadat di Nagari Sitiung akan berfungsi sebagaimana mestinya jika lembaga adat masih mampu menjalankan tugas yang diberikan. Sengketa tanah, perebutan lahan dan perebutan gelar datuk tidak akan terjadi di Nagari Sitiung karena ada bagian khusus dilembaga adat yang menyelesaikan kasus ini.

Organisasi sosial yang menjadikan Sitiung sebagai unit terkecil yang mereka kelola demi kemajuan dan kesuksesan yang lebih besar adalah Pemerintahan Nagari. Secara oraganisasi Pemerintahan Nagari merupakan lembaga yang diisi oleh orang-orang dari Nagari Sitiung, namun pemeritah nagari merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah daerah, sehinga cara kerja, fungsi dan peranan mereka berbeda dengan Lembaga Adat dan BMASN Nagari Sitiung.

Bagan/Skema 2
Pemerintah Nagari di Sitiung



Bagan diatas menjelaskan bahwa oraganisasi Pemerintahan Nagari Sitiung merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya, sehingga program dan perencanaan yang disusun oleh pemerintahan nagari harus sesuai dengan aturan dan pedoman yang diberikan pemerintah kabupaten. Hal yang membedakan pemerintahan nagari dengan BMASN adalah kebebasan mereka dalam mengambil sikap dan kebijakan. Kalau pemeritahan nagari harus sesuai

dengan arah dan petunjuk dari atas sedangkan BMASN keputusan mereka merupakan hasil rapat dan musyawarah yang mereka lakukan.

Bahasa dan Kesenian

Masyarakat Sitiung, dalam pergaulan sehari-hari memiliki bahasa dan aturan tersendiri. Hal ini terkait dengan aturan di alam Minangkabau yang membagi bahasa berdasarkan lawan bicara menurut stratifikasi dan pengelompokan, sehingga nada dan pilihan kata (kato) yang digunakan sangat bervariasi berdasarkan kelompoknya, seperti :

1. Kato “*mandaki*” (mendaki) adalah bahasa yang digunakan ketika seseorang berbicara dengan orang yang dihormatinya seperti ketika berbicara dengan penghulu, orang tua, mamak dan lain sebagainya
2. Kato “*malereng*” (melereng) adalah bahasa yang digunakan ketika seseorang berbicara dengan orang yang saling menghormati. Seperti antara *mertua* dan *minantu*, *ipar* dan *bisan*, *sumando* dan *mamak rumah*.
3. Kato “*mandata*” (mendatar) adalah bahasa yang digunakan ketika seseorang berbicara dengan teman sama besar atau sepermainan.
4. Kato “*manurun*” (menurun) adalah bahasa yang digunakan ketika berbicara dengan adik atau orang yang lebih kecil/muda.

Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Sitiung mengalami perubahan sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan kawasan Dharmasraya menjadi pusat dari transmigran dari Pulau Jawa. Kedatangan orang luar Minangkabau membawa dampak terhadap bahasa yang digunakan oleh masyarakat Sitiung. Secara garis besar mereka masih mempertahankan aturan bahasa yang terdapat di alam Minangkabau, disisi lain mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung dengan masyarakat di luar Minangkabau. Bahasa Minang dialek Sitiung memiliki kekhasan sendiri dan mirip dialek Payakumbuh.

Dalam hal kesenian, masyarakat Sitiung memiliki aneka kesenian rakyat yang berkembang sejak dahulu hingga sekarang, dan menjadi kekayaan budaya yang tetap dijaga dan diupayakan kelestariannya. Jenis kesenian rakyat yang terdapat di Sitiung antara lain;

1. Silat

Silat adalah seni beladiri tradisional Minangkabau yang lebih mengandalkan gerak-gerak tubuh. Pada awalnya silat merupakan kesenian yang dinikmati dan dimainkan oleh laki-laki. Silat dapat di bagi dalam dua kelompok yaitu:

- a. Pencak silat, yaitu silat yang digunakan untuk tari-tarian pertunjukkan dan pemainnya disebut *anak silek*. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang, atau lebih. Gayanya seperti gerakan silat, tidak untuk menciderai lawan, tetapi hanya sebagai hiburan.
- b. Silat (*silek*), yaitu ilmu silat yang bertujuan untuk bela diri dan pemain atau pesilatnya disebut dengan *pendeka* (pendekar). Bagi *pendeka* atau pesilat mempunyai prinsip "*musuah indak dicari, jikok basuo pantang diilakkan*" (musuh tidak dicari, jika besua pantang dielakkan).

2. Randai

Randai dilaksanakan dalam bentuk teater arena dan dilakukan dengan membentuk lingkaran, kemudian melangkah kecil-kecil secara perlahan-lahan. Gerak-gerak yang dimainkan dalam permainan randai umumnya menggunakan dasar-dasar dalam pencak silat. Setiap gerakan yang dilakukan oleh pemain randai, menimbulkan bunyi-bunyian yang berbentuk nada. Dalam permainan randai sebuah tim mengandalkan kekompakan dalam memainkan nada yang berasal dari langkah-langkah yang dilakukan. Untuk memandu mereka, sebuah grup randai memiliki seorang pemandu gerak/pemimpin.

3. Simarantang

Simarantang merupakan tingkat lebih lanjut dari randai yang mana dalam permainan ini sebuah grup harus menyampaikan sebuah cerita lewat nyanyian secara berganti-gantian. Cerita randai itu biasanya diambil dari kenyataan hidup di tengah masyarakat dan fungsinya sebagai seni pertunjukan untuk hiburan; penyampai pesan, nasihat, dan pendidikan. Semua gerakan Simarantang dituntun oleh aba-aba salah seorang di antaranya, disebut *janang*.

4. Sepak Rago

Sepak rago (sepak raga) merupakan sebuah olahraga tradisional, dan permainannya mirip sepak takraw. Bedanya, bola *sepak rago* terbuat dari daun kelapa muda yang dianyam dan berbentuk kubus dengan jumlah pemain antara 5 – 10 orang. Dalam permainan *sepak*

rago terdapat ajaran budi yang sangat tinggi, yakni seseorang dalam kehidupan memang harus lebih banyak berdialog dengan dirinya sendiri, berdiskusi, berbuat sesuatu untuk kesejahteraan hidupnya, dan tidak lupa bahwa ia berada di tengah masyarakat.

5. Selawat Dulang

Kesenian ini pada awalnya merupakan salah satu upaya dari kaum ulama dalam menyiarkan agama Islam kepada seluruh masyarakat, sebab dalam kesenian ini para pemainnya menceritakan tentang ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama Islam. Kesenian ini biasanya ditampilkan oleh dua kelompok, satu kelompok terdiri dari dua orang dan saling berhadapan, pemenangnya ditentukan oleh kegagalan sebuah kelompok untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lainnya.

Di samping kesenian yang benuasa Minangkabau, kesenian rakyat yang berkembang di Nagari Sitiung adalah kesenian yang di bawa oleh masyarakat Jawa berikut ini adalah kesenian rakyat yang berhubungan dengan masyarakat Jawas seperti wayang, ketoprak dan campurasari merupakan kesenian Jawa yang masih dipertahankan oleh masyarakat Jawa di Sitiung.

B. PROSES PERPINDAHAN MASYARAKAT JAWA KE SITIUNG

1. Kepindahan Orang Jawa dalam Lintasan Sejarah

Perpindahan penduduk dari Jawa ke daerah lain termasuk Sumatera Barat telah berlangsung lama. Kondisi ini diawal oleh kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke wilayah lain dengan tujuan untuk mempekerjakan mereka di perkebunan dan perusahaan Belanda. Ketika Indonesia telah merdeka kebijakan untuk memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke daerah lain tetap berlangsung. Program pemindahan masyarakat dari Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang padat penduduknya ke daerah yang lebih sedikit penduduknya lebih dikenal dengan nama transmigrasi. Melalui proses transmigrasilah perpindahan masyarakat Jawa ke wilayah lain berlangsung dengan cepat dan melibatkan banyak orang.

Transmigrasi di Indonesia diilhami dari sebuah tulisan C. Th. Van Deventer, anggota *Raad van Indie*, berjudul "*Een Eereschuld*" (Hutang Budi) yang dimuat dalam majalah *De Gids* yang terbit pada tahun 1899. Tulisan tersebut memberikan gambaran tentang kemiskinan di Pulau Jawa serta kaitannya dengan *cultuur stelsel* dan pelaksanaan kerja paksa oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Van Deventer menghimbau agar Pemerintah Belanda melakukan upaya-upaya yang

dapat memperbaiki kehidupan rakyat di Pulau Jawa yang menderita akibat kebijakan kaum kolonial padahal Pulau Jawa merupakan salah penyumbang devisa terbesar bagi pemerintah kolonial Belanda.

Mengacu pada pokok-pokok pikiran Van Deventer tersebut, Pemerintah Hindia Belanda kemudian menyiapkan program pembangunan yang meliputi bidang pendidikan, perbaikan di bidang produksi pertanian, serta pemindahan penduduk dari Pulau Jawa ke luar Jawa. Untuk rencana pemindahan penduduk tersebut, ditunjuklah H.G. Heyting, seorang asisten residen, untuk mempelajari kemungkinan pemindahan penduduk Pulau Jawa ke daerah-daerah lain yang jarang penduduknya dan yang dianggap potensial bagi pengembangan usaha pertanian. Laporan Heyting tahun 1903, antara lain menyarankan agar Pemerintah Belanda membangun desa-desa baru di luar Jawa dengan jumlah penduduk rata-rata sekitar 500 KK setiap desa, disertai bantuan ekonomi secukupnya agar desa-desa baru tersebut dapat berkembang serta memiliki daya tarik bagi pendatang-pendatang baru.⁴³

Transmigrasi merupakan program yang unik dan sangat khas Indonesia. Dalam program ini, pemerintah secara aktif terlibat langsung dalam memindahkan penduduk dalam jumlah besar, menyeberangi lautan, dan berlangsung terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Program seperti ini tidak ada duanya di dunia. Memang ada beberapa negara yang mempunyai program serupa, tetapi jumlah penduduk yang dipindahkan relatif sangat kecil, waktu penyelenggaraannya tidak terus-menerus dalam waktu yang lama, dan umumnya dalam bentuk program *resettlement*, tidak menyeberangi lautan.

Provinsi-provinsi yang dijadikan daerah pemukiman transmigrasi adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua.⁴⁴ Pengaruh demografi cukup terasa dalam menetapkan kawasan tersebut sebagai lokasi transmigrasi, karena di masa lampau jumlah penduduk setempat relatif masih sedikit. Di samping itu perekonomian daerah tujuan kemungkinan juga terpengaruh dengan adanya penambahan tenaga kerja dan pembukaan tanah-tanah pertanian baru.

Sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 1990, tergambar bahwa distribusi penduduk di Indonesia telah mengalami perubahan walupun belum signifikan karena jumlah penduduk yang banyak

⁴³ Witrianto, "Transmigrasi di Indonesia" Padang : Laporan Penelitian, 2010

⁴⁴

meninggalkan Pulau Jawa ternyata juga diikuti dengan jumlah penduduk yang masuk dan mendiami Pulau Jawa. Namun sedikit banyaknya berkurangnya penduduk yang mendiami Pulau Jawa dipengaruhi oleh pelaksanaan transmigrasi, walaupun tidak begitu besar.

Kurun waktu 60 tahun (1930-1990) penduduk yang mendiami Pulau Jawa dan Madura telah mengalami pengurangan. Berdasarkan sensus tahun 1930, penduduk di Pulau Jawa dan Madura dihuni oleh 68,9% dari jumlah penduduk yang mendiami Indonesia. Sensus tahun 1990 memperlihatkan “hanya” 59,9% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia yang berdomisi di Pulau Jawa dan Madura.

Tabel 4
Distribusi Penduduk Indonesia Menurut Sensus Penduduk
Tahun 1930 dan Sensus Penduduk Tahun 1990

Penduduk	1930		1990		Kenaikan/Perubahan	
	Jumlah (juta)	%	Jumlah (juta)	%	Jumlah (juta)	%
Jawa + Madura	41,7	68,9	107,5	59,9	65,8	(8,8)
Sumatera	8,2	13,5	36,4	20,2	28,2	6,8
Kalimantan	2,2	3,6	9,2	5,2	6,9	1,6
Sulawesi	4,2	6,9	12,5	7,0	8,3	0,1
Pulau Lain	4,2	7,3	13,6	7,7	9,2	0,3
Jumlah	60,7	100	179,2	100	119,4	0

Sumber: Badan Pusat Statistik

Data di atas memperlihatkan bahwa penyebaran penduduk berdasarkan pulau telah mengalami perubahan yang cukup berarti. Pulau Sumatera merupakan kawasan dengan perkembangan jumlah penduduk yang cukup cepat dibandingkan pulau-pulau lainnya. Walaupun demikian jumlah penduduk yang mendiami Pulau Jawa dan Madura tetap menjadi kawasan terpadat di Indonesia.

Dalam konteks Sumatera Barat pemindahan penduduk dari Pulau Jawa mulai dilaksanakan Pemerintah Kolonial Belanda ketika melakukan eksploitasi terhadap tambang batubara di Sawahlunto.⁴⁵ Mulai saat itu orang dari Pulau Jawa mendiami Sumatera Barat (Sumatera Westkust). Catatan sejarah masa Kerajaan Malayu muda di

⁴⁵ Undri, Makalah : Konflik Tanah di Daerah Perbatasan” Jakarta: disampaikan dalam acara Konferensi Sejarah Nasional ke VIII, 2006

Dharmasraya menyebutkan bahwa Jawa telah mendiami Dharmasraya saat dilaksanakannya ekspedisi Pamalayu yang merupakan cikal bakal dari terjalannya hubungan Dharmasraya dengan Jawa.

Populasi penduduk Jawa ke Sumatera Barat semakin meningkat seiring pemerintah Kolonial Belanda mendatangkan pemilik modal ke daerah Sumatera Barat. Kebijakan Belanda untuk mendatangkan pemilik modal karena Sumatera Barat mempunyai daerah yang cukup luas dan subur untuk dijadikan lahan perkebunan. lahan perkebunan tersebut terdapat di Pasaman, Lima Puluh Kota dan Solok Selatan Menurut laporan kamar dagang Belanda di Padang, pada akhir tahun 1935 buruh Jawa yang bekerja di Pasaman pada perusahaan N.V.Cultuur Maatschappij Ophir sebanyak 1.710 orang, buruh lepas sebanyak 142 orang. Awal tahun 1936 buruh yang bekerja 1.852 orang. Buruh inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan Belanda untuk mengerjakan pembangunan kelapa sawit Ophir.⁴⁶

Kebijakan pemindahan orang Jawa terus dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Pada masa orde lama, pemerintah mendorong terbentuknya Jajasan Pembukaan Tanah Transmigrasi. Lembaga ini bertugas untuk mempermudah program transmigrasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dari tahun 1950 – 1959 pemerintah telah berhasil memindahkan 56.486 KK atau 227.360 Jiwa.⁴⁷ Dalam konteks Sumatera Barat, kawasan yang di huni oleh transmigrasi masa pemerintahan orde lama adalah Kabupaten Pasaman dan kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Untuk Kabupaten Pasaman dari tahun 1953 sampai 1968 tercatat 2.068 KK atau 8.725 jiwa masyarakat Jawa yang mendiami disebilan lokasi yakni Sie Beremas, Desa Baru, Koto Rajo, Pasaman, Koto Baru, Tongar, Padang Lawas, Kinali, Lepau Tempurung. Umumnya mereka berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Suriname.⁴⁸

Pemindahan masyarakat dari Pulau Jawa keluar semakin intensif dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Berdasarkan laporan oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi (Depnakertranskop) dari Repelita 1 ke Repelita 4 cenderung bertambah seperti tergambar dalam tabel di bawah ini:

⁴⁶ *ibid*

⁴⁷ M. Amral Sjamsu Makalah “*Transmigrasi Gagal ataukah Berhasil*” intisari dari buku Dari Kolonialisasi ke Transmigrasi

⁴⁸ *Op.cit* undri

Tabel 2
TARGET DAN REALISASI TRANSMIGRAN KEPALA
KELUARGA
TAHUN 1969 – 1987

Tahun	Taget	Realisasi	Persentase dari Target
PELITA I	46.566	46.268	99,4
1969/1970	4.489	3.933	87,6
1970/1971	3.865	4.338	112,2
1971/1972	4.600	4.171	90,7
1972/1973	11.200	11.414	101,9
1973/1974	22.412	22.412	100
PELITA II	82.959	82.959	100
1974/1975	11.000	11.000	100
1975/1976	8.100	8.100	100
1976/1977	13.910	13.910	100
1977/1978	22.949	22.949	100
1978/1979	27.000	27.000	100
PELITA III	500.000	535.474	107,1
1979/1980	50.000	79.861	159,7
1980/1981	75.000	78.359	104,5
1981/1982	100.000	100.552	100,6
1982/1983	125.000	127.970	110,4
1983/1984	150.000	148.732	99,2
PELITA IV	750.000	402.756*	53,7
1984/1985	125.000	101.888	81,5
1985/1986	135.000	166.347	123,2
1986/1987	150.000	134.521*	89,7
Jumlah	1.039.525	1.067.457	102,7

Sumber: Siswono Yudohusodo, 1998, *Transmigrasi Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran yang Timpang*, PT Jumalindo Aksara Grafika, Jakarta, hlm. 73.

Laporan di atas memperlihatkan bahwa target yang direncanakan oleh pemerintah umumnya berjalan dengan baik, bahkan pada tahun 1985-1986, target yang dibebankan berhasil dilewati. Sampai sekarang di Sumatera Barat telah didiami oleh penduduk Transmigran sebanyak 29.573 KK = 125.989 Jiwa yang tersebar di 72 UPT pada 8 Kabupaten, berasal dari berbagai daerah asal di Indonesia seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta dan Jawa Timur

(TPA). Para transmigrasi tersebut bukan hanya berasal dari Pulau Jawa, namun adajuga Transmigran Penduduk Setempat (TPS), Pengungsi dan Korban Bencana Alam.⁴⁹

Proses pemindahan penduduk melalui program transmigrasi juga mengalami perkembangan. Dahulu proses perpindahan penduduk dari Pulau Jawa hanya melalui transmigrasi umum yaitu transmigrasi yang penyelenggaraannya sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah. Dalam perkembangan selanjutnya transmigrasi banyak juga dilakukan secara spontan yaitu transmigrasi sepenuhnya oleh masyarakat baik secara perorangan atau kelompok.⁵⁰

Pemerintah Orde Baru melalui Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi (Depnakertranskop) pada Pelita II memperkenalkan transmigrasi Bedhol Desa, yaitu seluruh penduduk yang mendiami kawasan tersebut harus ikut bertransmigrasi. Pola ini harus dilakukan oleh pemerintah ketika harus memindahkan penduduk secara keseluruhan, akibat kawasan pemukiman penduduk terkenal proyek pembangunan. Pembangunan Waduk Gajah Mungkur memaksa Pemerintah Kabupaten Wonogiri memindahkan penduduknya secara bedhol desa ke Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan.

Pola ini berawal dari dibangunnya proyek Bendungan Gajah Mungkur di Wonogiri. Akibatnya Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus melakukan transmigrasi “besol desa” sebab pembangunan waduk mengharuskan 46 desa harus ditenggelamkan. Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi (Depnakertranskop) memindahkan sebagian penduduk Wonogiri ke Kabupaten Sawahlunto-Sijunjung dengan lokasi penempatan di Sitiung, Tiumang, Sialanggaung, dan Kotosalak.

Transmigran tidak perlu membangun rumah dulu, karena rumah sudah disipkan oleh Depnakertranskop. Begitu berhasilnya pola ini, Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi, Prof. Soebroto bermaksud memperluas pola ini ke-14 provinsi lainnya di Indonesia. Akan tetapi, ternyata untuk menerapkan pola ini ke provinsi lain kendalanya cukup banyak, antara lain kesiapan lokasi transmigrasi, dan koordinasi yang kurang berjalan dengan baik.

⁴⁹ Kantor Transmigrasi Sumatera Barat “ Laporan Pelaksanaan Transmigrasi di Sumatera Barat” Padang : Depnakerternas, 2010

⁵⁰ Kantor Transmigrasi Sumatera Barat “Mengenal dan Memahami Pelaksanaan Transmigrasi“ diambil dari <http://deptrans.blogspot.com/> pada tanggal 30 Juni 2011

2. Tujuan Kedatangan

Kepindahan masyarakat Jawa ke Sitiung lebih banyak disebabkan oleh program transmigrasi. Arti dan rumusan transmigrasi telah diatur dalam Panca Matra Transmigrasi Terpadu, yaitu “Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain dalam rangka pembentukan masyarakat baru untuk membantu pembangunan daerah, baik daerah yang ditinggalkan, maupun daerah yang didatangi dalam rangka pembangunan Nasional”.⁵¹ Dari rumusan tersebut dapat dijabarkan bahwa Transmigrasi adalah pemindahan penduduk dalam rangka pembentukan masyarakat baru untuk mempercepat pembangunan nasional serta bermanfaat bagi daerah asal dan daerah baru transmigran.

Program transmigran harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena Indonesia adalah negara yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah, namun ironisnya sampai sekarang Negara Indonesia dapat dikategorikan negara yang kurang maju atau dapat dikatakan terbelakang. Salah satu sebab utama adalah karena kurang seimbang persebaran penduduk. Untuk mengatasi persoalan tersebut pemerintah melalui instansi terkait berupaya untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah Transmigrasi yang merupakan upaya untuk mencapai keseimbangan penyebaran penduduk. Sehingga dengan beban tugas tersebut transmigrasi akan mampu memberikan dukungan kepada sektor-sektor demi pembangunan Indonesia dan menciptakan perluasan kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan. Pengaturan mengenai daerah asal dapat kita temukan pada pasal 10 Undang-undang nomor 3 tahun 1972, dimana disebutkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosial, ekonomi dan pertahanan-keamanan serta atas usul Menteri, daerah yang dipandang perlu dipindahkan penduduknya, dapat ditetapkan sebagai daerah asal dengan keputusan Presiden.⁵²

Pertimbangan-pertimbangan sosial, ekonomi dan pertahanan keamanan transmigrasi adalah sebagai berikut, Kepadatan penduduk dan lapangan kerja yang sangat sempit, Luas areal tanah pertanian yang sangat terbatas. Jenis kesuburan tanah yang tidak menguntungkan dan adanya bencana alam dan gangguan keamanan. Keputusan Presiden

⁵¹ Martono 1979 “Panca Matra Transmigrasi” Jakarta : Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hlm 8

⁵² Undang-undang no 3 tahun 1972 “tentang ketentuan-ketentuan pokok transmigrasi” diambil dari http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_3_1972.htm pada tanggal 23 Juli 2011

Nomor 1 Tahun 1973 menetapkan pulau-pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok sebagai Daerah Asal Transmigrasi.⁵³

Pemerintah juga mengeluarkan buku petunjuk yang menjelaskan 4 (empat) macam ukuran untuk menentukan prioritas pemindahan penduduk dari Pulau Jawa, Lombok, Bali ke daerah penempatan yaitu daerah tersebut terkena bencana alam, daerah tersebut termasuk daerah kritis karena tanah gundul, daerah aliran sungai dan sebagainya. Keriteria lainnya adalah daerah yang penduduknya terlalu padat dan daerah yang terkena pembangunan.⁵⁴ Masyarakat Jawa yang pindah ke Sitiung merupakan kelompok masyarakat yang harus pindah karena pembangunan Waduk Gajah Mungkur.

Perkembangan selanjutnya memperlihatkan bahwa masyarakat Jawa yang mendiami kawasan Sitiung ternyata ada juga orang yang pindah bukan karena kawasan mereka terkena dampak pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Seperti yang dialami oleh Pak Syaban yang menyatakan, pada awalnya adalah transmigrasi yang ditempatkan di kawasan Taratak Hitam saat ini masuk dalam Kabupaten Indragiri Ilir Propinsi Riau. Beliau pindah dari Semarang ke Teratak Hitam pada tahun 1970, ketika sampai di Taratak Hitam, kawasan yang dijanjikan oleh pemerintah ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Kondisi ini menyebabkan usaha pertanian yang dilakukan selalu gagal, setelah jatah hidup (Jadup) habis. Ia pindah ke desa Dusun Tinggi, sebuah kawasan transmigrasi pada masa orde lama. Dari Dusun Tinggi lah beliau pindah ke Sitiung.⁵⁵

Kondisi berbeda dialami oleh Pak Saimin, beliau merupakan transmigrasi yang ditempatkan oleh pemerintah ke Aceh. Kawasan Transmigrasi yang didiami selalu mendapat gangguan keamanan dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kondisi tersebut mendorong mereka untuk pindah ke kawasan lain. Sitiung dijadikan lokasi pindah karena ada temannya pindah ke Sitiung.⁵⁶ Di samping itu ada juga orang Jawa yang pindah ke Sitiung akibat melihat kesuksesan yang telah diraih oleh kaum kerabatnya di Sitiung. Ketika pemerintah memindahkan

⁵³ Departemen Tenaga Kerja, Koperasi dan Transmigrasi “ Transmigrasi dan Koperasi” Laporan Penelitian diambil dari www.bappenas.go.id hlm 604

⁵⁴ Kemeterian Transmigrasi “Keputusan Menteri transmigrasi republik Indonesia Nomor : kep. 124/men/1990 Tentang Pola permukiman dan pengembangan usaha transmigrasi” Jakarta : Menteri transmigrasi republik indonesia, 1990

⁵⁵ Wawancara dengan Syaban di Jorong Padang Sidondang Nagari Sitiung pada tanggal 28 April 2011

⁵⁶ Wawancara dengan Saimin di Jorong Piruko Selatan Nagari Sitiung Pada tanggal 28 April 2011

masyarakat dari Wonogiri ke Sitiung, ada sebagian masyarakat yang tidak mau pindah. Ketika melihat kerabatnya telah sukses atau jauh lebih baik dibandingkan mereka, maka berangkatlah rombongan ini ke Sitiung.⁵⁷

Cerita diatas menjelaskan secara garis besar tujuan dari orang Jawa pindah ke Sitiung dapat di bagi atas 4 (empat) kelompok. Kelompok pertama adalah orang yang pindah karena daerah mereka terkena dampak pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Kelompok kedua pindah karena daerah penempatan mereka tidak sesuai dengan janji yang disampaikan oleh pemerintah, kelompok ketiga adalah orang yang pindah karena kawasan penempatan mereka tidak aman, selalu mendapatkan gangguan dari pihak lain. Sedangkan kelompok keempat adalah orang yang tertarik pindah karena melihat kesuksesan yang diraih oleh kaum keluarga mereka yang telah dahulu ikut transmigrasi ke Sitiung.

Kepindahan masyarakat Jawa ke Sitiung juga di pengaruhi oleh faktor pendorong dan penarik mereka untuk pindah ke Sitiung. Umumnya masyarakat Jawa yang mendiami Sitiung berasal dari Wonogiri. Maka faktor pendorong masyarakat Jawa yang pindah ke Sitiung juga berkaiatan dengan kondisi yang terdapat di Wonogiri. Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Wonogiri terkenal dengan sebutan Kota Gapek.

Pembentukan Wonogiri menjadi sebuah kabupaten ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Wonogiri kaya akan wisata ritual, karena menurut sejarahnya wonogiri didirikan oleh RM. Said (Pangeran Sambernyowo/MangkunegoroI) Salah satu lokasi RM.Said adalah Momumen Watu Gilang di Nglaroh Selogiri. Kabupaten Wonogiri, dengan luas wilayah 182.236,02 Ha secara geografis terletak pada garis lintang 7 0 32' sampai 8 0 15' dan garis bujur 110 0 41' sampai 111 0 18' Secara umum daerah ini beriklim tropis, mempunyai 2 musim yaitu penghujan dan kemarau dengan temperatur rata-rata 24 0 C hingga 32 0 C. dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur); Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar; Sebelah Selatan : berbatas dengan Kabupaten Pacitan (Jawa Timir) dan Samudra

⁵⁷ Wawancara dengan Suratno di Jorong Piruko Selatan Nagari Sitiung Pada tanggal 28 April 2011

Indonesia; dan Sebelah Barat berbatas dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Klaten.

Topografi daerah Wonogiri tidak rata dan perbedaan antara satu kawasan dengan kawasan lain membuat kondisi sumber daya alam juga saling berbeda. Di Wonogiri hampir sebagian besar tanahnya tidak terlalu subur untuk pertanian, berbatuan dan kering membuat penduduknya lebih banyak merantau(boro). Kabupaten Wonogiri mempunyai Waduk buatan yaitu Gajah Mungkur yang selain menjadi sumber mata pencaharian petani atau nelayan dan sumber irigasi persawahan juga merupakan aset wisata yang telah banyak dikunjungi oleh para wisatawan domestik. Disamping itu Kabupaten Wonogiri juga mempunyai 2 (dua) pantai yaitu Pantai Sembukan dan Pantai Nampu yang mempunyai pasir putih yang sangat tebal dan cocok untuk berwisata.⁵⁸

Penduduk Wonogiri yang tertarik mengikuti program transmigrasi dari Jawa ke Sitiung, dilatarbelakangi karena setelah adanya surat perintah yang menyatakan bahwa : Ketika Begawan Solo banjir banding pada tahun 1972, banyak daerah yang kena genangan air. Kondisi ini menyebabkan pemerintah mengeluarkan keputusan setiap daerah di Wonogiri yang digenang air akan ditenggelamkan. Kondisi ini menyebabkan 12.252 ribu kk warga Wonogiri yang harus dipindahkan dan ikut transmigrasi.⁵⁹ Sebanyak 12.252 KK tersebut ternyata ada beberapa sebab mereka setuju pindah ke wilayah baru seperti dorongan kemiskinan, keinginan merantau untuk mengetahui daerah baru dan sebagainya. Sebab kondisi alam dan kehidupan sulit menyebabkan mereka setuju untuk pindah. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan para transmigran.

... di Jawa kehidupan kami sangat susah. kami tidak memiliki tanah pekarangan untuk diolah, hidup kami mengandalkan mencari kayu bakar dari hutan, kemudian kami jual ke penduduk. Uang yang pas-pasan tersebut kami gunakan untuk keperluan membeli beras ...⁶⁰

... di kampung dulu, saya numpang di rumah mertua saya. Saya bekerja serabutan untuk menghidupi istri saya. Waktu itu ada saya dengar ada program transmigrasi ke Sumatera. Karena ingin merantau, ingin hidup mandiri

⁵⁸ Pemerintah Kabupaten Wonogiri “ Geografi dan Topografi Kabupaten Wonogiri” diambil dari www.wonogiri.go.id pada tanggal 28 juni 2011

⁵⁹ Mas Tris 2009 “ Waduk Gajah Mungkur Wonogiri” Wonogiri: Humus Pemkab Kabupaten Wonogiri,

⁶⁰ Wawancara dengan Saimin di Jorong Piruko Utara Nagari Sitiung pada tanggal 28 April 2011

memiliki tanah dan tinggal dirumah sendiri, saya mencoba mendaftarkan diri beserta keluarga saya ...⁶¹

... di kampung kami telah hidup dalam kondisi yang cukup makmur, namun ketika seluruh rumah, perkarangan dan kebun kami harus ditenggelamkan, tidak ada pilihan lain bagi kami selain untuk ikut transmigrasi dan mencoba hidup baru di kawasan Sitiung.⁶²

..... program transmigrasi penduduk Wonogiri ke Sitiung merupakan program pemerintah, kondisi ini menyebabkan bupati Wonogiri mengeluarkan kebijakan bahwa daerah yang terkena dampak transmigrasi maka kepala desa atau sekretaris desa harus ikut transmigrasi. Kondisi ini yang mendorong saya ikut transmigrasi .⁶³

Faktor inilah yang menyebabkan mereka berani meninggalkan kampung halamannya dan menjalani kehidupan di daerah yang baru yang belum pernah mereka datangi. Di samping itu faktor penarik yang menyebabkan orang Jawa dari Wonogiri mau berangkat transmigrasi ke Sitiung adalah adanya faktor penarik yang terdapat di Sitiung itu sendiri seperti informasi tentang transmigrasi dan sosialisasi tentang manfaat transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Informasi Tentang Transmigrasi tertuang dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 1973 Tentang Penyelenggaraan transmigrasi yang menyebutkan bahwa untuk menjadi transmigran wajib memenuhi beberapa syarat-syarat: warga negara Republik Indonesia, berkelakuan baik, berbadan sehat, sukarela, mempunyai kemampuan dan keterampilan kerja, tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan tentang penyelenggaraan transmigrasi.⁶⁴

Pemerintah membuat strategi penerangan yaitu memberikan pengertian umum kepada masyarakat akan arti pentingnya transmigrasi dalam pembangunan bangsa, sehingga dengan demikian diharapkan masyarakat dapat menyakini bahwa transmigrasi merupakan salah satu alternatif Jawaban memerangi kesulitan hidup terutama di daerah yang terkena / terancam bencana alam, daerah kritis dan tandus, daerah yang padat penduduknya serta di daerah yang terkena pembangunan proyek-proyek

Kegiatan penerangan transmigrasi ini memerlukan kerjasama antara pihak transmigrasi dengan instansi-instansi lainnya, misalnya

⁶¹ Wawancara dengan Syaban di Jorong Padang Sidondang Nagari Sitiung pada Tanggal 28 April 2011

⁶² Wawancara dengan Selamat Riyadi tokoh masyarakat Jorong Piruko Utara Nagari Sitiung Pada Tanggal 29 April 2011

⁶³ Wawancara dengan Patmo Kepala Desa Piruko Nagari Sitiung, sebelumnya carik desa di Pokoh Kidul Wonogiri, wawancara dilakukan pada Tanggal 29 April 2011

⁶⁴ *Op.cit* Mengenal dan Memahami Pelaksanaan Transmigrasi

Dinas Penerangan Daerah, para Pamong Desa maupun tokoh-tokoh masyarakat. Dengan demikian kebijaksanaan program transmigrasi lebih dikenal dalam masyarakat. Agar penerangan dapat menjangkau masyarakat luas maka penerangan transmigrasi dilaksanakan dengan sistem langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud secara langsung yaitu penerangan dilakukan oleh petugas-petugas penerangan transmigrasi dalam masyarakat. Misalnya melalui rapat-rapat desa, sarasehan dan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat.

Informasi tidak langsung yaitu penerangan yang dilaksanakan melalui saran media massa maupun tokoh-tokoh masyarakat. Misalnya melalui anjungsana tokoh-tokoh masyarakat, berita-berita pembangunan lewat Televisi Republik Indonesia (TVRI), surat kabar, pertunjukan rakyat, pameran pembangunan, dan sebagainya. Kondisi tersebut memberikan dampak kepada masyarakat bahwa dengan bertransmigrasi kehidupan mereka jauh lebih baik dari pada bertahan di Wonogiri.

Di samping itu pemerintah juga melakukan sosialisasi tentang bagaimana kehidupan yang akan dijalani oleh para transmigrasi dan bagaimana kondisi alam daeran baru. Menurut informasi dari transmigran mereka dikumpulkan di balai desa bahwa di Sitiung akan mendiami sebuah baru yang subur dan bagus, penduduknya diberi makan dan kebutuhan hidup selama 1 tahun ditanggung oleh pemerintah, daerah tersebut ditanami berbagai macam jenis tanaman, tanahnya luas, dan bila kita tetap bertahan didaerah tersebut maka kehidupan kita akan berubah menjadi baik. Sehingga apa yang dikhawatirkan dari informasi yang simpang siur yaitu bahwa ketika transmigran tinggal disana nantinya akan dimakan oleh harimau, buaya dan binatang hutan, daerahnya sepi dan akan hidup susah dan sengsara ternyata tidak seperti itu.

Untuk lebih memberikan keyakinan kepada masyarakat Wonogiri, Bupati Sawahlunto Sijunjung sempat beberapa kali datang ke Wonogiri untuk memberikan informasi kepada calon transmigran tentang keadaan daerah Sitiung dan meyakinkan penduduk Wonogiri bahwa daerah baru yang akan didiami adalah daerah subur yang mendatangkan kebahagiaan bagi mereka.⁶⁵

3. Proses Kedatangan

Sungai Bengawan Solo kembali mengalami banjir banding pada tahun 1972, kondisi ini menyebabkan banyak kawasan pemukiman penduduk terendam banjir dan kerugian harta benda yang tidak sedikit.

⁶⁵ Wawancara dengan Ngalimin di Jorong Piruko Utara Nagari Sitiung pada Tanggal 28 April 2011

Kondisi ini menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa setiap daerah yang terkena genangan air Begawan Solo harus pindah, sebab kawasan tersebut akan ditenggelamkan untuk dijadikan waduk. Keputusan pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Wonogiri pada tahun 1975 yang menyebutkan bahwa 12.252 KK warga Wonogiri di kecamatan Nguntoronadi, Kecamatan Worantoro, Kecamatan Eromoko, Kecamatan Baturetno dan Kecamatan Wonogiri harus pindah akibat pembangunan Waduk Gajah Mungkur.⁶⁶

Pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi (Depnakertranskop) langsung bergerak untuk menyiapkan lokasi penempatan bagi warga yang akan ditransmigrasikan tersebut. Berdasarkan jumlah penduduk yang harus dipindahkan, pemerintah menetapkan 3 (tiga) propinsi dijadikan lokasi penempatan bagi para transmigran Wonogiri yaitu Propinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Khusus untuk Sumatera Barat mereka ditempatkan di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.⁶⁷

Awalnya masyarakat dari Wonogiri tidak akan ditempatkan di Sumatera Barat, namun di Propinsi Jambi. Untuk itu pemerintah Propinsi Jambi telah menetapkan kawasan Rimbo Bujang Kabupaten Muaro Bungo sebagai kawasan lokasi penempatan para transmigran dari Wonogiri.⁶⁸ Pemerintah Kabupaten Muaro Bungo akan menyiapkan lahan dan perkarangan berada satu kompleks, sehingga masyarakat Wonogiri akan tersebar dan saling berjauhan. Namun konsep yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan ketersediaan lahan di Rimbo Bujang tidak sesuai. Bupati Wonogiri menginginkan masyarakatnya mendiami sebuah permukiman yang saling berdekatan layaknya di Wonogiri.

Persoalan ini coba diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dengan menyatakan kesediaan mereka untuk menerima para transmigran dari Wonogiri. Untuk menjawab persoalan ini pemerintah menetapkan kawasan bagian selatan dari Kabupaten Sawahlunto Sijunjung sebagai lokasi penempatan para transmigran. Pemilihan kawasan ini sebagai lokasi penempatan transmigrasi didukung oleh beberapa faktor yaitu jumlah penduduk yang sedikit, banyaknya lahan kosong.

⁶⁶ Tempo "Ada Sitiung" "Ada yang terkatung-katung" terbit 09 september 1978 diambil dari www.temponline.com pada tanggal 7 Juni 2011.

⁶⁷ Op.cit transmigrasi dalam angka

⁶⁸ Wawancara dengan Patmo Kepala Desa Piruko Nagari Sitiung, sebelumnya carik desa di Pokoh Kidul Wonogiri, wawancara dilakukan pada Tanggal 29 April 2011

Keputusan pemerintah menetapkan Kecamatan Pulau Punjung dan Koto Baru, sebagai lokasi penempatan transmigrasi didukung oleh jumlah penduduk yang masih sedikit, hal ini didukung oleh sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 1960, sebagaimana terungkap dalam table dibawah ini :

Tabel 3
Populasi Penduduk di Kecamatan Pulau Punjung dan Koto Baru Berdasarkan Nagari

No	Kecamatan	Nagari	Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pulau Punjung	Sungai Dareh	2.909	2806	5715
		Tebing Tinggi	978	1066	2044
		Siguntur	837	882	1719
		Sitiung	1098	1.101	2199
		Timpeh	199	206	405
		Lubuk Karak	971	1032	2003
		Silago	989	1034	2023
2	Koto Baru	Koto Salak	1897	1857	3754
		Sialang Gaung	1029	939	1968
		Kota Besar	1298	1231	2529
		Tiumang	676	696	1372
		Koto Baru	2137	2271	4408
		Sungai Liman	960	840	1800
Jumlah Total			16.787	18.192	35.979

Sumber : Sensus Penduduk Tahun 1960

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa penduduk yang mendiami nagari-nagari di di Kecamatan Pulau Punjung dan Koto Baru sangatlah sedikit dibandingkan dengan luas wilayah yang dimiliki. Untuk itulah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung berusaha untuk menyakinkan seluruh *ninik mamak* di Kecamatan Pulau Punjung dan Koto Baru untuk bersedia melepaskan tanah mereka untuk ditempati oleh para transmigrasi dari Jawa.

Upaya negosiasi dilakukan oleh pemerintah kepada *ninik mamak* di masing-masing nagari berjalan dengan cukup baik, hal itu dibuktikan dengan bisanya kawasan tersebut ditempati oleh transmigrasi dari Pulau Jawa. Namun untuk memperoleh izin dari *ninik mamak*, pemerintah telah membuat beberapa kesepakatan dengan *ninik mamak*, berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat di Nagari Sitiung diperoleh keterangan ada beberapa kesepakatan yang harus dipenuhi oleh pemerintah sehingga transmigrasi boleh mendiami kawasan

mereka, yaitu Penduduk yang datang harus beragama Islam; Penduduk yang datang harus ikut dengan adat istiadat setempat; dan sesuatu yang harus didapatkan oleh transmigrasi maka penduduk asli juga dapat mendapatkan hal yang sama.⁶⁹

Dalam kesepakatan tersebut jelas terlihat bahwa penduduk asli ingin orang yang datang harus beragama Islam, mau berbaur dengan penduduk asli dan pemerintah harus memberikan hal yang sama kepada setiap penduduk. Kesepakatan ini disetujui oleh pemerintah sehingga banyak orang Jawa yang pindah ke Sitiung harus memeluk agama Islam sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang eks Transmigrasi : “ Ketika dari Jawa saya ndak tahu apa agama yang dianut, namun ketika saya sampai di Sitiung, barulah kami disuruh ibuk dan bapak untuk belajar agama Islam seperti Sholat, membaca Al Qur’an dan puasa”⁷⁰

Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi (Depnakertranskop) berkerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung mulai membuka kawasan hutan dan semak belukar yang telah diserahkan oleh ninik mamak kepada pemerintah. Sesuai dengan kesepakatan luas lahan yang dibuka untuk areal persawahan untuk transmigrasi sama luasnya dengan lahan yang dibuka untuk penduduk asli. Kondisi ini menyebabkan proses perpindahan orang Jawa ke Sitiung mulai dilaksanakan.

Respon positif yang diberikan oleh masyarakat Sitiung, menyebabkan pemerintah memberikan nama program pemindahan orang Jawa ke Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dengan nama transmigrasi Sitiung. Padahal wilayah penempatan para transmigran tidak hanya di Nagari Sitiung, namun nagari lain di sekitar Sitiung nama program tetap Sitiung. Transmigran yang tidak lagi di kawasan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, nama program tetap transmigrasi ke Sitiung. Kondisi inilah yang menyebabkan nama Program transmigrasi ke Sitiung berkembang dari Sitiung satu sampai Sitiung lima.

Proses pemindahan masyarakat Wonogiri ke Sitiung diawali dengan keberangkatan rombongan dari Dusun Karang Lau, Desa Pokoh Kidul Kecamatan Wonogiri ke Sitiung. Keputusan Dusun Karang Lau dijadikan sebagai kawasan pertama yang harus berangkat lebih disebabkan karena dusun ini merupakan kawasan pertama yang

⁶⁹ Wawancara dengan Nurahim Dt Tan Majolelo ketua KAN Nagari Sitiung pada tanggal 28 April 2011

⁷⁰ Wawancara dengan Budianto Staf Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Dharmasraya di Nagari Sitiung pada tanggal 28 April 2011

dibebaskan oleh pemerintah.⁷¹ Sebagai wilayah pertama yang harus pindah ke Sitiung menyebabkan proses pemindahan penduduk Dusun Karang Lau mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan dinas terkait.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengundang Bupati Sawahlunto Sijunjung untuk datang ke Dusun Karang Lau untuk memberikan keyakinan kepada penduduk yang akan pindah bahwa di Sitiung telah dibangun sawah dan penduduk yang berada di Karang Lau tinggal menanam areal persawahan tersebut. Untuk lebih menyakinkan penduduk di Wonogiri didatangkan transmigrasi dari Dusun Tinggi yang menceritakan tentang indahnya hidup di Pulau Sumatera.⁷² Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri menyebabkan meningkatnya motivasi dari penduduk untuk mensukseskan program transmigrasi yang telah direncanakan.

Untuk menambah semangat dan motifasi masyarakat yang akan pindah pemerintah Wonogiri memberikan ganti rugi terhadap segala kerugian yang dialami oleh warganya. Setiap harta penduduk diberikan ganti rugi mulai dari rumah yang dibagi berdasarkan tipe rumah, kebun, sawah, tanaman dan hewan ternak yang dimiliki warga. Kondisi ini menyebabkan Masyarakat Wonogiri yang akan bertransmigrasi ke Sitiung memiliki sedikit uang yang bisa digunakan sebagai modal untuk menjalankan kehidupan baru. Di samping ganti rugi pemerintah juga memberikan izin kepada masyarakat untuk membawa peralatan rumah tangga dan hewan kesayangan untuk bertransmigrasi ke Sumatera Barat. Kondisi inilah yang menyebabkan konvoi bus dan truk yang memasuki kawasan Sitiung menjadi banyak, selain manusia bus dan truk juga membawa barang-barang dari Jawa.⁷³

Proses kepindahan dari Karang Lau hingga sampai ke Sitiung sebagai rombongan pertama mendapatkan penghargaan yang lebih mulai dari proses ke berangkat hingga sampai di Sitiung. Dalam perjalanan rombongan ini disambut hangat oleh seluruh penduduk dan pejabat terkait, bahkan segala aktifitas di shoting. Semua bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memberikan bukti kepada rombongan berikutnya bahwa perjalanan ke Sitiung aman dan membahagiakan.

⁷¹ Wawancara dengan Patmo Kepala Desa Pertama Piruko yang juga carik desa ketika di Pokoh Kidul di pada tanggal 29 April 2011

⁷² Wawancara dengan Selamat Riyadi Tokoh Masyarakat Jorong Piruko Utara Nagari Sitiung pada tanggal 29 April 2011

⁷³ Wawancara dengan Selamat Riyadi Tokoh Masyarakat Jorong Piruko Utara Nagari Sitiung pada tanggal 29 April 2011

Rombongan pertama berangkat dari berangkat dari Wonogiri dengan menaiki Kereta Api sedangkan barang-barang rumah tangga yang dimiliki oleh masing-masing transmigran di bawa lewat jalur darat. Waktu pemberangkatan dari kabupaten Wonogiri, ada isak tangis, bahkan ada yang pingsan waktu pelepasan warga yang ikut dalam program Transmigrasi tersebut. Setelah sampai di Jakarta, para transmigran di bawa ke Tanjung Periok lalu naik kapal Teluk Bayur, perjalanan ditempuh selama 2 hari dua malam.

Pada tanggal 4 November 1976, jam 3 sore rombongan pertama telah sampai di Teluk Bayur, namun tidak diperbolehkan turun, barulah keesokan harinya kami boleh turun dan disambut dengan penyambutan resmi di wisma Transito. Rombongan pertama istirahat selama 2 malam di wisma Transito. Selama istirahat di wisma tersebut, rombongan dihibur dengan Kuda Kepang dan Wayang. Pada hari rabu rombongan berangkat ke Sitiung. Perjalanan yang harus ditempuh selama 8 jam tersebut berakhir pada jam 5 sore rombongan sampai di Sitiung. Ketika memasuki daerah Sitiung, rombongan disambut dengan Kuda Kepang, yang ditampilkan oleh orang-orang Jawa yang terlebih dahulu mendiami Kabupaten Sawahlunto Sijunjung seperti di Dusun Tinggi dan Pulau Mainan.⁷⁴

Selama dalam perjalanan dari wisma transito sampai ke desa Sitiung, rombongan dimeriahkan oleh suara menderu-deru dari motor vorijders polisi dan jip dengan kap terbuka berisi para petugas LLAJR. Sirene pun meraung-raung. Dalam rombongan bus yang konvoi terdapat 100 KK atau 448 jiwa transmigran asal Wonogiri, Jawa Tengah, itu menuju Sitiung yang berjarak 200 Km dari Padang. Ketika itu rombongan pertama transmigran 'bedol desa' itu tiba di sana menjelang maghrib. Mereka mendapatkan sambutan lengkap dengan upacara adat dan sekapur sirih dari ketua adat Datuk Mendaro Kuning. Penyambutan itu merupakan bukti bahwa kepindahan masyarakat dari Wonogiri mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat Sitiung.

Keberhasilan memindahkan orang dari Dusun Karang Lau Desa Pokoh Kidul Kecamatan Wonogiri mempermudah proses pemindahan masyarakat Wonogiri lainnya ke Sitiung dan nagari-nagari sekitarnya. Rombongan transmigrasi dari Wonogiri ke Sitiung pada tahun awalnya berjumlah 2000 KK, program ini dikenal dengan wilayah transmigrasi

⁷⁴ Wawancara dengan Salamet Riyadi Tokoh Masyarakat Jorong Piruko Utara Nagari Sitiung pada tanggal 29 April 2011

Sitiung 1.⁷⁵ Proses pemindahan orang Jawa dari Wonogiri ke Sitiung terus berlanjut sampai 1000 KK, sedangkan 1000 KK lainnya di tempatkan di Nagari Koto Baru dan Sialanggaung.⁷⁶

Rombongan transmigrasi yang berangkat dari Wonogiri, ditempatkan di Sitiung. Rombongan pertama sampai rombongan ke tiga ditempatkan di Blok A. Kawasan ini kemudian lebih dikenal dengan nama Piruko. Sedangkan rombongan ke 4 ditempatkan di blok A+ kawasan ini dinamakan Desa Karyatama. Sedangkan rombongan ke-5 sampai ke-8 ditempatkan di Blok B, kawasan ini kemudian dikenal dengan nama Koto Agung.

Minggu-minggu berikutnya, disusul dengan kedatangan para transmigran berikutnya. Seminggu sekali datang 100 KK, sampai akhirnya mencapai jumlah 2.000 KK (66.000 jiwa). Mereka berasal dari 5 kecamatan (41 desa) di Jawa, dan ditempatkan di kabupaten Sawahlunto-Sijunjung. Rombongan yang datang belakangan biasanya tidak lupa peluk-memeluk dengan yang tiba duluan. Bersyukur tiba dengan selamat di 'tanah seberang'. Adapun tanah asal mereka di Wonogiri terkena proyek pembangunan waduk "Gajah Mungkur" yang kelak akan berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik, juga untuk mengairi sawah dan sekaligus menanggulangi banjir rutin Bengawan Solo.

Proses pemidahan masyarakat transmigrasi dari Wonogiri ke Sitiung dan sambutan yang luar biasa dari masyarakat Sitiung. Belum pernah sebelumnya di pelosok manapun di Indonesia, sambutan istimewa seperti itu terjadi. Transmigrasi "Pola Sitiung" memang agak lain. Pelaksanaannya tidak hanya ditangani oleh satu Departemen, melainkan bekerja sama dengan beberapa Departemen lain secara fungsional.⁷⁷

Sebanyak 41 desa dari 5 buah kecamatan yang terkena proyek waduk serba guna di Wonogiri sudah pindah ke Sitiung Sumatera Barat.

⁷⁵ Departemen Transmigarsi " Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi di Kabupaten Dharmasraya" Dharmasraya: Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

⁷⁶ Harian Suara Merdeka " Lupa Cangkul bisa "Mencicipi" Naik Pesawat : Kisah Sukses Transmigrasi di Sitiung I" terbit hari Selasa 24 Februari 2004

⁷⁷ Pola Sitiung adalah adanya koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait dalam pelaksanaannya. Misalnya pembabatan hutan, membangun prasarana jalan, jembatan, dan irigasi dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum, urusan pemerintahan desa oleh Departemen Dalam Negeri, pengkaplingan tanah hingga pembuatan sertifikat dilakukan oleh Jawatan Agraria, pendirian Puskesmas dan tenaganya oleh Departemen Kesehatan, sekolah dan gurunya oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tapi di bekas desa- desa masih ada kehidupan, Buktinya tanaman jagung dan Sayur-mayur masih tumbuh subur. Beberapa orang penduduk yang belum pindah telah menggunakan tanah di sana untuk melanjutkan kehidupan. Bahkan beberapa rumah baru telah berdiri di bekas-bekas desa itu. Mereka mengaku sudah menerima ganti rugi atas tanah, rumah, bangunan dan tanaman. Akan tetapi mereka tetap ingin bertahan. Uang ganti rugi yang semula dimaksudkan untuk mendirikan rumah baru, ternyata mereka pinjamkan kepada kenalan.

Di samping orang Jawa yang pindah karena Transmigrasi terdapat juga orang yang pindah karena dibawa oleh kondisi kehidupan seperti yang dialami oleh Syaban. Dia pindah ke Sitiung pada tahun 1971, ketika itu yang menjabat sebagai Walinagari Sitiung adalah Ibnu Abas. Kepindahannya ke kawasan Padang Sidondang, Sitiung lebih disebabkan ketidaksiapannya untuk hidup di kawasan transmigrasi Taratak Hitam. Pada bulan maret tahun 1970, Syaban muda berangkat dari Semarang untuk ditempatkan di kawasan Taratak Hitam.

Satu tahun beliau bertahan dikawasan ini dengan mengandalkan jatah hidup yang dijanjikan pemerintah untuk para transmigrasi. Setelah jatah hidup habis ia mulai berpikir untuk pindah dari kawasan Taratak Hitam ke Dusun Tinggi. Ia pindah dari dusun itu ke Padang Sidondang yang saat itu bernama Pisang Rebus, sebuah kawasan yang banyak dihuni oleh orang Jawa. Berkat kebaikan hati dan kemampuan untuk bersosialisasi, akhirnya Syaban mampu memiliki lahan di jorong Padang Sidondang, Nagari Sitiung.⁷⁸

Kondisi lebih pahit dialami oleh Tardimin, orang Jawa yang hidup di Padang Sidondang yang sampai saat ini masih bekerja pada orang lain sebagai buruh lepas. Walaupun telah berumur 70 Tahun, ia masih hidup dalam kesulitan. Pada awalnya ia ditempatkan oleh pemerintah sebagai transmigran di wilayah Lubuk Jambi. Namun karena kesulitan hidup di wilayah baru, ia meninggalkan lokasi penempatan dan pindah ke Sungai Tambang. Ia membuka sebidang lahan dan dijadikan persawahan dan perladangan di Sungai Tambang. Setelah mendiami kawasan tersebut dalam waktu yang cukup lama sawah dan ladangnya diambil oleh penduduk asli dan ia harus terusir dari Sungai Tambang. Perjalanan hidup membawanya untuk mengembara ke Sitiung dan bekerja sebagai buruh yang bertugas untuk merawat kebun karet dan sawit yang dimiliki oleh H. Syafriadi.⁷⁹

⁷⁸ Wawancara dengan Syaban di Jorong Padang Sidondang Nagari Sitiung pada tanggal 28 April 2011

⁷⁹ Wawancara dengan H. Syafriadi Ketua Bamus Nagari Sitiung pada tanggal 28 April 2011

Kelompok masyarakat Jawa lainnya yang mendiami kawasan Sitiung adalah orang Jawa yang pindah karena kawasan yang mereka diami ternyata tidak aman, seperti yang dialami oleh transmigrasi dari Aceh yang pindah ke Sitiung. Kepindahan kelompok ini ke Sitiung lebih disebabkan untuk menyusul saudara yang telah berdomisili di Sitiung.⁸⁰ Kelompok berikutnya adalah orang Jawa dari Wonogiri yang pada awalnya menolak untuk pindah, namun ketika kesulitan hidup semakin hebat di Wonogiri mereka berangkat menyusul sanak saudara yang telah terlebih dahulu berangkat ke Sitiung.⁸¹

Cerita di atas memperlihatkan bahwa proses kepindahan masyarakat melalui program transmigrasi langsung dikelola oleh pemerintah. Mereka langsung berangkat dari Wonogiri ke Sitiung. Umumnya orang ini berangkat secara rombongan “Bedhol Desa”. Penempatan mereka di lokasi baru mendapatkan fasilitas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan rombongan orang Jawa berikutnya yang memasuki kawasan Sitiung adalah orang yang berangkat bukan langsung dari daerah asal, namun terlebih dahulu singgah di kawasan baru bergerak ke Sitiung.

C. KEHIDUPAN MASYARAKAT JAWA DI SITIUNG

1. Masa Konsolidasi (1977 - 1985)

Sitiung sebagai Unit Penempatan Transmigrasi dari Wonogiri telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan, yang terdiri dari Jalan Penghubung, Jalan Poros, Jalan Desa dan Jembatan serta dilengkapi dengan fasilitas sosial, seperti Balai Pengobatan / Puskesmas Pembantu, Gedung Sekolah Dasar, Rumah Ibadah, Gudang, KUPT dan Rumah Petugas, Rumah Pos, Tanah Kas Desa, Tanah Kuburan, Lapangan Olahraga, Tanah Penggembalan dan Pasar, Bangunan Koperasi Unit Desa (KUD).⁸² Semua perlengkapan tersebut diciptakan untuk memberikan rasa aman dan mempermudah transmigran dalam melakukan aktifitas kehidupan.

⁸⁰ Wawancara dengan Saimin di Jorong Piruko Utara Nagari Sitiung pada tanggal 28 April 2011

⁸¹ Wawancara dengan Suratno di Jorong Piruko Utara Nagari Sitiung pada tanggal 28 April 2011

⁸² *Op.cit* transmigrasi di Indonesia



Gambar
Bangunan Pasar di Kompleks Transmigran 1976
Sumber : Dokumen

Di samping fasilitas sosial setiap transmigran telah disediakan sebuah rumah dan mendapatkan tanah yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dan pertanian. Setiap KK mendapatkan $\frac{1}{4}$ hektar rumah dan perkarangan, $\frac{3}{4}$ Hektar perkebunan dan 1 hektar persawahan.⁸³ Pola pemukiman yang ditempati oleh penduduk, sama dengan pola pemukiman di Wonogiri, yaitu masyarakat tinggal secara bersama dalam sebuah kompleks dan saling berdekatan.



Gambar 2
Rumah Transmigrasi pada Awal Kedatangan
Sumber : Dokumen Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumen

⁸³ *ibid*

Desa transmigrasi di Nagari Sitiung terletak di Jorong Piruko dan Jorong Koto Agung, sebagai sebuah kawasan yang dibuka oleh pemerintah untuk menjadi kawasan pemukiman transmigrasi telah memiliki aturan yang teratur letak susunannya. Tidak sukar, untuk mengetahui batas desa, letak dan luas perkampungan, lserta uas pekarangan. Keadaan jalan dibangun dengan jalur-jalur yang teratur. Di samping itu pemerintah telah mempersiapkan saluran atau rancangan saluran pengairan, letak tanah persawahan dan perladangan. Bahkan ada kawasan yang telah menyediakan tanah jabatan untuk pamong desa dan tanah-tanah desa lainnya seperti untuk bangunan keagamaan, pekarangan sekolah, tanah lapangan, pekuburan, pasar dan lain-lain. Keadaan seperti ini sangat menguntungkan bagi perkembangan daerah Sitiung pada masa depan.

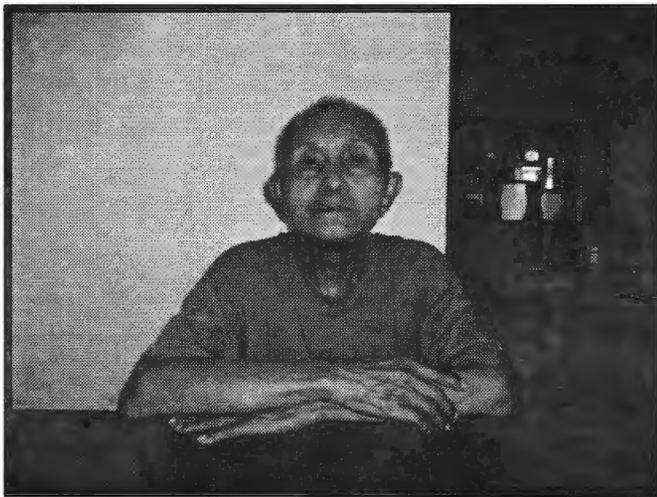
Rombongan pertama orang Jawa yang datang ke Nagari Sitiung melalui program transmigrasi berasal dari Dusun Karang Lau Desa Pokoh Kidul Kecamatan Wonogiri.⁸⁴ Sesampai di Sitiung rombongan ini langsung diantar ke kawasan pemukiman baru, setiap keluarga langsung diantar ke rumah masing-masing dengan ukuran satu unit rumah papan berukuran 5 X 7 meter yang terdiri dari satu ruang kamar tidur dilengkapi tempat tidur dari papan beralaskan tikar serta satu ruang digunakan untuk dapur, yang terletak diatas tanah pekarangan seluas 2.500 meter persegi (1/4 hektar) yaitu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam ketentuan tersebut bagi setiap keluarga diberikan surat keterangan mengenai penunjukan penggunaan atau pemilikan rumah dan lahan. Surat keterangan ini penting untuk menghindari terjadinya pengalihan atau penukaran pemilikan, namun dalam kenyataannya surat tersebut belum pasti bagi penduduk untuk menghindari upaya pengambilalihan lahan oleh masyarakat asli.

Di samping tanah untuk perumahan setiap keluarga transmigrasi mendapatkan tanah seluas 1 hektar yang direncanakan untuk menjadi kawasan persawahan atau dikenal dengan nama lahan 1 lahan inilah yang pertama dimanfaatkan oleh masyarakat transmigran. Masyarakat transmigran juga mendapatkan tanah seluas $\frac{3}{4}$ hektar yang direncanakan untuk areal perkebunan/palawija, dikenal dengan nama lahan 2. Sesuai dengan janji pemerintah, masing-masing keluarga dari penduduk asli mendapatkan tanah, terutama tanah yang akan dijadikan areal persawahan. Kondisi ini menyebabkan ketikan proses pembukaan

⁸⁴ Wawancara dengan Patmo Kepala Desa Piruko Nagari Sitiung, sebelumnya carik desa di Pokoh Kidul Wonogiri, wawancara dilakukan pada Tanggal 29 April 2011

lahan pemerintah harus mempersiapkan lahan untuk penduduk asli dan pendatang.

Bersamaan dengan itu diserahkan pula peralatan dan perlengkapan bagi masing-masing transmigran. Guna kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa maka setiap kawasan yang akan dihuni oleh para transmigran harus memiliki aparatur desa. Transmigrasi di Sitiung merupakan transmigrasi “Bedhol Desa” kondisi ini menyebabkan Bupati Wonogiri memerintahkan kepala desa atau sekretaris desa harus ikut pindah bersama warganya ke Sitiung. Kondisi ini menyebabkan sesampai di Sitiung, pemerintah desa langsung terbentuk.



Gambar 3
Pak Patmo Kades Pertama di Desa Piruko
1977 – 1998
Sumber : Dokumen

Terbentuknya pemerintah desa, pada satu sisi mempermudah masyarakat Jawa di Sitiung untuk melakukan kegiatan sebagaimana kebiasaan di Wonogiri. Untuk membantu masyarakat dalam mempertahankan hidup di kawasan baru pemerintah juga memberikan jaminan hidup (Jadup) yang diberikan selama satu tahun pertama. Setiap satu bulan sekali para keluarga transmigran mendapatkan jatah berdasarkan jumlah keluarga. Umumnya masing-masing keluarga mendapatkan beras 40 kg, ikan asin 4 kg, minyak goreng 3 kg, gula pasir 3 kg, minyak tanah 8 liter, garam 2 kg, serta sabun cuci batangan, beras, tepung terigu, minyak tanah, Ikan sarden dan susu bubuk selama 12 bulan, kelambu, serta peralatan dapur berupa satu buah wajan aluminium untuk penggorengan, satu buah periuk tempat masak nasi

maupun sayur, dan satu buah teko aluminium untuk merebus air dalam mempertahankan kehidupan baru semenjak menjalani.⁸⁵

Lahan yang disiapkan oleh pemerintah untuk lokasi transmigrasi, baik untuk perumahan, ladang dan persawahan adalah kawasan hutan dan semak bulukar. Dalam melakukan pembersihan lahan pemerintah mempergunakan bladoser, kebijakan ini ternyata berdampak terhadap kesuburan tanah. Kondisi ini menyebabkan kehidupan masyarakat Jawa di Nagari Sitiung pada lima tahun pertama penuh dengan kesulitan. Kondisi ini menyebabkan jaminan kehidupan pada tahap awal hanya untuk satu tahun akhirnya diperpanjang selama 4 tahun.⁸⁶

Proses transmigrasi orang Jawa melalui program Bedhol Desa di Nagari Sitiung berakhir pada pertengahan tahun 1977. Kondisi ini menyebabkan semenjak tahun 1977, masyarakat Jawa di Sitiung telah bertahan dihidup dengan memanfaatkan jatah hidup dan mencoba memanfaatkan areal perkarangan dan persawahan untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Sebagai kawasan yang baru dibuka, suasana yang ditemukan oleh transmigran adalah lahan perkarangan yang masih dipenuhi dengan kayu-kayu bekas pembukaan lahan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat secara bersama-sama, individu berusaha membersihkan lahan perkarangan mereka, untuk bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam.

Lahan persawahan yang dijanjikan oleh pemerintah siap tanam ternyata hanyalah tanah yang belum dicetak menjadi sawah. Kondisi tanah yang tidak subur akibat proses pembukaan lahan yang tidak tepat dan sawah yang belum dicetak menyebabkan masyarakat Jawa di Sitiung satu tahun pertama hanya berusaha untuk membersihkan lahan, menanam ubi, jagung dan padi ladang. Dalam satu tahun pertama, yang berhasil hanya ubi kayu. Kondisi ini menyebabkan pemerintah memberikan Jadup selama satu tahun lagi.

Pada tahun ke 3 (tiga) kehidupan masyarakat Jawa di Sitiung, belum mengalami perkembangan sebab kondisi tanah yang belum subur dan terbatasnya ketersediaan air menyebabkan areal persawahan belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan banyak kaum laki-laki Jawa yang berkerja sebagai buruh bagi masyarakat lokal

⁸⁵ Wawancara dengan Patmo Kepala Desa Piruko Nagari Sitiung, sebelumnya carik desa di Pokoh Kidul Wonogiri, wawancara dilakukan pada Tanggal 29 April 2011

⁸⁶ Wawancara dengan Salamet Riyadi Tokoh Masyarakat Piruko Utara Nagario Sitiung pada Tanggal 29 April 2011

atau bekerja sebagai buruh proyek yang saat itu telah banyak bermunculan di sekitar Nagari Sitiung.

Pemerintah melalui dinas terkait berusaha melakukan berbagai langkah agar kehidupan masyarakat transmigran bisa di tingkatkan. Untuk mengatasi keterbatasan debit air, semenjak tahun 1976 pemerintah melakukan proyek pompanisasi. Pompanisasi adalah upaya untuk menaikkan aliran sungai Batanghari dimanfaatkan untuk mengairi sawah penduduk.⁸⁷ Kebijakan ini belum berjalan optimal sehingga pemerintah terpaksa harus menambah Jadup para transmigran. Pada tahun ke tiga ini Jadup yang diberikan hanya beras sedangkan yang lainnya diberikan dalam bentuk program padat karya, setiap penduduk diharuskan bekerja dan digaji berdasarkan pekerjaan yang dilakukan. Kondisi ini berlanjut pada tahun ke 4 (empat) pemerintah tetap harus memberikan jadup dengan memperbanyak program pada karya di Nagari Sitiung dan sekitarnya.

Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah bekerjasama dengan PT. Incasi Raya membuka pabrik tepung topioka dengan tujuan untuk menampung produksi ubi kayu yang banyak dihasilkan oleh para transmigran. Keterbatasan tenaga yang dimiliki oleh transmigran banyak tanah mereka di kontrakan kepada PT Incasi, keputusan sama juga dilakukan oleh masyarakat asli. Kebijakan ini ternyata berdampak terhadap batas tanah, sebab dalam proses penanaman ubi kayu, pihak perusahaan membuka batas-batas tanah baik antara sesama transmigran maupun batas tanah dengan penduduk lokal.

Usaha penanaman Ubi kayu yang dilakukan oleh masyarakat Sitiung tidak bisa berlangsung lama, sebab harga ubi kayu yang ditetapkan oleh PT Incasi Raya sangat rendah.⁸⁸ Kondisi ini menyebabkan masyarakat Sitiung tidak menjadikan tanaman ubi kayu sebagai tanaman utama, akibatnya pabrik topioka yang didirikan di kawasan Jorong Koto Agung tidak bertahan, akibatnya tanah penduduk yang dikontrak harus dikembalikan. Persoalan baru muncul, ketika waktu peminjaman berakhir sulit bagi para transmigran menentukan luas tanah yang dimiliki. Sehingga banyak tanah mereka yang diambil oleh penduduk setempat.

Di samping itu, pemerintah melalui dana bantuan presiden dan Departemen Koperasi memberikan bantuan sapi untuk 100 KK diberikan 7 ekor induk sapi memberikan sapi kepada penduduk dengan

⁸⁷ Harian Rebulika "Presiden Resmikan Irigasi Batanghari Dharmasraya" terbit pada tanggal 13 Desember 2008

⁸⁸ Wawancara dengan Salamet Riyadi Tokoh Masyarakat Piruko Nagari Sitiung pada Tanggal 29 April 2011

menggunakan peraturan “ pada satu keluarga diberikan seekor sapi, setelah sapi melahirkan dua ekor anak, induk sapi menjadi hak keluarga tersebut sedangkan dua anaknya diberikan kepada tetangga”.⁸⁹ Kondisi ini menyebabkan hampir seluruh keluarga transmigran di nagari Sitiung mendapatkan sapi dan menjadikan usaha berternak sapi sebagai sebuah pekerjaan sampingan yang bernilai guna untuk kehidupan transmigran.

Areal persawahan yang dijanjikan oleh pemerintah untuk bertanam padi ternyata belum bisa dioptimalkan, jatah hidup yang terbatas memaksa sebagian besar masyarakat transmigran harus bekerja ke tempat lain. Sebagaimana diungkapkan oleh Suranto.

sebelum berangkat ke Sitiung, kami di Wonogiri telah diberikan pelatihan bercocok tanam, bertukang, pekerja perabot dan pelatihan keahlian lainnya. Keahlian inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat Wonogiri di Sitiung untuk bekerja ke tempat lain.

Kemunculan proyek-proyek besar di sekitar Nagari Sitiung, seperti pembangunan jalan, irigasi membuat perumahan untuk keluarga transmigran berikutnya memberikan peluang besar kepada masyarakat transmigran di Sitiung untuk bekerja pada proyek-proyek tersebut.

Proyek pompanisasi yang direncanakan oleh pemerintah semenjak tahun 1979, memberikan sedikit harapan kepada masyarakat bahwa lahan persawahan yang diberikan bisa dicetak menjadi sawah. Untuk itulah masyarakat secara bersama-sama berusaha membangun jaringan irigasi yang bisa langsung menuju sawah yang baru di cetak. Pada tahun 1982, proyek pompanisasi ini baru bisa dimanfaatkan oleh untuk mengairi sawah. Mulai saat itulah masyarakat di Nagari Sitiung mengubah pola tanaman dari ubi kayu, padi gogo ke padi sawah.

Kehidupan sulit juga dirasakan oleh masyarakat Jawa yang pindah bukan melalui program transmigrasi. Di antaranya dialami oleh Syaban. Kehidupan awalnya di Sitiung adalah membuka lahan sendiri, dengan terlebih dahulu meminta izin kepada walinagari dan ninik mamak di Padang Sindondang untuk mengolah tanah pertanian. Kedatangan Syaban, lebih awal dari pelaksanaan program transmigrasi, membuka kesempatan kepada dia untuk memanfaatkan lokasi yang telah ditetapkan menjadi lokasi transmigrasi. Sejak awal tinggal di Sitiung sampai saat ini ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk

⁸⁹ Wawancara dengan Salamet Riyadi Tokoh Masyarakat Piruko Nagari Sitiung pada Tanggal 29 April 2011

bekerja bersama orang lain, kondisi ini didukung dengan keahlian yang ia miliki sebagai tukang bangunan.⁹⁰

Kehidupan lebih sulit dialami oleh masyarakat Jawa yang pindah setelah kawasan Sitiung dihuni oleh masyarakat transmigran seperti yang dialami oleh Saimin dan Suranto. Kehidupan awal sangatlah sulit, sebab lahan yang akan digarap sangat terbatas, karena kebanyakan lahan telah dialokasikan kepada orang lain. Kondisi ini mengakibatkan kehidupan mereka tergantung dari sanak saudara mereka yang terlebih dahulu tinggal di Sitiung. Tanah yang mereka kuasai saat ini merupakan pemberian dari saudara. Kondisi ini mengakibatkan kehidupan mereka jauh dibawah masyarakat Jawa yang menjadi peserta transmigran.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa kehidupan masyarakat Jawa yang berasal dari program transmigrasi di Nagari Sitiung pada lima tahun pertama dipenuhi dengan kesulitan hidup. Kondisi ini disebabkan oleh lahan yang dijanjikan pemerintah ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Pembersihan lahan yang dilakukan dengan menggunakan alat berat, menyebabkan tanah menjadi tidak subur, akibatnya usaha pertanian yang dilakukan masyarakat menjadi gagal.

Saluran Irigasi merupakan persoalan dalam mengoptimalkan lahan persawahan di Nagari Sitiung. Penempatan transmigrasi di Sitiung ternyata tidak didukung dengan tersedianya saluran irigasi, baru pada tahun 1979, pemerintah memulai proyek pompanisasi. Pada tahun 1984 merupakan babak baru dalam kehidupan masyarakat Jawa di Nagari Sitiung, selesainya proyek pompanisasi memberikan kepastian kepada masyarakat Jawa di Sitiung untuk memanfaatkan lahan I untuk dijadikan sawah. Kondisi ini dengan sendirinya memberikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat Jawa di Nagari Sitiung.

Lima tahun pertama merupakan bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat Jawa di Nagari Sitiung masa tersebut dikelompokkan sebagai masa konsolidasi bagi masyarakat Jawa di Sitiung untuk mengoptimalkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan bertahan hidup di sebuah kawasan baru. Ketabahan mereka dalam menghadapi masa lima tahun pertama menjadi titik awal dari kesuksesan di masa depan.

2. Masa Pengembangan (1986 - 2000)

Masyarakat asli dan penduduk pendatang, sesuai janji pemerintah sama-sama dibukakan lahan yang belum di cetak menjadi

⁹⁰ Wawancara dengan Syaban di Jorong Padang Sidondang Nagari Sitiung pada Tanggal 28 April 2011

sawah. Orang Jawa telah menjadikan lahan mereka sebagai sawah dan dimanfaatkan untuk menanam padi sawah dan jagung. Pada tahun 1979 proyek pompanisasi dilakukan oleh pemerintah dengan memanfaatkan aliran sungai Batanghari.⁹¹ Kebijakan itu direspon oleh penduduk dengan mulai mencetak sawah, kegiatan mencetak sawah mulai dilakukan semenjak tahun 1981. Kebijakan ini awalnya tidak diikuti oleh masyarakat asli. Pada tahun 1982, sawah yang baru dicetak oleh masyarakat Jawa telah mulai ditanami. Pada awal penanaman padi, di sawah yang baru dicetak, belum memperlihatkan hasil, bahkan ada sawah yang gagal total. Namun kondisi ini tidak menjadi halangan bagi masyarakat Jawa untuk berusaha memanfaatkan areal 1 untuk dijadikan sawah.⁹²

Proyek pompanisasi yang dilaksanakan semenjak tahun 1979, dapat diselesaikan pada tahun 1984. Peresmian proyek ini merupakan babak baru dalam kehidupan masyarakat di Nagari Sitiung, air yang selama ini menjadi persoalan dalam pemanfaatan lahan untuk persawahan telah mulai berakhir. Mulai saat itulah, sebagian besar tanah yang selama ini tidak dimanfaatkan secara maksimal telah berubah fungsi menjadi sawah. Akibat bertambahnya jumlah transmigrasi yang menghuni kawasan Sitiung dan nagari sekitar, hal ini dibuktikan dengan dimulainya proyek transmigrasi Sitiung 2, hal ini tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas air yang dihasilkan oleh program pompanisasi.

Air merupakan komponen terpenting untuk mengoptimalkan areal persawahan yang telah dicetak oleh penduduk. Akibat terbatasnya debit air yang dihasilkan oleh irigasi dengan menggunakan tenaga pompanisasi mengakibatkan pemerintah mengeluarkan aturan dalam penanaman padi di sawah-sawah penduduk. Aturan yang dikeluarkan dengan membagi kawasan persawahan berdasarkan letak sawah dari aliran irigasi.

Setiap kawasan persawahan mendapatkan kesempatan untuk dua kali penanaman padi sawah, satu kali penanaman palawija. Pada awalnya aturan tersebut diterima penduduk, walaupun dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1986 penanaman padi yang dilaksanakan masyarakat Jawa belum menghasilkan sebagaimana yang diharapkan. Namun masyarakat masih tetap memanfaatkan sawah mereka. Berdasarkan kondisi ini pemerintah melalui Departemen Pertanian berusaha mengatasi masalah tersebut. Usaha tersebut memperlihatkan

⁹¹

⁹² Wawancara dengan Salamet Riyadi Tokoh Masyarakat Piruko Nagari Sitiung pada Tanggal 29 April 2011

hasil pada tahun 1987. Sawah yang dimiliki oleh penduduk telah memperlihatkan hasil sebagaimana mestinya. Dalam satu hektar sawah pada tahun 1987 bisa menghasilkan padi sampai dengan 3 Ton gabah kering.

Sistem bergilir yang ditetapkan oleh pemerintah dalam proses pemanfaatan lahan 1 (sawah) berdampak kepada usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat Jawa di Nagari Sitiung. Karena perubahan iklim yang tidak bisa ditebak, kadangkala menjadi biang dari gagalnya tanaman palawija (cabe, jagung, kacang tanah dll) yang sedang dikembangkan oleh penduduk yang mendapat jatah untuk menjadikan sawah mereka sebagai lokasi tanaman palawija. Kondisi ini mengakibatkan kehidupan masyarakat Jawa di Nagari Sitiung tidak mengalami perubahan yang berarti ketika masa bercocok tanam telah dilaksanakan oleh penduduk.

Persoalan baru mulai muncul ketika masyarakat transmigran mulai mengarahkan perhatian pada lahan 2 seluas $\frac{3}{4}$ hektar. Tanah yang diharapkan untuk areal tanaman palawija ternyata tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh penduduk transmigran, kondisi ini muncul karena tanah tersebut telah diambil alih oleh penduduk asli. Proses pengambilalihan lahan terjadi karena beberapa factor, berdasarkan diskusi dengan tokoh masyarakat Jawa di Sitiung secara garis besar pengambilalihan terjadi karena beberapa faktor:

1. Sosialisasi tentang kondisi lahan 1 yang siap tanam ternyata tidak terimplementasi dilapangan mengakibatkan masyarakat Jawa, belum memanfaatkan lahan 2. Ketika lahan 2 belum dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa lahan ini dibiarkan kosong dan terbengkalai, akibatnya lahan ini kembali dimanfaatkan oleh penduduk asli untuk perkebunan mereka.
2. Program penanaman ubi kayu yang diikuti dengan pendirian pabrik tepung topioka oleh PT Incasi Raya menyebabkan sebagian masyarakat Jawa mengkontrakan lahan 2 pada perusahaan PT. Incasi Raya. Dalam proses penanaman ubi kayu, PT Incasi Raya telah mencabut batas tanah antara masyarakat asli dan pendatang sehingga ketika masa kontrak berakhir sulit untuk membagi tanah tersebut.
3. Penduduk asli merasa pemerintah telah keluar dari kesepakatan yang telah dihasilkan. Dahulu pemerintah berjanji bahwa setiap penduduk asli akan mendapatkan areal persawahan, sampai saat ini janji tersebut belum dilaksanakan oleh pemerintah. Kondisi ini menyebabkan masyarakat asli merebut kembali tanah yang

telah diberikan, karena lahan 2 belum tergarap sehingga kebanyakan penduduk asli mengambil lahan 2.

4. Pemerintah ternyata tidak jujur dalam proses melakukan analisis terhadap luas lahan dengan jumlah keluarga. Lahan yang seharusnya untuk 7 orang oleh pemerintah diberikan sebanyak 10 s.d 15 orang kondisi ini menyebabkan lahan yang didapatkan penduduk tidak sesuai dengan janji yang telah diucapkan.⁹³

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa pengambilalihan lahan yang dilakukan penduduk asli terhadap masyarakat Jawa di Nagari Sitiung disebabkan karena faktor internal yang berasal dari masyarakat asli dan Jawa maupun faktor eksternal yang berasal dari pihak luar (pemerintah). Untuk mengatasi persoalan tersebut pemerintah berusaha melakukan mediasi dengan masyarakat asli, namun usaha tersebut gagal menyelesaikan persoalan tersebut.

Perebutan lahan antara penduduk asli dan masyarakat Jawa di Nagari Sitiung sempat berlangsung beberapa kali. Namun perebutan ini tidak berdampak luas, kondisi ini disebabkan karena masyarakat dikawasan tersebut masih mampu mengendalikan diri sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Selamat Riyadi “ ketika lahan 2 kami diambilalih oleh penduduk asli, sebagai masyarakat Jawa ingin merebutnya secara paksa. Namun keputusan ini tidak jadi dilaksanakan karena ada kelompok lain yang berpandangan bahwa hal tersebut tidak pas”⁹⁴

Pemerintah melalui dinas terkait, mengambil kebijakan dengan memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang lahan 2 diambil oleh masyarakat asli. Kesepakatan ini pada awalnya ditolak oleh masyarakat transmigran, sebab mereka ingin tanah tersebut tahun 2008 akhirnya Bentuk ganti rugi yang diberikan bukan saja dalam bentuk uang, namun ada sebagian masyarakat yang mendapatkan bantuan sapi.⁹⁵ Berdasarkan data yang terhimpun sebgaiian besar masyarakat Jawa di Nagari Sitiung menerima kebijakan pemerintah tersebut. Keputusan ini harus diambil masyarakat Jawa untuk menghindari konflik berkepanjangan dengan masyarakat asli.

⁹³ Wawancara dengan Selamat Riyadi Tokoh Masyarakat Piruko Nagari Sitiung pada Tanggal 29 April 2011

⁹⁴ Wawancara dengan Selamat Riyadi Tokoh Masyarakat Piruko Nagari Sitiung pada Tanggal 29 April 2011

⁹⁵ Wawancara dengan Selamat Riyadi Tokoh Masyarakat Piruko Nagari Sitiung pada Tanggal 29 April 2011

Kehidupan masyarakat Jawa di Sitiung umumnya lebih mengandalkan usaha persawahan, buruh, tukang dan berternak sebagai usaha utama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sawah dijadikan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan akan tersedianya pangan sedangkan pekerjaan buruh diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup harian. Usaha perternakan sapi dijadikan solusi untuk menghasilkan uang dalam jumlah banyak dalam waktu singkat.

Hal ini terlihat sampai saat ini, berternak sapi dijadikan pilihan karena usaha ini telah membantu masyarakat untuk membiaya kebutuhan hidup dalam jumlah besar seperti pesta perkawinan dan sekolah, sebagaimana diungkapkan oleh Ngalimin “ orang tua saya dalam membiayai pendidikan seluruh anak-anaknya sangat mengandalkan usaha berternak sapi sebagai unsur utama dalam pembiayaan anak-anaknya”⁹⁶

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa kehidupan masyarakat Jawa yang ada di Nagari Sitiung ketika memasuki tahun ke 6 (enam) memperlihatkan adanya peningkatan. Kondisi ini muncul karena lahan 1 telah bisa difungsikan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di Jawa. Kehilangan lahan 2, pada dasarnya memperlambat perubahan kehidupan masyarakat Jawa, Walaupun pemerintah berusaha untuk memberikan biaya ganti rugi dalam bentuk uang atau sapi, namun kondisi tersebut tidak bisa merubah kehidupan orang Jawa di Sitiung.

Disisi lain orang Jawa yang datang tidak melalui program transmigrasi, menghadapi dua kejadian yang saling berbeda. Orang Jawa yang datang sebelum transmigrasi hadir di Nagari Sitiung, saat ini mereka telah memiliki tanah karena ketika mereka hadir lahan yang bisa digarap masih luas. Keuletan mereka dalam berusaha dan ketersediaan lahan yang masih banyak memberikan kesempatan mereka untuk memperoleh lahan. Kondisi ini menyebabkan tingkat kehidupan jauh lebih baik dibandingkan kelompok yang datang setelah program transmigrasi. Sedangkan masyarakat yang datang setelah kawasan ini dihuni oleh transmigrasi kehidupan mereka cenderung tidak mengalami perubahan seperti yang dialami oleh Suranto “ sampai saat ini beliau masih hidup sebagai buruh harian dan tinggal di tanah garapan orang lain, kehidupan beliau masih mengandalkan kebaikan dari pemilik lahan.”⁹⁷

⁹⁶ Wawancara dengan Nagalimin Tokoh Masyarakat Piruko Nagari Sitiung pada Tanggal 29 April 2011

⁹⁷ Wawancara dengan Suranto Piruko Nagari Sitiung pada Tanggal 28 April 2011

3. Masa Hasil (2000 s.d 2009)

Kegagalan program pompanisasi dalam memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat Jawa di Sitiung dan nagari sekitarnya, mendorong pemerintah merencanakan pembangunan sebuah saluran irigasi. Pembangunan irigasi yang dinamakan Irigasi Batanghari telah direncanakan semenjak tahun 1992, namun pembangunan fisik baru mulai dilaksanakan pada tahun 1995. Pelaksanaan proyek mengakibatkan ada sebagian areal persawahan penduduk tidak dapat dialiri oleh air, akibat saluran irigasi pompanisasi harus dibuka, untuk pembangunan saluran irigasi Batanghari.

Penghentian pasokan air pada areal persawahan masyarakat Jawa di Sitiung memberi dampak kepada hasil yang dapat diperoleh dari pemanfaatan lahan 1. Kondisi tersebut tidak menghalangi masyarakat Jawa untuk tetap bertahan di Sitiung, pengalaman hidup selama ini memberi kekuatan kepada masyarakat Jawa untuk bertahan. Pada tahun 1997, masyarakat Sitiung mulai berpindah ke tanam karet dan sawit. Peralihan ini lebih disebabkan karena terhentinya pasokan air akibat pembangunan irigasi dan diperkenalkan tanaman karet dan sawit kepada masyarakat Jawa, seiring pelaksanaan program transmigrasi di Sitiung 2 s.d 5.

Keterbatasan lahan yang dimiliki oleh masyarakat Jawa di Sitiung menjadi faktor utama perkebunan karet dan sawit tidak begitu berkembang dalam kehidupan masyarakat Jawa di Sitiung. Di samping itu topografi wilayah antara Sitiung dan nagari sekitar menyebabkan perkebunan karet dan sawit tidak diminati secara berlebihan. Kehidupan masyarakat Jawa di Sitiung lebih mengandalkan usaha tani, buruh, tukang dan bertemak sebagai mata pencaharian. Kehidupan sulit dimasa lalu memberikan kekuatan kepada masyarakat Jawa di Sitiung untuk bertahan ketika kawasan mereka relative lambat belum berkembang dibandingkan dengan masyarakat Jawa di Nagari lain.

Penghentian pasokan air sempat dirasakan selama 3 tahun, pada tahun 2000 aliran air kembali lancar. Ketersedian air memberikan kesempatan kepada masyarakat Jawa di Sitiung untuk kembali mengoptimalkan sawah mereka sebagai matapencaharian utama. Pada tahun 2004, presiden republik Indonesia meresmikan pemakaian irigasi Batanghari secara resmi inilah babak baru kehidupan petani di Sitiung, sebab air tidak menjadi persoalan dalam mengoptimalkan lahan 1. Namun kondisi telah berubah, ketika air tidak lagi menjadi masalah dengan selesainya pembangunan saluran irigasi, sawah tidak menjadi primodana karena harga gabah dan biaya pengolahan sawah tidak sebanding.

Pasca reformasi, petani sawah bukanlah sebuah pekerjaan yang menjanjikan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia umumnya dan Sitiung khususnya. Hal ini dipicu oleh mahalnya biaya pengolahan sawah ditandai dengan naiknya biaya pupuk, obat-obatan. Hal tersebut tidak sebanding dengan harga jual gabah, disisi lain harga komoditi perkebunan seperti harga karet dan sawit mengalami peningkatan harga jual. Kondisi ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam mengoptimalkan lahan 1 menjadi tidak optimal, bahkan ada sebagian kecil masyarakat yang memanfaatkan lahan 1 untuk dijadikan perkebunan karet atau sawit.

Uniknya masyarakat Jawa di Sitiung tetap memperhatikan pendidikan anak, kondisi ini terlihat dari klasifikasi masyarakat Jawa yang mendiami Nagari Sitiung, umumnya telah menamatkan pendidikan sekolah tingkat atas, bahkan banyak yang menyelesaikan strata S1 dan D3. Keberhasilan masyarakat Jawa di Sitiung dalam menyekolahkan anak disebabkan strategi mereka untuk menjadikan usaha berternak sebagai sumber pembiayaan utama dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak. Keuletan dan kegigihan dalam menyekolahkan anak memberikan dampak yang luar biasa dalam perkembangan generasi ke dua (2) masyarakat Jawa di Sitiung. Pendidikan telah memberi kesempatan untuk merubah nasib dan status sosial masyarakat Jawa di Sitiung.

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan besar dalam struktur pemerintah, saat itu banyak terbentuknya kabupaten, kota dan propinsi baru, salah satunya adalah Kabupaten Dharmasraya, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Sitiung sebagai sebuah nagari dan Sitiung sebagai sebuah kecamatan merupakan wilayah yang tergabung dalam Kabupaten Dharmasraya, pasca keluarnya UU No 38 tahun 2003. Terbentuknya kabupaten baru pada dasarnya tidak membawa perubahan berarti dalam kehidupan masyarakat Jawa di Sitiung. Sebab Kabupaten Dharmasraya merupakan sebuah daerah yang mengandalkan sektor perkebunan sawit dan karet sebagai sumber ekonomi utama masyarakatnya. Padahal masyarakat Jawa di Sitiung adalah petani sawah, kondisi mengakibatkan taraf kehidupan masyarakat Jawa di Sitiung jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Jawa di nagari tetangga.

Perubahan mendasar yang dirasakan oleh masyarakat Jawa di Sitiung ketika mereka telah bergabung dalam Kabupaten Dharmasraya adalah kemudahan mereka untuk mengakses pusat pemerintahan dan kesehatan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ngalimin “dahulu ketika pusat kabupaten masih di Muaro Sijunjung, ketika kami harus mengurus keperluan surat menyurat dan pengobatan terasa sangat jauh serta butuh

dana besar. Hari ini semua terasa dekat dan telah banyaknya pusat-pusat kesehatan di masing-masing kecamatan.”

Manfaat utama yang dirasakan oleh masyarakat Jawa di Sitiung ketika mereka tergabung dalam kabupaten Dharmasraya adalah terbukanya kesempatan bagi masyarakat Jawa di Sitiung untuk bekerja sebagai PNS di lingkungan Pemda Dharmasraya. Ketekunan mereka dalam mendidik anak, membuka kesempatan bagi sebagian masyarakat Jawa di Sitiung untuk merubah nasib dan kehidupan. Berdasarkan cerita diatas terlihat bahwa kehidupan masyarakat Jawa di Sitiung pada tahun 2000 s.d 2009 tidak mengalami perubahan sebab secara ekonomi mereka tidak menikmati peningkatan harga karet dan sawit karena kawasan Sitiung merupakan areal persawahan.

Perubahan kehidupan baru dirasakan ketika Kabupaten Dharmasraya dengan terbukanya kesempatan bagi masyarakat Jawa untuk bekerja sebagai PNS. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan untuk merubah nasib dan status. Kondisi ini merupakan sebuah ironi sebab kawasan Sitiung merupakan lokasi pertama yang didiami oleh masyarakat Jawa ketika program transmigrasi Sitiung 1 mulai dilaksanakan. Kegagalan ini lebih disebabkan karena topografi wilayah penempatan masyarakat Jawa di Sitiung tidak cocok untuk perkebunan sawit dan karet. Padahal perkebunan karet dan sawit yang banyak dimiliki oleh Masyarakat Jawa di luar nagari Sitiung merupakan factor utama berubahnya taraf kehidupannya.

4. Interaksi Masyarakat di Sitiung

Kedatangan masyarakat Jawa di kawasan Sitiung menyebabkan terjadinya perubahan komposisi penduduk dari masyarakat homogen menjadi masyarakat heterogen. Kondisi tersebut dengan sendirinya berdampak terhadap perilaku masyarakat yang mendiami kawasan tersebut. Ada upaya saling mempengaruhi antara masyarakat Jawa dan penduduk asli sebagaimana diungkapkan oleh ketua Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Sitiung.

“kedatangan masyarakat Jawa ditelah memberikan contoh bagaimana rajin dan tekunnya mereka berusaha. Tidak ditemukan orang Jawa yang duduk di warung atau kedai, waktu mereka habis untuk bekerja inilah yang menyebabkan kehidupan mereka jauh lebih baik dari penduduk asli. Di sisi lain masyarakat asli lebih banyak menghabiskan waktu untuk duduk di kedai sehingga kehidupan mereka cenderung statis. Perkembangan selanjutnya kebiasaan masyarakat Jawa yang bekerja dengan tekun telah mulai diikuti oleh

sebagian masyarakat Asli terutama dikawasan yang dengan dengan masyarakat Jawa.

Cerita diatas menjelaskan bahwa kedatangan orang Jawa telah memberikan pengaruh terhadap pola perilaku masyarakat asli dalam bekerja. Di sisi lain masyarakat asli juga memberikan pengaruh terhadap perilaku kehidupan masyarakat Jawa terutama dalam bidang keagamaan sebagaimana diungkapkan oleh Budianto “ Dahulu di Jawa dia belum mengenal dengan jelas agama apa yang dianut oleh orang tua, setelah berada di Sitiung dia baru belajar baca Al Quran dan Sholat”. Kondisi ini muncul karena Islam merupakan agama yang dianut oleh seluruh masyarakat di Sitiung, hal itu menyebabkan tersedianya sarana yang membuka kesempatan masyarakat Jawa untuk mengenal Islam lebih jauh.

Kehadiran masyarakat Jawa telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Asli. Masyarakat Jawa yang terkenal sebagai orang agraris yang menjadikan sawah sebagai mata pencaharian utama, sebagai masyarakat agraris mereka telah mengenal dengan baik bagaimana cara bercocok tanam. Dulu sebelum masyarakat Jawa datang penduduk asli hanya mengarap sawah satu kali dalam satu tahun. Kedatangan orang Jawa yang mengarap sawah sepanjang tahun telah mempengaruhi masyarakat asli dalam mengarap sawah mereka.

Tradisi perkawinan yang berkembang di Sitiung saat ini merupakan sebuah bukti bahwa interaksi antara masyarakat asli dan pendatang telah terjalin dengan baik. Dalam setiap perkawinan yang dilaksanakan oleh orang Jawa, beberapa tradisi yang lazim dilakukan oleh penduduk asli juga dilakukan seperti ketika pesta perkawinan ada acara di “*arak bako*” umumnya tradisi ini dilakukan oleh orang Jawa yang telah bergabung dalam satu suku di Sitiung.

Bahasa juga memperlihatkan bahwa hubungan antara masyarakat berlangsung dengan baik. Saat ini bahasa yang berkembang adalah bahasa minang dengan dialek Jawa atau sebaliknya orang Sitiung yang telah berdialek Jawa. Kondisi ini muncul karena seringnya kontak secara verbal antara masyarakat Jawa dengan penduduk Asli, pasar merupakan sarana utama yang mempertemukan antara masyarakat Jawa dengan asli.

Cerita diatas menggambarkan bahwa interaksi masyarakat di Sitiung cukup berlangsung dengan baik. Perbedaan pendapat ketika terjadinya perebutan lahan tidak menimbulkan dampak dalam skala luas. Kemampuan kedua belah pihak untuk mengendalikan diri dan kerelaan mereka untuk saling menerima merupakan kunci dari terciptanya interaksi yang baik diantara masyarakat di Nagari Sitiung.

D. PENUTUP

1 Kesimpulan

Sebelum tahun 1977 Nagari sitiung merupakan sebuah nagari yang dihuni oleh masyarakat asli. luas lahan dan jumlah penduduk yang tidak sebanding menyebabkan banyaknya lahan yang belum tergarap. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung menjadikan daerah ini sebagai kawasan penempatan para transmigran. Di sisi lain pemerintah orde baru telah menetapkan program transmigrasi sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, Bali dan Lombok.

Kebijakan ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) kebijakan ini dilakukan untuk menyukseskan program swasembada beras pada Repelita ke 4. Untuk mensukseskan swasembada beras pemerintah berusaha untuk membuka areal-areal persawahan baru dan memperbanyak saluran irigasi untuk mendukung rencana tersebut. Pada saat bersama masyarakat di Wonogiri sering menderita akibat banjir banding, kondisi ini selalu dihadapi oleh masyarakat ketika air Sungai Begawan Solo meluap.

Pada tahun 1972, ketika Sungai Begawan Solo kembali meluap maka presiden memerintahkan bupati wonogiri untuk memindahkan seluruh penduduk yang kawasannya terendam air dan kawasan tersebut akan ditenggelamkan untuk dijadikan waduk. Inilah titik awal dari pindahnya orang Wonogiri ke Sitiung, apalagi yang akan ditenggelamkan banyak yang tidak subur, sehingga transmigrasi juga bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat.

Pemerintah melalui dinas terkait, mencari lokasi yang tepat untuk penempatan transmigrasi, pada awalnya lokasi yang dipilih adalah Rimbo Bujang Propinsi Jambi. Namun keputusan ini ditolak oleh Bupati Wonogiri sebab pembagian tanah dan pemukiman penduduk akan menyebabkan para transmigran terpisah-pisah. Untuk mengatasi persoalan ini Bupati Sawahlunto Sijunjung mengusulkan kawasan Nagari Sitiung untuk dijadikan lokasi penempatan transmigrasi. Pada tahun 1974, pemerintah kabupaten bekerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi (Depnakertranskop) berusaha bernegosiasi dengan ninik mamak Sitiung untuk bersedia melepaskan lahan mereka untuk dijadikan lokasi transmigrasi.

Negosiasi ini menghasilkan sebuah kesepakatan yang berbunyi bahwa seluruh orang yang datang harus beragama Islam, pada akhir harus mengikuti budaya Minang dan semua fasilitas yang didapat transmigran mereka juga mendapatkannya. Ini menjadi awal dari

permasalahan yang timbul di Sitiung di kemudian hari. Pada tahun 1977, mulai lah rombongan pertama masyarakat dari Wonogiri ke kawasan Sitiung, program pemindahan ini dinamakan Sitiung I.

Penduduk Dusun Karang Lau Desa Pokoh Kidul Kecamatan Wonogiri merupakan rombongan pertama yang datang dalam proyek Sitiung 1. Pemerintah menempatkan masyarakat transmigran di Piruko sebuah jorong yang tergabung dalam Nagari Sitiung sampai saat ini. Proses kepindahan rombongan ini mendapatkan fasilitas lebih dibandingkan rombongan berikutnya, sebab keberhasilan dalam proses pemindahan rombongan ini menjamin keberhasilan rombongan berikutnya.

Kehidupan awal yang dijalani oleh rombongan ini sangatlah sulit, hal tersebut dibuktikan dengan diperpanjangnya jatah jaminan hidup sampai empat (4) tahun. Janji Pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi (Depnakertranskop) yang mengatakan bahwa mereka akan dipindahkan pada areal persawahan yang siap tanah ternyata tidak terbukti. Bahkan pemerintah belum mencetak sawah dan menyediakan saluran irigasi, padahal air merupakan komponen utama bagi petani sawah. Baru tahu 1979 pemerintah melaksanakan proyek pompanisasi, kemudian ditingkat pada tahun 1992 setelah program pompanisasi gagal.

Pemerintah hanya memberikan lahan perkarangan seluas $\frac{1}{4}$ hektar, lahan sawah 1 hektar (Lahan 1) dan lahan kebun $\frac{3}{4}$ hektar (lahan 2), namun kondisi lahan belum siap pakai kecuali lahan perkarangan yang telah diisi dengan sebuah rumah. Proses pembukaan lahan yang menggunakan alat berat telah memperburuk kondisi tanah sehingga dalam 5 tahun pertama tanah tidak bisa dioptimalkan. Diawal kedatangan hanya lahan perkarangan dan lahan 1 yang baru digarap oleh para transmigran untuk ditanam berbagai tanam seperti jagung, padi gogo dan ubi kayu, yang tumbuh subur adalah ubi kayu.

Pada saat bersama PT. Incasi Raya membuka perusahaan tapioka untuk menampung produksi ubi kayu. Untuk mencukupi ketersediaan ubi kayu PT. Incasi Raya mengkontrak tanah penduduk untuk dijadikan lahan budidaya ubi kayu. Para transmigran juga mengkontrakan lahan 2 ke PT. Incasi Raya sebab selama ini lahan 2 belum bisa digarap. Ini merupakan penyebab terjadinya konflik perebutan lahan 2 oleh masyarakat asli karena Incasi Raya dalam menjadikan lahan 2 sebagai kebun ubi kayu telah mencabut batas tanah antar penduduk.

Kegagalan pemerintah dalam mengwujudkan janji pada ninik mamak dengan menyediakan lahan persawahan telah menyebabkan terjadinya pengambilalihan lahan 2 oleh masyarakat asli. Untuk

mengatasi persoalan tersebut pemerintah melakukan negosiasi agar tanah tersebut kembali diserahkan pada kaum transmigran, namun usaha tersebut gagal. Pemerintah akhirnya memberikan kompensasi sebagai pengganti lahan 2 dengan sapi atau uang. Sapi dijadikan alat tawar sebab selama ini masyarakat Sitiung telah menjadikan sektor peternakan sebagai usaha sampingan yang ditekuni hampir seluruh masyarakat Jawa di Sitiung.

Kehidupan masyarakat Jawa di Sitiung relatif kalah dibandingkan dengan masyarakat Jawa di nagari tetangga. Kondisi ini disebabkan karena masyarakat Jawa Sitiung masih bertahan sebagai petani sawah, padahal hasil sawah tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Sedangkan masyarakat Jawa di nagari sekitar jauh lebih maju karena mereka telah merubah diri dari petani sawah menjadi petani karet atau sawit. Bertahannya masyarakat Jawa di Sitiung untuk menjadi petani sawah disebabkan topografi wilayah dan hilangnya lahan 2 akibat direbut masyarakat asli.

Kehadiran masyarakat Jawa Sitiung sebagai rombongan pertama masyarakat transmigrasi Wonogiri dalam proyek Sitiung tidak mempengaruhi keberhasilan mereka di masa depan. Ketersediaan lahan merupakan kunci dari meningkatnya taraf hidup masyarakat Jawa di Sitiung. Ketika lahan terbatas dan kurangnya perhatian terhadap petani sawah menyebabkan kehidupan mereka tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Jawa yang datang kemudian.

2. Saran

Kehidupan masyarakat Jawa di Sitiung yang masih bertahan sebagai petani sawah seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Di tengah-tengah terbatasnya produksi beras dan kecenderungan petani sawah berpindah ke petani kebun akibat tidak sebandingnya harga jual gabah dan biaya produksi. Otonomi daerah menyebabkan munculnya semangat *kedaerahan* untuk itu pemerintah Pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait mesti melakukan berbagai upaya agar informasi tentang kepindahan masyarakat Jawa ke Sitiung, kehidupan masyarakat Jawa dan proses mendapatkan lahan harus disampaikan pada generasi muda untuk menghindari konflik di kemudian hari. Untuk itu diharapkan pemerintah harus melakukan berbagai langkah diantaranya :

1. Menerbitkan Buku yang mengungkapkan proses kedatangan, pemberian lahan dan kehidupan awal masyarakat Jawa di Sitiung atau Dharmasraya umumnya sebagai bahan bacaan untuk masyarakat asli terutama generasi muda untuk membangun kesadaran mereka tentang masyarakat Jawa.

2. Memberikan bantuan dan pelatihan kepada masyarakat Jawa dalam mengoptimalkan lahan 1 untuk menjamin ketersediaan pangan di Dharmasraya khususnya
3. Melengkapi infrastruktur penunjang untuk mengoptimalkan lahan 1 dalam meningkatkan kehidupan petani sawah di Sitiung.
4. memfasilitasi terciptanya event-event yang mendukung terciptanya interaksi antara masyarakat Jawa dan asli secara alami
5. Pemerintah Daerah perlu mengadakan festival-festival yang menampilkan budaya dan keunikan masing-masing etnis di Dharmasraya untuk mengungkapkan kekayaan budaya di Dharmasraya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, Dedi. "Transmigrasi : *Proses Interaksi Sosial di UPT Sitiung II 1979–1990*" Skripsi Padang : Fak Sastra Unand, 1995
- Amral, M. Sjamsu. *Dari Kolonialisasi ke transmigrasi* Djakarta : Jembatan tahun 1960
- "Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya. " *Kabupaten Dharmasraya dalam Angka tahun 2008*" Dharmasraya : BPS 2009
- Hariawan, Harry Saleh. *Transmigrasi : antara kebutuhan masyarakat dan kepentingan pemerintah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005
- Irnowati. "Sikap Penuturan Orang Jawa di Sitiung" Makalah Padang : Universitas Bung Hatta, 2007
- Kamus Bahasa Indonesia dari Yayasan Lembaga Sabda (YLSA) diambil dari www.kamus.sabda.org pada tanggal 8 Desember 2010
- Koentjaraningra. t " *Pengantar Antropologi* " Jakarta : Aksara Baru, 2006, Hlm 163
- Lembaran Berita Negara tentang Undang-undang No 38 Tahun 2003 diambil di www.depdagri.go.id tanggal 24 April 2007.
- May, Eny. "Transmigrasi dan Pengentasan Kemiskinan : Analisi Sejarah Program Transmigrasi di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat tahun 1941 – 1999", *Tesis* Padang : Pascasarjana Unand. Tahun 2000
- Mas Tris." Waduk Gajah Mungkur" diambil dari www.wonogiri.go.id pada tanggal 27 Januari 2011.
- Fatchurrahman, M., dkk. "Dari Gelandangan Menjadi Buruh Kebun, Studi Tentang Sosio Ekonomi Transmigran Asal Jakarta di Desa Kota Gadang Jaya Kinali Pasaman" *Laporan Penelitian* diambil dari Portal Penelitian Universitas Andalas <http://lp.unand.ac.id>, pada tanggal 16 Desember 2009
- Minyarso. "Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap partisipasi masyarakat dalam program Pengembangan Pembangunan Kecamatan Sitiung, Nagari Situng Kabupaten Dharmasraya" *Tesis* Padang : Pasca Sarjana Unand, Tahun 2008

- Notosusanto, Nugroho, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, (Jakarta: Inti Idayu Press.1984
- Swasono, Sri Edi. "Transmigrasi di Indonesia tahun 1905 – 1985" Jakarta : Universitas Indonesia, 1986
- Seno & Yondri. *Transmigrasi di Lunang Silaut* Padang : Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, tahun 2007
- Setyaningsih. "Dampak Perubahan Pola Pertanian terhadap kehidupan Masyarakat Desa Padang Bintungan Kecamatan Pulau Punjung" *Skripsi* Padang : Fak. Sastra Unand Tahun 2003
- Soekanto. S. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo 2002
- Wiratmi, Hesti. "Dinamika Kehidupan Sosial Ekonomi Transmigrasi Jorong SUNgai Atang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya 1977 – 2007", *Skripsi* : Padang : Fakultas Sastra, 2010
- Wahyu, MS. "*Perubahan sosial dan Pembangunan*", Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005, hlm 3 . pengertian yang sama juga ditemukan dalam tulisan Robert H. Louer *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, Jakarta Rineka Cipta 2003,
- Yuningsih , Lucia, Migrasi tahun 1870 – 1942 : Kajian Migrasi Wanita Pribumi antar Wilayah di Pulau Jawa, *Makalah* tahun 2008
- Yulfita, Rahardjo, *Dinamika Sosial Pemuda di Perkotaan* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996



BPSNT Padang Press
(Anggota IKAPI Sumbar)

Jl. Raya Belimbing No. 16 A Kuranji
Padang Sumatera Barat
Telp./faks. 0751-496151
www.bpsnt.padang.info

ISBN
978-602-8742-54-2